

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

##### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

###### 2.1.1.1 Kondisi Geografi

Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup Propinsi Djawa Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 983,9 Ha. secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan.

**Tabel 2. 1 Luas Wilayah Per Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Ha)
1	Adiwerna	21	27,0
2	Balapulang	20	86,2
3	Bojong	17	67,7
4	Bumijawa	18	109,2
5	Dukuhturi	18	17,1
6	Dukuhwaru	10	26,3
7	Jatinegara	17	109,5
8	Kedungbanteng	10	82,7
9	Kramat	20	43,9
10	Lebaksiu	15	47,0
11	Margasari	13	100,8
12	Pagerbarang	13	45,8
13	Pangkajene	23	37,6
14	Slawi	10	13,8
15	Suradadi	11	58,8
16	Talang	19	18,9
17	Tarub	20	28,0
18	Warureja	12	63,6
<b>Jumlah</b>		<b>287</b>	<b>983,9</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

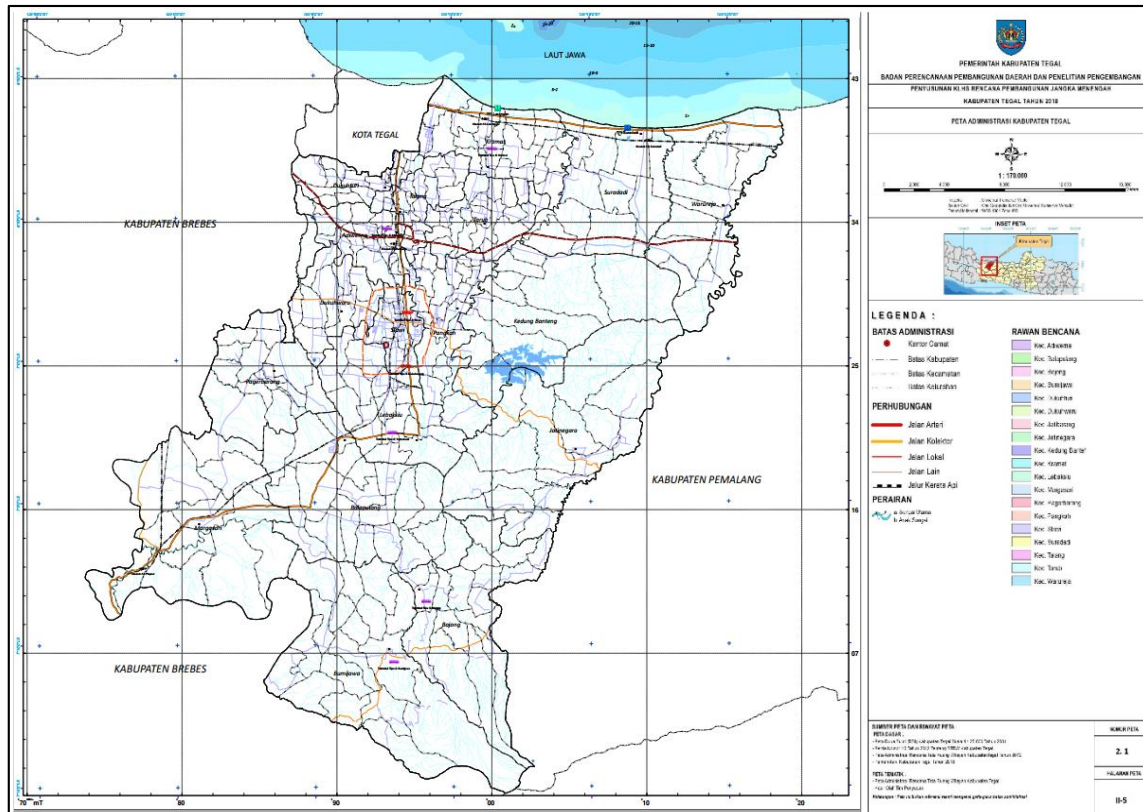
Kecamatan yang mempunyai wilayah yang terluas adalah Kecamatan Bumijawa (109,2 Ha), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Slawi (13,8 Ha). Kabupaten Tegal berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah selatan : Kabupaten Brebes dan Kab. Banyumas
- Sebelah barat : Kabupaten Brebes

## A. Letak dan Lokasi Geografis

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan ibukota Slawi dan terletak di : 108° 57'6" s/d 109° 21'30" BT dan antara 6° 50'41" s/d 7° 15'30" LS.

**Gambar 2. 1. Peta Konstelasi Kabupaten Tegal dengan Wilayah Sekitarnya**



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di Kota Slawi, lokasi strategis pengembangan pembangunan poros Jakarta – Semarang dan poros ke selatan Purwokerto / Cilacap. Wilayah Kabupaten Tegal meliputi pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayah berbatasan dengan laut jawa (pantura). Kabupaten Tegal mempunyai letak yang sangat strategis dimana dilintasi oleh beberapa Jalur utama, sebagai berikut :

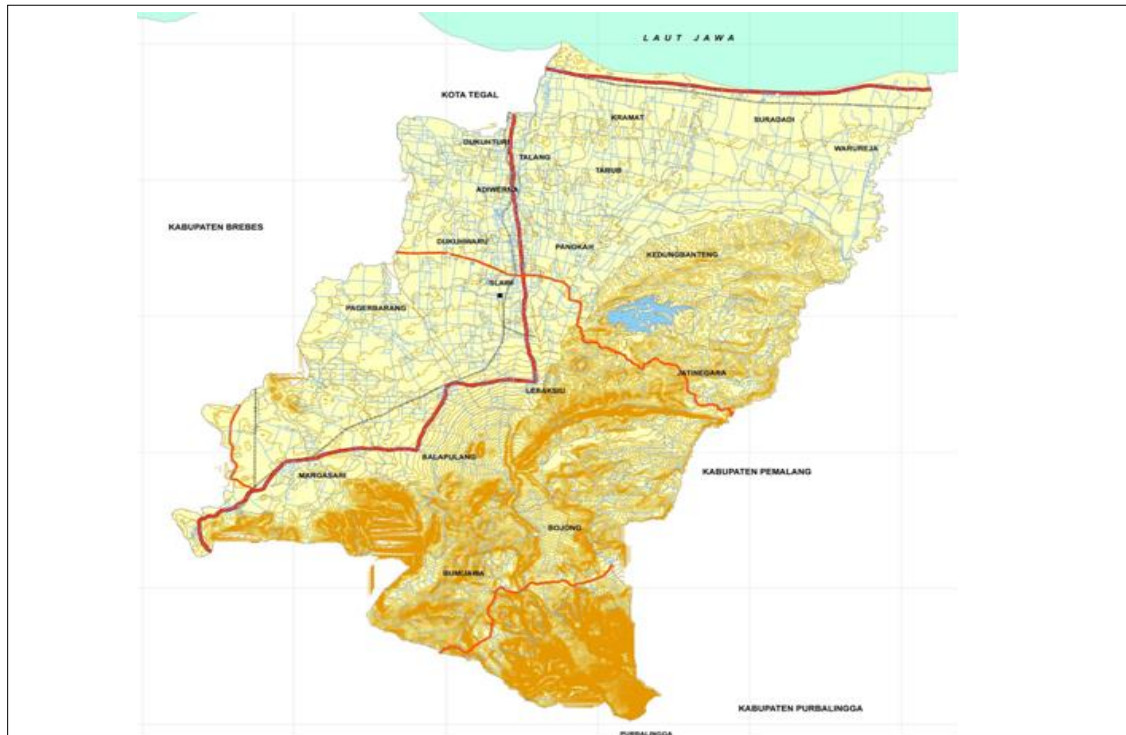
- Jalan Tol Pejagan – Pemalang
- Jalan Arteri Pantura Semarang – Tegal – Cirebon di sebelah utara
- Jalan Arteri Primer Tegal – Cilacap
- Jalan Arteri Sekunder Ketanggungan – Prupuk
- Jalur Kereta Api Jakarta – Semarang – Surabaya
- Jalur Kereta Api Jakarta–Cirebon – Yogyakarta
- Jalur Kereta Api Tegal – Slawi – Purwokerto– Yogyakarta – Solo

## B. Topografi

Kabupaten Tegal secara Topografis terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu:

- Daerah Pantai : Meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja.
- Daerah Dataran Rendah : Meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.
- Daerah Dataran Tinggi : Meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong dan sebagian Pangkah, Kedungbanteng.

**Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Tegal**



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan air laut, Kabupaten Tegal untuk ketinggian permukaan laut di bagi menjadi 4 (empat ) yaitu :

- Wilayah Kramat sekitarnya : 11Meter
- Wilayah Slawi sekitarnya : 42Meter
- Wilayah Lebaksiu sekitarnya : 135Meter
- Wilayah Bumijawa sekitarnya : 949Meter

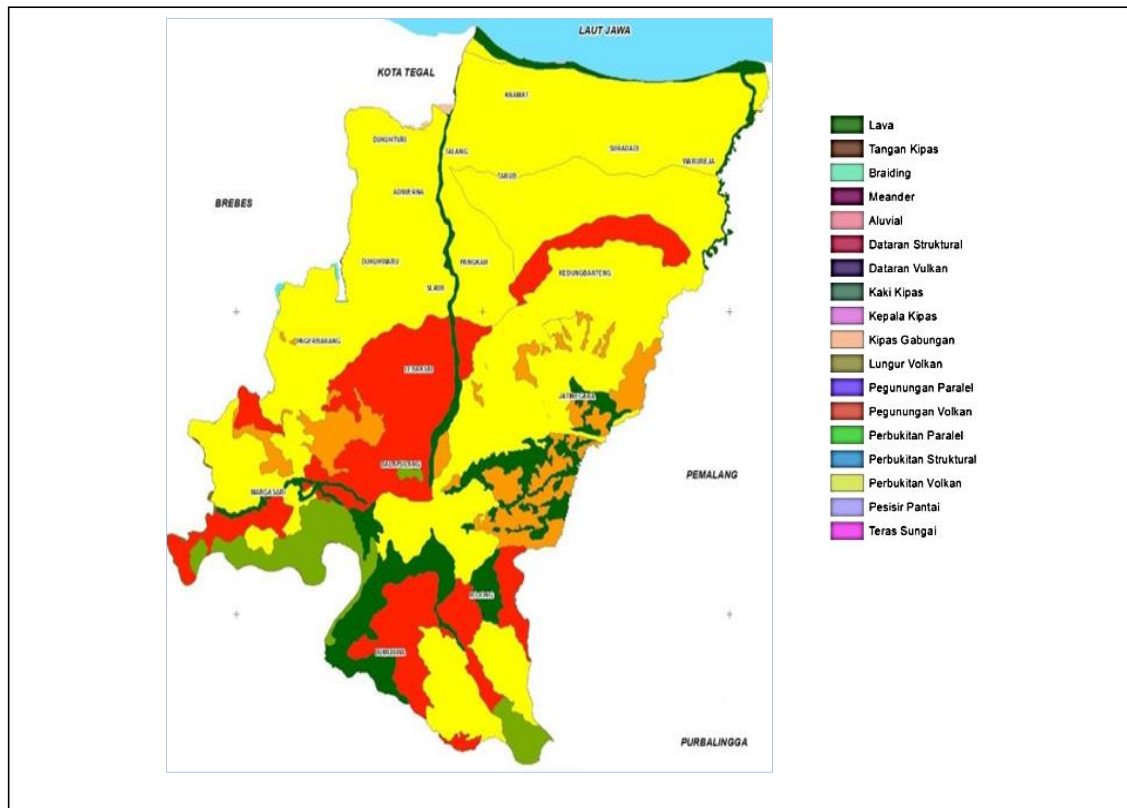
### **C. Jenis Tanah dan Geologi**

#### **1) Jenis Tanah**

Kondisi Berdasarkan analisis data GIS oleh BPDAS Pemali Jratun di Kabupaten Tegal terdapat lima jenis tanah utama yaitu tanah Aluvial, Grumosol, Latosol, Litosol, Podzolik, dan Regosol, serta asosiasinya. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tegal antara lain adalah Alluvial (34,93%), Regosol (24 %), Latosol (23,69 %), Grumosol (9,42 %), Andosol (4,29 %) dan jenis lain-lain (3,67 %). Tanah Aluvial merupakan jenis terluas yang ada di Kabupaten Tegal yaitu seluas 30.698

hektar yang merupakan tanah potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti padi, palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan dan lain-lain.

**Gambar 2. 3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Tegal**



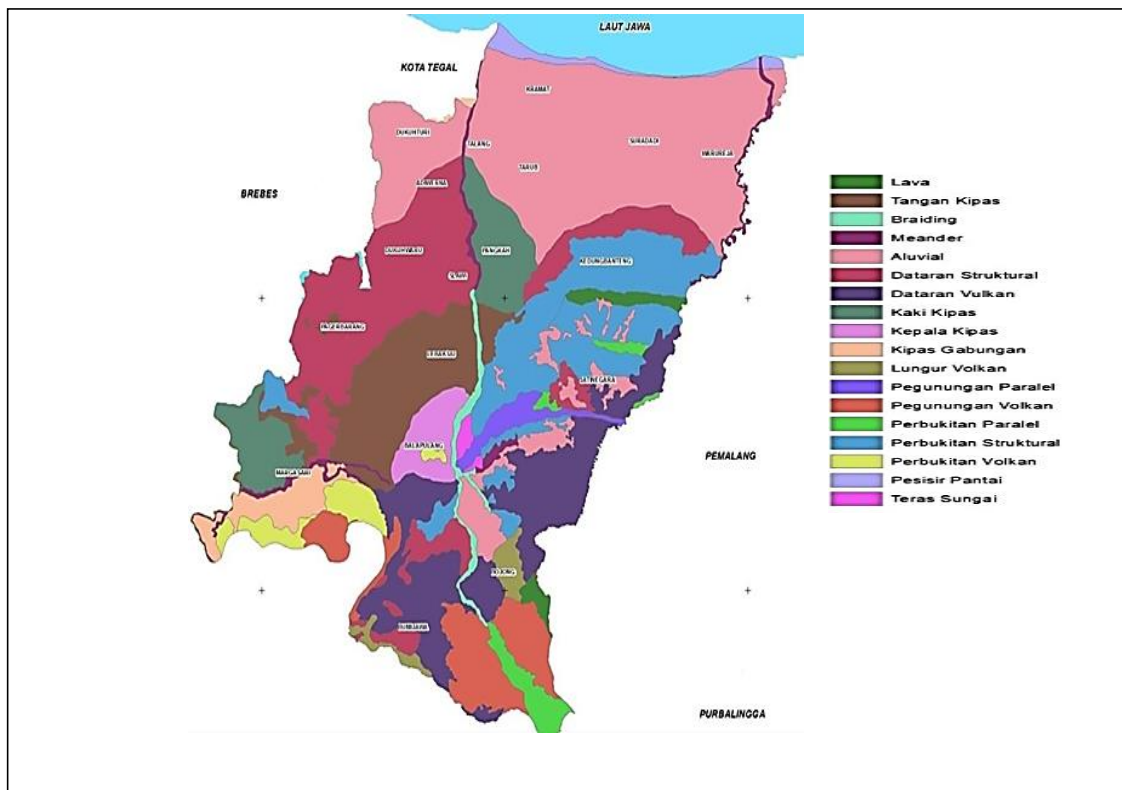
Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

## 2) Geologi

Kabupaten Tegal berada di kawasan pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Tegal memiliki garis pantai sepanjang 30 km, dengan luas daratan seluas 87.878 Ha, wilayah daratan Kabupaten Tegal memiliki kemiringan dan bentang alam yang bervariasi. Diantaranya berupa wilayah hutan, persawahan, dan ladang yang cukup luas. Begitu pula dari segi topografi, Kabupaten Tegal memiliki tiga kategori daerah yakni daerah pantai di wilayah utara, menerus ke selatan merupakan daerah dataran rendah, hingga daerah dataran tinggi di wilayah kaki Gunung Slamet.

Dilihat dari kondisi geologis yang lain, Kabupaten Tegal memiliki berbagai jenis klasifikasi geologis dimulai dari klasifikasi lava, tangen kipas, braiding, meander, aluvial, dataran struktural, dataran vulkan, kaki kipas, kepala kipas, kipas gabungan, lungur vulkan, pegunungan paralel, pegunungan vulkan, perbukitan paralel, perbukitan struktural, perbukitan vulkan, pesisir pantai, serta teras sungai.

**Gambar 2. 4 Peta Geologi Kabupaten Tegal**



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

#### D. Hidrologi

Kabupaten Tegal secara kewilayahan dikelilingi dan dibelah oleh 2 Sungai Besar yaitu Sungai Gung dan Kumisik. Selain itu Kabupaten Tegal juga mempunyai Waduk Cacaban yang mempunyai fungsi water storage di wilayah bagian timur. Secara detail keberadaan dan pembagian DAS dan Sub DAS di wilayah Kabupaten Tegal ditunjukkan dalam tabel.

**Tabel 2. 2 Daerah Aliran Sungai (DAS)**

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Kecamatan
1	Cacaban	14.599	Jatinegara, Kedungbanteng, Lebaksiu, Pangkah, talang, Tarub
2	Cenang	3.608	Suradadi
3	Gangsa	11.291	Adiwerna, Dukuhturi, Dukuhturu, Lebaksiu, Slawi, Talang
4	Gung	17.229	Adiwerna, Balapulung, Bojong, Bumijawa, Dukuhturi, Jatinegara, Lebaksiu, Pangkah, Slawi, Talang
5	Rambut	13.078	Bojong, Jatinegara, Kedungbanteng, Warureja
6	Semedo	3.064	Suradadi, Warureja
7	Pah	7.909	Kedungbanteng, Kramat, Suradadi, Tarub
8	Pemali	11.079	Balapulang, Bumijawa, Margasari, Pagerbarang
9	Kumisik	12.788	Balapulang, Bumijawa
10	Glagah	2.959	Bumijawa
	<b>Jumlah</b>	<b>97.604</b>	

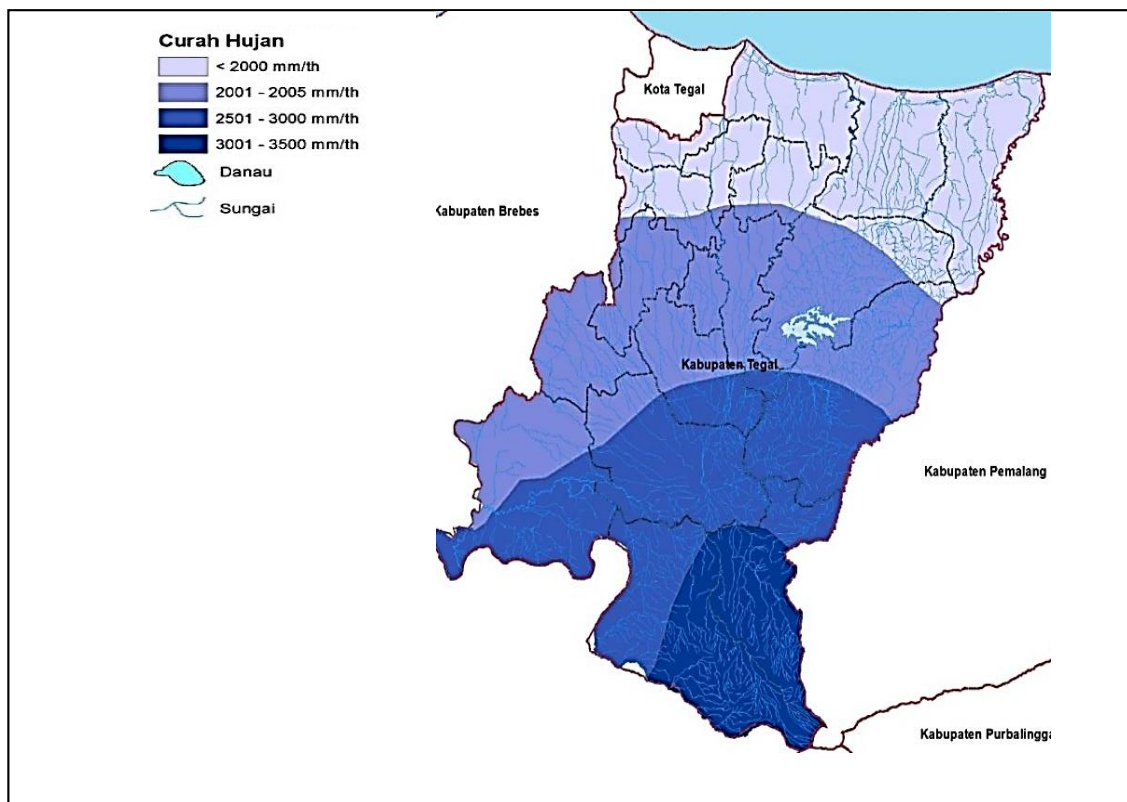
Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032



## E. Klimatologi

Kabupaten Tegal beriklim tropis, dengan rata-rata curah hujan sepanjang tahun sebesar 140,00 mm. Banyaknya curah hujan bergantung pada kelembaban udara yang tinggi, tetapi tekanan udara rendah dengan kecepatan angin, suhu udara dan lama penyinaran matahari serta penguapan sedang-sedang saja. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 345 mm dengan Kelembaban 82 %, Tekanan udara 1.008,4 hPa, Kecepatan angin 4 Knots, Suhu udara rata-rata 26,9°C dan Lama penyinaran Matahari 113,4 jam serta Penguapan air sebesar 131,2 mm. Gambaran tentang sebaran wilayah berdasarkan curah hujan dapat dilihat dalam peta sebagai berikut:

**Gambar 2. 5 Peta Sebaran Wilayah Berdasarkan Curah Hujan**



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

## F. Wilayah Rawan Bencana

Apabila dilihat kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah, dan keberadaan Gunung Slamet Tegal merupakan kabupaten yang sangat rawan bencana alam khususnya bencana erupsi gunung berapi dan gerakan tanah (tanah longsor), Abrasi, Angin Topan dan dan Kebakaran Hutan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032. Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023 | BAB II - 7

- d. Daerah Rawan Abrasi; Kabupaten memiliki wilayah Pantai Utara sepanjang sekitar 37 Km, beberapa tempat khususnya daerah – daerah yang berdekatan dengan muara sungai menjadi salah satu penyebab abrasi pantai. Wilayah yang sering terjadi abrasi meliputi Kelurahan Dampyak Kecamatan Kramat, Desa Maribaya Kecamatan Kramat, Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja, Desa Demangharja Kecamatan Suradadi, Desa Suradadi Kecamatan Suradadi, Desa Bojongsana Kecamatan Suradadi, Purwahamba Kecamatan Suradadi;
- e. Daerah Rawan Angin Topan; dimana angin dengan kecepatan dan dayarusak tinggi melintasi daratan yang seringkali terjadi di Kecamatan Balapulang, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Margasari, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa.
- f. Daerah Rawan Kekeringan; yaitu kawasan dengan ketersediaan air rendah untuk pertanian dan kebutuhan konsumsi masyarakat, khususnya pada musim kemarau yang diperparah dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam yaitu khususnya pada daerah yang bukan merupakan Cekungan Air Tanah (CAT), meliputi Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Margasari, Kecamatan Pagerbarang, Kecamatan Pangkah dan Kecamatan Warureja.
- g. Daerah Rawan Gelombang Pasang; Untuk rawan gelombang pasang didasarkan pada jarak dengan pantai, karakteristik lahan (morfologi dan ketinggian wilayah) serta ada tidaknya penghalang baik alam maupun buatan, meliputi: Kecamatan Kramat (Desa Kramat dan Desa Maribaya), Kecamatan Suradadi (Desa Bojongsana, Desa Purwahamba, dan Desa Suradadi) dan Kecamatan Warureja (Desa Demangharja).
- h. Daerah Rawan Kebakaran Lahan adalah daerah yang merupakan kawasan hutan khususnya yang komoditas tanamannya tanaman jati yaitu meliputi Kecamatan Balapulang, Margasari, Jatinegara, Kedungbanteng dan Sebagian Warureja.

## **G. Penggunaan Lahan**

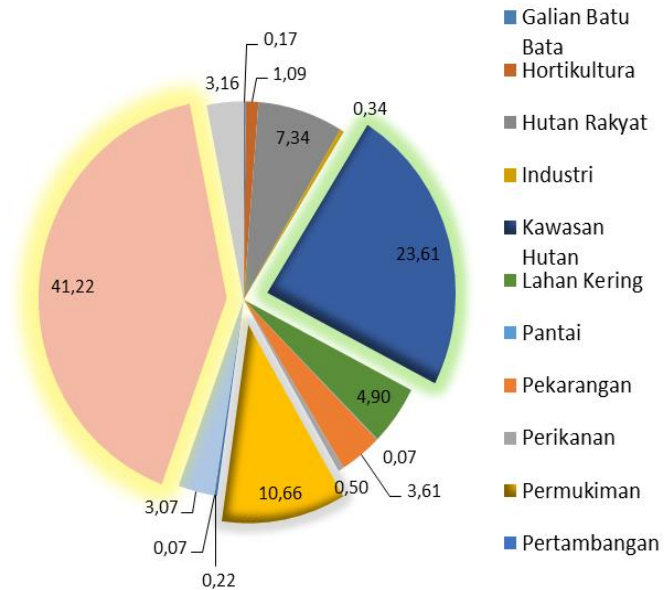
Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Tegal merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Berdasarkan interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi Liputan Tahun 2016, Kondisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Tegal didominasi oleh penggunaan lahan sawah basah sekitar 41,22 % dari luas wilayah Tegal ini berarti bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor dominan di Kabupaten Tegal, disusul kawasan hutan sekitar 23,61%.

Untuk lahan kering seluas 13.154 Ha komposisinya adalah tegalan, hutan rakyat dan hortikultura. Berdasarkan kondisi eksisting Bangunan permukiman seluas 10.529 Ha dan lahan pekarangan seluas 3.564 Ha di Kabupaten, apabila disandingkan dengan data jumlah penduduk Tahun 2020 sebanyak 1.596.996, dengan demikian secara kepadatan penduduk netto terkategori kepadatan tinggi 1.817 jiwa/km<sup>2</sup>. Kondisi ini membutuhkan lahan yang cukup untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk.



**Tabel 2. 3 Penggunaan Lahan**

Tataguna	Luas (Ha)
Galian Batu Bata	163
Hortikultura	1.073
Hutan Rakyat	7.247
Industri	334
Kawasan Hutan	23.313
Lahan Kering	4.835
Pantai	65
Pekarangan	3.564
Perikanan	491
Permukiman	10.529
Pertambangan	217
Peternakan	64
Sarana Prasana	3.032
Sawah	40.704
Tubuh Air	3.125
<b>Jumlah</b>	<b>98.756</b>



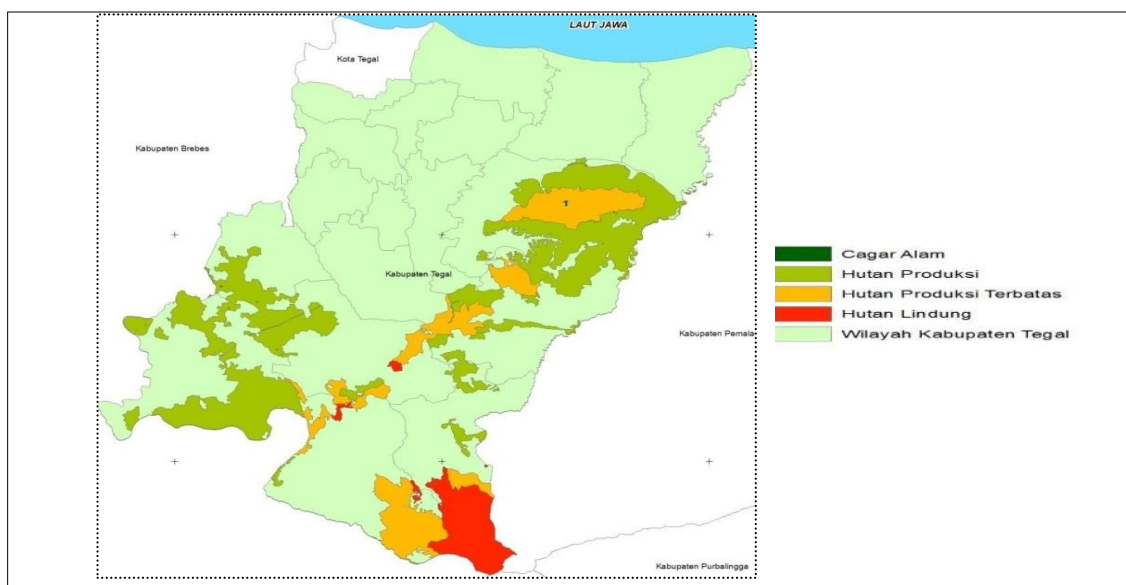
Sumber : Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Tahun 2016

## H. Sumber Daya Hutan

### 1) Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 359/Menhut-II/2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Luas kawasan Hutan di Kabupaten Tegal adalah 23.313 Ha atau setara dengan 27 % dari wilayah Kabupaten Tegal.

**Gambar 2. 7 Peta Sebaran Kawasan Hutan**



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

**Tabel 2. 4 Status dan Fungsi Hutan**

No	Status dan Fungsi hutan	Luas (Ha)	%
1	Areal Penggunaan Lain	74.686,25	73,01
2	Hutan Lindung	2.961,41	3,37
3	Hutan Poduksi Tebatas	6.672,40	7,58
4	Hutan Produksi	14.097,34	16,03
5	Cagar Alam	8,60	0,01
<b>Jumlah</b>		<b>98.426,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

## 2) Pengelolaan Hutan

Perum Perhutani Unit I yaitu KPH Pemalang, KPH Balapulang, dan KPH Pekalongan Barat yang sebagian besar kawasannya berada di kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Bentuk pemanfaatan kawasan hutan tersebut adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK – HT) dengan komoditas tanamannya jati dan pinus. Selain itu Kabupaten Tegal juga memiliki kawasan Cagar Alam Guci yang saat ini telah berubah statusnya menjadi Taman Wisata Alam (TWA) dan merupakan salah satu objek wisata.

**Tabel 2. 5 Pengelolaan Hutan**

No	KPH	Luas Berdasarkan Fungsi (Ha)				
		HL	HPT	HP	CA/TW A/SM	Jumlah
<b>1</b>	<b>KPH BALAPULANG</b>					
	BH Linggapada	-	399,4	2.732,5	-	3.131,9
	BH Margasari	-	-	3.737,6		3.737,6
<b>2</b>	<b>KPH PEMALANG</b>					
	BH Jatinegara	-	2.649,9	5.844,4	6,6	8.500,9
<b>3</b>	<b>KPH PEKALONGAN BARAT</b>					
	BH Bumijawa	2.961,4	3.623,1	1.782,9	2,0	8.369,4
	<b>Jumlah</b>	<b>2.961,4</b>	<b>6.672,4</b>	<b>14.097,3</b>	<b>8,6</b>	<b>23.739,8</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

## I. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, dengan mensinkronkan arah kebijakan pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

### 1) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan baik bagi kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman. Oleh karena itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal, penetapan kawasan ini dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Kawasan budidaya yang dikelola pemanfaatan ruangnya terdiri dari: kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan

perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; kawasan peruntukan lainnya.

a. Kawasan peruntukan hutan produksi.

Kawasan ini adalah kawasan yang dapat diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dengan sistem tebang pilih dan penanaman kembali ataupun hutan rakyat, maksudnya tanah rakyat yang ditanami dengan tanaman seperti halnya tanaman kehutanan namun sudah biasa ditanam rakyat dalam upaya konservasi tanah dan air.

Hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Bumijawa, Bojong, Margasari, Balapulung, Lebaksiu, Jatinegara, dan Kedungbanteng seluas 6.672,4 ha. Hutan produksi tetap terdapat di kecamatan Bumijawa, Bojong, Margasari, Pagerbarang, Balapulung, Lebaksiu, Jatinegara, Kedungbanteng, dan Pangkah seluas 14.097,34 ha.

b. Kawasan peruntukan pertanian.

Kawasan ini adalah kawasan yang dapat diperuntukkan bagi usaha pertanian meliputi: kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan, kawasan budidaya peternakan, Kawasan budidaya tanaman pangan meliputi: kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering (tanah ladang). Lokasi Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 39.045 hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. Sawah : Kecamatan Warurejo, Lebaksiu, Pagerbarang, Balapulung, Margasari, Dukuhturi, dan Dukuhwaru. Padi Ladang: Kecamatan Kedungbanteng, Bumijawa, Margasari, dan Bojong. Palawija: Kecamatan Suradadi, Kedungbanteng, Pangkah, Lebaksiu, Warurejo, dan Margasari.

c. Kawasan peruntukan perikanan.

Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha pengembangan perikanan. Berdasarkan tempat pembudidayaan, dibedakan: perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kawasan Pengembangan Perairan Umum, yaitu perikanan yang diusahakan di waduk, sungai, bendung, rawa dan sebagainya. Kawasan Pengembangan Budidaya Perikanan Kolam Air Tawar, dilaksanakan pada daerah yang mempunyai sumber air tawar dan benih yang mudah didapat. Budidaya ini dapat dilaksanakan pada daerah pegunungan dan dataran rendah. Tujuan Usaha ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kawasan perairan darat agar dapat meningkatkan perekonomian wilayah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah kawasan perikanan berupa kawasan tambak dan kolam seluas 321 Ha yang tersebar di Kecamatan Kedungbanteng, Pangkah, Kramat, Suradadi, Bumijawa, Lebaksiu dan Warureja. Rencana pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan daerah tangkapan antara 0-4 mil dari sepanjang pantai di Daerah di Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Warureja.

d. Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perkembangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan. Pengembangan kawasan pertambangan di Kabupaten Tegal masih membutuhkan beberapa tahapan sebelum sampai pada tahapan eksploitasi. Hal tersebut karena masih belum diketahui mengenai kondisi volume kandungan bahan tambang yang ada. Meskipun sudah terindikasikan luasan

hamparan tambang yang merata di wilayah kabupaten Tegal. Sedangkan sampai saat sekarang penguasaan dan pengusahaan bahan galian tambang yang ada masih ditangani oleh masyarakat umum awam dengan sistem pengelolaan informal. Lokasi yang sesuai dengan yang ditetapkan Departemen Pertambangan dimana mempunyai potensi bahan tambang yang bernilai tinggi; meliputi Kecamatan Balapulang, Bojong, Bumijawa, Lebaksiu, Slawi. Pertambangan pasir dan batu gamping di Kecamatan Margasari.

e. Kawasan peruntukan industri.

Kawasan peruntukan industri meliputi: industri besar; industri menengah; dan industri kecil dan mikro. Industri besar meliputi: kawasan Industri Margasari di Kecamatan Margasari; kawasan Industri Pantura meliputi: Kecamatan Kramat; Kecamatan Suradadi; dan Kecamatan Warureja.

Sentra kawasan industri berlokasi di Kecamatan Kramat dan Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Talang, Pangkah, Pagerbarang, Suradadi, dan Warureja. Kawasan industri ini perlu diperhatikan pengolahan limbah industrinya. Khusus untuk kawasan industri di Kecamatan Kramat (yaitu industri perkayuan dan perikanan), agar diperhatikan kelestarian lingkungan pantai. Luas kawasan peruntukan industri 1.770 hektar.

f. Kawasan peruntukan pariwisata.

Kawasan pariwisata alam meliputi: Pantai Purwahamba Indah di Kecamatan Suradadi. Pada lokasi dilengkapi hotel, restoran & taman rekreasi. Pemandian air panas Guci di Kecamatan Bojong dan Bumijawa merupakan wisata alam di lereng Gunung Slamet dengan hawa yang sejuk dan panorama indah serta adanya sumber air panas alami. Keberadaannya dilengkapi dengan adanya hotel, restoran dan taman wisata; Telaga Putri di Kecamatan Bumijawa; Gua Lawa di Kecamatan Balapulang; Gua Santri di Kecamatan Balapulang; dan Telaga air Cenggini di Kecamatan Balapulang. Sedangkan Kawasan pariwisata budaya meliputi: Makam Amangkurat dan Makam Suroponolawen di Kecamatan Adiwerna; Makam Smedo di Kecamatan Kedungbanteng; dan Makam Syeh Maulana Magribi di Gunung Tanjung di Kecamatan Lebaksiu.

g. Kawasan peruntukan permukiman.

Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan, meliputi Kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan. Kawasan permukiman perdesaan memiliki luas sekitar 7.275 hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten, sedangkan Kawasan permukiman perkotaan memiliki luas 7.275 hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

h. Kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan nasional. Kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi

- Komando Distrik Militer (Kodim) 0712/ Tegal di Kecamatan Dukuhturi;
- Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh kecamatan;
- Brigade Infanteri (Brigif) 4/ Dewa Ratna di Kecamatan Slawi;
- Batalyon Infanteri (Yonif) 407/ Padma Kusuma di Kecamatan Adiwerna;

- Kompi A Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 4/ Tanpa Kawandya di Kecamatan Slawi; dan
- Satuan Radar (Satradar) di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja.

## 2) Kawasan Lindung

Kawasan Lindung yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tegal terdiri dari Hutan Lindung, Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan lindung geologi, Kawasan Lindung Lainnya.

## 3) Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Kawasan lindung dikelola oleh negara sangat penting dalam menjaga kualitas air sungai, ketersediaan air sungai, serta pelestarian berbagai flora dan fauna sepanjang Daerah Aliran Sungai termasuk peningkatan produktivitas lahan, terletak di Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Bojong, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Margasari seluas 2.961,41 ha.

### a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air. Kawasan resapan air adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai penyedia sumber air.

- Kecamatan Balapulang dengan luas kurang lebih 549 hektar;
- Kecamatan Jatinegara dengan luas kurang lebih 1.766 hektar;
- Kecamatan Kedungbanteng dengan luas kurang lebih 319 hektar;
- Kecamatan Lebaksiu dengan luas kurang lebih 806 hektar
- Kecamatan Pangkah dengan luas kurang lebih 517 hektar.

### b. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. dengan luas kurang lebih 33.593 hektar tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten. Tujuannya adalah melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Lokasi Sempadan Sungai Besar yaitu: Sungai Rambut, Sungai Cenang, Sungai Jimat, Sungai Cacaban, Sungai Gung, Sungai Kliwon, Sungai Gangsa, Sungai Pemali, Sungai-Sungai Besar lainnya.

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai dengan luas kurang lebih 226 hektar. Tujuan melindungi pantai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu ekosistem. Pada wilayah Kabupaten Tegal, kawasan yang dimaksud adalah kawasan sekitar Pantai Maribaya (Kecamatan Kramat), Desa Kedungkelor (Kecamatan Warureja), Desa Demangharjo, Suradadi, Purwahamba dan Bojongwana (Kecamatan Suradadi).



Kawasan sekitar mata air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air dengan luas kurang lebih 265 hektar. Tujuannya adalah untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu, di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk dengan luas kurang lebih 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hektar terletak di Waduk Cacaban. Tujuannya adalah melindungi waduk/danau dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk. Lokasi berada di sekitar kawasan Waduk Cacaban terutama terdapat di Kecamatan Kedungbanteng dan Jatinegara.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah luasan memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kawasan ruang terbuka hijau sebagai kawasan yang mempunyai fungsi lindung atau konservasi adalah sesuai dengan RUTRK untuk masing-masing ibukota kecamatan yang bersangkutan. Dimana proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan di wilayah Daerah adalah paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.

Pembagian Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik paling sedikit 20 % dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat 10 %. Distribusi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah tersebar di seluruh ibukota kecamatan dengan luas kurang lebih 5.714 (lima ribu tujuh ratus empat belas) hektar atau 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kawasan perkotaan

c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya

Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suaka alam untuk melestarikan lingkungan dan melindungi keanekaragaman biota serta ekosistem. Gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pola umumnya. Kawasan suaka alam di Kabupaten Tegal terdiri dari:

- Cagar alam; Kawasan cagar alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan. Lokasi berada di Kecamatan Bumijawa (Cagar Alam Guci) seluas + 2 ha ; dan dan Kecamatan Jatinegara (Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara) seluas + 6,6 ha.
- Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya; Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada. Lokasi Berupa Kawasan

Konservasi Perairan Karang Jeruk Kecamatan Kramat dengan luas +10,635 ha.

- Pantai berhutan bakau, Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap pantai dan lautan. Tujuannya Memberikan perlindungan terhadap pantai dan lautan dengan tujuan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut, pelindung pantai dari pengikisan air laut serta penunjang usaha budidaya lainnya. Selama itu juga dapat melindungi kawasan daratan disekitarnya dan bahaya rob dan pengikisan pantai. Pantai berhutan bakau berlokasi di Kecamatan Warureja.
- Cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diperuntukan bagi kegiatan yang bertujuan untuk melindungi atau melestarikan budaya dan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dapat berupa peninggalan bersejarah yang berguna bagi pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan.

d. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya berupa Kawasan lindung dilihat fisiografis seperti hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat adalah kawasan yang sepenuhnya diperuntukan bagi konservasi hidrologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan kesuburan tanah. dengan luas kurang lebih 1.389 hektar meliputi:

- Kecamatan Bumijawa dengan luas kurang lebih 852 hektar;
- Kecamatan Bojong dengan luas kurang lebih 53 hektar;
- Kecamatan Balapulang dengan luas kurang lebih 91 hektar;
- Kecamatan Jatinegara dengan luas kurang lebih 113 hektar;
- Kecamatan Pangkah dengan luas kurang lebih 229 hektar; dan
- Kecamatan Kedungbanteng dengan luas kurang lebih 249 hektar.

Pelestarian kawasan lindung di luar kawasan hutan berperan dalam memberikan ruangan yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah dan penanggulangan banjir. Upaya pengelolaan kawasan sama dengan upaya pengelolaan kawasan hutan lindung. Tujuannya Memberikan ruangan yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah dan penanggulangan banjir.

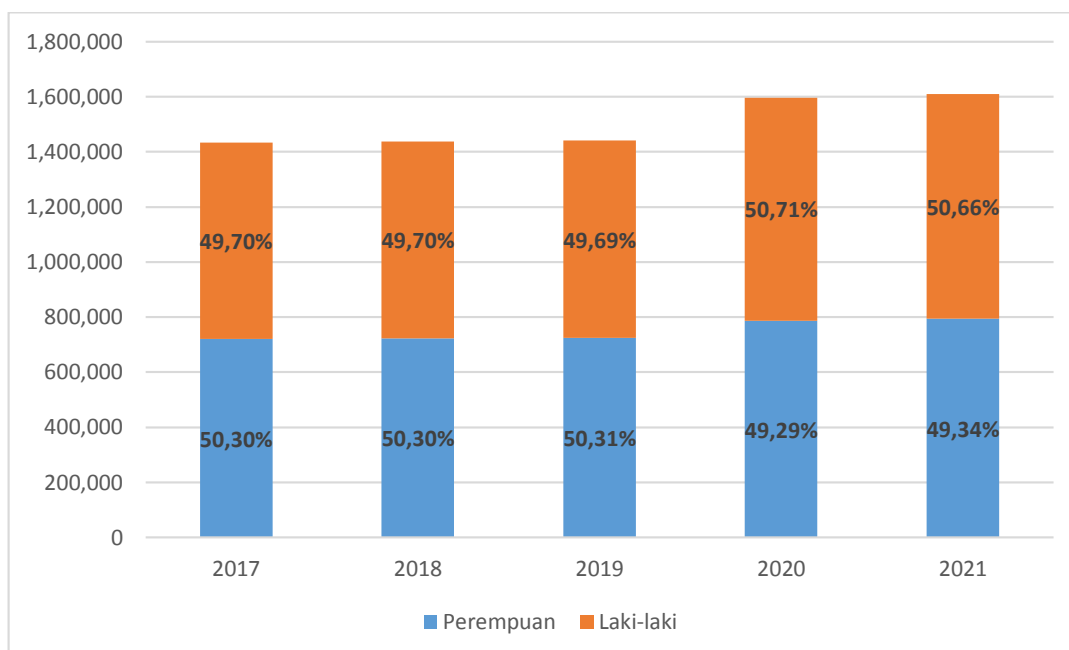
### 2.1.1.2 Kondisi Demografi

#### A. Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila

disertai dengan kualitas yang tinggi. Dan sebaliknya, apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

**Gambar 2. 8 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2021 adalah 1.609.857 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 815.615 jiwa dan perempuan 794.242 jiwa. *Sex ratio* Kabupaten Tegal adalah 103 yang artinya terdapat **103** laki-laki untuk setiap **100** perempuan di Kabupaten Tegal pada 2021.

**Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Rasio**

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
Margasari	55.578	54.838	110.416	101
Bumijawa	50.246	47.347	97.593	106
Bojong	37.793	36.523	74.316	103
Balapulang	47.082	46.364	93.446	102
Pagerbarang	31.603	31.337	62.940	101
Lebaksiu	46.750	47.075	93.825	99
Jatinegara	30.915	29.467	60.382	105
Kedungbanteng	22.806	22.264	45.070	102
Pangkah	58.398	56.804	115.202	103
Slawi	39.875	39.658	79.533	101
Dukuhwaru	34.886	34.203	69.089	102
Adiwerna	66.611	64.175	130.786	104
Dukuhturi	51.412	49.212	100.624	104
Talang	55.004	52.695	107.699	104
Tarub	43.682	42.843	86.525	102
Kramat	60.340	59.475	119.815	101
Suradadi	47.850	46.197	94.047	104
Warureja	34.501	33.393	67.894	103

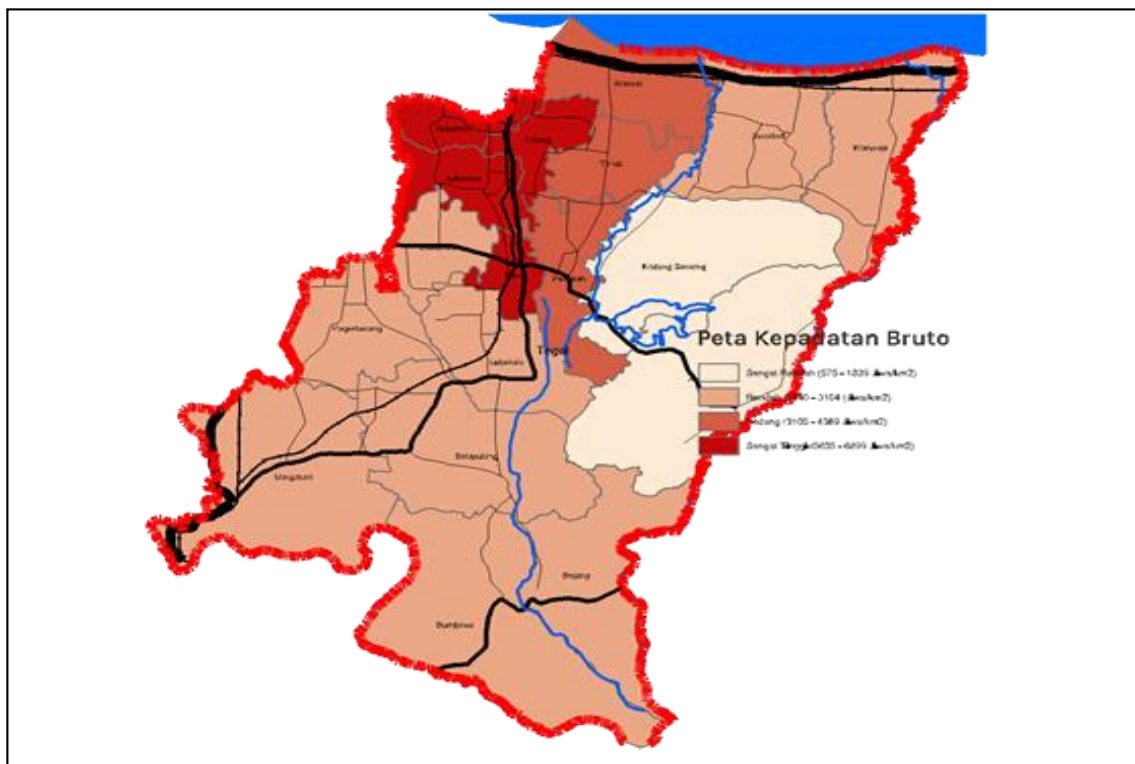
Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
<b>Tahun 2021</b>	<b>815.615</b>	<b>794.242</b>	<b>1.609.857</b>	<b>103</b>
Tahun 2020	809.884	787.112	1.596.996	102,9
Tahun 2019	715.887	724.811	1.440.698	98,77
Tahun 2018	714.305	722.920	1.437.225	98,81
Tahun 2017	712.511	721.004	1.433.515	99,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

## B. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Persebaran kepadatan penduduk bruto cenderung terpusat di utara dan barat Kabupaten Tegal. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Talang dengan kepadatan sebesar 5.570 jiwa/km<sup>2</sup>, diikuti oleh Kecamatan Slawi dan Dukuwaru. Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Kedungbanteng sebesar 462 jiwa/km<sup>2</sup> karena luasan lahan yang dominan merupakan lahan pertanian daripada lahan terbangun. Adanya perbedaan kepadatan tiap kecamatan tentu berpengaruh terhadap pembangunan wilayah seperti infrastruktur tiap kecamatan.

**Gambar 2. 9 Peta Sebaran Kepadatan Penduduk**



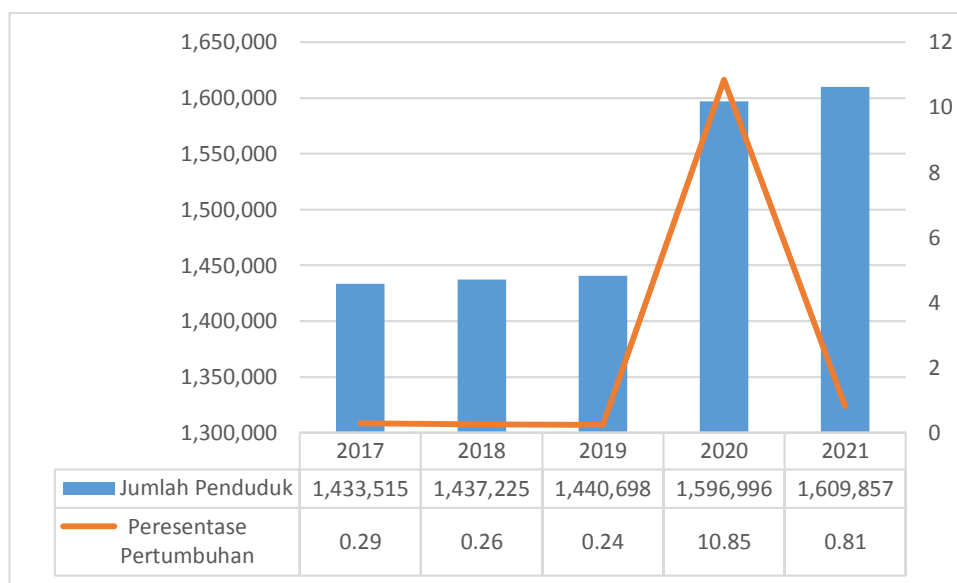
Sumber : Selayang Pandang Kabupaten Tegal, 2022

Dengan perbedaan tersebut akan menimbulkan perbedaan tingkat pelayanan di setiap kecamatan. Oleh karena itu untuk kecamatan dengan kepadatan terendah perlu diperhatikan lagi agar tidak ada kesenjangan dalam pembangunan nantinya. Untuk melihat kepadatan penduduk secara riil terkategori kepadatan tinggi 139 jiwa/Ha (13.580 jiwa/km<sup>2</sup>).

### C. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dapat berupa peningkatan jumlah penduduk (nilai laju pertumbuhan penduduk positif) atau juga penurunan jumlah penduduk (nilai laju pertumbuhan penduduk negatif). Laju pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tegal beberapa tahun yang akan datang. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga memengaruhi berbagai potensi dan masalah yang ada di Kabupaten Tegal baik berupa ketersediaan lapangan pekerjaan dan sumber daya tenaga kerja, sarana dan prasarana, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Berikut adalah grafik pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal dari tahun 2017-2021.

**Gambar 2. 10 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tegal Tahun 2017-2021**



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2022

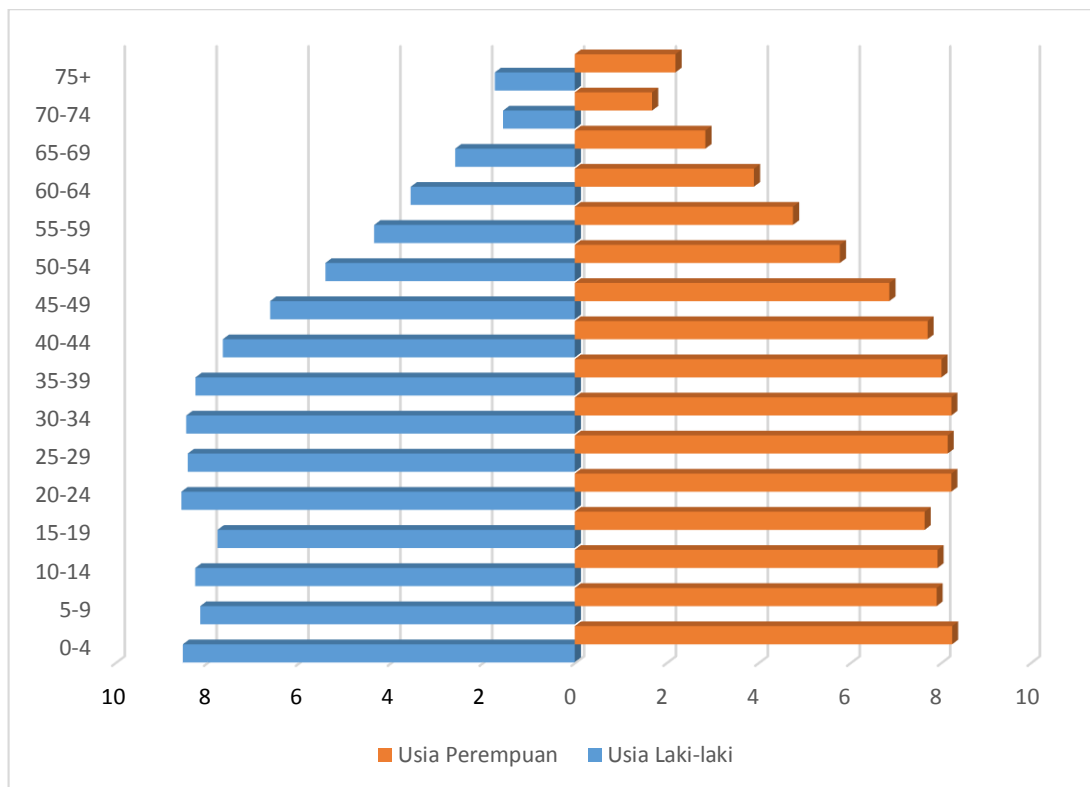
Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal cenderung linear dan meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun jumlah penduduk Kabupaten Tegal selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal cenderung menurun, tetapi berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020 pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal naik hingga 10,85% dari data tahun 2019. Hal ini disebabkan updating data berdasarkan database Dukcapil saat Sensus Penduduk 2020. Pada tahun 2021 persentase pertumbuhan penduduk kembali turun menjadi 0,81%.

### D. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2021 adalah 1.609.857 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 815.615 jiwa dan perempuan 794.242 jiwa. *Sex ratio* Kabupaten Tegal adalah 103 yang artinya terdapat **103** laki-laki untuk setiap **100** perempuan di Kabupaten Tegal pada 2021. Rincian jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan jenis kelamin tahun 2017-2021 tersebut dapat dilihat pada Tabel.



**Gambar 2. 11 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

Berdasarkan gambar piramida penduduk Kabupaten Tegal diketahui bahwa komposisi penduduk didominasi oleh usia produktif usia 15-59 tahun. Piramida tersebut merupakan piramida penduduk muda (*expansive*) yang menggambarkan tingkat kelahirannya tinggi sementara tingkat kematiannya rendah sehingga banyaknya usia produktif pada tahun tersebut, yang berarti Kabupaten Tegal mengalami *bonus demografi*. Namun padapenduduk usia 10-29 mengalami penurunan, dimana penurunan tersebut mengindikasikan bahwa adanya migrasi keluar Kabupaten Tegal. Jumlah kelahiran (fertilitas) di tahun tertentu akan berpengaruh pada demografi Kabupaten Tegal, sehingga penduduk usia produktif di Kabupaten Tegal semakin banyak. Akan tetapi pertambahan usia produktif harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM agar seimbang. Namun Angka kematian kasar di Kabupaten Tegal rata-rata dibawah angka 1 berarti kematian yang terjadi masih terbilang sedikit. Hal tersebut terlihat sangat jelas pada piramida penduduk Kabupaten Tegal.

Piramida penduduk Kabupaten Tegal adalah bentuk piramida yang termasuk ke dalam piramida ekspansif atau piramida penduduk muda. Piramida ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Bentuk piramida secara keseluruhan yang menyerupai kerucut;
- 2) Jumlah penduduk usia muda relatif banyak dan penduduk usia tua jauh lebih sedikit;
- 3) Menunjukkan angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan angka kematian (khususnya untuk penduduk berusia 0-4 tahun dan penduduk usia tua);
- 4) Piramida penduduk jenis ini umumnya merupakan piramida penduduk di daerah-daerah berkembang.

Piramida penduduk tersebut dengan jelas menggambarkan proporsi jumlah penduduk usia muda dan usia produktif di Kabupaten Tegal jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tua. Proporsi penduduk ini juga memengaruhi angka rasio ketergantungan yang ada di Kabupaten Tegal, dimana penduduk usia tua yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif sangat sedikit, tetapi penduduk usia produktif harus menanggung penduduk usia muda yang cukup banyak.

#### E. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Secara umum, wilayah yang kepadatan penduduknya relatif lebih tinggi berada pada kawasan perkotaan, terutama kawasan yang mengikuti jalur regional, kawasan kota Slawi, dan kawasan perbatasan dengan Kota Tegal. Hal ini terjadi karena kawasan-kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi (yang otomatis juga memiliki kualitas layanan sarana dan prasarana yang relatif baik) sehingga menarik orang untuk datang dan tinggal. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 980.258 orang, jumlah non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun keatas) mencapai 629.599.

Darihal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai 62,91 artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 63 penduduk tidak produktif, sebagaimana tersaji pada tabel.

**Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

Usia	2017	2018	2019	2020	2021
0 – 4	125.515	123.783	122.171	135.079	135.079
5 – 9	129.132	128.043	126.880	129.254	129.254
0 – 14	131.447	131.111	130.677	130.294	130.294
15 – 19	121.999	120.599	119.260	124.067	124.067
20 – 24	113.627	114.588	115.193	135.207	135.207
25 – 29	108.147	109.527	111.032	133.429	133.429
30 – 34	105.112	103.541	102.491	134.351	134.351
35 – 39	104.683	103.564	102.348	130.961	130.961
40 – 44	93.783	93.757	93.559	123.640	123.640
45 – 49	87.274	87.140	86.919	108.486	108.486
50 – 54	83.794	84.609	85.240	90.117	90.117
55 – 59	72.930	74.713	76.313	73.350	73.350
60 – 64	58.461	61.180	63.717	60.123	60.123
65 +	97.611	101.070	104.898	88.638	101.499
Jumlah	1.433.515	1.437.225	1.440.698	1.596.996	1.609.857

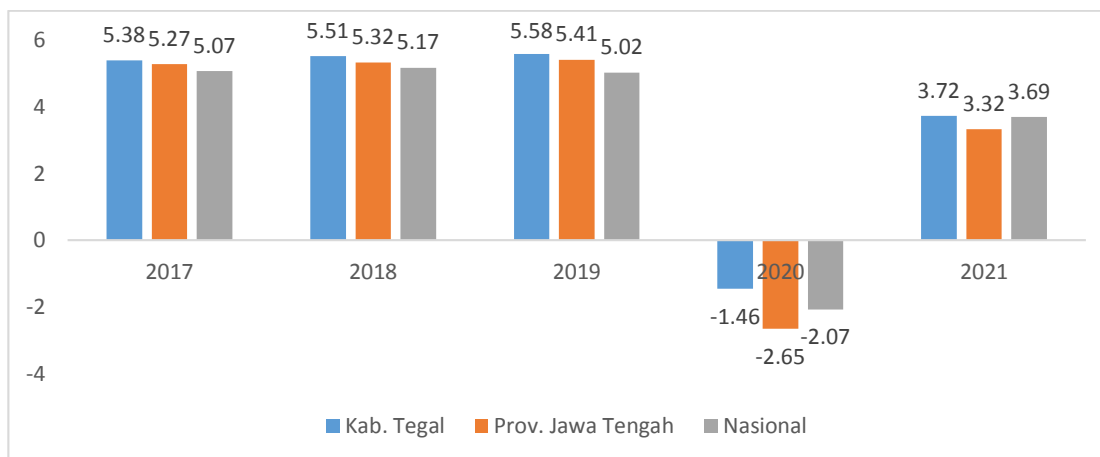
Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka, 2022

#### 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal sejak Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan secara rerata selalu di atas 5%,tetapi pada tahun 2020 mengalami kontraksi.menjadi -1,46.Pandemi *Covid-19* yang terjadi sepanjang tahun 2020 secara nyata mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Kabupaten Tegal. Perekonomian Kabupaten Tegal tahun 2021 (c-to-c) tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 3,72 persen

dibandingkan pencapaian pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -1,46 persen.

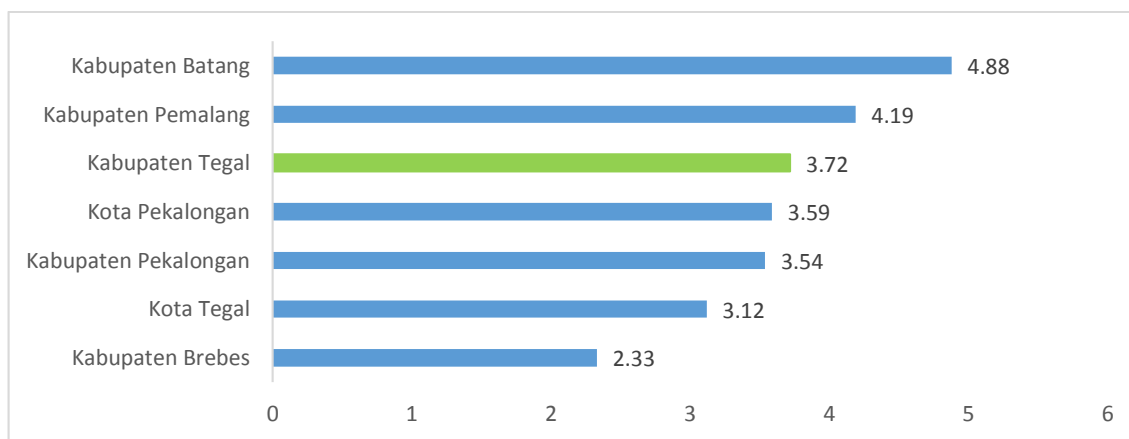
**Gambar 2. 12 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2017-2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

Berdasarkan data Tahun 2021, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal sebesar 3,72% menduduki peringkat ketiga dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah di Kabupaten Brebes (2,33%) sedangkan Pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah Kabupaten Batang (4,88%).

**Gambar 2. 13 Pertumbuhan Ekonomi se-Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

Dari sisi produksi, lapangan usaha yang mampu mencatatkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2021 adalah Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 6,87 persen seiring meningkatnya kebutuhan pembelajaran *online* serta penyelesaian pekerjaan dan pertemuan secara virtual. Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh sebesar 6,50 persen dan Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 4,35 persen.

**Tabel 2. 8 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)  
Tahun 2017-2021**

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.35	1.44	-0,69	2,18	2,80
B	Pertambangan dan Penggalian	6.50	5.19	3,55	2,05	4,35
C	Industri Pengolahan	6.95	6.66	6,44	-0,46	4,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.65	4.78	5,74	0,77	2,87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.09	4.30	5,74	2,40	6,50
F	Konstruksi	7.22	5.85	3,40	-3,02	4,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.80	4.43	5,21	-4,20	4,07
H	Transportasi dan Pergudangan	6.09	6.50	6,81	-29,97	3,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.33	6.74	7,13	-5,45	4,54
J	Informasi dan Komunikasi	7.50	9.51	8,68	14,96	6,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/	5.09	4.24	10,70	2,32	1,76
L	Real Estat	4.50	4.07	3,90	-0,73	2,08
M	Jasa Perusahaan	6.50	6.14	4,99	-5,33	2,37
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.25	3.46	8,44	-0,91	-0,10
O	Jasa Pendidikan	6.57	8.40	3,61	-0,42	0,72
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.10	8.78	6,02	3,02	1,78
Q	Jasa lainnya	5.43	7.70	6,74	-5,02	0,63
<b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b>		<b>5,38</b>	<b>5,51</b>	<b>5,58</b>	<b>-1,46</b>	<b>3,72</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

#### **A. PDRB**

PDRB Kabupaten Tegal tahun 2021 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp.37.335.993,58juta dan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2021 mencapai Rp.25.402.911,06juta. Struktur ekonomi Kabupaten Tegal didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tegal, dan bisa dilihat pengaruhnya pada penggunaan lahan serta penduduk berdasar matapencaharian.

Sektor industri pengolahan berkembang dengan adanya klaster logam di Kecamatan Talang dan Adiwerna utamanya meliputi komponen kapal, komponen alat mesin pertanian, komponen otomotif, komponen alat berat, dan peralatan rumah tangga. Produk IKM Kabupaten Tegal telah banyak dipakai di banyak daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara tetangga. Industri pengolahan makanan juga berkembang dengan baik di Kabupaten Tegal utamanya minuman dan makanan kecil khas Kabupaten Tegal diantaranya adalah teh, tahu aci, pilus, anthor, olos, dan kacang bogares. Kuliner lain selain makanan kecil adalah sate kambing muda yang terkenal gurih dan lezat danteh poci yang tidak dapat dipisahkan dari kedua kuliner khas Tegal di atas dan sangat mendukung perkembangan industri berbasis makanan ini. Industri konfeksi juga menyumbang kontribusi yang cukup besar utamanya industri batik tegalan sebagai identitas budaya khas Kabupaten Tegal. Upaya yang telah

dilakukan diantaranya adalah peningkatan kualitas batik, introduksi pewarna alami, pelatihan manajemen, promosi melalui pameran, dan kebijakan untuk mengenakan batik tegalan sebagai pakaian resmi daerah yang dikenakan setiap hari Kamis.

Secara umum, industri pengolahan merupakan kontributor yang signifikan karena selain sumbangsuhnya yang besar pada perekonomian Kabupaten Tegal, sifat industrinya adalah padat karya sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain itu, kontribusinya relatif stabil –hampir mencapai 30% dari total perekonomian wilayah - serta tren pertumbuhannya juga cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Sebagai sektor ekonomi yang memiliki potensi bagus serta *backward* dan *forward linkage* yang kuat, sudah seharusnya sektor industri pengolahan dijadikan prioritas pembangunan. Perkembangan yang terjadi pada sektor ini akan menarik sektor ekstraktif untuk maju dan mendorong sektor tersier untuk berkembang.

Kontribusi sektor perdagangan juga sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya *outlet* penjualan di sepanjang jalur regional yang ada. Berkembangnya sektor ini dilatarbelakangi dengan berkembangnya sektor lain, mengingat perkembangan perdagangan merupakan muara dari sistem produksi. Kawasan pusat ekonomi di Kabupaten Tegal adalah Kecamatan Adiwerna dan Slawi. Pusat-pusat perdagangan muncul dengan pesat serta membentuk satu koridor ekonomi yang utuh. Hampir semua titik penjualan hasil produksi di Kabupaten Tegal berada di area Adiwerna dan Slawi.

Sektor perdagangan juga mengalami tren yang menaik dari tahun ke tahun, serta kontribusinya juga mengalami peningkatan. Selain karena lokasi Kabupaten Tegal yang relatif baik, perkembangan sektor ini dipengaruhi perkembangan kawasan perkotaan kecamatan, dan tumbuhnya sektor industri pengolahan. Peningkatan aktifitas sektor perdagangan dan industri memberi pengaruh terhadap ketahanan perekonomian daerah. Perkembangan kawasan perkotaan di kecamatan juga memiliki pengaruh yang signifikan dimana perkembangan fisik dan ekonomi tidak lagi terpusat pada kawasan Slawi-Adiwerna, tetapi juga pada kawasan perkotaan kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan lokal untuk kawasan sekitarnya. Selain itu, pertumbuhan sektor industri pengolahan yang bagus akan secara langsung mendorong perkembangan sektor perdagangan. Setiap barang yang diproduksi pasti akan dijual, dan setiap penjualan akan meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan.

Sementara, kontribusi sektor pertanian juga relatif besar meskipun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, sektor ini tetap harus menjadi perhatian karena merupakan sektor yang sangat strategis. Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Tegal sangat bergantung pada performa sektor pertanian. Selain itu, jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor ini sangat besar dan merupakan kontributor terbesar pada jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat Kabupaten Tegal. Perkembangan sektor pertanian masih berkutat pada cara ekstraktif. Cara ini sangat bergantung pada kondisi alam, dimana ketika hasil yang didapat berkualitas bagus maka sektor pertanian akan tumbuh. Sebaliknya, jika hasil yang didapat berkualitas kurang baik, maka sektor pertanian akan cenderung turun.

Di samping itu, luas lahan pertanian yang semakin berkurang (termasuk infrastruktur pendukungnya) juga ikut mendorong turunnya kontribusi sektor



pertanian. Kedua hal tersebut menjadikan sektor pertanian hanya menghasilkan nilai tambah yang kecil dalam perekonomian. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya industri pengolahan di Kabupaten Tegal yang berbasis pada produk pertanian yang dihasilkan dari daerah sendiri. Industri pengolahan makanan yang memiliki kontribusi besar yaitu industri teh, mengambil bahan baku bukan dari Kabupaten Tegal. Industri pengolahan makanan kecil juga kebanyakan berbahan dasar terigu yang merupakan bahan impor. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mendorong industrialisasi pertanian yang berbasis produk pertanian di Kabupaten Tegal. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka sektor industri akan berkembang, dan sektor perdagangan juga akan ikut terdorong.

**Tabel 2. 9 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021 atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)**

No	Sektor	2017		2018		2019		2020		2021	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.191,18	13,79	4.435,64	13,29	4.495,44	12,76	4.675,15	13,24	4.855,09	13,00
B	Pertambangan dan Penggalian	1.365,81	4,50	1.451,67	4,54	1.521,87	4,32	1.561,87	4,42	1.644,22	4,40
C	Industri Pengolahan	10.504,77	34,91	11.241,13	35,35	12.189,63	34,60	12.454,64	35,26	13.366,27	35,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19,38	0,06	21,02	0,06	22,36	0,06	22,24	0,06	22,81	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,79	0,36	11,32	0,03	11,78	0,03	12,25	0,03	13,22	0,04
F	Konstruksi	2.272,53	7,48	2.524,33	7,60	2.740,43	7,78	2.677,42	7,58	2.881,24	7,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.573,69	15,12	4.966,94	14,94	5.449,56	15,47	5.274,29	14,93	5.571,85	14,92
H	Transportasi dan Pergudangan	820,72	2,70	901,58	2,72	993,90	2,82	718,03	2,03	775,45	2,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	1.288,91	4,28	1.426,15	4,24	1.567,01	4,45	1.496,20	4,24	1.587,13	4,25
J	Informasi dan Komunikasi	811,45	2,60	935,79	2,61	1.046,92	2,97	1.204,87	3,41	1.288,17	3,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	700,35	2,29	752,38	2,27	793,39	2,25	817,74	2,32	854,67	2,29
L	Real Estat	485,88	1,60	530,85	1,62	562,97	1,60	560,24	1,59	580,78	1,56
M	Jasa Perusahaan	126,29	0,42	137,50	0,43	153,32	0,44	147,50	0,42	152,61	0,41
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	659,25	2,19	695,06	2,10	731,14	2,08	732,71	2,07	730,14	1,96
O	Jasa Pendidikan	1.565,27	5,18	1.736,45	5,34	1.888,35	5,36	1.915,90	5,42	1.945,11	5,21
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	236,31	0,77	259,42	0,78	282,37	0,80	297,55	0,84	304,98	0,82
Q	Jasa lainnya	645,95	2,07	712,60	2,07	781,25	2,22	751,23	2,13	762,23	2,04
	<b>Total</b>	<b>30.278,51</b>	<b>100</b>	<b>32.769,83</b>	<b>100</b>	<b>35.231,69</b>	<b>100</b>	<b>35.318,84</b>	<b>100</b>	<b>37.335,99</b>	<b>100</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

**Tabel 2. 10 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017- 2020 atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)**

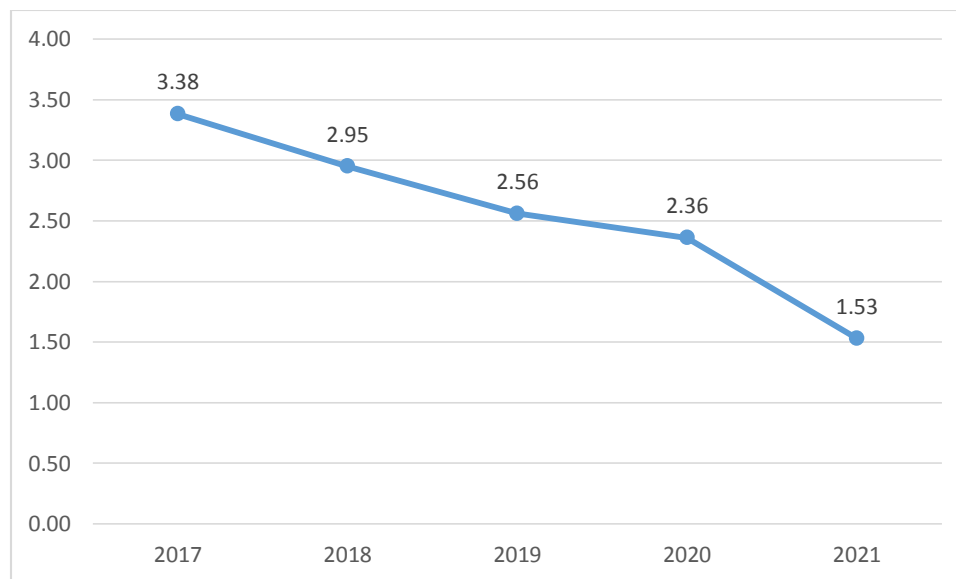
No	Sektor	2017		2018		2019		2020		2021	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.958,75	13,25	3.032,39	12,87	3.011,43	12,11	3.077,10	12,56	3.163,25	12,45
B	Pertambangan dan Penggalian	903,63	4,05	950,49	4,04	1004,34	4,04	1.004,34	4,10	1.048,07	4,13
C	Industri Pengolahan	7.221,20	32,35	7.502,88	31,86	7.985,86	32,11	7.949,32	32,44	8.272,51	32,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16,56	0,07	17,35	0,07	18,35	0,07	18,49	0,08	19,02	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,90	0,04	10,33	0,04	10,68	0,04	10,94	0,04	11,65	0,05
2 F	Konstruksi	1.767,54	7,92	1.882,51	7,99	1.980,60	7,96	1.920,79	7,84	2.003,10	7,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.796,30	17,01	4.033,06	17,12	4.307,73	17,32	4.126,59	16,84	4.294,72	16,91
H	Transportasi dan Pergudangan	680,00	3,05	724,91	3,08	776,58	3,12	543,84	2,22	567,74	2,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	1.023,82	4,59	1.117,85	4,75	1.214,94	4,89	1.148,76	4,69	1.200,93	4,73
J	Informasi dan Komunikasi	821,24	3,68	947,42	4,02	1.048,77	4,22	1.205,67	4,92	1.288,50	5,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	491,85	2,20	509,33	2,16	529,18	2,13	541,46	2,21	550,98	2,17
L	Real Estat	411,72	1,84	438,50	1,86	460,39	1,85	457,04	1,87	466,56	1,84
M	Jasa Perusahaan	96,97	0,43	102,92	0,44	111,61	0,45	105,66	0,43	108,29	0,43
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	459,70	2,06	475,79	2,02	492,99	1,98	488,49	1,99	487,99	1,92
O	Jasa Pendidikan	964,63	4,32	1.044,73	4,44	1.107,66	4,45	1.102,98	4,50	1.110,94	4,37
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	180,42	0,81	195,46	0,83	208,64	0,84	214,95	0,88	218,78	0,86
Q	Jasa lainnya	517,89	2,32	566,63	2,41	617,14	2,48	586,18	2,38	589,86	2,32
	<b>Total</b>	<b>22.322,10</b>	<b>100</b>	<b>23.552,55</b>	<b>100</b>	<b>24.866,73</b>	<b>100</b>	<b>24.502,62</b>	<b>100</b>	<b>25.402,91</b>	<b>100</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

## B. Laju Inflasi

Selama tahun 2021 laju inflasi yang terjadi di Kota Slawi secara umum mengikuti hasil penghitungan angka Inflasi *sister city* yaitu Kota Tegal sebagai salah Kota yang ikut dalam penghitungan Standar Biaya Hidup (SBH). Angka inflasi Kota Tegal Tahun 2021 adalah sebesar 1,53 persen. Inflasi yang terjadi di Kota Tegal secara umum disebabkan karena naiknya nilai indeks yang cukup signifikan hampir semua kelompok pengeluarannya itu Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 1,78 persen, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,66 persen, Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,51 persen, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,35 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,12 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Rumah tangga dan Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah tangga masing-masing sebesar 0,11 persen. Disamping itu ada dua kelompok pengeluaran mengalami penurunan nilai indeks yaitu terjadi pada Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,05 persenan Kelompok Transportasi sebesar 0,03 persen. Sedangkan Kelompok Pendidikan dan Kelompok rekreasi, Olahraga dan Budaya selama Bulan Desember 2021 tidak mengalami perubahan nilai indeks atau harga yang terjadi relatif stabil.

**Gambar 2. 14 Perkembangan Inflasi Tahun 2017-2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal; BPS Kota Tegal, 2022

Dari sisi andil/sumbangan terhadap pembentukan inflasi Kota Tegal dari sebelaskelompok pengeluaran, tujuh kelompok memberikan andil/sumbangan inflasi, dua kelompok memberikan andil/sumbangan deflasi dan dua kelompok tidak memberikan sumbangan inflasi/ deflasi yaitu Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya dan Kelompok Pendidikan. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi terbesar yaitu : Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 0,522 persen, disusul Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,062 persen, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,0327persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah tangga sebesar 0,023

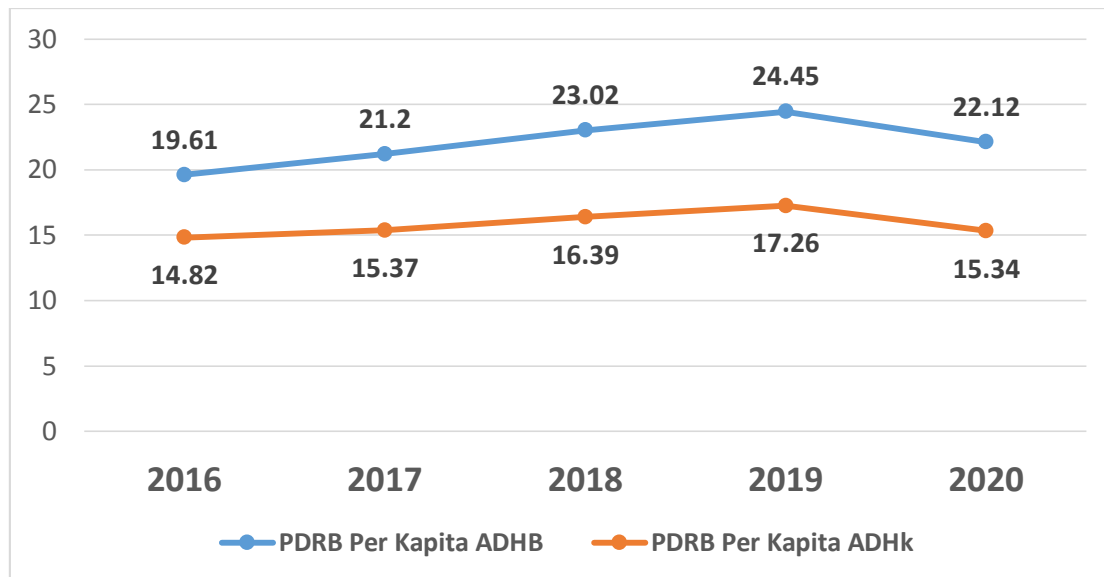
persen, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,017 persen, Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah tangga sebesar 0,006 persen dan Kelompok Kesehatan sebesar 0,003 persen. Sedangkan kelompok yang memberikan andil deflasi adalah Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,002 persen dan Kelompok Transportasi sebesar 0,003 persen.

### C. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya PDRB tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 mengalami kenaikan. Pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 secara nyata mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Kabupaten Tegal, sehingga PDRB per kapita Tahun 2020 turun. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 24,45 juta rupiah. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 selama tahun 2020 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Work From Home (bekerja dari rumah), StudyFrom Home (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan kinerja seluruh lapangan usaha, utamanya Transportasi dan Perdagangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat.

**Gambar 2. 15 PDRB per kapita ADHB dan ADHK Tahun 2016-2020**



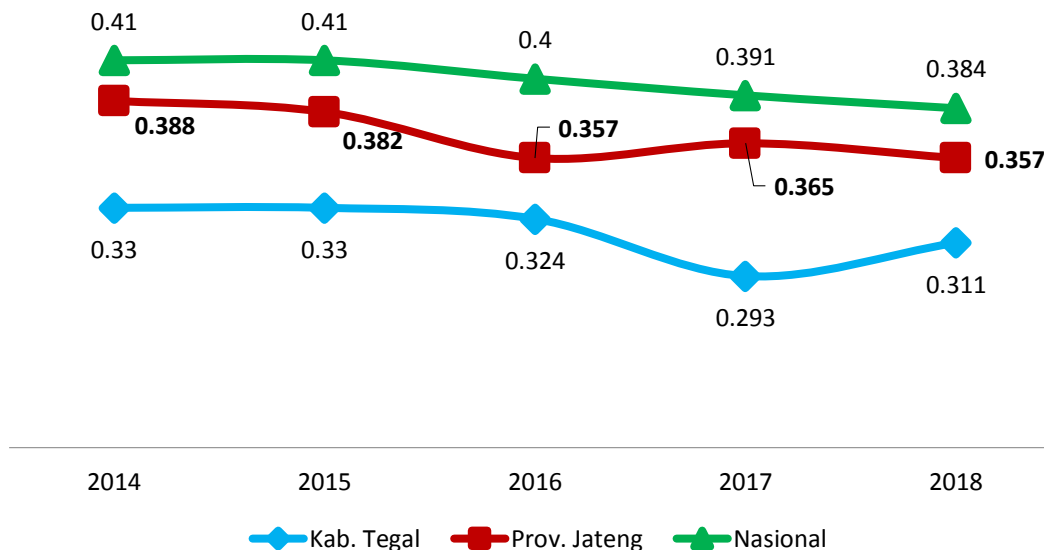
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022



#### D. Indeks Gini

Ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Tegal menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Data terakhir yang tersedia adalah Indeks Gini Kabupaten Tegal tahun 2014 - 2018 sebagaimana tersaji dalam gambar grafik indeks gini.

**Gambar 2. 16 Gini Ratio Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional**



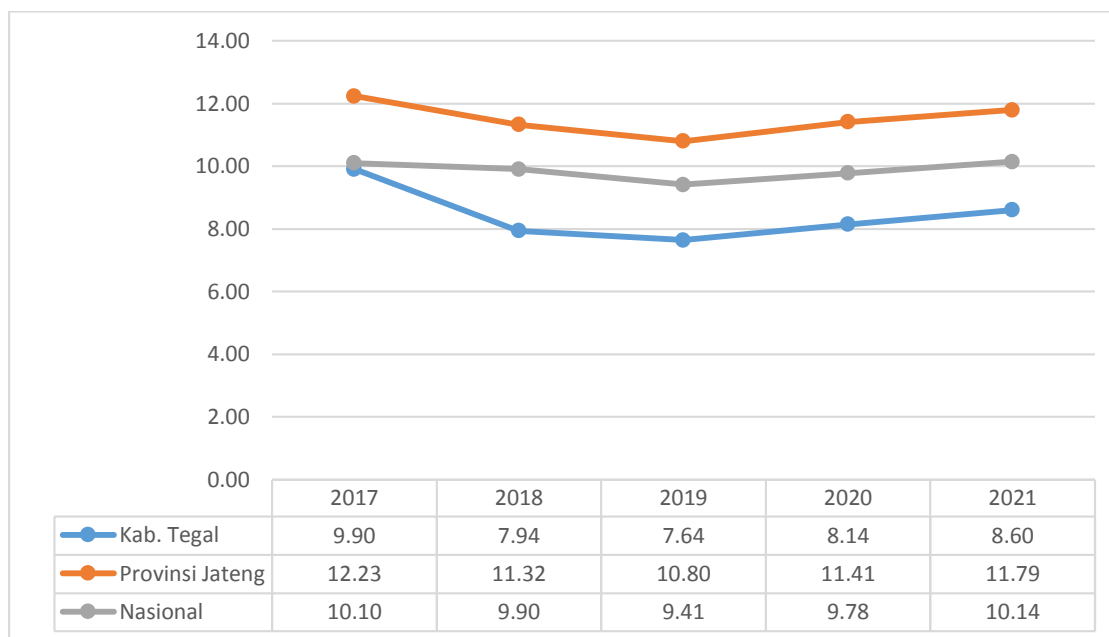
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

Berdasarkan kriteria menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi, maka ditentukan bila  $G < 0,35$  ketimpangan taraf rendah; bila  $G$  antara  $0,35 - 0,5$  ketimpangan taraf sedang; dan bila  $G > 0,5$  ketimpangan taraf tinggi. Untuk Kabupaten Tegal dibawah  $0,35$  sehingga dikatakan ketimpangan taraf rendah, dan dibandingkan Gini Provinsi Jawa Tengah maupun Gini Nasional maka Gini Kabupaten Tegal masih dibawah Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Namun ketimpangan rendah belum bisa menampilkan kondisi lebih baik, karena akan menjadi permasalahan berikutnya bila homogeny kondisi sama-sama miskin atau kondisi sama-sama kaya belum bisa ditentukan.

#### E. Penduduk Miskin

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal mengalami penurunan tetapi pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 123.520 jiwa (bertambah 6.020 jiwa) atau 8,60% dari total jumlah penduduk, jumlah ini naik sebesar 0,46% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2020 mencapai 117.540 jiwa atau 8,14%. Penduduk miskin di Kabupaten Tegal sejak Tahun 2017-2021 lebih rendah dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

**Gambar 2. 17 Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

Berikut ini adalah gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2017-2021. Jumlah penduduk yang menjadi pembanding adalah jumlah penduduk hasil proyeksi yang dirilis BPS, bukan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus tahun 2020. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 11 Penduduk Miskin Tahun 2017 - 2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penduduk Miskin	141.800	114.060	109.940	117.500	123.520
2.	Jumlah Penduduk	1.433.515	1.437.225	1.440.671	1.435.147	1.596.996
3.	Persentase (%)	9,90	7,94	7,64	8,14	8,60

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

Indikator kemiskinan dihitung dari survei 20% populasi di bawah Garis Kemiskinan Sementara (GKS) tahun sebelumnya. Dari GKS ditetapkan nilai pengeluaran dari 52 komoditi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan pengeluaran Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

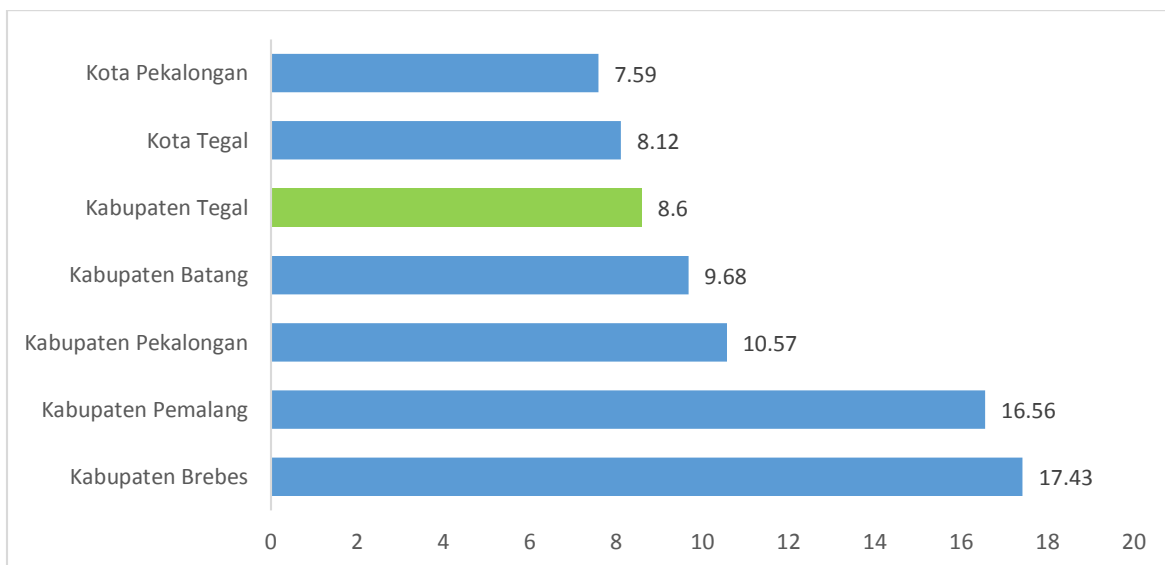
Namun demikian, pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Tegal meningkat dari sebelumnya 8,14% pada tahun 2020 menjadi 8,60% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan kondisi pandemi *covid-19* yang mulai dirasakan dampaknya sejak awal tahun 2020 oleh masyarakat Indonesia. Data kemiskinan per Maret 2020 (dirilis November 2020) telah menunjukkan tren peningkatan tingkat kemiskinan di semua level. Meskipun Pandemi *covid-19* di Indonesia bermula sejak Maret 2020, namun kontraksi komoditas makanan dan non makanan sudah terjadi dalam bentuk:

- Kontraksi permintaan-penawaran, produksi lemah, ekspor-impor terhambat;
- panic buying*,
- menahan *spending* (pengeluaran);
- mengatur *saving* (tabungan/investasi);
- pembatasan kegiatan masyarakat.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, kondisi kemiskinan Kabupaten Tegal perlu dilihat dari perspektif regional. Kondisi makro regional yang relatif senada mengindikasikan efektivitas penanganan program kemiskinan satu wilayah cenderung tepat apabila berada pada posisi yang relatif sama dengan kab/kota sekitarnya.

Capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal pada Tahun 2021 merupakan yang terbaik jika disandingkan dengan 4 (empat) Kabupaten di eks karesidenan Pekalongan. Penduduk miskin Kabupaten Tegal lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Pekalongan dan Kota Tegal, sebagaimana gambar berikut ini.

**Gambar 2. 18 Perbandingan Kemiskinan di eks Karesidenan Pekalongan**

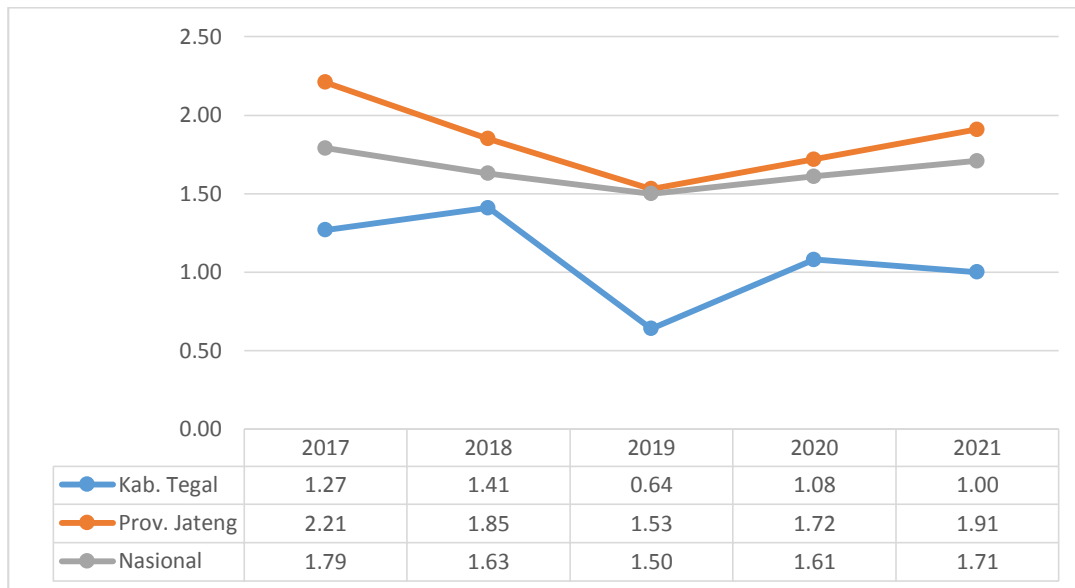


Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2022

Persentase Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah 8,60% menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Kemiskinan paling rendah adalah di Kota Pekalongan (7,59%) sedangkan Kabupaten yang kemiskinannya paling tinggi adalah Kabupaten Brebes (17,43%).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tegal dari tahun 2017 – 2021 angkanya cukup fluktuatif. Pada tahun 2017 adalah 1,27, tahun 2018 naik menjadi 1,41 selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga mencapai 0,64 namun meningkat lagi menjadi 1,08 pada tahun 2020, tahun 2021 turun menjadi 1,00. Dari angka Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Tegal cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin besar. Ada penurunan kesejahteraan pada masyarakat dengan kategori miskin di Kabupaten Tegal.

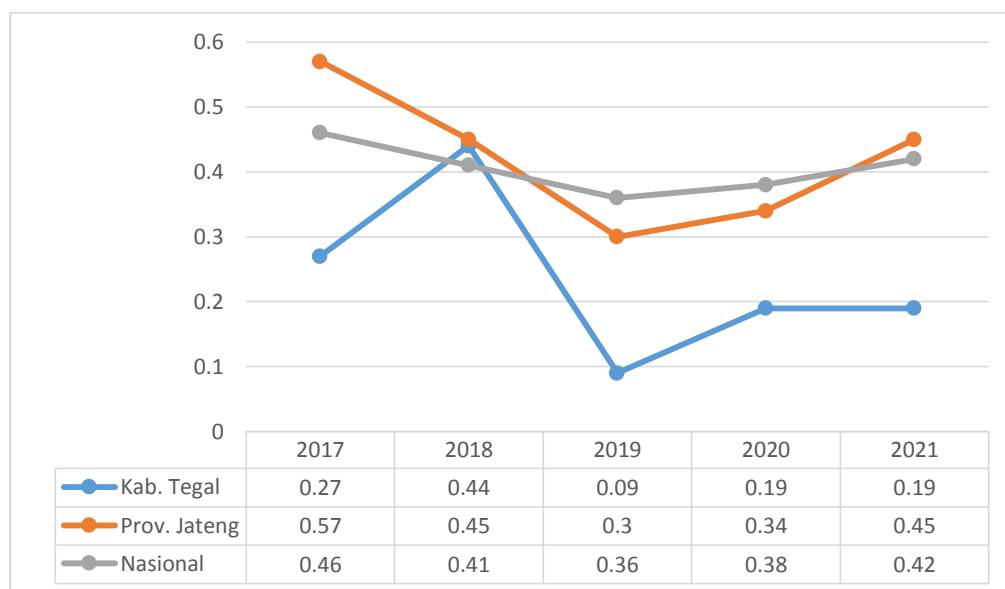
**Gambar 2. 19 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2017 - 2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*), merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin (Badan Pusat Statistik Tahun 2016). Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

**Gambar 2. 20 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2017 - 2021**

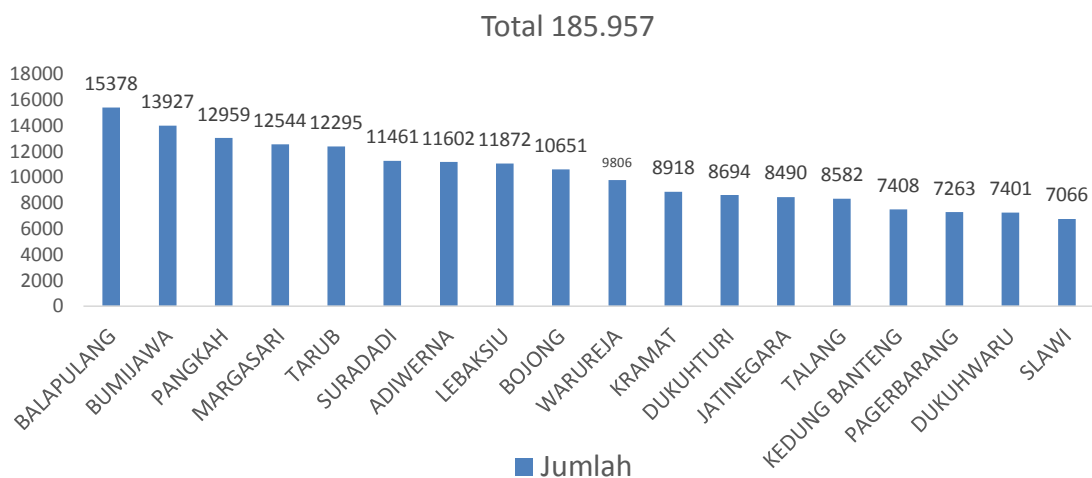


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaen Tegal dari tahun 2017 – 2021 angkanya cukup fluktuatif. Selama satu tahun terakhir cenderung naik. Dari angka Indeks Keparahan Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Tegal masih sama dengan tahun 2020. Penduduk miskin Kabupaen Tegal semakin homogen kasus/ karakter/keadaannya. Kecamatan-kecamatan dengan karakteristik perbatasan dan agraris seperti Balapulang, Bumijawa, Pangkah dan Margasari merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Tegal. Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsidi pemerintah. Dengan demikian jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan setiap tahunnya.

Penduduk miskin Kabupaten Tegal semakin heterogen kasus/karakter/keadaannya. Dari hasil Basis Data Terpadu Tahun 2019 dapat diketahui jumlah 40% penduduk dengan kesejahteraan terendah, yaitu Rumah Tangga Miskin Kabupaten Tegal sejumlah 184.070 Rumah tangga. Untuk jumlah rumah tangga miskin Kecamatan yang terbesar adalah di Kecamatan Balapulang yaitu sebanyak 15.396 Rumah tangga, sedangkan terkecil adalah Kecamatan Slawi dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 6.756 Rumah Tangga. Sebaran data untuk 18 (delapan belas) Kecamatan dapat dicermati pada gambar berikut ini.

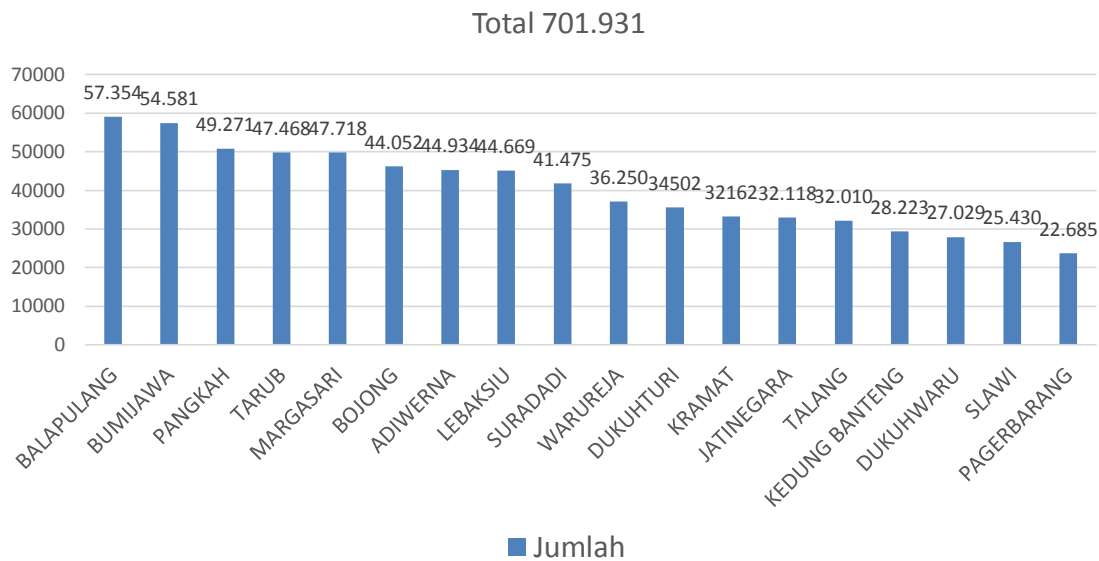
**Gambar 2. 21 Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan**



Sumber: DTKS, 2022

Untuk jumlah individu miskin Kabupaten Tegal hasil Penetapan Bulan Oktober 2020 Rekap DTKS SK No.146/HUK/2020 adalah sejumlah 701.931 individu untuk jumlah yang terbesar adalah di Kecamatan Balapulang yaitu sebesar 57.354 individu yang kedua yaitu kecamatan Bumijawa sebanyak 54.581 individu dan urutan yang ke tiga adalah kecamatan Pangkah sebanyak 49.271 individu sedangkan jumlah individu miskin yang paling sedikit adalah kecamatan Pagerbarang yaitu sejumlah 22.685 individu. Sebaran data jumlah individu miskin di seluruh Kecamatan berdasarkan Basis Data Terpadu Tahun 2020 sebagaimana gambar berikut ini.

**Gambar 2. 22 Jumlah Individu Miskin Per Kecamatan**



Sumber: DTKS, 2022

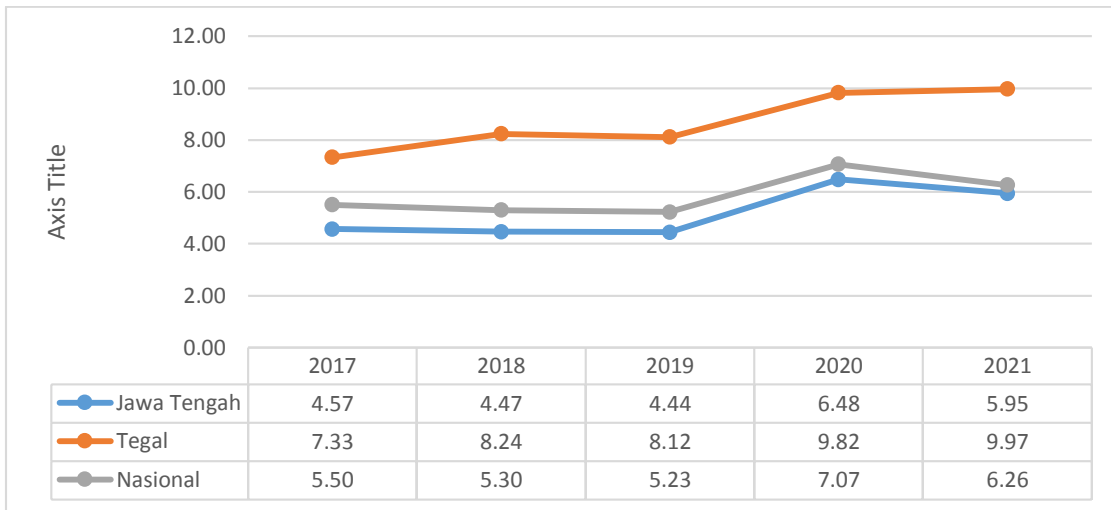
Kecamatan-kecamatan dengan karakteristik perbatasan dan agraris seperti Balapulang, Bumijawa, Pangkah dan Margasari merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Tegal. Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsidi pemerintah. Dengan demikian jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan setiap tahunnya.

#### **F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal mencapai 70.246orang atau 9,82%. Pada Tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal mencapai 71.346orang atau 9,97%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat pada Triwulan pertama tahun 2021. Peningkatan terjadi pada karakteristik: pengangguran karena *covid-19*, Bukan Angkatan Kerja karena *covid-19*, Sementara tidak bekerja karena *covid-19*, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena *covid-19*. Jenis lapangan usaha yang paling terdampak *covid-19* diantaranya industri pengolahan, konstruksi dan administrasi pemerintahan. Sementara jenis lapangan usaha yang mengalami peningkatan tenaga kerja adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; penyediaan akomodasi dan makanan minuman; serta perdagangan besar dan eceran. Sebagai perbandingan dengan kinerja penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah, dapat dicermati dalam gambar berikut:

**Gambar 2. 23 TPT Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021**

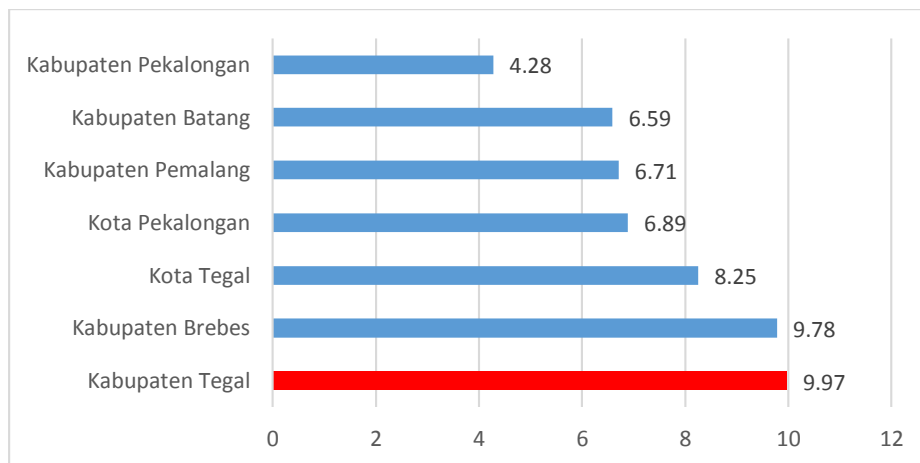


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

Angka TPT di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 masih menunjukkan angka yang relatif tinggi, yaitu 9,82% bahkan meningkat menjadi 9,97% tahun 2021. Di luar kondisi *Covid-19*, tingginya angka pengangguran di Kabupaten Tegal terjadi karena karakteristik pengangguran di Kabupaten Tegal relatif berpendidikan menengah (SMK) dan tinggi (PT). Pencari kerja di Kabupaten Tegal cenderung memilih pekerjaan yang disukai dan memilih menunda memperoleh pekerjaan ketimbang bekerja namun bukan pada pekerjaan yang diinginkan atau lebih suka menganggur.

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tegal pada Tahun 2021 menjadi salah satu fokus utama bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengambilan kebijakan pada 5 (lima) tahun ke depan. Data kinerja TPT Tahun 2021 disandingkan dengan Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 2. 24 TPT Kabupaten /Kota se Eks Karesidenan Pekalongan**



Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2022



Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah 9,97% merupakan TPT yang cukup tinggi dibandingkan dengan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan, sedangkan TPT paling rendah adalah di Kabupaten Batang (6,59%). Jika dibandingkan dengan data kinerja TPT di seluruh Provinsi Jawa Tengah, maka wilayah eks Karesidenan Pekalongan secara umum termasuk kategori tinggi TPT nya, hanya Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang yang relatif rendah. Berbagai upaya kebijakan akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada 5 (lima) tahun ke depan, antara lain dengan Program Kewirusahaan Pemuda dan pendirian Sentra Pelayanan Publik untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja pelayanan perijinan.

#### G. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka diindikasikan pembangunan manusia semakin baik. IPM Kabupaten Tegal selalu meningkat seiring waktu. Jika dilihat secara lebih detail, semua indikator penyusun IPM juga mengalami peningkatan. Sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini maka komponen Indeks Pembangunan Manusia menggunakan metode baru. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Keunggulan IPM metode baru adalah menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. IPM Kabupaten Tegal menurut metode baru tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :

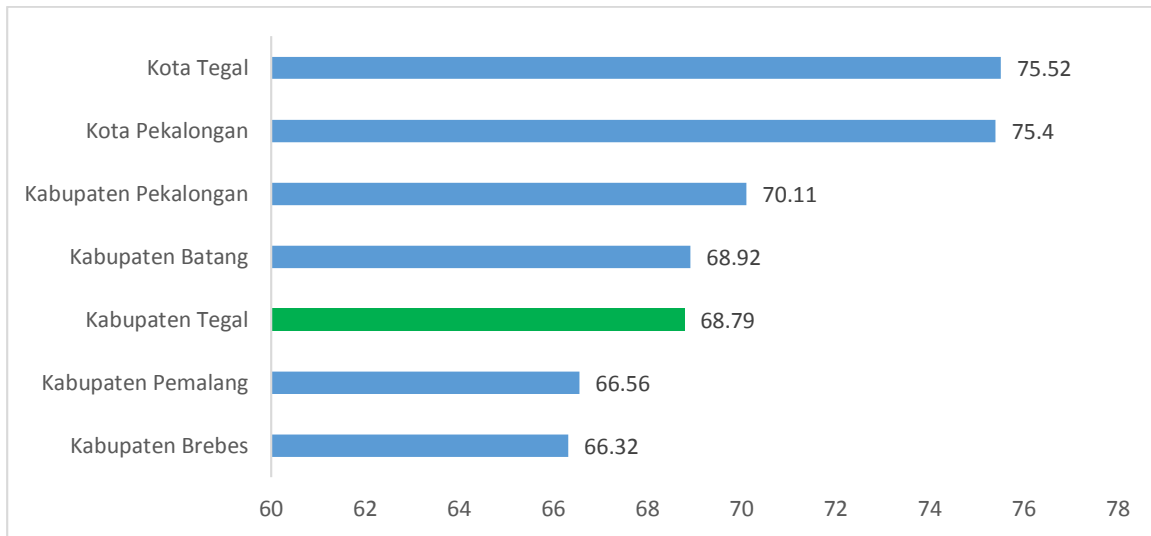
**Tabel 2. 12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2017 - 2021**

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>IPM :</b>	66,44	67,33	68,24	68,39	68,79
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,14	71,28	71,40	71,60	71,72
Harapan Lama Sekolah (EYS)	12,06	12,34	12,58	12,67	12,89
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	6,55	6,70	6,86	6,98	6,99
Pengeluaran (RibuRupiah/orang/tahun)	9.136	9.433	9.798	9.612	9.700

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karesidenan Pekalongan, pada Tahun 2021 IPM Kabupaten Tegal sebesar 68,79 % menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. IPM paling rendah adalah di Kabupaten Brebes (66,32) sedangkan IPM yang paling tinggi adalah Kota Tegal (75,52).

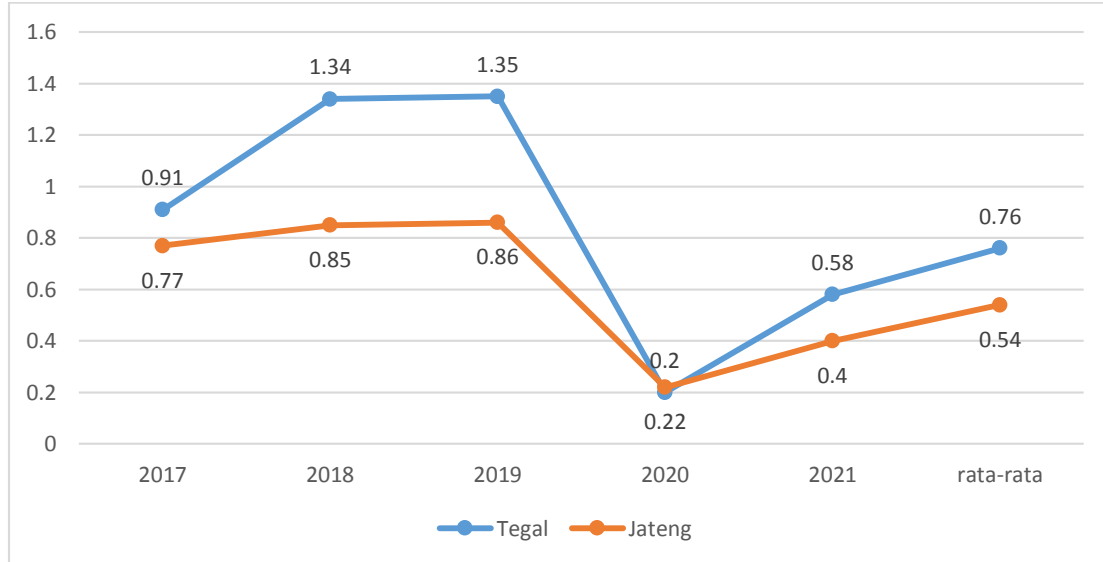
**Gambar 2. 25 IPM Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

Namun apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, meskipun secara level IPM Tegal masih dibawah Jawa Tengah, akan tetapi pemerintah Kabupaten Tegal mampu meningkatkan pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding Jawa Tengah.

**Gambar 2. 26 Pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah**



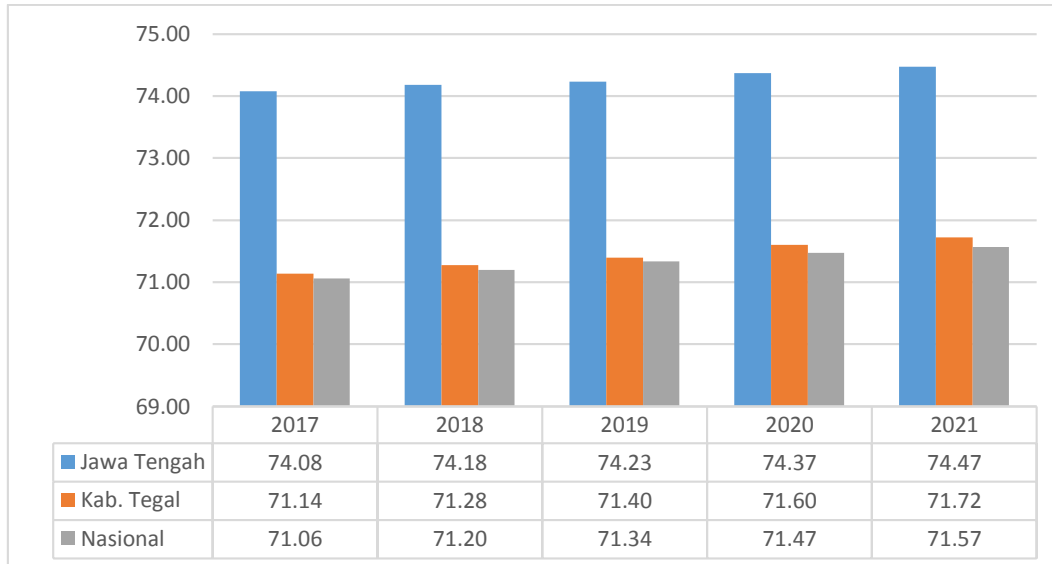
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

#### H. Angka Harapan Hidup (AHH)

AHH Kabupaten Tegal cukup tinggi. Pada tahun 2021 angkanya menunjukkan 71,72 tahun. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 71,60 tahun pada tahun 2020 atau 71,40 tahun pada tahun 2019. Tingginya AHH ini membutuhkan kebijakan penanganan lansia yang komprehensif. Semakin banyak

penduduk yang memenuhi AHH mengindikasikan jumlah lansia yang semakin banyak. Lansia yang tidak produktif akan menjadi beban dependensi rasio bagi penduduk usia.

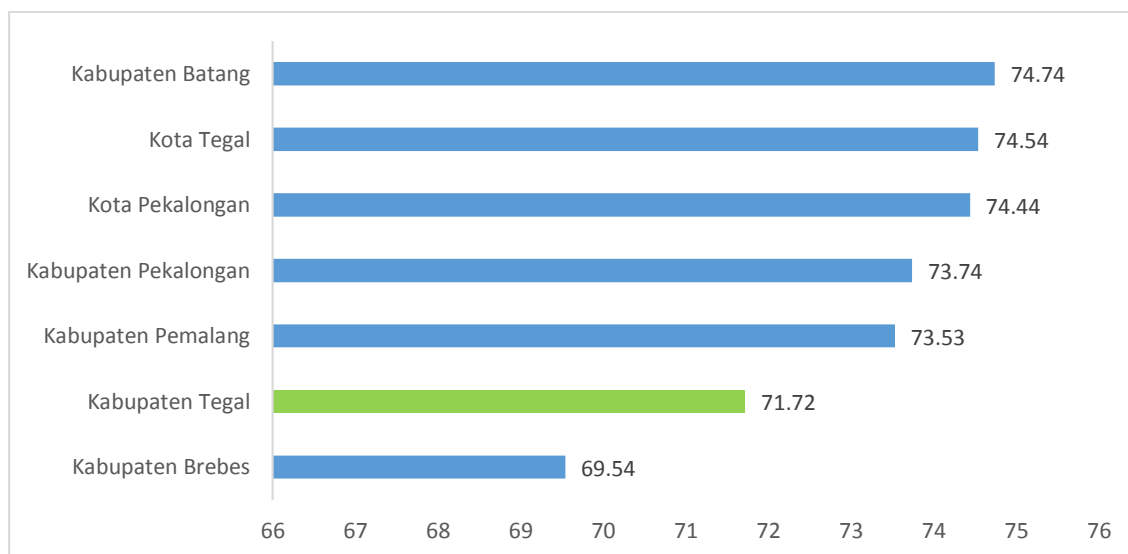
**Gambar 2. 27 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2017 – 2021**



*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022*

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, AHH Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah 71,72 tahun menduduki peringkat kedua terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Angka Harapan Hidup (AHH) paling rendah adalah di Kabupaten Brebes (69,54 tahun) sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) yang paling tinggi adalah Kabupaten Batang (74,74 tahun).

**Gambar 2. 28 Perbandingan Angka Harapan Hidup di Eks Karisidenan Pekalongan**

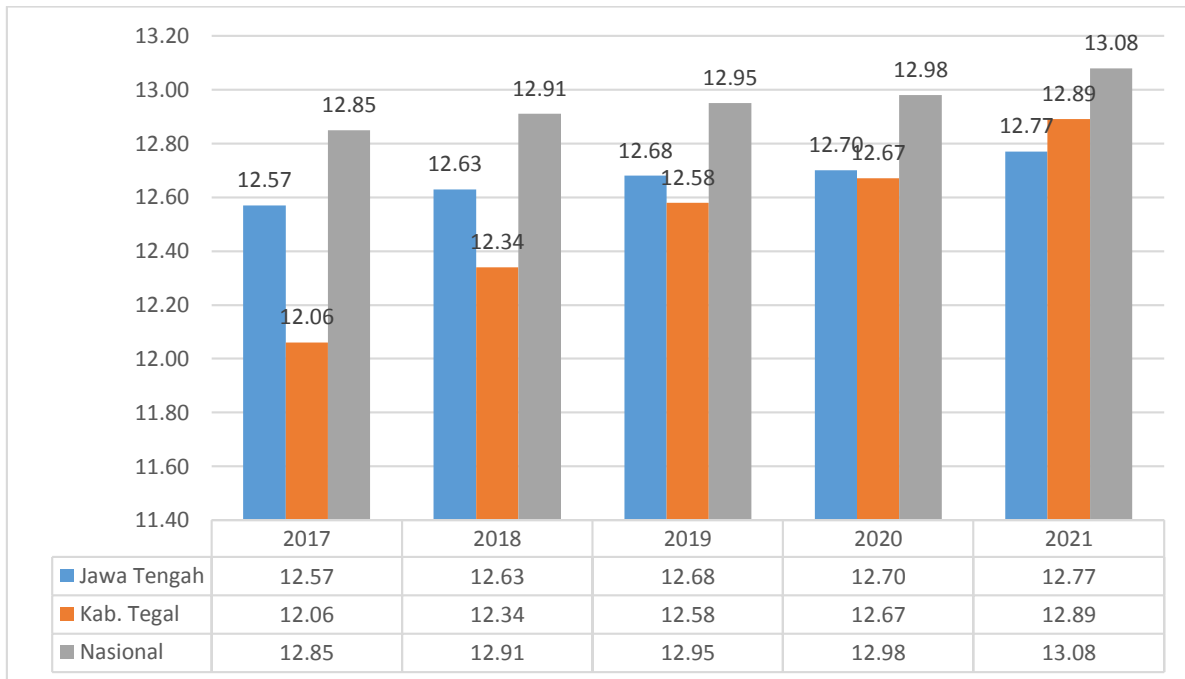


*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022*

### I. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah merupakan perhitungan seseorang berusia di atas 7 tahun dimungkinkan akan mengenyam pendidikan sepanjang hidupnya. Dari data yang ada, HLS Kabupaten Tegal menunjukkan angka yang semakin meningkat setiap tahun. Bila tahun 2019 angkanya 12,58 tahun, tahun 2020 telah menjadi 12,67 tahun dan tahun 2021 sebesar 12,89 tahun.

**Gambar 2. 29 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2017 – 2021**

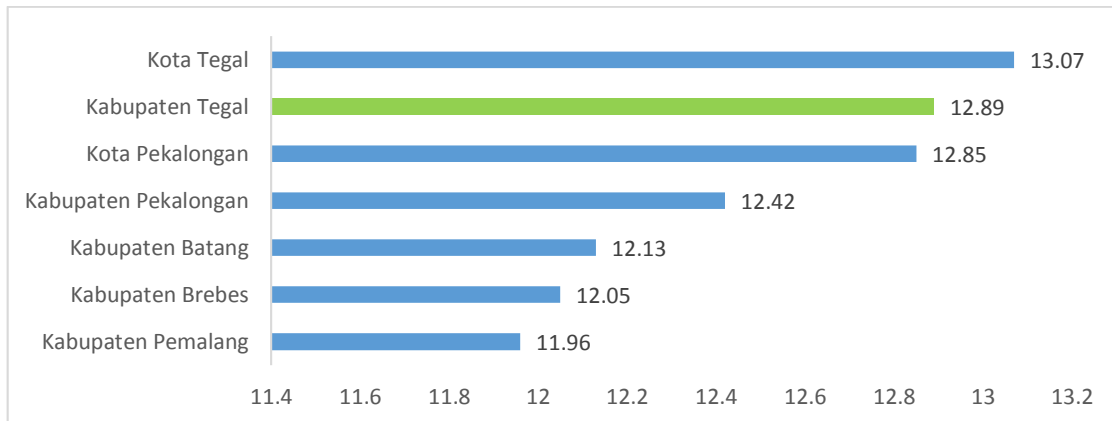


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

Mencermati angka yang ada, progres pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal cukup menggembirakan. Setiap tahun grafik peningkatan kinerjanya cukup tinggi, sehingga perlu dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah 12,89 tahun menduduki peringkat kedua tertinggi dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Harapan Lama Sekolah (HLS) paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (11,95 tahun) sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang paling tinggi adalah Kota Tegal (13,07 tahun).

**Gambar 2. 30 Perbandingan Angka HLS di Eks Karisidenan Pekalongan**

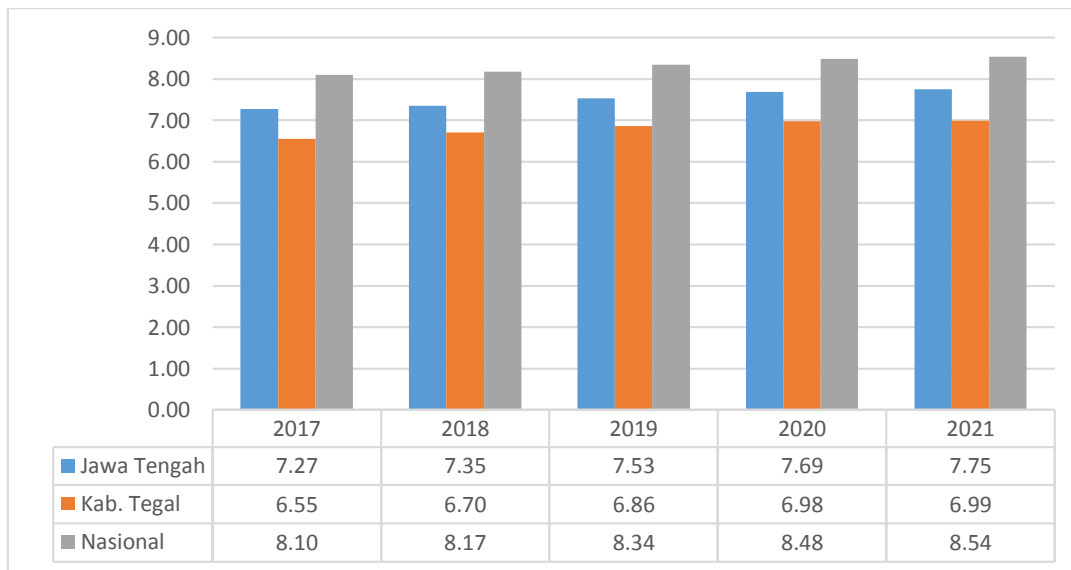


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

#### J. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tegal menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Data tahun 2019 menunjukkan angka 6,86 tahun, meningkat menjadi 6,98 tahun pada tahun 2020. tahun 2021 angkanya menjadi 6,99 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati pada gambar berikut:

**Gambar 2. 31 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2017 -2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

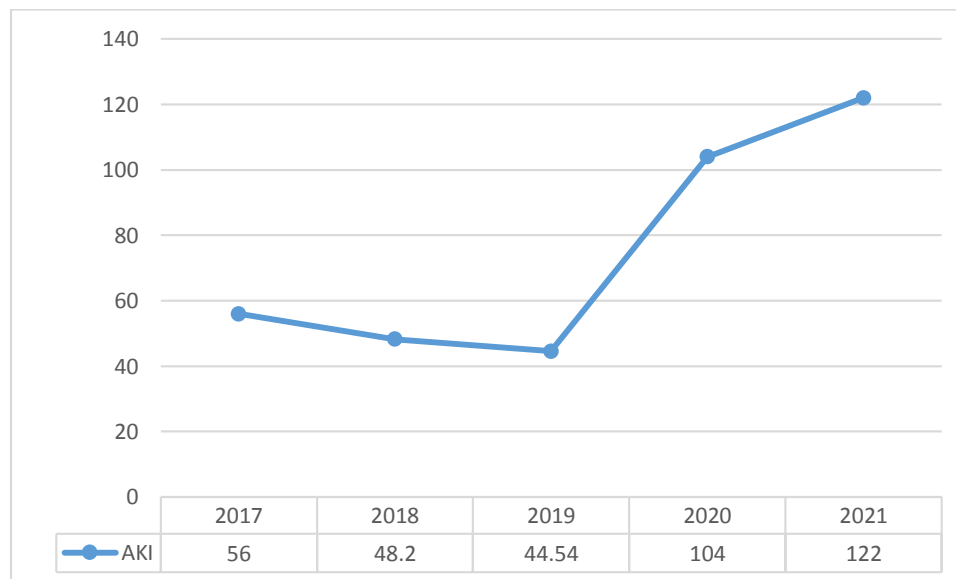
Rata-Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata setiap orang berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Tegal yang mengenyam pendidikan formal dan non formal. Dari data tahun 2017, diketahui bahwa setiap orang di Kabupaten Tegal rata-rata telah berpendidikan SMP kelas 7. Kondisi ini perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, agar rata-rata penduduk Kabupaten Tegal telah mengenyam pendidikan setingkat SMA.

#### K. Angka Kematian Ibu (AKI)

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Salah satu indikatornya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yang mencerminkan banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Kabupaten Tegal menunjukkan tren menurun dalam 5 tahun terakhir.

Angka kematian ibu dari setiap 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan. AKI Kabupaten Tegal cenderung turun dari 56 di tahun 2017 menjadi 44,5 di tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan AKI yang cukup tinggi menjadi 104 pada tahun 2020 dan 118,7 pada tahun 2021. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat pandemi COVID-19 menyebar, pelayanan kesehatan memiliki beban tambahan dalam melakukan skrining, pengujian laboratorium dan perawatan intensif, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak. AKI di Kabupaten Tegal meningkat sejak pandemi Covid-19, dari 12 kasus pada tahun 2019, meningkat menjadi 30 kasus pada tahun 2021. Penyebab kasus kematian ibu pada tahun 2021 sebagian besar karena terinfeksi virus covid 19, dari 30 kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2021, sebanyak 14 kasus (46,67%) karena terkonfirmasi Covid 19.

**Gambar 2. 32 Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2017 -2021**



*Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2022*

Upaya-upaya telah dilakukan untuk mencegah kematian ibu, terutama pada masa pandemi Covid 19 pada tahun 2020 dan tahun 2021 antara lain Posyandu tetap dilaksanakan pada daerah zona hijau dengan protokol kesehatan dan menerapkan sistem shifting sasaran serta pelaksanaan dilaksanakan di ruang terbuka, pengadaan Alat

Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan baik Rumah Sakit maupun Puskesmas, Pengadaan alat desinfektan, Pelaksanaan rapid test dan PCR, Merubah alur pelayanan di Puskesmas khususnya di PONEC dan Mampu Persalinan, Melakukan skrining semua ibu hamil dengan rapid test dan swab 10 hari sebelum HPL (Hari Perkiraan Lahir), Merujuk ibu bersalin dengan hasil rapid test reaktif atau tes PCR positif, Penambahan ruang isolasi dan ruang bersalin untuk ibu bersalin terkonfirmasi Covid 19 di rumah sakit, PONEC tetap menyediakan APD lengkap untuk menangani ibu bersalin dengan rapid test reaktif atau tes PCR positif, dan terus mensosialisasikan 5 M pada masyarakat.

Selain hal hal tersebut upaya lain yang sudah dilakukan diantaranya menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran sebagai sarana untuk mendekatkan ibu hamil risiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan, mengadakan pelatihan Peningkatan Keterampilan dan Kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatal, Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi, Pelatihan PONEC, Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti *call center* penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), data ibu hamil terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan ibu dan anak (SIKIA), puskesmas mampu persalinan, konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan KB Pasca Persalinan, Penyediaan Buku KIA, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, pemberian Makanan tambahan bagi ibu hamil KEK, pemberian TTD (Tablet Tambah Darah), Pengadaan alat kesehatan, obat puskesmas mampu persalinan dan PONEC, Pembinaan calon pengantin oleh Puskesmas, Kelas Bumil, kerja sama lintas sektor tokoh keluarga (toga) dan tokoh masyarakat (tomad), sekolah, Perangkat Daerah lain), pelaksanaan program gubernur Jawa Tengah 5NG (Jateng *Gayeng Nginceng Wong Meteng*).

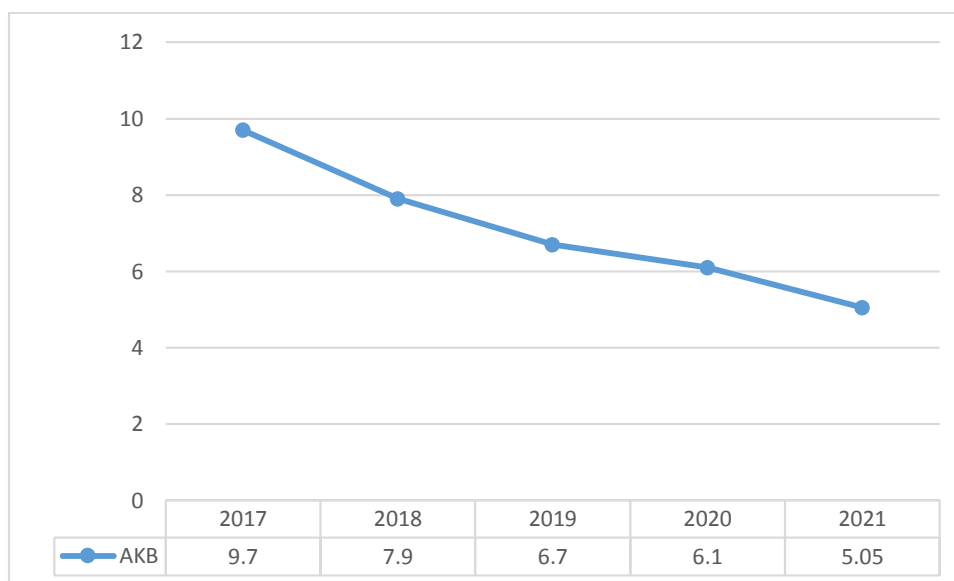
#### **L. Angka Kematian Bayi (AKB)**

Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Kematian bayi dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah, kelainan kongenital pada bayi, dan komplikasi kehamilan.

Kecenderungan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tegal dalam kurun lima tahun terakhir cenderung menurun. Angka kematian bayi dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017 sampai tahun ke tahun 2019 cenderung mengalami penurunan, dari 9,7 pada tahun 2017 menjadi 6,7 pada tahun 2019. AKB kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 6,1 hal ini terjadi sebagai akibat pandemi Covid-19 yang membatasi upaya pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir. AKB pada tahun 2021 menurun menjadi sebesar 5,1 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini lebih rendah dari AKB tahun 2020 yaitu sebesar 6,9 per 1000 kelahiran hidup.



**Gambar 2. 33 Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2017 -2021**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2022

Upaya yang sudah dilakukan yaitu mengadakan pelatihan Konseling Menyusui, Pelatihan Manajemen Asfiksia dan Berat Bayi Lahir rendah (BBLR), Audit Kematian Maternal Perinatal dan SHK, puskesmas mampu persalinan, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti *call center* penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), mengadakan rumah tunggu kelahiran, Konseling IMD dan KB Pasca Persalinan, Penyediaan Buku KIA, konseling ASI Eksklusif, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, Pengadaan alkes, obat puskesmas mampu persalinan dan PONED, kerja sama lintas sektor (toga, toma, sekolah, OPD lain), Pelatihan Kader Motivator ASI.

Dengan upaya yang dilakukan mulai dari *screening* oleh bidan dokter dan dokter spesialis serta pemantauan ibu hamil risti melalui program Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di mana semua ibu hamil risiko tinggi (risti) dipantau. Selain itu dengan klarifikasi dan Audit Maternal Perinatal (AMP) bila ada kematian menjadi pembelajaran dlm penanganan ibu hamil risti.

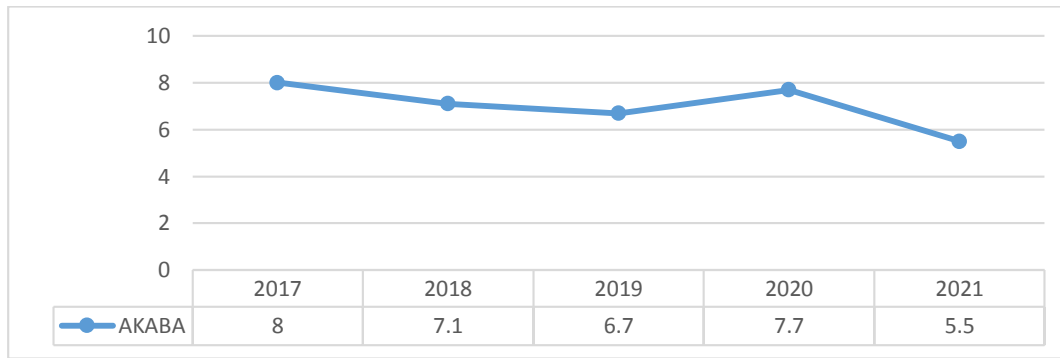
#### **M. Angka Kematian Balita (AKABA)**

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA merepresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. AKABA dapat pula menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/ Posyandu, dan kondisi sanitasi lingkungan.

AKB dan AKABA tahun 2017-2021 cenderung naik disebabkan karena kasus BBLR dan asfiksia di Kabupaten Tegal masih cukup banyak. BBLR dan asfiksia menjadi penyumbang kematian terbanyak. Hal ini disebabkan karena riwayat kehamilan ibu yang mengidap Kurang energi Kronis (KEK) atau proses persalinan tidak normal. Perlu intervensi terhadap ibu hamil KEK dengan pemberian PMT ibu hamil, untuk petugas

perlu update skill penanganan BBLR dan asfiksia. Angka kematian balita di Kabupaten Tegal sejak Tahun 2017 sampai 2021 menunjukkan tren fluktuatif. AKABA di Kabupaten Tegal pada tahun 2021 yaitu sebesar 5,5 per 1.000 kelahiran hidup, menurun jika dibandingkan AKABA tahun 2020 yaitu sebesar 7,7 per 1000 kelahiran hidup.

**Gambar 2. 34 Angka Kematian Balita (AKABA) Tahun 2017 -2021**



*Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2022*

Penyebab kematian balita antara lain infeksi pernafasan, komplikasi bayi prematur, diare, asfiksia, sepsis, cacat bawaan lahir, meningitis, dan kekurangan zat besi. Permasalahan yang terjadi selama tahun 2021, adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan posyandu balita terhenti pada saat masa darurat covid 19, serta pembatasan pelayanan posyandu setelahnya serta kebijakan pembatasan kontak langsung dengan balita saat pelayanan kesehatan.

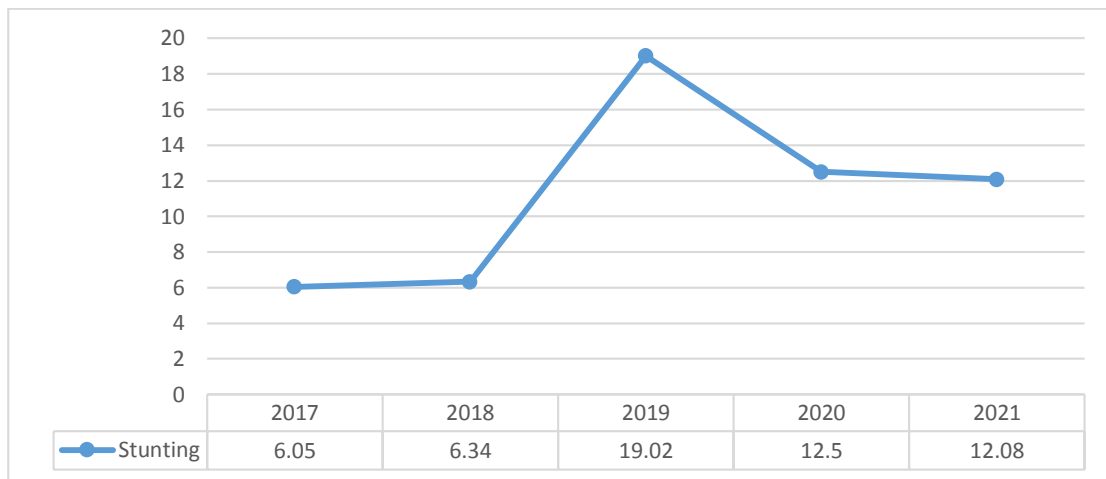
#### **N. Gizi Buruk dan Stunting**

Gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) < -3 standar deviasi WHO-NCHS dan atau ditemukan tanda - tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor.

Intervensi yang dilakukan dalam penurunan kasus stunting ini adalah intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Intervensi gizi spesifik yang dilakukan dalam 1.000 HPK dibagi menjadi 3 tahap, yaitu saat ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi usia 0-23 bulan.

Prevalensi kasus stunting akibat gizi buruk pada balita di Kabupaten Tegal terus menurun dari 19,02% di tahun 2019 menjadi 12,08% di tahun 2021. Angka ini lebih rendah dari rata-rata Jawa Tengah di angka 20%. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati gambar berikut.

**Gambar 2. 35 Kasus Stunting Kabupaten Tegal Tahun 2017 -2021**



*Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2022*

Kasus balita gizi buruk umumnya terjadi karena tidak ada makanan (faktor kemiskinan), dan ada makanan tetapi tidak diasupkan (faktor perilaku dan pola asuh). Dari kasus balita gizi buruk di Kabupaten Tegal, sebagian besar karena faktor kemiskinan, sedangkan penyebab lainnya karena perilaku dan pola asuh anak yang salah. Penyebab kedua ini biasanya terjadi karena pengetahuan orang tua tentang pemberian makanan pada bayi dan balita dengan menu gizi seimbang yang masih kurang. Kemudian kurangnya pengawasan orang tua dalam hal pola asuh/tumbuh kembang balita, karena mempercayakan pengasuhan anak pada asisten rumah tangga atau orang terdekat lain. Hal ini menyebabkan munculnya masalah kurang gizi pada balita.

Cakupan balita stunting di kabupaten tegal dari tahun 2017 sampai tahun 2021 cukup fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh mobilitas sasaran (balita) yang cukup tinggi, belum memadainya alat antropometri di posyandu, belum semua kader terampil melakukan pengukuran antropometri dengan benar, dan belum optimalnya peran lintas sektor dalam penanggulangan balita stunting.

**Tabel 2. 13 Kasus Stunting Kabupaten Tegal Tahun 2017 - 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	6.05	6.34	19.02	12.5	12.08

*Sumber: Hasil operasi timbang tahun 2016 – 2018, ePPGBM tahun 2019 – 2021  
Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2022*

Dari data hasil Operasi Timbang pada tahun 2019, angka stunting mengalami kenaikan dibanding angka tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh penanganan stunting yang belum menjadi isu strategis nasional berpengaruh terhadap pelaporan dan penanganan kejadian stunting di masyarakat. Pada tahun 2020 kasus stunting sudah mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 grafik kasus stunting meningkat lagi disebabkan antara lain karena mobilitas sasaran (Balita) cukup tinggi, belum

memadainya alat antropometri di posyandu, belum semua kader terampil dalam melakukan pengukuran antropometri dengan benar dan belum optimalnya dukungan lintas sector dalam percepatan penurunan stunting.

Mulai tahun 2019, hasil Operasi Timbang dientry ke aplikasi *e-PPGBM* (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dimana angka stuntingnya mengalami peningkatan. Peningkatan angka stunting lebih disebabkan karena proses identifikasi/penemuan kasus stunting dan masalah gizi lain yang semakin baik, sehingga rencana intervensi lebih tepat sasaran.

#### O. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender.

**Tabel 2. 14 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2017 - 2021**

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Gender	86,76	86,95	86,74	86,79	87,53

Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, 2022

IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Pada tahun 2021 IPG Kabupaten Tegal tercatat sebesar 87,53 naik 0,75 poin dibanding IPG tahun 2020. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Namun demikian hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Kabupaten Tegal masih terlihat jelas cenderung menguntungkan kepada penduduk laki-laki. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding IPM.

#### P. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, Kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Tegal yang diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan fluktuasi kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2020. Perkembangan IDG Kabupaten Tegal tahun 2017-2020 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini. Angka tahun 2021 sampai saat ini belum dirilis dan akan dirilis paling cepat di akhir bulan April tahun 2022.

**Tabel 2. 15 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2017 - 2021**

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Pemberdayaan Gender	51,15	68,90	69,25	72,12	72,32

Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, 2022

Angka IDG tersebut menunjukkan masih cukup rendahnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Data yang dirilis BPS dari tahun 2017-2020. Data tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan. Data tahun 2021 adalah 72,32.

**Q. Pemuda dan Olahraga**

Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda. Selanjutnya banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Jumlah Organisasi Pemuda sejak Tahun 2016 – 2020 sebanyak 33 organisasi, sementara jumlah Gelanggang / Balai Remaja sebanyak 273 buah.

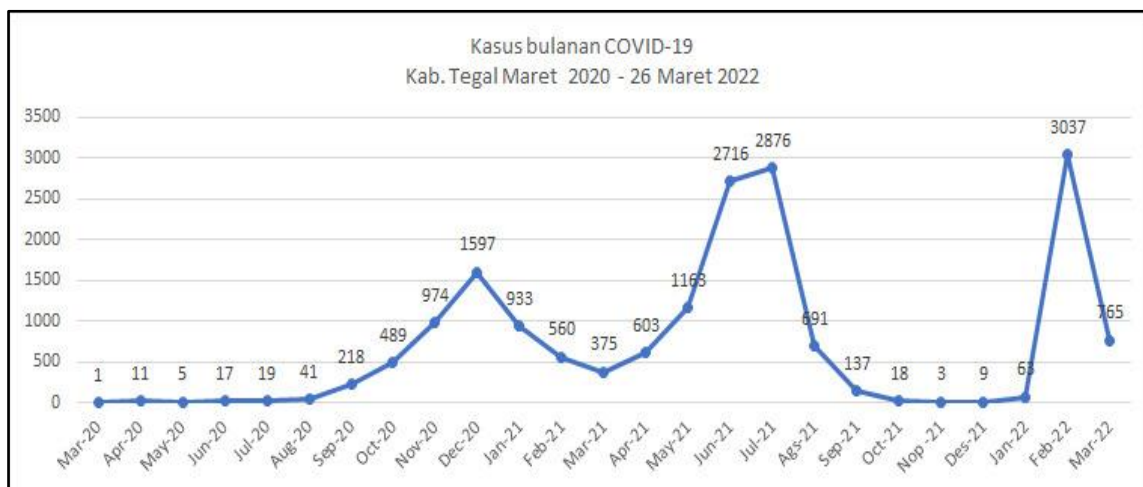
Salah satu upaya pemberdayaan pemuda melalui penumbuhan wirausaha muda pemula berbasis kinerja bisnis. penumbuhan wirausaha muda pemula berbasis kinerja bisnis dilakukan sejak tahun 2019 dengan skema kompetisi. Pada tahun 2019 jumlah pendaftar wirausaha muda pemula berbasis kinerja bisnis sebanyak 401 orang dan tahun 2020 sebanyak 398 orang. Dari jumlah itu diseleksi sebanyak 100 orang untuk mendapatkan fasilitasi pelatihan dan pendampingan penyusunan rencana bisnis. Dari 100 orang yang menyusun rencana bisnis dipilih 50 orang untuk melakukan presentasi rencana bisnis. Dari 50 orang yang melakukan presentasi rencana bisnis ditetapkan 28 orang mendapatkan insentif masing-masing Rp.15 juta untuk pengembangan usaha.

**R. Pandemi Covid-19**

Pandemi *covid-19* di Indonesia dimulai ketika awal maret 2020. Tepatnya pada 2 Maret 2020, pemerintah melaporkan 2 orang yang terkonfirmasi *covid-19*. Pemerintah menetapkan *covid-19* sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian disusul Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan bahwa wabah *covid-19* sebagai bencana nasional.

Kabupaten Tegal juga tidak lepas dari *pandemic covid-19*. Sampai bulan Maret tahun 2022 tercatat sebanyak 16.821 orang terkonfirmasi *covid-19*. Situasi *covid-19* terkini di Kabupaten Tegal selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2. 36 Trend Bulanan Perkembangan Covid-19 di Kabupaten Tegal  
Bulan Maret 2020 – Februari 2021**



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tegal (<https://covid19.tegalkab.go.id/>)

Dengan melihat trend kasus *covid-19* diatas, maka Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam Percepatan Penanganan *covid-19* di Kabupaten Tegal yaitu dengan upaya penyembuhan pasien *covid-19* dengan tetap melakukan tindakan preventif. Pemerintah Kabupaten Tegal saat ini telah melakukan langkah *preventif* yang terukur, jelas dan objektif seperti penerapan PHBS (Perilaku hidup bersih dan sehat) dengan selalu cuci tangan & penyediaan tempat cuci tangan / hand sanitizer, kewajiban penggunaan masker, penyemprotan desinfektan, tetap di rumah dan larangan bepergian, *social distancing*, *physical distancing* dll.

Secara umum pencegahan penularan *covid-19* adalah phisical and social distancing (pembatasan fisik dan sosial). Dampak ikutan dari kebijakan phisical and social distancing adalah berkurangnya aktivitas masyarakat. Pengurangan aktivitas masyarakat ini berkorelasi dengan perlambatan ekonomi yang sedang terjadi. Akibatnya masyarakat miskin semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasar (subsisten/pangan). Masyarakat rentan miskin juga dihadapkan pada situasi berkurang atau hilangnya pendapatan sehingga daya beli menurun. Sehubungan dengan hal tersebut dibuthkan kebijakan jaring pengaman sosial (social safety net) kepada warga miskin dan warga rentan miskin berupa bantuan pangan.

Dalam situasi *covid-19* ini, jumlah penduduk yang terdampak yang kemudian miskin atau rentan miskin dimungkinkan bertambah. Kelompok ini tergabung sebagai kelompok penduduk di luar DTKS atau penduduk miskin terdaftar DTKS yang belum mendapat fasilitasi program.

Dalam hal perekonomian masyarakat di Kabupaten Tegal, berbagai sektor perekonomian baik formal maupun informal, dari skala besar hingga kecil melaporkan penurunan pendapatan hingga mengalami kerugian yang cukup besar. Banyak pelaku usaha mengalami gangguan rantai pasok baik di level domestik maupun internasional (ekspor/impor), serta penurunan drastis permintaan akan barang-barang non-esensial (durable), yang selanjutnya bisa mengganggu neraca keuangan perusahaan bahkan bisa berujung kebangkrutan. Hal tersebut memaksa banyak perusahaan merumahkan

bahkan mem-PHK karyawannya. Pada sektor (perdagangan) informal, pelaku usaha mikro, pedagang eceran, serta pelaku usaha transportasi mengalami dampak yang cukup berat dari berkurangnya omset usaha hingga yang paling ekstrem kehilangan mata pencaharian. Pelaku usaha transportasi mulai dari tukang ojek online, ojek pangkalan, kusir andong, sopir angkot, tukang becak yang sebagian besar beroperasi di Kecamatan Slawi dan Adiwerna dengan jumlah tidak kurang dari 2.765 orang dilaporkan pendapatannya menurun hingga 26,02%. Bahkan ada risiko kenaikan harga kebutuhan pokok karena distribusinya terganggu. Selain itu sektor-sektor di Kabupaten Tegal yang juga diperkirakan terpukul dengan kondisi ini diantaranya industri pariwisata (perhotelan, agen perjalanan, bisnis hiburan, dan usaha kuliner), industri manufaktur khususnya yang padat karya dan bergantung pada ekspor-impor, dan sektor konstruksi.

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu: fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

#### 2.1.3.1 Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar

##### A. Pendidikan

##### 1) Akreditasi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Di era berkembang sekarang ini pendidikan sangat memiliki peran sangat penting terhadap perkembangan seseorang, pendidikan di arahkan dengan berbagai segalah macam kemudahan untuk mengasah pengetahuan setiap peserta didik, artinya bahwa peningkatan mutu pendidikan itu sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan, sebagai bagian dari tujuan pendidikan itu sendiri mengedepankan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang diharapkan mengacu pada hasil kelulusan dari setiap peserta didik, untuk mendapatkan hasil lulusan yang baik, diperlukan berbagai macam trobosan-trobosan baru untuk mengatar peserta didik lebih unggul dalam berbagai pengetahuan. Artinya kemajuan peserta didik harus diwujudkan dengan proses pembelajaran yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, professional, unggul, berpandangan jauh kedepan (visioner) memiliki percaya dan harga diri yang tinggi. Mutu pendidikan merupakan hasil dari penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari 8 standar. Kedelapan standar tersebut adalah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Untuk melihat penerapan SNP masing-masing satuan pendidikan, maka perlu dilakukan akreditasi masing-masing satuan pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional baik BAN S/M maupun BAN PAUD dan Pendidikan Non Formal.

**Tabel 2. 16 Peringkat Akreditasi Jenjang Pendidikan  
Tahun 2017 - 2021**

Tahun	Jenjang	Peringkat	Status		Jumlah	Persentase TerAkreditasi	Persentase Akreditasi
			Negeri	Swasta			
2017	PAUD	A	1	1	2	3,77	57,52
		B	1	17	18		



Tahun	Jenjang	Peringkat	Status		Jumlah	Persentase TerAkreditasi	Persentase Akreditasi		
			Negeri	Swasta					
			C		10			10	
	TT		765	765					
	SD	A	215	9	224	98,14			
		B	430	6	436				
		C	24	3	27				
		TT	6	7	13				
	SMP	A	38	9	47	90,65			
		B	6	22	28				
		C	3	19	22				
		TT	1	9	10				
	KESETARAAN	A	1		1	37,50			
		B		6	6				
		C		2	2				
		TT		15	15				
	2018	PAUD	A	1	2	3		7,79	62,01
			B	1	45	46			
C				13	13				
TT				734	734				
SD		A	218	9	227	98,57			
		B	433	6	439				
		C	21	3	24				
		TT	3	7	10				
SMP		A	38	9	47	91,67			
		B	6	22	28				
		C	3	21	24				
		TT	2	7	9				
KESETARAAN		A	1	2	3	50,00			
		B		8	8				
		C		1	1				
		TT		12	12				
2019	PAUD	A	2	6	8	10,84	66,66		
		B		59	59				
		C		21	21				
		TT		724	724				
	SD	A	219	9	228	98,72			
		B	442	6	448				
		C	13	3	16				
		TT	1	8	9				
	SMP	A	38	9	47	94,59			
		B	6	26	32				
		C	3	23	26				
		TT	2	4	6				

Tahun	Jenjang	Peringkat	Status		Jumlah	Persentase TerAkreditasi	Persentase Akreditasi
			Negeri	Swasta			
	KESETARAAN	A	1	3	4	62,50	
		B		10	10		
		C		1	1		
		TT		9	9		
2020	PAUD	A	2	6	8	10,73	73,30
		B		59	59		
		C		21	21		
		TT		732	732		
	SD	A	222	13	235	99,29	
		B	439	7	446		
		C	13	2	15		
		TT	1	4	5		
	SMP	A	39	7	46	83,19	
		B	6	26	32		
		C	2	14	16		
		TT	2	17	19		
	KESETARAAN	A	1	6	7	100,00	
		B	0	12	12		
		C	0	5	5		
		TT	0	0	0		
2021	PAUD	A	2	11	13	14,06	75,54
		B		65	65		
		C		40	40		
		TT		721	721		
	SD	A	235	14	249	99,42	
		B	426	6	432		
		C	0	0	0		
		TT		4	4		
	SMP	A	41	7	48	88,70	
		B	10	28	38		
		C		16	16		
		TT		13	13		
	KESETARAAN	A	1	6	7	100,00	
		B	0	12	12		
		C	0	5	5		
		TT	0	0	0		

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2022

## 2) Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten

Tegal. Adapun data tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai Tabel berikut ini.

**Tabel 2. 17 Tingkat Partisipasi PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2017- 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	APM PAUD	25,34	54,66	25,76	69,54	47,31
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	N/a	N/a	N/a	79,86	85,05
3.	Tingkat Kelulusan PAUD	100	100	100	100	100
4.	Tingkat Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	N/a	N/a	N/a	97,25	96,55
5.	Tingkat Kelulusan :					
	~ Paket A	100	99,99	100	100	100
	~ Paket B	99,97	99,96	99,96	99,77	100
	~ Paket C	N/a	N/a	N/a	99,76	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2022

Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD tahun 2021 adalah 85,05 naik dari tahun 2020 yang hanya 79,86 sedangkan APM PAUD adalah 47,31 turun dari tahun 2020 yang mencapai 69,54. Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung ini merupakan faktor yang mempengaruhi nilai APM PAUD tersebut karena efek Pandemi tersebut bersifat global dan di segala aspek kehidupan termasuk pendidikan. Tingkat kelulusan PAUD relatif stabil yaitu 100% dari tahun ke tahun. Tingkat partisipasi pendidikan kesetaraan baru di hitung mulai tahun 2020. Pada tahun 2021 yaitu sebesar 96,55% menurun sedikit dari tahun 2020. Tingkat kelulusan Paket A, B dan C dari tahun ke tahun relatif stabil yaitu 100%.

Sebagai dukungan terhadap prioritas Propinsi terkait penanganan anak tidak sekolah, maka Kabupaten Tegal menyelenggarakan kebijakan Yuh Sekolah Maning. Kegiatan Yuh sekolah maning sudah dilaksanakan sejak tahun 2019. Pendataan dilakukan oleh unsur kecamatan hingga unsur desa. Hasil dari pendataan tersebut adalah anak-anak yang putus sekolah yang kemudian di daftarkan ke sekolah non formal melalui pendidikan yang ada di satuan pendidikan nonformal melalui PKBM. Pada tahun 2019 tercatat ada 341 siswa Paket A dan 796 siswa Paket B. Pada tahun 2020 tercatat ada 99 siswa Paket A dan 306 siswa Paket B. Pada tahun 2021 tercatat ada 335 siswa Paket A dan 778 siswa Paket B. Terdapat peningkatan jumlah siswa *Yuh Sekolah Maning* di tahun 2021 mudah-mudahan wabah Pandemi Covid-19 berangsur pulih sehingga bisa menuntaskan anak putus sekolah di Kabupaten Tegal.

### 3) Pembinaan Sekolah Dasar

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, capaian kinerja dari program pembinaan Sekolah Dasar (SD) dapat terlihat dari beberapa uraian indikator. Adapun data capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. 18 Tingkat Partisipasi SD dan Kelulusan Tahun 2017-2021**

No	Uraian Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	APM SD/MI	101,01	98,27	96.49	102.83	80,08
2	APK SD/MI	111.52	105.67	104.40	109.66	95,71
3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	93.04	93.03	87.47	107.03	92,73
4	Angka Putus Sekolah SD	0,03	0,04	0,06	0.48	0.03
5	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	100	99,99	100	77.12	75.63
6	Sarana Prasarana SD baik	70,68	70,78	135,59	99.76	99.78

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2022*

Angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar SD/MI yang fluktuatif dari tahun ke tahun akan tetapi menunjukkan semakin tingginya APK dan APM SD/MI. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar juga fluktuatif. Memasuki tahun 2021 nilai APK dan APM SD/MI serta tingkat partisipasi cenderung menurun karena tahun 2021 merupakan tahun kedua dari wabah Pandemi Covid-19 dimana efek dari Pandemi tersebut makin terasa sehingga berpengaruh pada semua aspek kehidupan terutama dalam hal kemampuan ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap angka putus sekolah SD. Angka putus sekolah SD dari tahun 2017 - 2019 mengalami penurunan akan tetapi di tahun 2020 mengalami kenaikan hal ini terjadi karena di tahun 2020 terjadi pandemi covid-19. Begitu juga di tahun 2021 yang notabene merupakan tahun kedua Pandemi Covid-19 dimana efek dari wabah tersebut juga masih dirasakan akan tetapi angka putus sekolah cenderung menurun dibanding tahun 2021 yaitu 0,03 sedangkan tahun 2020 adalah 0,48. Rata-rata nilai kelulusan SD cenderung stabil di tahun 2017 - 2019 namun terjadi penurunan di tahun 2020 dan 2021. Penurunan rata-rata nilai kelulusan SD terjadi sama halnya dengan angka putus sekolah karena di tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang berpengaruh pada semua aspek kehidupan terutama dalam bidang ekonomi. Sarana prasarana SD Baik dari tahun ke tahun sudah semakin baik hal ini berarti ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar di tingkat SD. Pengukuran Sarpras di tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana di tahun sebelumnya dihitung dari presentase ruang kelas dan presentase perpustakaan sedangkan di tahun 2020 dihitung dari presentase ruang kelas dan MCK begitu juga dengan tahun 2021.

#### **4) Pembinaan Sekolah Menengah Pertama**

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, capaian kinerja dari program pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat terlihat dari beberapa uraian indikator. Adapun data capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 19 Tingkat Partisipasi SMP dan Kelulusan Tahun 2017-2021**

No	Uraian Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	APM SMP/MTs	96,23	83,60	95,69	89,25	68,16
2	APK SMP/MTs	111,51	94,71	119,78	132,78	86,59
3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	91,18	77,37	78,29	105,99	72,71
4	Angka Putus Sekolah SMP	0,03	0,10	0,13	0,86	0,41
5	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	99,97	99,96	99,96	78,46	89,67
6	Sarana Prasarana SMP baik	89,33	89,33	73,92	99,22	99,86

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2022

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs cenderung fluktuatif, akan tetapi di tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan. Penurunan signifikan ada pada tahun 2021 yaitu 68,16. Tahun 2021 memasuki tahun kedua Pandemi Covid-19 dimana efeknya masih terasa di tahun kedua Pandemi. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs juga fluktuatif akan tetapi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sama halnya dengan APM, APK SMP/MTs dan Tingkat Partisipasi juga turun pada tahun 2021 yaitu berturut-turut 86,59 dan 72,71. Angka putus sekolah dari tahun 2016-2019 semakin baik hal ini ditandai dengan angka putus sekolah yang mengalami penurunan, akan tetapi di tahun 2020 terjadi kenaikan angka putus sekolah. Hal ini terjadi karena adanya pandemi *covid-19* yang berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan sehingga ekonomi masyarakat menjadi lemah yang kemudian berpengaruh pada presentase anak putus sekolah. Hal ini terjadi pula di tahun 2021 yaitu 0,41 yang tergolong cukup tinggi. Akan tetapi menurun dibanding angka tahun 2020. Rata-rata nilai kelulusan SMP sama halnya dengan angka putus sekolah di tahun 2016-2019 semakin baik akan tetapi di tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan hal ini juga terjadi karena adanya pandemi *covid-19* yang berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan sehingga ekonomi masyarakat menjadi lemah yang kemudian berpengaruh pada rata-rata nilai kelulusan SMP. Sarana prasarana SMP baik dari tahun ke tahun juga fluktuatif akan tetapi cenderung meningkat. Pengukuran Sarpras di tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana di tahun sebelumnya dihitung dari presentase ruang kelas dan presentase perpustakaan sedangkan di tahun 2020 dihitung dari presentase ruang kelas dan MCK. Begitu juga di tahun 2021.

## 5) Pengembangan Kurikulum

**Tabel 2. 20 Persentase Muatan Lokal Tahun 2017 - 2021**

No	Uraian Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase muatan lokal dalam KBM	5.26	5.26	5.26	5.00	5.26

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2022*

Berdasarkan Tabel di atas maka persentase muatan lokal dalam KBM cenderung stabil sejak tahun 2017-2021. Pada tahun 2020 di jenjang SD terdapat muatan lokal Bahasa Daerah dengan alokasi 2 jam pelajaran dalam 1 minggu sedangkan jumlah jam pelajaran selain muatan lokal ada 36 jam pelajaran sehingga totalnya menjadi 38 jam pelajaran. Pada jenjang SMP terdapat muatan lokal Bahasa Daerah dengan alokasi 2 jam pelajaran dalam 1 minggu sedangkan jumlah jam pelajaran selain muatan lokal ada 38 jam pelajaran sehingga totalnya menjadi 40 jam pelajaran.

Penanaman jiwa kewirausahaan pada siswa dapat membentuk karakter wirausaha. Sehingga setiap siswa mempunyai pola pikir wirausaha sejak dini dimana dari pola pikir wirausaha tersebut siswa dapat memunculkan ide-ide kreatifnya. Secara jangka panjang ke depan jika bisa menjadi wirausaha maka akan memberikan banyak peluang kerja bagi masyarakat. Penanaman jiwa kewirausahaan dalam bentuk pembuatan soal-soal/materi yang menunjukkan adanya jiwa wirausaha.

## 6) Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pembinaan atau pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan (sekolah). Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Suatu program pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan biasanya diselenggarakan atas asumsi adanya berbagai kekurangan dilihat dan tuntutan organisasi, atau karena adanya kehendak dan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri. Beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pembinaan tenaga kependidikan ini yaitu:

1. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan patut dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan baik untuk tenaga struktural, tenaga fungsional maupun tenaga teknis penyelenggara pendidikan.
2. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan profesional dan atau teknis untuk pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan posisinya masing-masing.
3. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan untuk mendorong

meningkatnya kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidikan atau sistem sekolah; dan menyediakan bentuk- bentuk penghargaan, kesejahteraan dan insentif sebagai imbalannya guna menjamin terpenuhinya secara optimal kebutuhan sosial ekonomis maupun kebutuhan sosial-psikologi.

4. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan/posisi, baik karena kebutuhan-kebutuhan yang berorientasi terhadap lowongan jabatan/posisi di masa yang kan datang.
5. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sebenarnya dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, pemecahan masalah, kegiatan-kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja dan ketahanan organisasi pendidikan. Menyangkut pembinaan dan jenjang karir tenaga kependidikan disesuaikan dengan kategori masing-masing jenis tenaga kependidikan itu sendiri. Meskipun demikian, dapat saja berjalan karir seseorang menempuh puncak karirnya.

Output program pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan salah satunya adalah terpenuhinya rasio antara guru dan jumlah murid. Adapun perhitungan rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Adapun perkembangan jumlah guru dan murid serta rasio ketersediaan guru dengan siswa berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Tegal tahun 2017 sd 2021 dengan catatan jumlah guru disini adalah guru PNS yang dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 21 Jumlah Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021**

No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>SD</b>					
1.1.	Jumlah Guru	2.885	2.641	3.783	3.395	5.869
1.2.	Jumlah Murid	126.809	126.072	131.269	159.481	126.665
1.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1:43,95	1:47,74	1:34,70	1:46,98	1:21,58
<b>2</b>	<b>SMP</b>					
2.1.	Jumlah Guru	1.276	1.228	1.235	1.447	2.395
2.2.	Jumlah Murid	31.715	35.590	46.303	79.764	47.423
2.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1:24,86	1:28,98	1:37,49	1:55,12	1:19,80

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2022

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa perbandingan antara guru dengan jumlah murid untuk tingkat SD pada tahun 2017 perbandingan jumlah guru dan murid sebesar 1:43,95 (jumlah guru 2.885 orang berbanding dengan jumlah murid sebanyak 126.809 murid) sampai dengan tahun 2021 cenderung membaik mencapai 1: 21,58 (jumlah guru 5.8691 sedangkan jumlah murid 126.665) sedangkan rasio ideal guru dan murid untuk jenjang pendidikan SD adalah 1 : 29. Dengan kata lain bahwa ketersediaan guru jenjang pendidikan SD di Kabupaten Tegal sudah ideal. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan jumlah guru diantaranya

banyaknya guru yang memasuki masa purna tugas (pensiun) dan kematian sedangkan pengadaan guru baru (CPNS) jumlahnya terbatas. Perlu diketahui jumlah guru disini mencakup guru ASN dan non ASN.

Adapun untuk tingkan SMP pada tahun 2017 perbandingan jumlah guru dan murid sebesar 1 : 24,86 (jumlah guru 1.276 orang berbanding dengan jumlah murid sebanyak 31.715 murid) meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 1 : 19,80 (jumlah guru 2.395 orang berbanding dengan jumlah murid sebanyak 47.423 murid), sedangkan rasio ideal guru dan murid untuk jenjang pendidikan SMP adalah 1 : 24. Dengan kata lain bahwa ketersediaan guru jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Tegal sudah ideal. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan jumlah guru diantaranya banyaknya guru yang memasuki masa purna tugas (pensiun) dan kematian sedangkan pengadaan guru baru (CPNS) jumlahnya terbatas.

Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata adalah jumlah guru per kelas per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar perkelas. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru perkelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. Kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2017-2021 dengan catatan menghitung jumlah guru PNS, sebagaimana di bawah ini.

**Tabel 2. 22 Rasio Guru per Kelas dan Rasio Guru per Mapel Tahun 2017 -2021**

No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
	Rasio guru/Kelas	1:0,25	1:0,3	1:0,8	1:1,29	1:1,24
2.	SMP/MTs					
	Rasio guru/Mapel	1:1:31	1:1:32	1:1:28	1:1:25,73	1:1:39,7

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2022

Dari isian tabel tersebut diatas bahwa untuk Rasio Guru Per Kelas, Rasio Guru per mata pelajaran. Rasio guru per kelas jenjang SD di tahun 2020 adalah 1 banding 1,24 ini berarti 1 guru memegang 1 kelas. Hal ini berarti sudah memenuhi kriteria ideal 1 guru 1 kelas. Rasio guru per mapel jenjang SMP adalah 1 banding 39,7 jam pelajaran. Hal ini tidak mengalami perubahan di tahun 2021. Berikut pula Tabel rasio guru per jenjang pendidikan.

**Tabel 2. 23 Rasio Guru per Kelas dan Rasio Guru per Jenjang Pendidikan Tahun 2017 -2021**

No	jenjang pendidikan	Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Guru Kelas PAUD	N/a	N/a	N/a	23	12,66
2	Rasio Guru Kelas TK	N/a	N/a	N/a	3,16	3,47
3	Rasio Guru Kelas SD	N/a	N/a	N/a	1,8	1,24
4	Guru Mapel PAI	N/a	N/a	N/a	3	3
5	Guru Mapel PJOK	N/a	N/a	N/a	2,9	2,7
6	Rasio Guru Mapel SMP	31	32	28	27,19	39,7
7	Rasio Guru Mapel Paket A	N/a	N/a	N/a	1,26	1,26
8	Rasio Guru Mapel Paket B	N/a	N/a	N/a	0,95	0,95
9	Rasio Guru Mapel Paket C	N/a	N/a	N/a	0,38	0,42

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2022



## 7) Pengendalian Perizinan

Setiap satuan pendidikan sebelum menyelenggarakan pendidikan harus mempunyai izin penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa sekolah yang bernaung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dari tahun 2017-2021 sudah mempunyai izin operasi.

**Tabel 2. 24 Perizinan Sekolah Tahun 2017-2021**

No	Jenjang	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	PAUD (TK, KB, TPA, SPS)	2	793	2	794	2	793	2	794	2	837
2	SD	675	25	675	25	675	25	675	25	655	30
3	SMP	48	59	49	59	48	59	49	59	49	67
4	KESETARAAN	1	23	1	23	1	23	1	23	1	23

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2022

## 8) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Menumbuhkan rasa kecintaan terhadap budaya-budaya di Indonesia terutama budaya yang ada di Jawa pada siswa merupakan salah satu langkah untuk dapat memunculkan rasa nasionalisme yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya pengembangan Bahasa dan Sastra. Berikut ini adalah Tabel Penggunaan Bahasa Daerah yang digunakan di sekolah:

**Tabel 2. 25 Penggunaan Bahasa Daerah di Sekolah**

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26
2	SMP	5.26	5.26	5.26	5.00	5.00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2022

Berdasarkan data pada tabel tersebut maka bisa disimpulkan bahwa dari tahun 2017-2021 penggunaan Bahasa Daerah di Sekolah cenderung stabil artinya program penggunaan Bahasa Daerah masih terus berjalan. Pada jenjang SD dalam 1 minggu terdapat 36 jam pelajaran ditambah dengan 2 jam pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah sehingga totalnya ada 38 jam pelajaran. Pada jenjang SMP dalam 1 minggu ada 38 jam pelajaran ditambah dengan 2 jam pelajaran muatan lokal Bahasa Daerah.

## B. Kesehatan

### 1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Berikut capaian kinerja pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dari tahun 2015 – 2020:

**Tabel 2. 26 Capaian Kinerja Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2017 – 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,069%	0,077%	0,087%	0,092%	0,092%
2.	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	57,1%	71,4%	66,7%	88,9%	88,90%
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	92%	100%	100%	93,3%	87,38%
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	96,3%	96%	100%	98,2%	90,05%
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	99%	91,76%
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	95,3%	100%	93,1%	73,7%	84,86%
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,3%	99%	97,8%	38,9%	69,16%
8.	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	0,58%	10,07%	21,3%	15,4%	65,57%
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	22,4%	35,79%	49%	33,6%	95,94%
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23,8%	46,3%	29,9%	10,1%	55,00%
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	24,1%	32,9%	100%	74,5%	74,42%
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	64,9%	57,3%	57,57%
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	70%	86,3%	57,1%	69,20%
14.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	94,2%	97%	99,3%	90,5%	99,47%
15.	Cakupan balita stunting	5.39%	5.9%	9.74%	12,5%	12,08%
16.	Persentase Fasyankes tingkat pertama terakreditasi	35%	41%	41%	42%	100%
17.	Persentase capaian kinerja mutu puskesmas	-	-	-	38%	46%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2022

Beberapa indikator pada program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK). Dinas Kesehatan bersama Pemerintah Kabupaten Tegal terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan capaian SPM-BK antara lain dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan, mengoptimalkan anggaran yang ada, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan telah menambah jumlah puskesmas mampu persalinan. Puskesmas mampu persalinan memberi pelayanan ibu melahirkan selama 24 jam. Puskesmas PONED dan mampu persalinan dapat memberikan pelayanan kesehatan ibu melahirkan yang terstandar, mengingat masih banyak ibu melahirkan di dukun bayi yang belum memenuhi standar pelayanan ibu melahirkan.

## 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kualitas sumber daya manusia kesehatan terus ditingkatkan, diantaranya dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi dan perijinan yang sesuai dengan standar. Indikator – indikator pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan antara lain:

**Tabel 2. 27 Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2017 – 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	100	100	100	100	100
2.	Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	-	52	52	82,8	82,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2022

Kabupaten Tegal terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas SDMK sesuai dengan standar. Pemerataan distribusi SDMK di fasilitas pelayanan kesehatan juga terus diupayakan.

## 3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Capaian kinerja pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman antara lain:

**Tabel 2. 28 Capaian Kinerja Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Tahun 2017 – 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase pangan yang tidak memenuhi syarat	23,08	7,95	9,09	18,99	18,99
2	Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2022

Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal terus berupaya memenuhi sediaan farmasi dan alat kesehatan, dalam hal kuantitas maupun kualitas. Tugas pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan menjadi tugas Dinas Kesehatan, sedangkan pendistribusian dilakukan oleh UPTD Gudang Farmasi. Selama ini kebutuhan obat di puskesmas sudah tercukupi. Kendala yang dihadapi adalah pada proses pengadaan yang bersifat teknis. Namun kendala – kendala tersebut dapat diatasi dan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan di puskesmas dapat terpenuhi.

Belum semua makanan dan minuman yang beredar di Kabupaten Tegal memiliki kualitas yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dinas Kesehatan sebagai salah satu anggota Tim Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) Kab. Tegal terus berupaya dalam menjaga kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat. Tim SKPT mengambil sample makanan di sejumlah tempat kemudian dilakukan pemeriksaan, apakah terdapat kandungan zat berbahaya di dalamnya. Jika terdapat zat berbahaya pada makanan yang diperiksa, akan dilakukan pembinaan terhadap penjual makanan dan minuman tersebut.

#### 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Indikator – indikator Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan antara lain:

**Tabel 2. 29 Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2017 – 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	80	81	81	95,4	95,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2022

#### 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (RSUD dr Soeselo)

RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal telah melakukan pelayanan dan pengelolaan penunjang medis dan non medis sesuai dengan indikator yang ada. Ada beberapa indikator yang sudah tercapai akan tetapi masih ada juga beberapa indikator yang perlu di tingkatkan. Berikut capaian kinerja pelayanan penunjang di RSUD dr. Soeselo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

**Tabel 2. 30 Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang RSUD dr. Soeselo Tahun 2017 – 2021**

No	Indikator	Standar	Hasil Perhitungan				
			2017	2018	2019	2020	2021
A	Mutu Pelayanan						
1	Emergency Respon Time	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang	≤ 3 menit	2 menit	2.33 menit	4.5 menit	4.5 menit

No	Indikator	Standar	Hasil Perhitungan				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Angka Kematian IGD	≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	0,2	0,5	0,095	0,38	0,38
3	NDR (Angka Kematian Netto)	≤ 0.24 %	2,80%	2,95%	3,12%	3,09	3,09
4	Jumlah Pasien Rawat Inap yang Dirujuk		196 Pasien	257 Pasien	252 Pasien	146 Pasien	146 Pasien
5	Post Operative Death Rate	≤ 1 %	0	0	0	0	0
6	Angka Infeksi Nosokomial	< 1.5 %	-	-	-	-	-
7	Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	≤ 30 menit	39.98 menit	36.4 menit	41.44 menit	42.80 menit	42.80 menit
8	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	1.4 hari	1 hari	1.4 hari	1.5 hari	1.5 hari
<b>B Kepedulian Kepada Masyarakat</b>							
1	Pembinaan Kepada Puskesmas						
2	PKRS		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Rasio Tempat Tidur Kelas III		0,54	0,58	0,59	0,59	0,59
4	Pemanfaatan TT (BOR) Kelas III	75-85 %	107,11%	90,96%	107,96%	80,58%	80,58%
5	Proporsi pelayanan pasien tidak mampu di rawat jalan	-	28.456	21.012	21.990	25.997	25.997
<b>C Kepuasan Pelanggan</b>							
1	Prosentase Komplain		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Lama waktu tunggu di poliklinik	≤ 60 menit	133 menit	152 menit	111.71 menit	-	-
3	Kemudahan Pelayanan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Standar	Hasil Perhitungan				
			2017	2018	2019	2020	2021
D	Kepedulian Terhadap Lingkungan						
1	Hasil uji AMDAL		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : RSUD dr Soeselo Kabupaten Tegal, 2022

## 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (RSUD Suradadi)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk meningkatkan kualitas layanan Rumah Sakit yang dilaksanakan sesuai standar. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor yang terkait. Sebagai ilustrasi tersaji data pelayanan Rumah Sakit mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi peningkatan pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar.

**Tabel 2. 31 Capaian Kinerja Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2017 - 2021**

No	Indikator	Standar	2017	2018	2019	2020	2021
<b>a.</b>	<b>Mutu Pelayanan</b>						
1	Emergency respon time	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang (0 >30 menit, 1=16-30 menit, 2=8-15 menit, 3= <8 menit)	NA	NA	3	2	2
2	Angka Kematian UGD	≤ 2% (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam) 0=>10% 1=8-10% 2=5-7% 3=<5%)	NA	NA	3	3	3
3	NDR (Angka Kematian Netto)	≤ 0,24 % (jumlah kematian pasien ≥48 jam setelah dirawat / jumlah pasien yang dirawat x 1000 ‰) 0=>65% 1=41-65 2=25-40 3=<25%	NA	NA	3	3	3
4	Prosentasi pasien rawat inap yg dirujuk	jumlah pasien rawat inap yang dirujuk / jumlah pasien rawat inap x 100% 0=>10% 1=8-10% 2=5-7% 3=<5%	NA	NA	3	2	2

No	Indikator	Standar	2017	2018	2019	2020	2021
5	Post operative death rate	≤ 1% (jumlah operasi pasien meninggal / jumlah pasien dioperasi x 100%) 0=>10% 1=6-10% 2=2-7% 3=<2%	NA	NA	3	3	3
6	Angka Infeksi Nosokomial	< 1.5 % (jumlah psaien dirawat yang terinfeksi nosokomial / jumlah pasien dirawat x 100 0=>15% 1=10-15% 2=2-9% 3=<2%	NA	NA	3	2	2
7	Kecepatan pelayanan resep obat jadi	≤ 30 menit (rata-rata pelayanan resep obat jadi dalam menit) 0=<60 menit 1=31-60 menit 2=8-30 menit 3=<8 menit	NA	NA	2	2	2
8	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari (rata rata waktu tunggu sebelum operasi dalam hari) 0=>5 hari 1=3-5 hari 2=2-3 hari 3=< 24 jam	NA	NA	3	3	3
<b>B</b>	<b>Kepedulian Kepada Masyarakat</b>						
1	Pembinaan Kepada Puskesmas	0 tidak ada program, 0,251 ada tidak dilaksanakan, 0,5 ada dilaksanakan sebagian, 1,00 ada dilaksanakan semua	NA	NA	0.5	0.5	0,5
2	PKRS	0 tidak ada program, 0,251 ada tidak dilaksanakan, 0,5 ada dilaksanakan sebagian, 1,00 ada dilaksanakan semua	NA	NA	0.5	0.5	0,5
3	Rasio tempat tidur kelas 3	0 ≤10%, 0,25 =10-20, 0,5 =21-30,1= > 30%	NA	NA	1	1	1

No	Indikator	Standar	2017	2018	2019	2020	2021
4	Pemanfaatan TT (BOR (kelas) 3	60-80% (Depkes, 2005) 0=>40% 0,25=40-59% 0,5=60-58% 1=<85%	NA	NA	1	1	1
5	Proporsi pelayanan pasien tidak mampu (Pbi/ total pasien rajal dan ranap)	0 ≤10%, 0,25 =10-20, 0,5 =21-30,1= > 30%	NA	NA	0.5	0.5	0,5
<b>C Kepuasan Pelanggan</b>							
1	Prosentase komplain	0 tidak ada program penanganan komplain, 0,251 ada tidak dilaksanakan, 0,5 ada dilaksanakan sebagian, 1,00 ada dilaksanakan semua	NA	NA	0.5	0.5	0,5
2	Lama Waktu Tunggu di poliklinik	≤ 60 menit (0 >120 menit, 0,75 61-120 menit, 1,5 30-60 menit 2,00 < 30 menit)	NA	NA	1.5	2,0	2,0
3	Kemudahan pelayanan	0 = tidak ada petunjuk, 1 = ada petunjuk tidak lengkap, 2 = tidak ada petunjuk	NA	NA	1	1,0	1,0
<b>D Kepedulian terhadap lingkungan</b>							
1	Kebersihan lingkungan	0 tidak ada program, 0,75 ada program dan sop, 1,5 sop dilaksanakan sebagian, 2 sop dilaksanakan semua	NA	NA	1.5	1.5	1,5
2	Hasil uji AMDAL	0 tidak ada Amdal, 0,75 tidak ada tindaklanjut hasil amdal 1,5 ada tindaklanjut belum selesai 2,00 ada tindaklanjut sampai selesai	NA	NA	0	0	0
<b>Total Skore Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,00</b>	<b>25,00</b>

Sumber : RSUD Suradadi Kabupaten Tegal, 2022



### C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tegal berdasarkan kewenangannya meliputi :

#### 1) Infrastruktur Bangunan Sumber Daya Air (SDA)

Infrastruktur sumberdaya air berpedoman pada pola pengelolaan sumber daya air, meliputi: wilayah sungai, jaringan irigasi, pengembangan jaringan air baku untuk air bersih, pengembangan sistem pengendalian banjir. Pengembangan wilayah sungai yang merupakan WS strategis nasional adalah WS Pemali Comal terdiri atas Pengelolaan sumber daya air sungai, Pengembangan waduk; dan Pengembangan embung. Terkait dengan pengembangan waduk dan embung, Di Kabupaten Tegal terdapat Waduk Cacaban yang mempunyai kapasitas yang saat ini mempunyai kapasitas 49,02 juta m<sup>3</sup> dan dapat mengaliri lahan sawah seluas 17.481 Ha. Sedangkan jumlah embung atau waduk lapang di Kabupaten Tegal sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 32 Jumlah dan Luas Embung**

No	Kecamatan	Jumlah	Luas (m2)
1	Adiwerna	6	39.315
2	Dukuhturi	2	9.778
3	Dukuhwaru	10	52.209
4	Kedungbanteng	1	15.535
5	Kramat	17	88.872
6	Lebaksiu	28	134.637
7	Pangkah	9	34.609
8	Slawi	10	47.298
9	Talang	3	18.557
10	Tarub	17	83.538
11	Suradadi	5	21.600
12	Warureja	3	5.800
	<b>Total</b>	<b>111</b>	<b>551.748</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2022

Jaringan irigasi di Kabupaten Tegal terdiri dari jaringan teknis (primer, sekunder, tersier) dan jaringan non teknis. Kedua jaringan ini hampir tersebar merata di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tegal. Kondisi saluran-saluran irigasi ini perlu perawatan karena sebagian dari saluran-saluran ini, terutama saluran teknis mengalami kerusakan pada fisik bangunannya. Selain itu perlu juga adanya peningkatan terhadap saluran non teknis dan ssemi teknis lainnya agar berfungsi lebih optimal untuk mengairi seluruh persawahan areal persawahan yang ada di Kabupaten Tegal.

Lahan sawah di Kabupaten Tegal sekitar 40.133 Ha. Untuk komoditas padi pada Tahun 2017 luas tanam mencapai 61.995 Ha dan luas panen mencapai 65.660 Ha, sedangkan untuk produksinya mencapai 373.524 Ton, dengan produktivitas rata-rata 5,69 Ton/Ha. Dilihat dari distribusi per kecamatan, kecamatan Warureja menjadi penyumbang lahan tanam padi tersebar di Kabupaten Tegal yaitu sekitar 7.102 Ha.

Berdasarkan jenis pengairan di Kabupaten Tegal, sebagian besar sawah tersebut merupakan sawah irigasi teknis yaitu sekitar 32.600 Ha. Berdasarkan kewenangan irigasi, Daerah irigasi (DI) untuk lahan pertanian di Kabupaten Tegal terbagi menjadi 3 (tiga) kewenangan DI yaitu:

**Tabel 2. 33 Panjang Irigasi Kabupaten Tegal**

Kewenangan	Jumlah DI	Panjang Saluran (m)	Luas Daerah Irigasi (Ha)
Kabupaten	208	276,02	9.281
Provinsi	11	84.597	6.956
Pusat	3	240.686	24.083
<b>Total</b>	<b>222</b>	<b>325.559</b>	<b>40.320</b>

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2022*

Gambaran kinerja pada aspek pembangunan infrastruktur sumberdaya air berupa jaringan irigasi di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2017-2021 dapat dilihat dari beberapa kondisi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 2. 34 Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tahun 2017-2021**

No	Kondisi Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Per Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1.	Baik	155	53,1	164,5	56,39	155	53,1	164,5	56,39	165,56	59,98
2.	Sedang	52	17,8	67,2	22,97	52	17,8	67,2	22,97	44,34	16,06
3.	Rusak Ringan	21,69	7,44	44,85	15,37	21,69	7,44	44,85	15,37	55,96	20,27
4.	Rusak Berat	63,03	21,6	15,43	5,26	63,03	21,6	15,43	5,26	10,17	3,69
	Total	291,72	100	291,7	100	291,72	100	291,7	100	276,02	100

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2022*

Berdasarkan Kewenangannya, Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Tegal sebanyak 208 DI dengan luas 9.281 hektare. Kebutuhan air Daerah irigasi Kabupaten tersebut dipenuhi melalui jaringan irigasi. Panjang Saluran irigasi saat ini mencapai 276,02 km, dengan kondisi jaringan irigasi yang mantap sepanjang 209,89 km (76,04%). Sedangkan yang mengalami kerusakan ringan dan rusak berat (tidak mantap) sepanjang 66,13 km (23,96%). Sedangkan kondisi cakupan daerah irigasi kewenangan kabupaten tergambar sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 35 Kondisi Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2017-2021**

Kondisi DI	Kondisi Daerah Irigasi Per Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Daerah Irigasi (Ha)	15.497	15.497	9.281,00	9.281,00	9.281,00
Luas Daerah Irigasi Baik (Ha)	10.987	12.298	5.302,49	5.374,93	5.477,59
Persentase Luas DI Baik	70,90	79,36	58,17	58,86	60,27

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, 2022

Peningkatan kondisi daerah irigasi kabupaten, dikarena alokasi anggaran yang stabil untuk perbaikan infrastruktur irigasi baik saluran maupun bangunan bendung. Selain itu secara lokasi sebagian besar Daerah Irigasi Kabupaten berada di daerah atas yaitu Kecamatan Bojong, Jatinegara, Margasari dan Bumijawa, serta bangunan Irigasinya letaknya jauh dari permukiman penduduk.

## 2) Infrastruktur Air Minum

Infrastruktur sistem jaringan bersih di Kabupaten Tegal dibagi menjadi jaringan perpipaan dan non perpipaan. Jaringan air minum perpipaan untuk wilayah perkotaan sampai pada akses layanan rumah tangga dilayani oleh oleh PDAM. Sedangkan untuk perpipaan wilayah perdesaan difasilitasi melalui program Pamsimas. Untuk jaringan non perpipaan masyarakat di Kabupaten Tegal dipenuhi dari layanan sumur dan mata air. Data layanan air minum sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2. 36 Data Layanan Air Minum Tahun 2017-2021**

Uraian	Capaian Layanan Air Minum				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Total (jiwa)	1,428,884	1,431,375	1,433,464	1,435,147	1,664,588
Jumlah Penduduk wilayah Teknis PDAM (jiwa)	664,694	659,655	669,141	768,153	842,398
Jumlah Penduduk Perdesaan Teknis PAMSIMAS (jiwa)	638,111	745,005	878,629	980,694	622,190
Target Capaian PDAM dr Total Penduduk (%)	21.53	23.18	24.72	22.92	40.12
Target Capaian Pamsimas dr Total Penduduk (%)	22.92	19.89	17.86	17.68	24.03
Layanan PDAM (SR)	40,619	42,742	45,648	48,150	51,590
Layanan PDAM (Jiwa)	143,121	152,927	165,442	176,097	337,952
Layanan Pamsimas (Jiwa)	146,272	148,149	156,898	173,339	197,539
Non Perpipaan (Sumur dan Mata Air)	N/A	503,878	503,878	527,336	527,336
Capaian Air Minum PDAM (%)	10.02	10.68	11.54	12.27	20,3

Uraian	Capaian Layanan Air Minum				
	2017	2018	2019	2020	2021
Capaian Air Minum Pamsimas (%)	10.24	10.35	10.95	12.08	11,87
Capaian Akses Air Minum Keseluruhan (%)	N/A	56.24%	57.64%	61.09%	63.85%

Sumber : Hasil Analisa Berbagai Sumber, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara teknis jangkauan jaringan air minum perpipaan PDAM adalah 20,3% wilayah Kabupaten Tegal. Capaian layanan PDAM meningkat dalam kurun waktu 5 tahun dari 8,55% menjadi 12,27%. Untuk Layanan Pamsimas saat ini baru dapat melayani wilayah di Kabupaten Tegal sebesar 11,87%. Secara keseluruhan terdapat peningkatan layanan akses air minum selama 5 tahun terakhir dengan capaian pada tahun 2021 adalah sebesar 63,85%.

**Tabel 2. 37 Data Layanan Air Minum Layak Tahun 2017-2021**

Air Minum Layak	Layanan Air Minum				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk Terlayani	409411.88	872119.87	906727.92	968751.17	1019203.07
% Layanan	28.56	56.24	57.64	61.09	64.79

Sumber : Dinas Kawasan Permukiman, Perumahan rakyat, Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Tegal, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa layanan air minum layak mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017 presentase layanan hanya 28,56% meningkat 56,24% di tahun 2018 dan 64,79 % di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa layanan air minum di Kabupaten Tegal dalam waktu 5 tahun mengalami peningkatan meskipun dari 2018 – 2021 kenaikannya tidak signifikan.

### 3) Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

Berikut adalah gambaran rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal, sebagaimana Tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 38 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Kondisi TPS				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah TPSS (unit)	113	118	124	129	129
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	222,75	240,66	206,43	242,50	242,50
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.433.515	1.437.225	1.566.587	1.599.432	1.599.432
4.	Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk	0,155	0,082	0,155	0,151	0,151

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2022

Sebelum sampah diangkut / dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kabupaten Tegal pada

tahun 2020 sebanyak 129 buah (berlokasi di pasar dan pabrik). Daya tampung setiap TPSS tersebut sebesar 242,50ton. Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Penujah dengan menggunakan sistem *controlled landfill* sehingga perlu ditingkatkan ke sistem *sanitary landfill*, mendasari hal tersebut maka, perlu dilaksanakan revitalisasi TPA Penujah dan Perencanaan Pembuatan TPA baru untuk meningkatkan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Tegal.

**Tabel 2. 39 Kondisi Tempat Pemrosesan Sampah Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Kondisi TPA				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Volume Sampah (m <sup>3</sup> )	124.708	137.883	146,604	148,425	148,425
2.	Jumlah TPA (unit)	1	1	1	1	1
3.	Luas TPA (m2)	41.691	41.691	41.691	41,691	41,691

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2022

#### 4) Infrastruktur Sanitasi

Infrastruktur sanitasi di Kabupaten Tegal fokus pada prasarana sanitasi permukiman yaitu pada akses pada jamban sehat.

**Tabel 2. 40 Rumah Berjamban Tahun 2018- 2021**

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Akses (%)				KK yg belum berjamban layak	
			2018	2019	2020	2021	Unit	%
1	Margasari	37.624	98,8	N/A	100	100	1.071	2,85
2	Bumijawa	32.722	98,2	N/A	100	100	1.946	5,95
3	Bojong	24.710	98	N/A	100	100	692	2,80
4	Balapulang	32.705	97,3	N/A	100	100	3.570	10,92
5	Pagerbarang	21.727	96,7	N/A	100	100	1.311	6,03
6	Lebaksiu	32.846	95,5	N/A	100	100	2.793	8,50
7	Jatinegara	20.897	93,7	N/A	100	100	1.248	5,97
8	Kedungbanteng	15.989	92,7	N/A	100	100	1.919	12,00
9	Pangkajene	37.554	87,1	N/A	100	100	2.203	5,87
10	Slawi	26.082	87	N/A	100	100	62	0,24
11	Adiwerna	44.273	86,8	N/A	100	100	4.358	9,84
12	Talang	34.264	85,8	N/A	100	100	2.912	8,50
13	Dukuhturi	33.234	83,6	N/A	100	100	951	2,86
14	Tarub	28.781	82,8	N/A	100	100	3.239	11,25
15	Kramat	38.150	81,5	N/A	100	100	656	1,72
16	Suradadi	30.677	81,5	N/A	100	100	1.645	5,36
17	Warureja	22.760	79	N/A	100	100	2.466	10,83
18	Dukuhwaru	23.165	73,4	N/A	100	100	775	3,35
	<b>Total</b>	<b>538.160</b>	<b>88,7</b>		100	100	<b>33.817</b>	<b>6,38</b>

Sumber : Hasil Olah Data, 2022

Dari data tabel di atas diketahui bahwa Kabupaten Tegal telah melakukan percepatan penanganan sanitasi selama 4 tahun (2018-2021). Hal tersebut dapat

dilihat dari telah tercapainya 100% akses sanitasi namun masih menyisakan 6,38% KK yang masih belum memiliki akses jamban yang layak.

**Tabel 2. 41 IPAL Domestik Skala Komunal Kabupaten Tegal**

No	Kecamatan	Kapasitas (m3)	Jumlah KK Tersambung
1	Pangkah	211,08	191
2	Jatinegara	107,25	60
3	Bojong	290,92	188
4	Lebaksiu	32,00	53
5	Balapulang	217,22	132
6	Adiwerna	388,23	162
7	Dukuhwaru	240,75	136
8	Tarub	188,14	125
9	Slawi	139,25	80
<b>Total</b>		<b>1.888,54</b>	<b>1.157</b>

*Sumber: Hasil Olah Data, 2022*

Dari data table IPAL domestik skala komunal Tahun 2018 – 2021 diketahui bahwa Kabupaten Tegal telah melakukan percepatan penanganan sanitasi selama 4 tahun (2018-2021). Hal tersebut dapat dilihat dari telah tercapainya 100% akses sanitasi dengan kapasitas 1.888,54 m3 dengan jumlah KK tersambung 1.157.

**Tabel 2. 42 Data Layanan Sanitasi Aman Tahun 2017-2021**

Air Minum Layak	Layanan Sanitasi Aman				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk Terlayani	290286.79	322082.67	329247.32	493176.65	-
% Layanan	20.25	20.77	20.93	31.10	-

*Sumber : Dinas Kawasan Permukiman, Perumahan rakyat, Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Tegal, 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa layanan sanitasi aman di Kabupaten Tegal capaiannya masih sangat kecil di tahun 2020 hanya 31,10 % dengan jumlah penduduk terlayani hanya 493176.65 jiwa.

## 5) Infrastruktur Drainase

Berdasarkan Hirarki dan kewenangan, drainase yang menjadi kewenangan kabupaten adalah drainase sekunder yaitu yang sejajar dengan jalan kabupaten. Kebutuhan drainase jalan di Kabupaten Tegal adalah sekitar 490,15 km, sampai dengan akhir tahun 2020 telah terbangun sekitar 286,35 km atau 58,42%. Dari data capaian penyediaan jaringan drainase di Kabupaten Tegal terdapat peningkatan panjang drainase dari tahun ke tahun sebagaimana tersaji pada tabel dibawah.

**Tabel 2. 43 Panjang Drainase Jalan Kabupaten Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Panjang Drainase Jalan Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
		Km	Km	Km	Km	Km
A	Jalan Kabupaten	847,27	847,27	847,3	847,27	847,27
B	Jalan yg harus berdrainase	477,46	477,46	490,2	490,15	490,15
C	Jalan yg tidak harus berdrainase	137,02	115,40	79,17	70,77	55,19
D	Jalan yg berdrainase	232,79	254,41	278	286,35	301,93
	<b>Persentase Jalan berdrainase (d/b)</b>	<b>48,76</b>	<b>53,28</b>	<b>56,71</b>	<b>58,42</b>	<b>61,60</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2022

## 6) Bangunan Gedung Negara

Bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah. Rumah negara dan pagar bangunan gedung negara/rumah negara termasuk dalam kategori bangunan gedung negara. Data bangunan gedung negara di Kabupaten Tegal tersaji dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2. 44 Data Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Tegal Tahun 2021**

No.	Jenis Bangunan	Jumlah Bangunan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	228
2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	3
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	133
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	35
5	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2
6	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	947
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	130
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	42
9	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	22
10	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	42
11	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1
12	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	19
13	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	10
14	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	1
15	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	6
16	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan Lain-lain (dst)	1
17	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	29
18	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	1
19	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	1
20	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	31
21	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	16
22	Bangunan Stasiun Permanen	1
23	Bangunan Tempat Parkir	109
24	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	1

No.	Jenis Bangunan	Jumlah Bangunan
25	Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen	1
26	Bangunan Klinik/Puskesmas	210
27	Bangunan Rumah Sakit Umum	53
28	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	4
29	Bangunan Rumah Sakit Hewan	3
30	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	26
31	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1
32	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	1
33	Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain-lain	2
34	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	27
35	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	6
36	Bangunan Untuk Kandang	8
37	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	1
38	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	6
39	Bangunan Gedung Musium Permanen	1
40	Hotel Permanen	2
41	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	6
42	Candi	1
43	Gedung Garasi/Pool Darurat	2
44	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	6
45	Gedung Garasi/Pool Permanen	45
46	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	5
47	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	61
48	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	1
49	Gedung Pos Jaga Permanen	44
50	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	1
51	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	7
52	Gedung Pemotong Hewan Permanen	13
53	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	6
54	Gedung Menara Peninjau Permanen	3
55	Rumah Negara Gol I Lain-lain (dst)	2
56	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1
57	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	2
58	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	2
59	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	93
60	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	2
61	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	1
62	Flat/rumah Lain-lain (dst)	7
63	Flat/Rumah Susun Permanen	3
64	Asrama Permanen	1
65	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat	1
66	Pagar Permanen	204
<b>Total Bangunan Gedung Negara</b>		<b>2.677</b>

Sumber : Hasil Analisa Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa bangunan gedung pendidikan permanen merupakan jenis bangunan gedung negara yang paling dominan di



Kabupaten Tegal dengan persentase sebesar 35.38%. Dari total 947 bangunan gedung pendidikan permanen, 632 bangunan diantaranya merupakan bangunan sekolah dasar negeri. Data bangunan sekolah dasar negeri di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

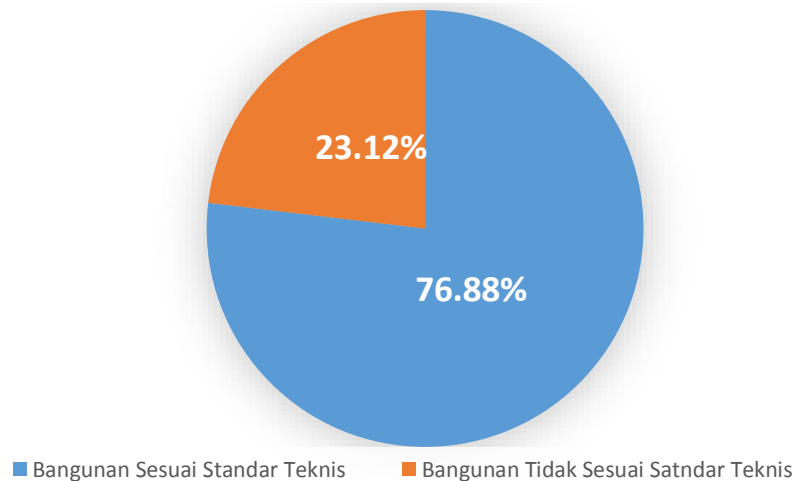
**Tabel 2. 45 Data Bangunan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tegal Tahun 2021**

NO.	Nama Kecamatan	Jumlah SD	Jumlah Bangunan Ruang Kelas	Jumlah dan Kondisi Bangunan SD		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Dukuhwaru	28	202	85	73	44
2	Adiwerna	50	359	175	116	68
3	Tarub	38	273	103	88	82
4	Pangkah	52	330	122	156	52
5	Margasari	32	224	83	91	50
6	Balapulang	35	232	77	91	64
7	Slawi	37	249	71	140	38
8	Bojong	31	204	77	77	50
9	Bumijawa	50	327	137	127	63
10	Suradadi	30	253	106	88	59
11	Dukuhturi	27	186	77	83	26
12	Lebaksiu	37	262	99	91	72
13	Kedungbanteng	17	110	41	26	43
14	Kramat	39	280	108	135	37
15	Pagerbarang	32	217	56	63	98
16	Talang	36	269	90	103	76
17	Warureja	28	210	87	73	50
18	Jatinegara	33	216	91	72	53
<b>Jumlah</b>		<b>632</b>	<b>4.403</b>	<b>1.685</b>	<b>1.693</b>	<b>1.025</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2022

Permasalahan utama dalam pengelolaan bangunan gedung negara di Kabupaten Tegal adalah masih banyaknya bangunan gedung negara yang tidak sesuai dengan standar teknis. Bangunan yang sesuai standar teknis diartikan sebagai bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan serta hanya mempunyai tingkat kerusakan bangunan antara 0% s.d 25%. Data bangunan gedung yang sesuai dengan standar teknis di Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

**Gambar 2. 37 Data Bangunan Gedung Negara Sesuai Standar Teknis di Kabupaten Tegal Tahun 2021**



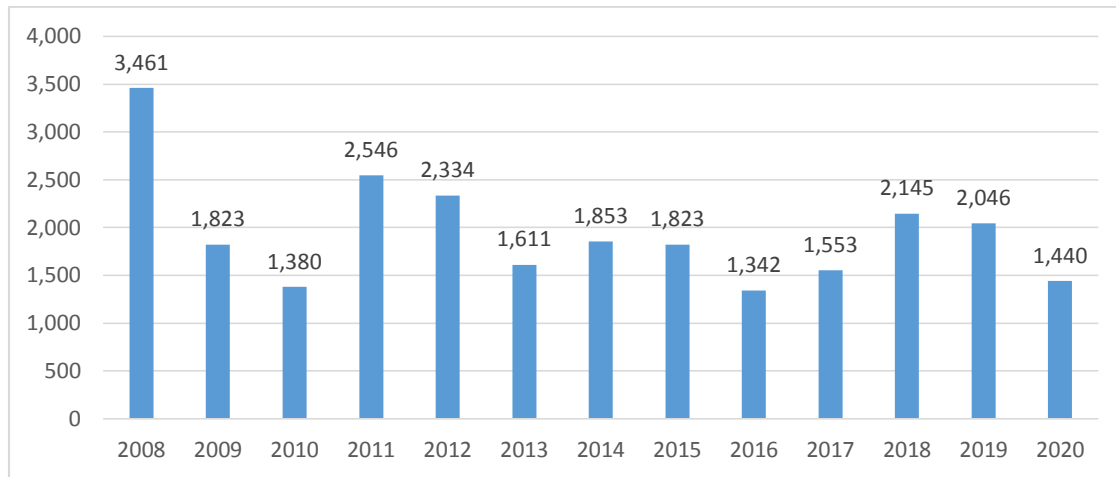
*Sumber : Hasil Analisa berbagai Sumber, 2022*

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa bangunan gedung negara yang sesuai standar teknis adalah sebesar 76,88% atau sebanyak 2.058 bangunan gedung negara, sedangkan bangunan gedung negara yang tidak sesuai standar teknis adalah sebesar 23,12% atau sebanyak 619 bangunan gedung negara. Peningkatan rasio bangunan gedung negara yang sesuai standar teknis dapat dilakukan dengan perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung negara di Kabupaten Tegal dengan memprioritaskan bangunan-bangunan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan sedang.

### **7) Izin Mendirikan Bangunan**

Berdasarkan Permen PUPR No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PermenPUPR No 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Tegal diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kecuali IMB rumah tinggal sederhana dengan luas bangunan maksimal 100 m<sup>2</sup> oleh Kecamatan. Data penerbitan IMB di Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :

**Gambar 2. 38 Data Data Penerbitan IMB di Kabupaten Tegal Tahun 2020**



Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Tegal, 2022

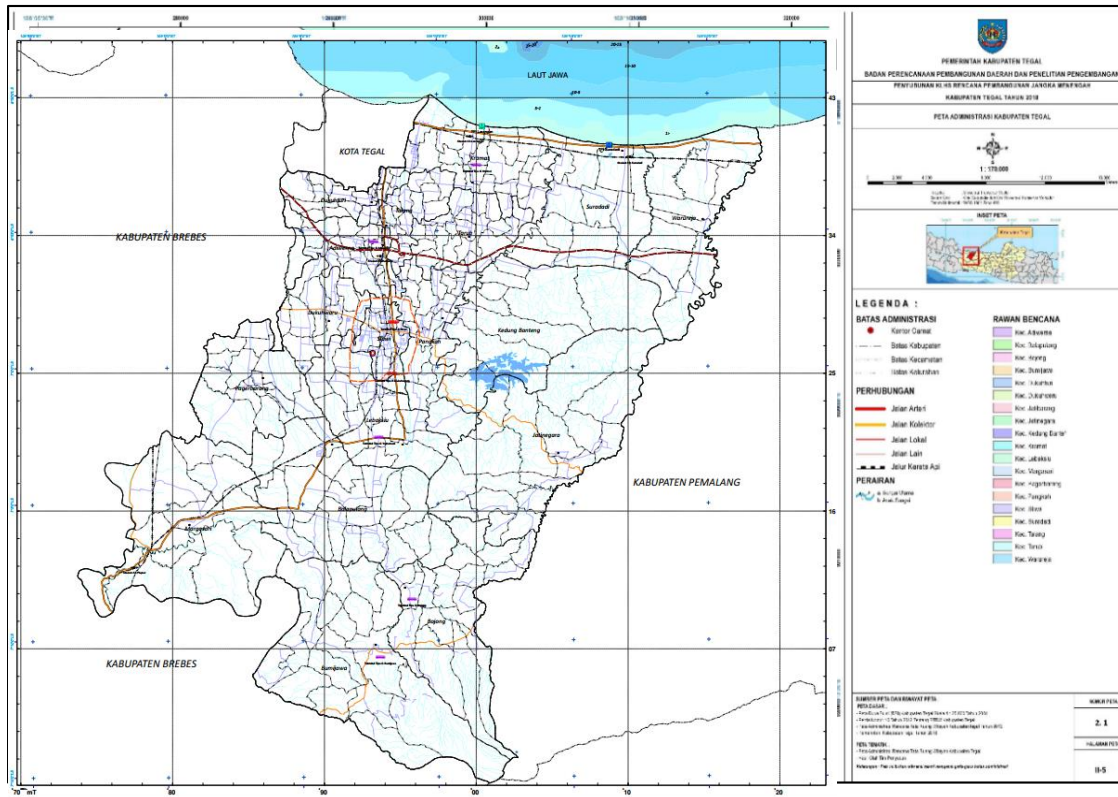
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa tren penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) cenderung tidak stabil. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2011 s.d 2020) penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terbanyak dalam waktu satu tahun anggaran terjadi pada tahun 2011 yaitu sebanyak 2.546. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, rata-rata penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam waktu satu tahun anggaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah 1.869.

## **8) Infrastruktur Jalan**

Secara kewilayahan Kabupaten Tegal mempunyai pusat – pusat kegiatan yang tersebar secara sporadis dan terkoneksi dengan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan dimana berdasar SK Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal, panjang jalan Kabupaten adalah 847,27 km, sedangkan Jalan Nasional yang berada di Wilayah Kabupaten Tegal sepanjang 68,29km, Jalan Provinsi sepanjang 54,63km, Jalan Desa di Kabupaten Tegal sepanjang 691,28 km serta Jalan Tol Ruas Pejagan-Pemalang yang melintasi wilayah Kabupaten Tegal sepanjang 30,7 km.

Kabupaten Tegal secara kewilayahan regional Bregasmalang meliputi di bagian Utara terlntasi oleh Jalan Arteri Primer (Jalan Pantura), dan bagian tengah jalan arteri sekunder (ruas Tegal – Cilacap) yang merupakan jalan nasional sepanjang 68,29 kilometer. Di Bagian Tengah juga terlntasi oleh Jalan Kolektor Primer yang merupakan jalan provinsi (Ruas Randudongkal – Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru – Jatibarang) yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan di wilayah Randudongkal (Kabupaten Pemalang), Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru (Kabupaten Tegal), dan Jatibarang – Ketanggungan – Losari (Kabupaten Brebes). Berikut ini peta jalan Kabupaten Tegal.

**Gambar 2. 39 Peta Jalan Kabupaten**



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

Secara umum, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan Kabupaten yang baik meningkat persentasenya. Hal ini merupakan hasil pembangunan yang didanai APBD Kabupaten Tegal. Saat ini kondisi jalan rusak berat masih mencapai 80,52 km atau sekitar 9,50%. Kondisi jalan rusak berat di Kabupaten Tegal berada pada jalan kecil yang bukan jalan strategis dimana sebagian besar berfungsi sebagai jalan usaha pertanian. Sedangkan jalan rusak berat dan berfungsi sebagai jalan strategis akan menjadi prioritas dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara tuntas di waktu yang akan datang. Berikut ini data kondisi jalan Kabupaten Tegal.

**Tabel 2. 46 Capaian Kinerja Pembangunan Jalan Kabupaten Tahun 2017-2021**

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan Per Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1.	Baik	377,94	44,6	528,9	62,42	377,94	44,6	528,9	62,42	606,04	71,53
2.	Sedang	170,34	20,1	118,7	14,00	170,34	20,1	118,7	14,00	97,59	11,52
3.	Rusak Ringan	139,51	16,5	82,98	9,79	139,51	16,5	82,98	9,79	63,12	7,45
4.	Rusak Berat	159,48	18,8	116,8	13,78	159,48	18,8	116,8	13,78	80,52	9,50
	Total	847,27	100	847,3	100	847,27	100	847,3	100	847,27	100

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan Per Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Mantap										703,63	83,05
Tidak Mantap										143,64	16,95

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2022

Berdasarkan tabel di atas Secara umum, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan Kabupaten yang baik meningkat persentasenya. Hal ini merupakan hasil pembangunan yang didanai APBD Kabupaten Tegal. Saat ini kondisi jalan rusak berat masih mencapai 80,52km atau sekitar 9,50%. Kondisi jalan rusak berat di Kabupaten Tegal berada pada jalan jalan kecil yang bukan jalan strategis dimana sebagian besar berfungsi sebagai jalan usaha pertanian. Sedangkan jalan rusak berat dan berfungsi sebagai jalan strategis akan menjadi prioritas dan Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan secara tuntas di waktu yang akan datang.

Untuk menjamin konektifitas antar wilayah di Kabupaten Tegal, Indikator infrastruktur jalan seharusnya bukan lagi baik, sedang, rusak ringan, maupun rusak berat, Namun seharusnya indikator pembangunan infrastruktur jalan mantap dan tidak mantap. Jalan Mantap dapat diartikan dengan jalan yang ada secara fisik harus dalam kondisi baik dan sedang, secara dimensi dan konstruksinya serta kelengkapan jalannya harus sesuai dengan fungsinya.

**Tabel 2. 47 Kondisi Lebar Jalan Kabupaten Tegal Tahun 2020**

Kondisi Jalan	Lebar Jalan (Meter)						
	Lebar yang tidak memenuhi standar (< 4m)		Lebar yang memenuhi standar (> 4m)				
	< 4m	Jumlah (Km)	4 - 5 m	6 - 8 m	9 - 11 m	12 m - keatas	Jumlah (Km)
Baik	220,28	220,28	327,10	28,69	3,60	3,03	362,42
Sedang	33,48	33,48	68,23	1,59	1,26	0	71,08
Jumlah Jalan Mantap yang tidak memenuhi standar		253,76	Jumlah Jalan Mantap yang memenuhi standar				433,50
Rusak ringan	30,24	30,24	41,09	0,5	2,37	0	43,96
Rusak berat	43,07	43,07	46,54	1,2	0	0	47,74
Jumlah jalan tidak mantap yang tidak memenuhi standar		73,305	Jumlah jalan tidak mantap yang memenuhi standar				91,7
Jumlah Total (Km)							847,27

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2022

Kemantapan jalan secara dimensi dapat dilihat dari lebar minimal jalan sesuai standar, yaitu sama dengan dan lebih dari 4 (empat) meter, dimana kondisi jalan kabupaten secara umum baru mencapai 51,16% atau sekitar 433,50 km yang memiliki lebar sesuai standar, sedangkan sisanya sekitar 413,77 km memiliki dimensi lebar jalan kurang dari 4 (empat) meter, sehingga salah satu target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal adalah meningkatkan dimensi jalan sesuai standar, dan sampai dengan tahun 2020 kondisi Jalan mantap (Kondisi baik dan sedang) adalah 81,11% atau sekitar 687,25 km.

## 9) Infrastruktur Jembatan

Data infrastruktur jembatan di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 berjumlah 282 unit, sedangkan pada akhir Tahun 2021 berjumlah 323 unit. Hal ini selama kurang waktu 5 tahun terakhir terdapat pembangunan jembatan baru dan updating data jembatan.

**Tabel 2. 48 Jumlah Jembatan Kabupaten Tahun 2017-2021**

No	Kondisi Jembatan	Jumlah Jembatan Per Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
1.	Baik	282	64,7	298	67,12	282	64,7	298	67,12	323	70,22
2.	Sedang	69	15,8	93	20,95	69	15,8	93	20,95	89	19,35
3.	Rusak Ringan	57	13,1	30	6,76	57	13,1	30	6,76	33	7,17
4.	Rusak Berat	28	6,42	23	5,18	28	6,42	23	5,18	22	4,78
	<b>Total</b>	<b>436</b>	<b>100</b>	<b>444</b>	<b>100</b>	<b>436</b>	<b>100</b>	<b>444</b>	<b>100</b>	<b>460</b>	<b>100</b>
										<b>Mantap</b>	<b>89,57</b>
										<b>Tidak Mantap</b>	<b>11,96</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2022

Berdasarkan data tersebut di atas, kondisi jembatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semakin baik dimana jembatan yang baik sebanyak 323 unit (70,22%), sedangkan yang masih dalam kondisi sedang, rusak ringan dan rusak berat adalah 144 unit (31,3%) dari jumlah keseluruhan jembatan di Kabupaten Tegal, yaitu sebanyak 460 unit jembatan dengan panjang keseluruhan mencapai 5.578,07 meter. Dari jumlah jembatan yang tercatat, tergambar jumlah jembatan dengan lebar sebagai berikut.

**Tabel 2. 49 Jumlah Jembatan Berdasarkan Lebar Jembatan Tahun 2020**

Kondisi Jembatan	Lebar Jembatan ( Unit )					Jumlah (Unit)
	1 - 2 m	3 - 5 m	6 - 8 m	9 - 11 m	12 m keatas	
Baik	9	186	94	18	7	314
Sedang	2	63	22	1	1	89
Rusak ringan	0	25	8	0	1	34
Rusak berat	2	20	1	0	0	23
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>294</b>	<b>125</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>460</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2022

Sebagaimana infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan haruslah mengikuti infrastruktur jalan, dimana kedepan Kondisi Jembatan harus dalam kondisi mantap yaitu mantap dalam arti sesuai dengan fungsi jalan yaitu dimensi (panjang dan lebar) harus sesuai dengan fungsinya, dan kemantapan jembatan di Kab. Tegal pada tahun 2020 telah mencapai 88,05%.

## **10) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tegal mengawali pelaksanaan Urusan Penyelenggaraan Jasa konstruksi dengan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Tegal mengamanatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk menyelenggarakan Urusan tersebut namun demikian belum dapat memberikan anggaran guna pelaksanaan program Jasa Konstruksi, dikarenakan program tersebut tidak/belum terakomodir dalam RPJMD 2019-2024 dan Renstra DPU Kab. Tegal 2019-2024, yang kemudian disusun Renstra Terbatas DPU Kab. Tegal 2019-2024 guna menyusun indikator dan sasaran Program Jasa Konstruksi pada tahun-tahun selanjutnya.

Terkait pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Jasa Konstruksi pada Bidang Jasa Konstruksi, Laboratorium, Monitoring, dan Evaluasi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal di tahun 2020, baru sebatas layanan pemberian rekomendasi kepada para pemohon perpanjangan Ijin Usaha Jasa Konstruksi dari para penyelenggara Jasa Konstruksi di Kabupaten Tegal. Sampai dengan akhir tahun 2020 DPU Kab. Tegal telah menerima permohonan penerbitan rekomendasi dari 124 Badan Usaha dan telah diterbitkan rekomendasi sebanyak 122 buah rekomendasi atau 98,40% dari keseluruhan pemohon, 2 (dua) Badan Usaha tidak dapat diberikan rekomendasi dikarenakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki tidak dapat diverifikasi oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan pada akhir tahun 2019 DPU Kab. Tegal mendasari Permen PUPR Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional telah memberikan layanan tersebut kepada 5 (lima) Badan usaha.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merujuk pada Pasal 9 ayat (1) yang disebutkan bahwa “Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi; b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota; c. penerbitan izin usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi. Pada pasal (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi. (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

## 11) Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang yang baik dan terpadu. Indikator Penataan Ruang pada fokus fasilitasi wilayah/infrastruktur antara lain dilihat dari ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang (RTR). Untuk melihat berapa nilai ketaatan (persentase) antara realisasi pemanfaatan ruang terhadap dokumen RTR.

### a. Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Beberapa dokumen RTR yang harus dan yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sampai dengan saat ini tergambar sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 50 Jumlah Dokumen RTR Kabupaten Tahun 2017-2021**

No	Dokumen RTR	Target sesuai UU 26/2017	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Sampai 2020
1	RTR Wilayah (RTRW)	1						1
2	RTR Kawasan Strategis Kab (KSK)							
	KSK Ekonomi	9	0	0	0	0	0	0
	KSK Sosial Budaya	4	0	0	0	0	0	0
3	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)							
	Dok RDTR	18	5	5	0	0	0	18
	Perda RDTR	18	0	0	0	0	0	0
4	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	10	0	0	0	0	0	3

Sumber : Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal, 2022

Hanya 1 (satu) dokumen RTR yang sudah mendapatkan legalisasi hukum yaitu Perda 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) baru dalam tahap penyusunan dokumen namun belum ada yang diperdakan, karena mengacu proses legalisasi Perda Revisi RTRW.

### b. Pemanfaatan Ruang

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang yang baik dan terpadu. Indikator Penataan Ruang pada fokus fasilitasi wilayah/infrastruktur antara lain dilihat dari ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang (RTR). Untuk melihat berapa nilai ketaatan (persentase) antara realisasi pemanfaatan ruang terhadap dokumen RTR.

### c. Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Beberapa dokumen RTR yang harus dan yang telah disusun oleh Pemerintah



Kabupaten Tegal sampai dengan saat ini tergambar sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 51 Jumlah Dokumen RTR Kabupaten Tahun 2017-2021**

No	Dokumen RTR	Target sesuai UU 26/2017	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Sampai 2021
1	RTR Wilayah (RTRW)	1						1
2	RTR Kawasan Strategis Kab (KSK)							
	KSK Ekonomi	9	0	0	0	0	0	0
	KSK Sosial Budaya	4	0	0	0	0	0	0
3	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)							
	Dok RDTR	18	5	5	0	0	0	18
	Perda RDTR	18	0	0	0	0	0	0
4	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	10	0	0	0	0	0	3

Sumber : Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal, 2022

Hanya 1 (satu) dokumen RTR yang sudah mendapatkan legalisasi hukum yaitu Perda 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) baru dalam tahap penyusunan dokumen namun belum ada yang diperdakan, karena mengacu proses legalisasi Perda Revisi RTRW.

#### **d. Pemanfaatan Ruang**

Terbitnya Perda Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032 bertujuan sebagai pedoman pemanfaatan ruang di Kabupaten Tegal agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdayaguna serasi selaras seimbang dan berkelanjutan, serta mampu mensejahterakan masyarakat. Sehingga walaupun dalam skala makro RTRW ini dijadikan sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Khusus di Pemerintah Kabupaten indikator yang digunakan adalah pemanfaatan ruang dalam pengajuan permohonan Informasi Tata Ruang, agar tingkat ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang dapat tetap terkendali.

**Tabel 2. 52 Pemanfaatan Ruang Kabupaten Tahun 2014-2021**

Uraian	s/d 2019	2020	2021
Total Pengajuan Permohonan ITR	n/a	1114	1106
Pengajuan ITR yang Diperbolehkan	n/a	862	937
Pengajuan ITR yang Diperbolehkan Separuhnya	n/a	57	
Pengajuan ITR yang Tidak Diperbolehkan	n/a	195	169
Persentase Ketaatan	n/a	79,93%	84,7%

Sumber : Dokumen Penijauan Kembali (Dinas Perkimtaru), 2022

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 75% tingkat ketaatan tata ruang, di mana kondisi eksisting lahan tersebut merupakan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan oleh masyarakat yang telah sesuai dengan rencana tata ruang. Sedangkan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang Perda RTRW ditunjukkan dengan jumlah pengajuan ITR yang tidak diperbolehkan sebesar 15,3%, sedangkan pengajuan ITR yang diperbolehkan separuh adalah pengajuan ITR dengan bidang tanah yang jatuh pada dua Zonasi Tata Ruang yang berbeda, dan persentase pembolehan pembangunan diberikan mengikuti luas bidang tanah yang sesuai dengan rencana peruntukan pembangunan yang ditentukan oleh masyarakat.

#### D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

##### 1) Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana

Kerusakan tempat tinggal merupakan salah satu dampak dari adanya bencana alam. Untuk tetap menjaga kualitas hidup masyarakat korban bencana maka pemerintah berupaya untuk menyediakan atau melakukan perbaikan rumah bagi para korban bencana. Data penyediaan dan rehab rumah bagi korban bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 53 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana  
Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rencana Unit Rumah Korban Bencana yang akan ditangani pada Tahun n	27	N/A	5	11	92
Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani pada Tahun n	27	N/A	5	11	92
% Capaian Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana	100%	N/A	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal, 2022

Sumber dana bantuan untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana pada tahun 2017 dan 2019 berdasarkan data pada tabel diatas merupakan dari *corporate social responsibility (CSR)* dari Bank Jateng, sedangkan pada tahun 2020 bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan untuk tahun 2021 dari APBD KAB. Tegal.

## 2) Perumahan

Penyediaan perumahan baru untuk masyarakat sangatlah penting, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah karena dapat mengurangi *backlog* di Kabupaten Tegal. Melalui pembangunan maupun pengembangan perumahan juga dapat meningkatkan lingkungan yang tertata. Data pembangunan dan pengembangan perumahan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 54 Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Tahun 2017-2021**

Uraian	Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Setiap Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Target Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin pada Tahun n	24	29	29	62	32
Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin pada Tahun n	24	29	29	62	32
% Capaian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin pada Tahun n	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal, 2022

Dari data tabel diatas dapat terlihat jumlah pembangunan dan pengembangan perumahan di Kabupaten Tegal selalu mengalami kenaikan. Dengan hal tersebut maka angka *backlog* di Kabupaten Tegal dapat berkurang.

## 3) Kawasan Kumuh

Luas dan sebaran lokasi kumuh di Kabupaten Tegal telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 484 Tahun 2015 yang telah direvisi dengan Keputusan Bupati Nomor 239 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kumuh di Kabupaten Tegal, berbagai upaya telah dilakukan dalam upaya pengurangan lahan kumuh tersebut, luas dan sebaran pengurangan Kawasan kumuh di Kabupaten Tegal tergambar sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 55 Pengurangan Kawasan Kumuh Tahun 2018-2021**

No	Kecamatan	Luas sesuai SK 239/2016	Kondisi Sampai 2020				
			2018	2019	2020	2021	Kondisi Sampai 2021
1	Adiwerna	166,5	166,5	97,74	120,55	9,81	35,41
2	Dukuhturi	53,2	53,2	1,32	14,87	6,59	32,17
3	Jatinegara	18,4	18,4	0	0,19	-	18,167
4	Kedungbanteng	30,4	30,4	0	-27,96	0,02	58,275
5	Kramat	18,5	18,5	6,72	6,54	-	11,905
6	Lebaskiu	68,9	68,9	0	21,17	11,43	36,15
7	Slawi	28,5	28,5	4,2	16,11	1,29	11,19
8	Suradadi	48,6	48,6	0	-4,53	9,41	43,37

No	Kecamatan	Luas sesuai SK 239/2016	Kondisi Sampai 2020				
			2018	2019	2020	2021	Kondisi Sampai 2021
9	Talang	32,5	32,5	2,2	23,79	0,00	8,71
10	Tarub	9,88	9,88	0	0,92	0,08	8,96
11	Warureja	12,4	12,4	0	1,36	0,05	11,04
	Total	487,78	487,78	112,18	173,01	38,672	275,347

Sumber : Hasil Olah Data, 2022

Dari luasan kawasan kumuh 487,78 Ha telah terjadi penurunan luas kawasan kumuh seluas 205,50 Ha (42%). Hal tersebut dilakukan melalui kolaboratif anggaran dari pusat, provinsi, kabupaten dan desa, sehingga sampai dengan akhir Tahun 2020 luas kumuh di kabupaten Tegal menjadi 314,77 Ha.

#### 4) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin juga berpengaruh pada jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Berdasarkan data dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015, jumlah RTLH di Kabupaten tercatat sebesar 42.675 Kepala Rumah Tangga (KRT) terdiri dari:

- Prioritas Utama adalah Kelompok Rumah Tangga yang mempunyai tingkat keparahan (7 Indikator) tidak layak sebanyak : 1.331 KRT
- Prioritas 1,10 persen KRT termiskin yang mempunyai tiga dari ketiga komponen (atap, lantai dan dinding/aladin) tidak layak sebanyak : 4.268 KRT
- Prioritas 2,10 persen KRT termiskin yang mempunyai tiga dari ketiga komponen (atap, lantai dan dinding/aladin) tidak layak sebanyak : 4.268 KRT

**Tabel 2. 56 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017-2021**

Uraian	Jumlah RTLH Komulatif setiap Tahun (KRT)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Data RTLH 40% desil terendah	42.675	42.675	42.675	42.675	42.675
Kumulatif Realisasi RTLH	845	2.323	4.585	5.575	6.299
<b>% Capaian RTLH</b>	1,98	5,44	10,74	13,06	14,76

Sumber : Olah data Dinas Perkim, 2022

Penanganan RTLH di Kabupaten Tegal berasal dari berbagai sumber dana yakni APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Tegal. Berdasarkan penanganan tersebut terdapat kenaikan realisasi penanganan RTLH pada tahun 2021 yakni sebesar 14,76%.

#### 5) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial budaya dan ekonomi.

Setiap unit rumah menjadi layak huni dengan tercukupinya akses terhadap jaringan PSU berupa jaringan jalan, jaringan listrik, serta akses terhadap jaringan air minum dan sanitasi. Dari jumlah unit rumah di Kabupaten Tegal yang berjumlah 387.253 unit, capaian ketersediaan PSU tergambar sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 57 Capaian Akses PSU Tahun 2017 - 2021**

Uraian	Capaian Akses PSU									
	2017		2018		2019		2020		2021	
		%		%		%		%		%
Jumlah unit rumah di Kabupaten Tegal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	387.253	-
Jumlah rumah tangga/KK di Kabupaten Tegal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	534.004	-
Jumlah rumah yang difasilitasi air minum <b>(unit)</b>	N/A	N/A	194.068	50,11	N/A	N/A	194.068	50,11	213.228	55,06
Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi akses sanitasi <b>(KK)</b>	N/A	N/A	347.335	77,83	N/A	N/A	347.335	77,83	379.818	84
Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi akses listrik <b>(KK)</b>	335.635	N/A	355.124	N/A	335.635	N/A	355.124	N/A	367.421	94,87
Capaian Akses PSU Keseluruhan <b>(%)</b>	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	<b>77,97</b>

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Tegal, 2022

Dari data tersebut, dapat disimpulkan tidak meratanya ketersediaan PSU di Kabupaten Tegal. Maka dari itu diperlukan suatu upaya mencapai ketersediaan PSU di Kabupaten Tegal, salah satunya dengan melakukan perencanaan pengembangan PSU yang berkualitas.

## **E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

### **1) Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah untuk meningkatkan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP melakukan kegiatan patroli siaga diseluruh wilayah Kabupaten Tegal yang menjadi sasaran patroli yaitu tempat keramaian, hiburan malam dan PKL yang berjualan disepanjang bahu jalan, sesuai SPM patroli dilaksanakan tiga kali dalam sehari namun baru dilaksanakan dua kali dalam sehari. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerjasama dengan lembaga dan instansi yang terkait. Berikut disajikan data Cakupan Patroli Siaga Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Tegal mulai tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun patroli siaga mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 76 % sedangkan tahun 2021 sebesar 82%.

**Tabel 2. 58 Cakupan Patroli Siaga dan Pelaporan  
Pengaduan yang Tertangani terkait Ketertiban Umum dan  
Ketentraman Masyarakat Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah patroli siaga per tahun	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
2.	Target patroli siaga per tahun (3 kali sehari)	630	767	730	730	730
3.	Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	58	70	67	67	67
4.	Persentase Laporan Pengaduan Gangguan Trantibum yang tertangani	76%	81%	84%	82%	82%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2022

Patroli siaga ketentraman dan ketertiban umum dari tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan, sedangkan untuk tahun 2019 dan tahun 2021 tidak mengalami perubahan, sehingga diharapkan untuk periode yang akan datang agar bisa meningkat.

## 2) Penegakan Perundang-undangan Daerah

Penegakan Perundang-undangan Daerah dilaksanakan agar jumlah pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal akan semakin menurun. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati guna terpeliharanya ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor terkait. Berikut disajikan data Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2017-2021 seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 59 Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindak Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penegakan Perda					
	a. Jumlah Pelanggaran Perda	503	108	110	129	529
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	371	82	96	107	485
	c. Penyelesaian Penegakan Perda (%)	73,76	76	87,2	83	91,68
2.	Penegakan K3					
	a. Jumlah Pelanggaran K3	1.756	1673	1.623	1669	1667
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	1.688	1603	1.587	1604	1608
	c. Penyelesaian Penegakan K3 (%)	96,13	96	97,7	96	96,46
3	SPM Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Jumlah Warga	100%	100%	100%	100%	100%

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada					

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2022

Untuk penyelesaian Penegakan Perda tahun 2017 dibandingkan sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan, sedangkan untuk tahun 2020 mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar 91,68 %. Peningkatan ini tidak lepas dari penanganan yang lebih intensif dan kerjasama yang baik sehingga penanganan pelanggaran Perda semakin meningkat. Disamping itu dukungan tenaga PPNS dan anggaran untuk penegakan Perda secara pro yustisi sangat diperlukan akan semakin . Perda yang ditegakkan di tahun 2021 antara lain Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, dan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032. Sedangkan Perbup yang ditegakkan adalah Perbup Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Tegal. Penegakan Trantibum dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan.

Penegakan peraturan perundang-undangan dan patroli dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum merupakan upaya dalam pemenuhan standar pelayanan minimal yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dari tabel di atas dapat di diskripsikan bahwa antara jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada dengan jumlah warga negara yang akan terlayani dan mendapatkan pelayanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada adalah sama yaitu 100 % (seratus persen).

### 3) Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran antara lain untuk meningkatkan rasio Linmas per RT dan penanganan kebakaran di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2021 rasio tersebut mencapai 1 : 1,06. Hal ini berarti bahwa untuk setiap RT di Kabupaten Tegal tersedia jumlah Linmas sebanyak 1 orang lebih. Rasio ini lebih besar bila dibandingkan dengan yang ada dalam Permendagri nomor : 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menargetkan cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat 1 orang setiap RT. Rasio Linmas Terlatih di Kabupaten Tegal pada tahun 2021 sebanyak 576 orang sedangkan jumlah Linmas sebanyak 7.295 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio jumlah Linmas terlatih di Kabupaten Tegal pada tahun 2021 sebesar 1:12. Jumlah ini sama dengan tahun 2020 dikarenakan pada tahun 2021 tidak ada anggaran linmas disebabkan adanya refofusing akibat Covid-19, sehingga tidak ada penambahan jumlah linmas terlatih di tahun 2021. Jumlah penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Tegal pada tahun 2017 mencapai 99 kebakaran, kebakaran yang tertangani 100%. Pada tahun 2021

terjadi kebakaran sebanyak 89 kejadian kebakaran jumlah ini lebih banyak bila dibandingkan tahun 2020 yaitu 56 kejadian kebakaran. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Tegal. Penanganan bencana kebakaran akan bertambah baik apabila Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terpenuhi yaitu ada 9 WMK, maka perlu penambahan mobil pemadam kebakaran (1 pos WMK 1 mobil Damkar), mobil yang dimiliki sekarang berjumlah 5 unit sehingga masih kurang 4 unit mobil Damkar. Juga perlu ada penambahan SDM pemadam kebakaran (1 pos WMK membutuhkan 18 orang). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 60 Rasio Jumlah Linmas per RT Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Linmas	7.206	7.234	7.295	7.295	7.295
2.	Jumlah RT	6.875	6.889	6.889	6.889	6.889
3.	Rasio jumlah Linmas per RT	1:1,05	1:1,06	1:1,06	1:1,06	1:1,06

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2022

Rasio jumlah Linmas per RT dari tahun ke tahun cenderung tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, sehingga untuk tahun mendatang perlu kerja keras agar rasio jumlah Linmas per RT mengalami kenaikan.

**Tabel 2. 61 Rasio Jumlah Linmas Terlatih Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Linmas	7.206	7.234	7.295	7.295	7.295
2.	Jumlah Terlatih	240	320	480	576	576
3.	Rasio jumlah Linmas Terlatih	1:30	1:22	1:15	1:12	1:12

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2022

Rasio jumlah Linmas terlatih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan walaupun belum semua melaksanakan pelatihan, sehingga untuk tahun mendatang perlu kerja keras agar rasio jumlah Linmas terlatih mengalami kenaikan.

**Tabel 2. 62 Kasus Kebakaran Tertangani Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kebakaran	99	153	193	56	89
2.	Jumlah kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap ( <i>Response Time Rate 15 Menit</i> )	56	88	169	44	73
3.	Persentase Kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap ( <i>Response Time Rate 15 Menit</i> )	57%	58%	88%	79%	82%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2022

Kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, ini merupakan usaha yang harus



ditingkatkan agar untuk tahun-tahun mendatang semua jenis kebakaran bisa ditangani secara maksimal, sehingga resiko kebakaran bisa ditekan sekecil mungkin.

#### 4) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kenaikan sejalan dengan upaya-upaya pembinaan, pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah rawan bencana. Ke depan masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan yang sudah dan akan terus dilaksanakan dalam upaya memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang potensi bencana dan upaya-upaya pengurangan risiko bencana secara berkesinambungan.

**Tabel 2. 63 Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2017-2021**

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	325.655	342.795	360.837	379.828	399.828
Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana	584.336	584.336	584.336	584.336	584.336
Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	55,73%	58,66%	61,75%	65,00%	68,42%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2022

#### 5) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pelayanan ini lebih diprioritaskan pada upaya penyiapan kesiapsiagaan masyarakat dalam bentuk pembinaan, pelatihan, simulasi, apel/gladi kesiapsiagaan dan sosialisasi. Ke depan masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan yang sudah dan akan terus dilaksanakan dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan khususnya bagi masyarakat di daerah rawan bencana.

**Tabel 2. 64 Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Pembinaan Penanggulangan Bencana**

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah warga negara yang ikut pembinaan	6.919	7.283	7.666	8.070	8.270
Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana	584.336	584.336	584.336	584.336	584.336
Persentase warga negara yang ikut pembinaan penanggulangan bencana	1,18%	1,25%	1,31%	1,38%	1,42%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2022

## 6) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Pelayanan ini lebih diprioritaskan pada upaya penyelamatan dan pemberian bantuan peralatan dan logistik. Ke depan masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan yang sudah dan akan terus dilaksanakan dalam upaya peningkatan kapasitas personil, bantuan material, peralatan dan logistik bagi korban bencana.

**Tabel 2. 65 Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Akibat Bencana**

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi	44.585	46.932	49.402	52.002	66.166
Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	233.597	233.597	233.597	233.597	314.233
Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	19,09%	20,09%	21,15%	22,26%	21,06%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2022

Salah satu pelayanan yang di berikan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menunjang misi pemerintahan yang salah satunya tertuang dalam tujuanmenurunnya risiko bencana, yang didukung oleh 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. 66 Capaian Indeks Risiko Bencana dan Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Level	Ket.
1.	Indeks Risiko Bencana	Angka	181,98	181,91	Tinggi	Resiko bencana tinggi
2.	Indeks Kapasitas Daerah	Angka	0,62	0,62	Sedang	Kapasitas penanggulangan bencana sedang

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2022

Kabupaten Tegal dengan kondisi topografi yang ada merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana yang lengkap. Hampir semua ancaman bencana seperti banjir, longsor, angin kencang, gempa bumi, letusan gunung berapi, kekeringan maupun kebakaran hutan bahkan tsunami bisa terjadi di wilayah Kabupaten Tegal. Namun demikian kapasitas masyarakat maupun kelembagaan dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tegal tergolong masih rendah, yang ditandai dengan angka Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana pada tahun 2021 sebesar 0,62 yang hanya masuk katagori sedang. Hal inilah yang menyebabkan **risiko bencana** di wilayah

Kabupaten Tegal tergolong **tinggi** dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Jawa Tengah.

Kabupaten Tegal merupakan daerah rawan bencana. Jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tegal antara lain kekeringan di kecamatan-kecamatan Warureja, Suradadi, Kramat dan Kedungbanteng. Banjir di Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Warureja, Suradadi, Kramat. Tanah longsor di Kecamatan Tarub, Pangkah, Bumijawa, Bojong dan Jatinegara. Berikut disajikan data kebencanaan di Kabupaten Tegal.

**Tabel 2. 67 Kondisi Kebencanaan Tahun 2017-2021**

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa Tangguh Bencana	2	2	2	5	8
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (Milyard)	4,5	6,5	5,7	6,8	6,8
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat kabupaten	1	1	1	1	3
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0.15	0.2	0.3	0.4	0.4

*Sumber: Evaluasi RAD SDGs, Tahun 2022*

Desa tangguh bencana saat ini masih belum menyeluruh di desa-desa kawasan rawan bencana. Sebagian desa tangguh bencana masih merupakan pelaksanaan kegiatan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sebagian lagi oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Untuk tahun yang akan datang diharapkan jumlah desa tangguh bencana dapat meningkat dengan memanfaatkan penganggaran melalui APBDesa.

Terkait dengan SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum aspek kebencanaan memiliki (3) tiga indikator yaitu pelayanan informasi rawan bencana yang capainya pada tahun 2021 sebesar 68,42% atau sebanyak 399.828 jumlah penduduk telah memperoleh informasi rawan bencana dari 584.336 penduduk yang ada di wilayah rawan bencana. Indikator kedua yaitu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana capainya masih rendah hanya 1,428% pada tahun 2021 yaitu baru 8270 penduduk dari 584.336 penduduk yang berhak mendapat layanan. Dan yang ketiga adalah penyelamatan dan evakuasi korban bencana tercapai 21,06% dari 66.166 penduduk yang telah mendapat atau ditolong dan dievakuasi dari perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana sebanyak 314.233 jiwa.

## **F. Sosial**

### **1) Pemberdayaan Sosial**

Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perseorangan, lembaga, kelompok, keluarga dan masyarakat agar memiliki daya guna untuk berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Hasil Pemberdayaan Sosial dapat dilihat dalam Tabel berikut,

dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan dapat meningkatkan kapasitas PSKS.

**Tabel 2. 68 Data Layanan Pemberdayaan Sosial PSKS Kabupaten Tegal**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial.	2.025	1.925	1.875	1.763	1.763
2.	Jumlah Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial yang sudah dibina dan diberdayakan	572	572	572	572	137
3.	Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	28,25	29,71	30,51	32,44	7,77
4.	Jumlah Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial yang seharusnya diberdayakan	2.050	2.145	2.145	2.100	2.100
5.	Cakupan Pemberdayaan Sosial	98,78	89,74	87,41	85,71	83,95

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2022

Layanan Pemberdayaan Sosial baik Perorangan, Keluarga, Kelembagaan dan Sumber Dana Sosial yang diberdayakan semakin berkurang, hal ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan Sosial terhadap PSKS belum optimal dikarenakan :

- 1) Adanya Pandemi Covid 19 yang mengharuskan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) sehingga pelaksanaan Pemberdayaan PSKS yang melibatkan banyak Orang ditiadakan.
- 2) Adanya Relokasi Anggaran untuk Penanganan Dampak Covid 19 sehingga Anggaran Kegiatan pemberdayaan PSKS di drop.
- 3) Penguatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum Simultan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- 4) Belum semua LKSA melaksanakan Standar Nasional Pelayanan Anak (SNPA);
- 5) Belum semua LKS melaksanakan Standar Pelayanan Sosial yang telah ditetapkan/Terakreditasi;
- 6) Ijin Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan yang berasal dari masyarakat belum sepenuhnya dilaksanakan secara prosedural.

Adapun Upaya yang harus dilakukan :

- a. Meningkatkan peran dan fungsi Pilar-pilar Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada, termasuk Dunia Usaha yaitu dengan meningkatkan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang belum simultan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- b. Melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti Karang Taruna (Katar), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS), Dunia Usaha dan Kelompok-kelompok Sosial Berbasis Masyarakat diantaranya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat WKSMB (Kelompok Arisan, Pengajian, Usaha Kecil) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan UEP.

- c. Melakukan bimbingan manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak / agar tertib administrasi dan meningkatnya pengelolaan pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai Standar Nasional Pelayanan Anak .
- d. Melakukan bimbingan manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial agar tertib administrasi dan meningkatnya pengelolaan pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai Standar Pelayanan Sosial.

Pengenalan dan sosialisasi kepada petugas (Perbankan dan Dunia Usaha) yang melakukan/menghimpun sumber dana yang berasal dari masyarakat agar tertib dalam perijinan dan usaha pengumpulan sumber dana yang berasal dari masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan sosial.

## 2) Penanganan Warga Migran Korban Kekerasan

Warga Migran adalah Warga negara Indonesia yang sedang atau akan melaksanakan suatu pekerjaan di luar Wilayah Indonesia dengan mendapatkan upah, namun karena sesuatu hal kadang mereka menjadi korban tindak kekerasan di negara lain , mulai dari kekerasan fisik maupun mental sehingga pemerintah berkewajiban untuk melindungi para migran dari korban kekerasan.

**Tabel 2. 69 Data Warga Migran Korban Kekerasan**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Warga Migran Korban Kekerasan yang ditangani	-	9	-	11	0
2.	Jumlah Warga Migran Korban Kekerasan yang seharusnya ditangani	-	9	-	11	0
3.	Cakupan Penanganan Warga Migran Korban kekerasan	-	100	-	100	0

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2022

Kasus kekerasan terhadap warga migran yang berasal dari wilayah kabupaten Tegal dalam kurun waktu 5 Tahun cukup menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah, Meski kasusnya tidak terlalu banyak namun hal ini terjadi hampir setiap tahun , sehingga Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Sosial perlu memfasilitasi pemulangan warga migran hingga ke tempat asalnya serta melakukan pendampingan kepada warga migran yang mengalami trauma akibat kekerasan , meski pelayanan penanganan Warga migran yang menjadi korban kekerasan dirasa belum optimal dan masih ditemukan banyak kendala diantaranya :

1. Adanya status migran ilegal menjadikan kesulitan dalam penanganan.
2. Belum adanya sistem penanganan Warga Migran yang menjadi korban kekerasan.
3. Belum adanya anggaran sehingga menjadi kendala dalam penanganan Warga migran yang menjadi korban kekerasan.

Upaya yang harus dilakukan :

1. Memberikan Edukasi kepada masyarakat tentang prosedur menjadi Tenaga Kerja di luar negeri.
2. Dibangunnya sistem atau prosedur Penganganan warga migran yang menjadi korban kekerasan.
3. Di anggaran melalui APBD II.

### **3) Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan yang memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, yang terdiri dari Rehabilitasi Sosial Dasar yaitu upaya yang dilakukan untuk melakukan fungsi sosial seseorang dan Rehabilitasi Sosial Lanjut adalah upaya untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang. Rehabilitasi Dasar diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu Anak Terlantar, Usia Lanjut, Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial yang dilakukan dalam bentuk memberikan dukungan pelayanan dan pendampingan kepada PPKS dan memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan Lembaga yang telah ditetapkan Pemerintah dan / atau Pusat Kesejahteraan Sosial. Layanan tersebut berupa data dan pengaduan, kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Rehabilitasi Sosial Lanjut dilaksanakan oleh UPT setingkat eselon II yaitu di Balai Besar Rehabilitasi Sosial dan Balai Besar Rehabilitasi Vokasional

Pemberian layanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial dilakukan pada rumah singgah atau pusat kesejahteraan sosial. Dalam pengembangan Layanan Sosial Kabupaten Tegal telah memiliki Rumah Perlindungan Sosial Sementara / Rumah Singgah cukup representative yang terletak di Kecamatan Pangkah, dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan sosial terkait dengan penanganan PPKS yang memerlukan tempat perlindungan sementara, karena kondisi atau Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Pusat, Provinsi atau Masyarakat belum mampu menerima secara keseluruhan karena over kapasitas. Pusat kesejahteraan Sosial, saat ini ada 12 (dua belas) telah terbentuk di desa/ kelurahan, dan adanya dukungan aksesibilitas sebagai upaya untuk membantu PPKS sehingga memperoleh kemudahan akses terhadap berbagai jenis layanan diantaranya sosialisasi, advokasi sosial dan fasilitasi.

Layanan Data dan Pengaduan Kabupaten Tegal, telah memiliki Gedung Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan dan / atau pertanyaan yang disampaikan masyarakat, mengenai tidak terpenuhinya kebutuhan dasar

Layanan kedaruratan, merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan kepada PPKS yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang meliputi : permakanan, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, fasilitasi pembuatan NIK, KK, akta kelahiran, surat nikah, KTA, akses ke layanan

kesehatan dan pendidikan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan rujukan, diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan/ atau relawan sosial, Kabupaten Tegal dalam Program T.J ( Tiga Jaminan : Jaminan Kesehatan, Jaminan Rumah dan Jaminan Hidup), tengah menangani Program Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia.

Hasil dari upaya penanganan dapat dilihat dalam data Pelayanan dan Rehabilitasi PPKS mulai tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 seperti pada tabel, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun terdapat peningkatan keberfungsian sosial PPKS.

**Tabel 2. 70 Layanan PPKS Kabupaten Tegal Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS	1.925	1.925	1950	1975	2.180
2.	Jumlah PPKS yang seharusnya direhabilitasi Sosial	2.000	2.000	2025	2050	2.180
3.	Cakupan Rehabilitasi Sosial PPKS	96,25	96,25	96,29	96,34	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2022

Cakupan akses layanan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak terlantar, Usia Lanjut terlantar, Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial masih perlu ditingkatkan Hal ini disebabkan karena :

1. Keterbatasan SDM bidang Kesejahteraan Sosial yang berpengaruh terhadap kecepatan dan Ketepatan Penanganan Masalah Sosial.
2. Terbatasnya Kuota layanan di Panti / Balai Rehabilitasi Sosial sebagai penerima rujukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) milik.
3. Masih banyak Penyandang Disabilitas yang belum mendapatkan layanan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial termasuk pemenuhan alat bantu Pemerintah Provinsi /Kementrian Sosial.
4. Belum adanya Identitas kependudukan menjadikan kendala dalam mengakses layanan sosial.

Adapun Upaya yang harus dilakukan :

1. Pemenuhan Kebutuhan SDM bidang kesejahteraan sosial melalui formasi ASN.
2. Melakukan Kerjasama dengan Balai Rehabilitasi Sosial baik milik Pemerintah Provinsi /Kementrian Sosial.
3. Menyiapkan Anggaran untuk Fasilitas atau rujukan , penjangkauan dan pemenuhan alat bantu.
4. Melakukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### **4) Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat Fakir miskin, beresiko sosial, rentan sosial dan anak terlantar , adapun upaya yang telah dilakukan dalam pemberian perlindungan dan jaminan sosial serta Pendataan Fakir Miskin tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 seperti tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2. 71 Layanan Perlindungan Sosial**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kelompok Beresiko Sosial	63.825	63.824	74.292	141.368	182.727
2.	Jumlah Penanganan Kelompok Beresiko Sosial yang seharusnya mendapat pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial	63.845	63.850	72.898	169.739	496.587
3.	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	99,97	99,96	101,91	83,28	36,79

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2022

Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Kelompok Beresiko Sosial sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2019 mengalami penurunan , hal ini disebabkan :

1. Verifikasi dan Validasi Data telah dilakukan oleh 287 Desa /Kelurahan terkait Kelayakan Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
2. Pemerintah Desa telah melakukan perekrutan SDM khusus Operator Data Desa beserta Dukungan Sarana dan Prasarana.
3. Desa telah mengalokasikan Anggaran untuk Pemutakhiran Data Kemiskinan melalui Dana Desa untuk meminimalisir *Eclution* dan *Inclution Error*.

**Tabel 2. 72 Data Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Tegal**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Pendataan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	688.943	697.893	723.590	701.931	913.476
2.	Jumlah Pendataan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang seharusnya ditangani	714.497	722.124	741.879	776.209	913.477
3.	Cakupan Penanganan Fakir Miskin	96,42	96,64	97,50	90,43	100,00

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2022

Dari Tabel di atas menggambarkan bahwa sasaran program perlindungan dan Jaminan Sosial semakin meningkat dimana di tahun 2021 mencapai 182.727 penerima Bantuan Sosial (PKH,BPNT dan KJS) dibanding Tahun sebelumnya sebesar 141.368 sasaran , namun Capaian di tahun 2021 sebesar 36,79 hal ini karena adanya lonjakan jumlah Verval Data DTKS pada Desil 1 dan Desil 2 sejumlah 496.587 Jiwa. hal ini menggambarkan bahwa Pelaksanaan Verval Data telah berjalan secara optimal. Namun demikian akses Cakupan layanan Sosial harus selalu ditingkatkan mengingat belum semua masyarakat yang layak dan kategori pra sejahtera mendapatkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial secara komprehensif, dengan melalui Pendataan Fakir Miskin secara berkala. Ketidakakuratan data sasaran antara lain disebabkan oleh :

1. Masih terbatasnya SDM IT Operator Data di Tingkat Desa.Kelurahan



sehingga proses expot Data hasil Verifikasi dan Validasi DTKS ke aplikasi SIKS-NG belum optimal.

2. Masih Terbatasnya sarana/ Prasarana Pengolahan Data sehingga proses pemilahan dan pepadanan Data membutuhkan waktu lama karena Sarana Pengolah Data (Spesifikasi Perangkat Hardware ) kurang mendukung.
3. Masih adanya Inclusion Error dan exclusion error dimana masyarakat yang sudah tidak layak /mampu masih masuk di DTKS sebagai penerima Bansos sementara masyarakat yang layak mendapatkan Program penanganan Fakir Miskin namun belum Masuk DTKS.

Adapun Upaya yang harus dilakukan :

1. Melakukan Bimbingan Teknis tentang bagaimana proses expot Data hasil Verifikasi dan Validasi DTKS ke aplikasi SIKS-NG di Desa se Kabupaten Tegal.
2. Mengajukan Anggaran Pengadaan sarana/ Prasarana Pengolahan Data sehingga proses pemilahan dan pepadanan Data lebih optimal dan akurat.
3. Melakukan Koordinasi dari tingkat Desa sampai tingkat Pusat guna menyelesaikan permasalahan tersebut.
4. Pembuatan Akses data kependudukan melalui Web.Sidanik.tegalkab.go.id sebagai sarana operatot Desa dalam melakukan Pepadanan NIK dan pencocokan data Kependudukan.

## 5) Penanganan Bencana

Bencana merupakan peristiwa alam yang tidak bisa diprediksi kapan dan dimana akan terjadi, yang berdampak besar terhadap masyarakat baik materiil maupun korban jiwa serta menimbulkan trauma kepada masyarakat korban bencana sehingga perlu adanya penanganan yang tepat dan cepat. berdasarkan Data tiga tahun terakhir Mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 dapat kita lihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2. 73 Data Korban Bencana Kabupaten Tegal**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Korban Bencana yang ditangani	-	540	915	506	764
2.	Jumlah Korban Bencana yang seharusnya ditangani	-	540	915	506	764
3.	Cakupan Penanganan Korban Bencana	-	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2022

Dari data tersebut diatas menggambarkan bahwa kasus kebencanaan di Kabupaten Tegal terjadi setiap Tahun dengan cenderung meningkat jumlah korbannya, di Tahun 2021 terjadi lonjakan yang sangat tinggi hal ini diakibatkan adanya Bencana Alam (Tanah longsor, Banjir, Puting beliung,Tanah Bergerak ) serta Bencana Sosial (Kebakaran, Pandemi covid-19), Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial penanganan korban Bencana adalah dengan memberikan pemenuhan Kebutuhan Dasar (SPM) yang

meliputi kebutuhan permakanaan, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Namun Penanganan Kebencanaan di Kabupaten Tegal masih belum optimal Hal ini disebabkan karena :

1. Bantuan yang diberikan kepada korban bencana masih belum memenuhi Kebutuhan Dasar Minimal.
2. Kapasitas pendamping sosial dan pendamping psikososial korban bencana belum maksimal.
3. Koordinasi dalam membangun mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu belum optimal.
4. Sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana belum representatif.
5. Belum seluruhnya daerah rawan bencana di Kabupaten Tegal melaksanakan kesiapsiagaan berbasis masyarakat.
6. Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana bagi anak sekolah.

Adapun upaya yang harus dilakukan adalah :

1. Meningkatkan persediaan barang kebutuhan logistik penanggulangan bencana.
2. Peningkatan kapasitas SDM pendamping sosial dan pendamping psikososial korban bencana.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga penanggulangan bencana.
4. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
5. Melakukan pembentukan dan pengembangan Kampung Siaga Bencana.
6. Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana bagi anak sekolah.

## **6) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

Taman Makam pahlawan PURA KUSUMA merupakan lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk para pahlawan nasional, anggota militer dan Pejabat Tinggi di wilayah Kabupaten Tegal.

Taman Makam Pahlawan PURA KUSUMA juga dijadikan sebagai tempat ziarah ataupun kegiatan oleh masyarakat dan anak generasi muda untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan, sehingga akan muncul semangat patriotisme di kalangan generasi muda, untuk itu perlu adanya pengelolaan dan pemeliharaan secara terus menerus untuk menjaga sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan supaya tetap berfungsi dengan baik.

Namun demikian pengelolaan Taman Makam Pahlawan dirasa belum optimal hal ini disebabkan karena :

1. Kurangnya sarana prasarana Taman Makam Pahlawan
2. Taman Makam Pahlawan belum representatif
3. Kurangnya tenaga pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
4. Belum optimalnya Pemberdayaan Perintis Kemerdekaan/Wakawuri dan Veteran Pejuang

### **2.1.3.2 Fokus Layanan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

#### **A. Tenaga Kerja**

##### **1) Perencanaan Tenaga Kerja**

Peranan sumber daya manusia dalam pembangunan di berbagai bidang pada suatu negara tidak dapat terbantahkan. Sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan modal/kapital serta teknologi secara bersama-sama dan bersinergi berkontribusi terhadap terbentuknya Produk Domestik/Regional Bruto (PDB/PDRB). Besaran PDB/PDRB merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Indikator makro ekonomi ini sekaligus dipandang sebagai tingkat kesejahteraan suatu wilayah/Negara. SDM secara makro merupakan penduduk suatu negara/wilayah yang sudah memasuki usia kerja, baik yang belum maupun yang sudah bekerja. Berdasarkan definisi menurut BPS, penduduk usia kerja yang siap memproduksi atau melakukan aktivitas ekonomi (*economically active population*) disebut angkatan kerja (*labor force*). Termasuk dalam penduduk golongan ini adalah mereka yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Berdasarkan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah disebutkan pada Pasal 7, bahwa:

- 1) Dalam rangka pembangunan Ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja.
- 2) Perencanaan Tenaga Kerja meliputi Perencanaan Tenaga Kerja Makro, dan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro.
- 3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja.

Pada prinsipnya pembangunan ketenagakerjaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas serta kesejahteraan tenaga kerja. Hal ini karena tenaga kerja selain penting peranannya dalam proses produksi juga merupakan subyek dari objek pembangunan suatu wilayah. Sebagai subyek pembangunan, tenaga kerja menjadi faktor utama yang menggerakkan proses pembangunan secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai obyek pembangunan, tenaga kerja merupakan sasaran akhir bagi peningkatan kesejahteraan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pembangunan bidang ketenagakerjaan perlu dilakukan secara konsisten dan terarah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan perlindungan tenaga kerja melalui sistem pengawasan ketenagakerjaan yang efektif.

##### **2) Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Tingkat produktivitas tenaga kerja yaitu rasio antara jumlah produk domestik regional bruto dengan total penduduk yang bekerja. Semakin tinggi nilai tingkat produktivitas semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

**Tabel 2. 74 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja terhadap PDRB**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai PDRB Kabupaten (juta)	22.322,10	23.552,55	24.866,73	24.502,62	25.402,91
2	Total Penduduk yang bekerja	645,162	630,593	645,698	644,978	644,978
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (ribu)	34.599	37.349	38.510	37.990	39.385

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami kondisi fluktuatif, adapun tingkat capaian tertinggi yaitu pada tahun 2019 dimana capaian nilai PDRB Kabupaten Tegal tinggi yang kemudian diikuti dengan tingginya penduduk Kabupaten Tegal yang bekerja.

### 3) Kompetensi Tenaga Kerja

Mendasari data pencari kerja dan penempatan tenaga kerja pada tahun 2017-2021, diketahui bahwa pencari kerja di Kabupaten Tegal masih tinggi sedangkan angka penempatan tenaga kerja masih relatif rendah, hal ini salah satunya dikarenakan keterbatasan dalam keahlian (*low skilled*) dari tingkat pendidikan dan /atau keterampilan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Permasalahan ini yang diduga menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya penyerapan tenaga kerja. Berikut ini data terkait lowongan tenaga kerja yang dapat menggambarkan masih rendahnya penyerapan tenaga kerja salah satunya menurut golongan lapangan usaha.

**Tabel 2. 75 Lowongan Kerja yang Terdaftar, Ditempatkan dan Dihapuskan Menurut Golongan Lapangan Usaha Kabupaten Tegal Bulan Januari – Desember Tahun 2020**

Golongan Pokok Lapangan Usaha	Sisa akhir bulan lalu		Lowongan terdaftar bulan ini		Lowongan dipenuhi bulan ini		Lowongan dihapuskan bulan ini		Sisa lowongan akhir bulan ini	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12	-	22	-	22	-	-	-	12	-
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	369	247	717	755	882	945	-	-	204	57
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah Dan Sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Golongan Pokok Lapangan Usaha	Sisa akhir bulan lalu		Lowongan terdaftar bulan ini		Lowongan dipenuhi bulan ini		Lowongan dihapuskan bulan ini		Sisa lowongan akhir bulan ini	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Konstruksi	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	120	120	85	211	85	211	-	-	120	120
Transportasi dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Keuangan dan Asuransi	216	564	64	53	64	53	-	-	216	564
Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	300	144	1	1	1	1	-	-	300	144
Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	48	-	-	-	-	-	-	-	48
Jasa Pendidikan	648	180	-	-	-	-	-	-	648	180
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	552	348	-	-	-	-	-	-	552	348
Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Jasa Lainnya	24	-	-	12	-	12	-	-	24	-
Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan	12	24	3	53	3	53	-	-	12	24
Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.253</b>	<b>1.675</b>	<b>896</b>	<b>1.085</b>	<b>1.061</b>	<b>1.275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.088</b>	<b>1.485</b>

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2022

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2020 berdasarkan golongan lapangan usahanya Industri Pengolahan merupakan bidang yang paling banyak ditempatkan tenaga kerja yang kemudian disusul oleh bidang perdagangan.

#### 4) Pencari dan Penempatan Tenaga Kerja

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Tegal pada kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 sangat bervariasi, pada kurun waktu Tahun 2017-2019 mengalami penurunan hal ini karena terdukung adanya pelaksanaan Job fair dan Penempatan melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) namun pelaksanaannya tidak rutin setiap tahun, sehingga pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan. Secara rinci persentase pencari kerja yang ditempatkan dapat dilihat Tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 76 Data Pencari dan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Tegal Tahun 2017 -2021**

Tahun	Jumlah Pencaker	Penempatan					Total Penempatan	Persentase Penempatan
		AKL	AKAD	AKAN	BKK	Job Fair		
2017	16,077	124	231	653	3,537	10	4,555	28,33
2018	15,464	942	1,589	1,866	3,116	870	8,383	54,21
2019	10,432	1,179	932	669	-	-	2,780	26,65
2020	15,189	1,493	1,020	193	-	-	2,706	17,82
2021	15,189	1,493	1,020	193	-	-	2,706	17,82

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2022

Penempatan tenaga kerja dilakukan melalui beberapa mekanisme diantaranya melalui AKL, AKAD, AKAN, BKK dan *Job Fair*. Persentase penempatan melalui mekanisme tersebut paling besar pada tahun 2018 yaitu mencapai 54,21 % dengan total penempatan 8,383.

#### 5) Hubungan Industrial

Hubungan Industrial pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang dilakukan antara pengusaha dengan pekerja, namun adakalanya dalam pelaksanaannya sering terjadinya perselisihan, beberapa indikator dalam pelaksanaan Hubungan Industrial antara lain:

##### a. Tingkat Peraturan Perusahaan yang Disahkan

Merupakan rasio antara jumlah perusahaan wajib lapor yang memiliki peraturan perusahaan dengan total perusahaan wajib lapor.

**Tabel 2. 77 Perusahaan Wajib Lapor Memiliki Peraturan Perusahaan di Kabupaten Tegal Tahun 2017 -2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perusahaan Wajib Lapor	667	-	-	-	-
2	Perusahaan Wajib lapor memiliki peraturan perusahaan	667	667	468	382	382

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2022

Pada tabel diatas menunjukan bahwa pedoman tertulis bagi perusahaan dengan buruh/pekerja/karyawan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan pada tahun 2020 sebanyak 382, sehingga diharapkan dapat mendorong terwujudnya hubungan kerja yang harmonis.

#### **b. Tingkat Perjanjian Kerja Bersama**

Merupakan rasio antara jumlah perusahaan wajib lapor yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama dengan total perusahaan waji lapor.

**Tabel 2. 78 Perusahaan Wajib Lapor Memiliki Perjanjian Kerja Bersama di Kabupaten Tegal Tahun 2017 -2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perusahaan Wajib Lapor	667	-	-	-	-
2	Perusahaan Wajib lapor memiliki Perjanjian Kerja Bersama	6	4	4	5	5

*Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2022*

Pada tahun 2020 perusahaan wajib lapor yang telah memiliki perjanjian kerja bersama sebanyak 5 perusahaan, hal ini masih sangat rendah dari jumlah perusahaan yang ada. Diharapkan dari jumlah perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama dapat meredam tuntutan pekerja yang berlebihan, mendorong produktivitas kerja, mendorong peningkatan daya saing pekerja sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan pekerjaanya.

#### **c. Tingkat LKS Bipartit**

Merupakan rasio antara jumlah perusahaan wajib lapor yang memiliki LKS Bipartit dengan total perusahaan wajib lapor.

**Tabel 2. 79 LKS Bipatrit di Kabupaten Tegal Tahun 2017 -2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perusahaan Wajib Lapor	667	-	-	-	-
2	Perusahaan Wajib lapor memiliki LKS Bipartit	14	15	21	24	24

*Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2022*

Tingkat LKS Bipartit merupakan bentuk upaya pemerintah dalam membangun forum komunikasi dan konsultasi diperusahaan untuk mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dalam upaya menampung aspirasi para pekerja di perusahaan tersebut, dari jumlah perusahaan wajib lapor pada tahun 2020 terdapat 24 perusahaan yang telah membuat LKS Bipartit.

#### d. Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial

Tingkat perselisihan hubungan industrial merupakan rasio antara jumlah perselisihan Hubungan Industrial dengan total perusahaan wajib lapor.

**Tabel 2. 80 Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Tegal Tahun 2017 -2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perusahaan Wajib Lapor	667	-	-	-	-
2	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial	8	14	16	27	29

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2022

Tingkat perselisihan hubungan industrial merupakan gambaran kualitas hubungan industrial di suatu wilayah, pada tahun 2021 di Kabupaten Tegal jumlah perselisihan hubungan industrial mencapai 29.

### B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### 1) Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia. Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai capaian kinerja pemberdayaan perempuan 2017-2021. Sebagaimana Tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 81 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan Tahun 2017 -2021**

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Capaian Keadilan dan Kesetaraan Gender/APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	400	700	700	940	960
2.	Jumlah Pekerja Perempuan sebagai PNS (Jiwa)	5.926	5.341	4862	4859	4247
3.	Jumlah Perempuan sebagai Anggota DPRD (Jiwa)	10	10	12	12	12
4.	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif (%)	20	20	24	24	24

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2022

Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta. Capaian kinerja APE telah menunjukkan kinerja yang baik, Kabupaten Tegal berada pada posisi APE Madya. Kondisi ini perlu dipertahankan untuk menggambarkan kinerja pemberdayaan perempuan yang lebih baik lagi.



Perempuan Aparatur Sipil Negara (ASN) menduduki posisi manajer cukup mendapat tempat dalam struktur birokrasi di Kabupaten Tegal. Kondisi kinerja selalu meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana dapat dicermati dalam gambar berikut.

**Tabel 2. 82 Perempuan ASN sebagai Manajer Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	26.75	27.95	28.69	28,83	36,49

Sumber: Evaluasi RAD SDGs,2022

Keberadaan perempuan ASN menduduki posisi manajer dimungkinkan karena kapasitas ASN perempuan tidak kalah bersaing dengan ASN laki-laki dari segi kapasitas, kompetensi dan kepemimpinan. Sehingga penempatan jabatan ASN perempuan dapat diterapkan, meningkat setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pembangunan yang dilaksanakan harus berpijak pada perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Sebagai bentuk upaya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah ditunjukkan dengan anggaran responsif gender (ARG). Berikut ini Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kabupaten Tegal Tahun 2017 – 2021.

**Tabel 2. 83 Anggaran Responsif Gender (ARG) Kabupaten Tegal Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Persentase ARG				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah ARG pada belanja operasi APBD		36.547.450.000	248.727.027.000	491.396.436.000	106.332.316.500
2.	Belanja operasi APBD	1.611.513.759.083	1.704.320.211.333	1.776.181.411.040	1.830.927.981.000	2.961.886.307.000
3.	Persentase ARG terhadap belanja Operasi APBD	NA	2,14	14,00	26,84	3,59

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2022

## 2) Perlindungan Perempuan

Perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan merupakan implementasi Negara hadir dalam melindungi segenap warga Negara termasuk perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran didalam kehidupan rumah tangga.

**Tabel 2. 84 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Kasus KDRT				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan	90	42	54	40	54
2.	Jumlah Penduduk Perempuan	721.004	722.920	753.718	774.913	816.986
3.	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	12,48	5,81	7,16	5,16	6,61

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2022

### 3) Peningkatan Kualitas Keluarga

Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, maupun yang memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, memiliki hubungan yang serasi dan selaras, seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Pengasuhan memegang peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga dan akan menentukan baik buruknya karakter seorang anak kelak. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan disertai lemahnya program pemerintah dalam membantu/memberdayakan keluarga tersebut untuk mengasuh dan melindungi anak, dikhawatirkan akan menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan dan beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Oleh karena itu, Kemen PPPA telah menyiapkan program unggulan PUSPAGA untuk mengatasi masalah tersebut.

Program peningkatan kualitas keluarga merupakan program yang baru dilaksanakan mulai tahun 2020 di Kabupaten Tegal berupa pelayanan konseling kepada keluarga, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 85 Pencapaian Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Pelayanan Kualitas Keluarga				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah keluarga yang mendapat pelayanan konseling	-	-	-	203	331
2.	Jumlah keluarga	-	517.914	534.392	538.160	538.085
3.	Persentase pelayanan peningkatan kualitas keluarga	NA	NA	NA	0,04	0,06

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2022

### 4) Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Tujuan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data informasi gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyusun program/kegiatan *responsive gender* dan peduli hak anak. Berikut pencapaian pengelolaan sistem data gender dan anak di Kabupaten Tegal Tahun 2017 -2021.

**Tabel 2. 86 Pencapaian Pengelolaan Data Gender dan Anak Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah lembaga/instansi yang menyediakan atau memberikan data gender dan anak	15	15	15	15	15
2.	Jumlah lembaga/instansi	48	48	48	48	48
3.	Persentase penyediaan dan pengelolaan data gender dan anak	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2022

### 5) Pemenuhan Hak Anak

Dalam rangka peningkatan pemenuhan hak anak sebagai upaya peningkatan kualitas hidup anak dilakukan meliputi pembentukan Desa Layak Anak (Delana) dan Forum Anak tingkat Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati Tabel berikut.

**Tabel 2. 87 Capaian Sasaran Program Perlindungan Anak Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Tahun (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Capaian Pemenuhan Hak Anak	400	500	550	570	610
2.	Persentase Desa Layak Anak (Delana) yang dibentuk.	5,22	6,62	20,6	20,64	22,65
3.	Persentase Forum Anak tingkat Desa yang dibentuk.	1,39	1,39	4,9	4,88	5,58
4.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani.	5	5	5,1	9	9
5.	Jumlah Tenaga Terlatih Konvensi Hak Anak (KHA).	100	100	120	75	60
6.	Persentase Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terbentuk. Kecamatan	2	2	27,8	27,8	27,8

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2022

Capaian pemenuhan hak anak menunjukkan kinerja yang belum optimal. Capaian pemenuhan hak anak Kabupaten Tegal masih menunjukkan posisi KLA Pratama. Hal ini disebabkan koordinasi lintas sektor belum optimal dalam memenuhi ketentuan persyaratan KLA. KLA merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pelayanan di bidang perlindungan anak.

### 6) Perlindungan Khusus Anak

Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) cukup efektif untuk menindaklanjuti pengaduan kekerasan dalam rumah

tangga. Angka KDRT perlu dipertahankan untuk ditekan. Meski demikian KDRT yang ada masih fenomena gunung es, yaitu kecenderungan korban KDRT untuk melapor dimungkinkan masih rendah karena merasa malu atau takut melapor. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dikoordinasikan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA). Berikut disajikan data penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

**Tabel 2. 88 Persentase Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Tegal Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Anak yang mengalami kekerasan	78	19	46	36	44
Jumlah Anak seluruhnya	488.628	483.936	479.168	474.291	526.807
Persentase kekerasan terhadap anak	0,0160	0,0039	0,0096	0,0076	0,0084

*Sumber: Evaluasi RAD SDGs, 2022*

Kesadaran masyarakat untuk melaporkan penanganan terhadap perempuan dan anak menunjukkan kecenderungan yang baik. Pada tahun 2017 jumlah laporan cukup tinggi, dan pada tahun-tahun selanjutnya jumlah laporan menurun. Dari semua laporan yang ada, telah ditindaklanjuti 100%, baik berupa penanganan medis, mediasi hingga upaya jalur hukum.

## C. Pangan

### 1) Ketersediaan Pangan Utama

Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar utama bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup, oleh karena itu kecukupan pangan bagi setiap orang pada setiap waktu merupakan hak azasi yang harus dipenuhi. Ketersediaan pangan suatu wilayah didasarkan pada ketersediaan pangan utama, jumlah konsumsi pangan dan jumlah penduduk. Tabel berikut memberikan gambaran tentang ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal.

**Tabel 2. 89 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Tegal Tahun 2017 – 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama(ton)	221.533	221.928	222.421	223.568	392.578
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.429.386	1.433.515	1.440.698	1.596.996	1.664.588
3.	Jumlah Konsumsi Pangan Utama(ton)	133.155	134.588	135.987	136.481	148.839
4.	Ketersediaan Pangan Utama (ton) terhadap Jumlah Konsumsi Pangan Utama	166,37	164,89	163,56	163,80	263,77

*Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2022*

Ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal terus meningkat dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 jumlah ketersediaan pangan utama 392.578 ton dan jumlah penduduk 1.664.588 jiwa, secara otomatis konsumsi pangan utama meningkat menjadi 148.839 ton dengan ketersediaan pangan utama mencapai 263,77 persen.

Kemampuan lingkungan hidup dalam penyediaan pangan dihitung dengan mempertimbangkan dari 1) sisi permintaan (*demand*) dengan memperhatikan laju

pertumbuhan penduduk, indeks konsumsi beras penduduk pertahun dan 2) sisi ketersediaan (*supply*) dengan mempertimbangkan produksi padi, produksi beras dan tingkat produktifitas lahan sawah dalam pemenuhan kebutuhan beras.

Kebutuhan total beras di tahun 2031 sebesar 187.820,44 ton sedangkan ketersediaan padi di tahun 2031 sebesar 1.440.981,12 ton dan ketersediaan beras di tahun 2013 sebesar 936.637, 65 ton. Dari hasil perhitungan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Tegal, dapat diketahui bahwa Kabupaten Tegal dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam kondisi surplus dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) masyarakat. Sedangkan untuk posisi daya dukung lahan sawah sampai akhir tahun perencanaan mempunyai nilai  $\alpha > 1$ , berarti wilayah tersebut mampu swasembada pangan dalam arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal.

## 2) Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Tegal

Pangan merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas serta perbaikan kualitas penduduk. Distribusi dan akses pangan memiliki peranan yang sangat strategis karena mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Distribusi pangan diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan merata sehingga tidak menimbulkan kerawanan pangan. Tabel berikut menjelaskan tentang Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Tegal Tahun 2017-2021.

**Tabel 2. 90 Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Distribusi dan Akses Pangan					
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	49,95	77,68	104,22	105,23	69,49
	Stabilitas harga dan pasokan pangan	85,14	98,67	91,64	93,52	68,01
2.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan					
	Skor pola pangan harapan	83,6	72,1	78,6	80,4	91,7
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	73,58	66,1	65,1	61,5	11,5
3.	Penanganan kerawanan pangan					
	Penanganan daerah rawan pangan	16	9	15	11	3

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2022

Indikator dari jenis pelayanan Distribusi dan Akses Pangan adalah Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah, serta indikator stabilitas harga dan pasokan pangan. Target komoditas yang wajib dipantau untuk diketahui informasi pasokan, harga dan akses adalah gabah/beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir dan cabe merah.

Indikator dari jenis pelayanan Panganekaragaman dan Keamanan Pangan adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan. Pada tahun 2021 kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan berkurang menjadi 11,5 karena anggaran kegiatan yang berkurang.

Indikator dari Penanganan Kerawanan Pangan pada Tahun 2020 sebanyak 11 Desa, sedangkan pada tahun 2021 turun menjadi 3. Dukungan untuk pencapaian jenis pelayanan ini antara lain dengan pembuatan peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat Kabupaten Tegal.

### **3) Regulasi Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Gubernur dan Bupati/Walikota, dimana bahwa gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban melaporkan kepada pemerintah dan DPRD tentang pembangunan ketahanan pangan; dan sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan yang dapat dipedomani pemerintah Kabupaten/Kota telah tersedia, diantaranya yaitu: UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; PP 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

## **D. Pertanian**

Urusan pertanian berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Terkait dengan urusan pertanian maka pemerintah kabupaten Tegal hanya fokus pada koordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan pertanian serta memfasilitasi kegiatan pemetaan dan identifikasi penggunaan bidang–bidang yang dimiliki oleh masyarakat, serta identifikasi/pemetaan bidang tanah milik pemerintah dan pengurusan sertifikasi tanah–tanah tersebut.

Urusan pertanian berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Terkait dengan urusan pertanian maka pemerintah kabupaten Tegal hanya fokus pada koordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan pertanian serta memfasilitasi kegiatan pemetaan dan identifikasi penggunaan bidang–bidang yang dimiliki oleh masyarakat, serta identifikasi/pemetaan bidang tanah milik pemerintah dan pengurusan sertifikasi tanah–tanah tersebut.

**Tabel 2. 91 Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kecamatan yang telah diidentifikasi dan dipetakan bidang tanah (penggunaan lahannya)	0	0	0	0	0
2	Jumlah Bidang tanah masy yang difasilitasi Pemerintah untuk sertifikat / Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	5.000	25.000	45.000	28.000	28.000
3	Jumlah Kecamatan yang telah diidentifikasi dan dipetakan tanah asset milik pemerintah	NA	NA	NA	3	3
4	Jumlah Bidang Tanah Milik Kabupaten	1.593	1.593	1950	1925	1925
	a. Bersertifikat	N/A	N/A	567	1077	1077
	b. Belum Bersertifikat	N/A	N/A	1383	848	848
	Persentase Tanah Milik Kabupaten yang bersertifikat			29,08	55,95	55,95
5	Persentase Penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPN dan Dinas Perkimtaru Kab. Tegal, 2022

Pemerintah Kabupaten Tegal bekerjasama dengan BPN/ATR Kabupaten Tegal untuk memetakan semua bidang tanah yang ada di Kabupaten Tegal hal ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan dan nilai zona masing – masing bidang tanah. Selanjutnya bidang – bidang tanah tersebut difasilitasi oleh BPN/ATR untuk proses sertifikat kepemilikannya melalui program PTSL.

Selain itu juga memetakan bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Yang selanjutnya khusus untuk tanah milik pemerintah kabupaten akan dilakukan percepatan dalam pengurusan sertifikat kekanya. Pemerintah Kabupaten Tegal selama 5 tahun terakhir hanya mampu menyelesaikan hak atas tanah milik Pemda dengan jumlah 1052 bidang atau sekitar 53,9 % dari jumlah total bidang tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Urusan penyelesaian ganti rugi / santunan tanah untuk pembangunan atau untuk kepentingan umum. Dari hasil identifikasi paling tidak dibutuhkan tanah untuk pembangunan pembangunan jalan baru, pasar, tempat pembuangan sampah, fasilitas kesehatan dan balai benih ikan dengan luasan sekitar 5,9 hektar. Sedangkan sampai tahun 2020 baru tercapai 11%.

**Tabel 2. 92 Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kecamatan yang telah diidentifikasi dan dipetakan bidang tanah (penggunaan lahannya)	0	0	0	0	0
2	Jumlah Bidang tanah masy yang difasilitasi Pemerintah untuk sertifikat / Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	5.000	25.000	45.000	28.000	28.000
3	Jumlah Kecamatan yang telah diidentifikasi dan dipetakan tanah asset milik pemerintah	NA	NA	NA	3	3
4	Jumlah Bidang Tanah Milik Kabupaten	1.593	1.593	1950	1925	1925
	a. Bersertifikat	N/A	N/A	567	1077	1077
	b. Belum Bersertifikat	N/A	N/A	1383	848	848
	Persentase Tanah Milik Kabupaten yang bersertifikat			29,08	55,95	55,95
5	Persentase Penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPN dan Dinas Perkimtaru Kab. Tegal, 2022

Pemerintah Kabupaten Tegal bekerjasama dengan BPN/ATR Kabupaten Tegal untuk memetakan semua bidang tanah yang ada di Kabupaten Tegal hal ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan dan nilai zona masing – masing bidang tanah. Selanjutnya bidang – bidang tanah tersebut difasilitasi oleh BPN/ATR untuk proses sertifikat kepemilikannya melalui program PTSL.

Selain itu juga memetakan bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Yang selanjutnya khusus untuk tanah milik pemerintah kabupaten akan dilakukan percepatan dalam pengurusan sertifikat kekanya. Pemerintah Kabupaten Tegal selama 5 tahun terakhir hanya mampu menyelesaikan hak atas tanah milik Pemda dengan jumlah 1052 bidang atau sekitar 53,9 % dari jumlah total bidang tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Urusan penyelesaian ganti rugi / santunan tanah untuk pembangunan atau untuk kepentingan umum. Dari hasil identifikasi paling tidak dibutuhkan tanah untuk pembangunan pembangunan jalan baru, pasar, tempat pembuangan sampah, fasilitas kesehatan dan balai benih ikan dengan luasan sekitar 5,9 hektar. Sedangkan sampai tahun 2020 baru tercapai 11%.

## **E. Lingkungan Hidup**

### **1) Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup**

Sampai dengan tahun 2021 dokumen pengendalian dan perencanaan lingkungan hidup baru tersusun 6 dokumen diantaranya Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kab.Tegal Tahun 2019-2024; Pengukuran IKLH tahun 2020, Dokumen Daya Dukung



Daya tampung sektor Sumber Daya Air; Dokumen RPPLH; Dokumen Pengukuran IKLH tahun 2021 dan Dokumen IKPLHD tahun 2021.

## 2) Penataan Lingkungan

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tegal sudah mengacupada wawasan Lingkungan Hidup dan Berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan penyusunan KLHS RPMJD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 pada tahun 2021 juga telah menyusun dokumen neraca sumber daya alam dan dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai data utama pembuatan dokumen rencana RPPLH. Sesuai amanat Undang-undang 32 tahun 2009 yang telah di ubah menjadi Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dimana setiap kabupaten/Kota diwajibkan menyusun Perda RPPLH. Maka pada tahun 2021 DLH kab Tegal telah menyusun dokumen RPPLH sebagai dasar acuan Perda tentang RPPLH. Adapun terkait Kajian Dampak Lingkungan untuk selama 5 tahun terakhir tertuang dalam tabel berikut.

**Tabel 2. 93 Kajian Dampak Lingkungan Tahun 2017 - 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Usaha/kegiatan Wajib Izin Lingkungan (Amdal/UKL-UPL)	70	55	72	57	29
2.	SPPL (usaha kecil/mikro)	140	151	364	506	406

*Sumber : DLH Kabupaten Tegal, 2022*

Kondisi tersebut diatas diharapkan telah dapat mendukung peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tegal terutama pada Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

**Tabel 2. 94 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2021**

No	Jenis Indeks	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,62	64,76	66,18	55,05	60,67
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	40,00	35,00	38,89	31,11	44,09
3.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,44	83,90	84,74	84,99	85,13
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	68,98	72,72	72,72	50,55	43,89

*Sumber : KLH, Kabupaten Tegal, 2022*

Capaian Indeks Kualitas Air cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan adanya peningkatan aktifitas masyarakat dan industri. Selain Indeks Kualitas Air, capaian yang menurun juga terjadi pada Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Penurunan ini disebabkan selain efek perubahan tata guna lahan juga disebabkan adanya perubahan peraturan terkait pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

## 3) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah untuk

mengendalikan kualitas dan kuantitas pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim; Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota ; Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat; Pengisolasian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; Pengehentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian sumber pencemar; Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua pihak yang terkait.

**Tabel 2. 95 Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2017 - 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pemantauan lingkungan	54	55	68	36	104
2	Jumlah rekomendasi ijin pembuangan limbah cair	9	3	4	8	8
3	Jumlah pembinaan usaha	20	20	50	80	150
4	Jumlah wilayah yang terkena kerusakan lingkungan	8	10	4	9	9
5	Jumlah lokasi perlindungan mata air (adaptasi perubahan iklim)	-	-	1	5	1

*Sumber : DLH Kab. Tegal, 2022*

Perhitungan dari keenam jenis kajian dihasilkan rata-rata Pengendalian Kualitas dan kuantitas pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui metode skoring yang berbeda ataupun skoring tunggal.

#### **4) Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan**

Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup selalu terawasi, dapat dicegah dan/atau dihentikan pelanggaran perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik, dan dapat tertangani melalui pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

**Tabel 2. 96 Data Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Tahun 2017 - 2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Sekolah Adiwiyata					
	- Tingkat Nasional			2	-	-
	- Tingkat Provinsi	7	2	4	-	-
	- Tingkat Kabupaten	24	2	9	-	3
	Denominator : Sekolah potensi minat adiwiyata (dikali %)	60	10	59	-	6
2.	Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pengawasan					
	Denominator : Total Perusahaan (dikali %)	47,2 % (110 dari 233)	50,38 % (131 dari 233)	61,25% (147 dari 240)	60,80% (152 dari 250)	-
3.	Jumlah Penerapan Sanksi Administrasi Denominator : Hasil mapping sanksi administrasi (dikali %)	18	4	1	7	9

Sumber : DLH Kab. Tegal, 2022

Pada indikator Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengawasan, pada tahun 2021 sudah tidak dilaksanakan kembali karena sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Indikator tersebut, diganti dengan indikator baru yakni jumlah perusahaan yang taat dibandingkan jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan. Dari indikator yang diperoleh, pada tahun 2021 didapatkan 5 dari 14 perusahaan sudah taat dengan aturan perundang-undangan yang ada.

### 5) Sampah Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui penambahan armada dan sarana prasarana persampahan. Volume sampah yang terangkut per hari di Kabupaten Tegal diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan. Hasil dari pengelolaan sampah adalah meningkatnya volume sampah yang terangkut per hari sebagaimana tersaji data pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 97 Volume Sampah Terangkut per Hari Tahun 2017 - 2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah volume sampah yang terangkut (m <sup>3</sup> )	347,00	512,37	566,00	578,00	427,38
2	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m <sup>3</sup> )	496,00	640,46	573,41	583,79	533,98
3	Sampah terangkut	70,00	80,00	98,00	99,00	80,04

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2022

Dalam penanganan sampah menggunakan pendekatan berbasis *3R* yaitu *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (mendaur ulang) telah dibentuk Bank Sampah melalui komunitas sebanyak 140 unit sampai dengan tahun

2021. Selain itu, dalam upaya pengurangan sampah juga di dukung dengan dilaksanakannya program prioritas Bupati Tegal, yakni Program Desa Merdeka Sampah yang diharapkan mampu mengurangi sampah yang dihasilkan di tingkat Pedesaan dengan target sejumlah 281 desa dan 6 Kelurahan s.d tahun 2024. Dengan jumlah tersebut di harapkan dapat meningkat di tahun 2024, sehingga program pengurangan sampah plastik di harapkan dapat secara maksimal di terapkan. Berikut adalah data pembentukan Bank Sampah sebagaimana Tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 98 Bank Sampah Tahun 2017-2021**

No.	Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Bank Sampah (unit)	86 unit	120 unit	130 unit	140 unit	140 unit
2.	Potensi Bank Sampah yang dibentuk (unit)	100 unit	129 unit	135 unit	140 unit	165 unit
3.	Bank Sampah yang dibentuk (%)	86,00 %	93,02%	96,29%	100,00%	84,84 %

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2022

## F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah layanan pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) atau surat keterangan kependudukan.

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan terlihat dari bertambahnya angka kepemilikan KK, KTP-el dan KIA. Hal ini berdampak pula pada meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dokumen kependudukan. Dukungan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan sangat penting dalam mewujudkan pelayanan dokumen kependudukan yang berkualitas.

Data jumlah kepemilikan KTP el, KK dan KIA mulai tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 yang secara signifikan meningkat, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 99 Kepemilikan KTP el, KK dan KIA Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Cakupan Kepemilikan Identitas				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kartu Keluarga (KK)	83,75	88,68	90,86	91,67	95,30
2.	Kepemilikan KTP el	73,42	84,13	97,08	99,68	99,69
3.	Kepemilikan KIA	7.415	-	9,68	21,80	31,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2022

Dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa angka kepemilikan dokumen kependudukan KK dan KTP-el setiap tahunnya meningkat. Namun demikian peningkatan hasil pelayanan pendaftaran penduduk di atas belum merata untuk

seluruh wilayah Kabupaten Tegal. Terutama untuk penduduk pada wilayah-wilayah yang jauh dari tempat pelayanan atau faktor lain seperti memiliki kebutuhan khusus, difable dan lain-lain. Oleh karena itu agar pelayanan pendaftaran penduduk tetap sampai kepada masyarakat, dibutuhkan pula dukungan dari perangkat daerah untuk menuntaskan target kepemilikan identitas penduduk bagi masyarakat Kabupaten Tegal.

Sementara itu pelayanan penerbitan KIA di Kabupaten Tegal dimulai pada tahun 2017, kemudian di tahun 2018 terhenti karena terkendala sarana dan prasarana pencetakan KIA. Tahun 2019 penerbitan KIA dapat berlangsung kembali karena telah tercukupinya kelengkapan dan peralatan yang mendukung, walaupun secara bertahap.

Dalam pelayanan pendaftaran penduduk dari segi Kualitas Layanan dan Responsibilitas masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan pemberian informasi kepada masyarakat seperti sosialisasi belum maksimal sehingga masih ada masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan juga masih terdapat masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dengan tidak mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditetapkan, kurangnya optimalisasi akurasi dan validasi database kependudukan sehingga ada penduduk yang belum mendapatkan NIK secara Nasional atau masih memiliki NIK ganda, Letak geografis (tempat tinggal masyarakat dengan kecamatan menyulitkan masyarakat untuk melakukan perekaman KTP Elektronik.

## 2) Pelayanan Catatan Sipil

Pelayanan Catatan Sipil adalah pelayanan pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk dalam register pencatatan sipil kemudian diterbitkan akta-akta Catatan Sipil. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Namun penggunaan akta-akta catatan sipil sering terabaikan karena penggunaannya kurang terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial maupun ekonomi. Sehingga perlu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya akta-akta pencatatan sipil. Angka kepemilikan akta kelahiran dan kematian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 100 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian  
Tahun 2017 – 2021**

No.	Uraian	Cakupan Kepemilikan Identitas				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Penduduk memiliki Akta Kelahiran	63,29	63,3	64,11	93,10	94,88
2.	Persentase Penduduk memiliki Akta Kematian	N/A	N/A	N/A	68,54	69,87

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2022

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa jumlah angka kepemilikan akta kelahiran

cukup tinggi pada akhir tahun 2021. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan melibatkan para stake holder, melakukan sosialisasi secara berkesinambungan, melakukan kerja sama dengan perangkat daerah pendukung, pengembangan aplikasi SIAK melalui inovasi pelayanan on line dan inovasi layanan dengan sistem paket seperti LOAK (Lahir Olah Akta Kelahiran/Akta Kematian dan KK).

Upaya yang sama akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna meningkatkan capaian kepemilikan akta kematian. Selama ini kendala utama dalam merumuskan capaian kepemilikan akta kematian adalah tidak tersedianya angka pembagi yaitu jumlah penduduk yang meninggal secara akurat. Data kematian selama ini diperoleh dari Laporan Kematian yang dikirim beberapa Kecamatan atau Desa/Kelurahan, tetapi tidak rutin dilaporkan dan informasi data penduduk meninggal tidak lengkap.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pengembangan aplikasi SIREP (Sistem Registrasi Penduduk), sehingga Petugas Registrator Desa/Kelurahan dapat melaporkan peristiwa kematian penduduk cukup melalui aplikasi. Penggunaan aplikasi cukup efektif karena dalam tahun 2020 bisa dirumuskan capaian angka kepemilikan akta kematian dengan bilangan pembagi data kematian yang telah masuk dalam aplikasi SIREP. Data jumlah penduduk yang meninggal masih bisa terus bertambah, mengingat belum semua data kematian tercatat dalam aplikasi.

### **3) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan.**

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama dan inovasi pelayanan, memiliki peran penting dalam mengelola informasi Administrasi Kependudukan. dengan menggunakan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan pada seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. SIAK digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Agar pelayanan dapat berlangsung setiap waktu, SIAK perlu didukung oleh sarana dan prasarana pendu yang memadai. Sarana dan prasarana pendukung SIAK dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 101 Sarana dan Prasarana Pendukung SIAK di Dinas Dukcapil dan Rumah Paten Kabupaten Tegal Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Kondisi Layanan SIAK				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Aplikasi pokok SIAK (unit)	3	3	3	7	7
2.	Aplikasi pendukung SIAK (unit)	2	3	4	4	4

No	Uraian	Kondisi Layanan SIAK				
		2017	2018	2019	2020	2021
3.	Jaringan SIAK (unit)	22	22	22	26	26
4.	Perangkat Keras SIAK (user)	29	33	34	72	72
5.	SDM IT SIAK (org)	2	3	4	4	4

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2022

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa telah tersedia aplikasi pokok pelayanan administrasi kependudukan yaitu SIAK (Data Penduduk), BCard (Aplikasi Pencetakan KTP el) dan Benroll (Aplikasi Perekaman KTPel) dan aplikasi pendukung berupa Suplemen SMS Gateway, Website, Jaringan SIAK untuk setiap bidang dan 18 Rumah Paten. Aplikasi diatas hanya dapat digunakan dengan dukungan peralatan lain berupa personal komputer, printer, printer KTPel, jaringan kabel, server, kelengkapan internet dan lain-lain. Mengingat intensitas penggunaan peralatan yang sangat tinggi, maka sangat rawan terjadi kerusakan. Sehingga dibutuhkan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan IT.

Hasil dari pengelolaan informasi kependudukan dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pemanfaat data yaitu OPD dan instansi lainnya (pemerintah dan swasta). Inovasi pada semua jenis produk layanan Adminduk diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengurusan/pelayanan Adminduk bagi Petugas selaku pengelola layanan dan Masyarakat selaku penerima layanan. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan sinergitas semua bidang pada Disdukcapil dan OPD yang terkait.

Pemanfaatan data telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal mulai tahun 2017 dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Pemanfaatan data dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 102 Data Lembaga Pemanfaat Data, Jumlah Perjanjian Kerja Sama dan Jumlah Inovasi Pelayanan Tahun 2017 – 2021**

NO	URAIAN	Layanan Pemanfaatan Data				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah OPD pemanfaat data	20	20	20	20	20
2.	Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS)	3	7	13	14	16
3.	Jumlah Inovasi Pelayanan	2	3	3	4	6
	Jumlah OPD pemanfaat data berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS)	-	1	2	3	2

NO	URAIAN	Layanan Pemanfaatan Data				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	-	5%	10%	15%	10 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2022

Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan yang dapat disajikan tahun 2017 karena bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan baru terbentuk pada Januari 2017. Data rincian penduduk dapat diberikan dalam bentuk hak akses data yang diikat dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selama ini lembaga terbanyak pemanfaat data adalah Desa.

Dalam perkembangannya, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Dengan terbitnya ketentuan yang baru ini, maka perjanjian kerja sama dan pemanfaatan data yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini.

## G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### 1) Administrasi Pemerintahan Desa

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi perubahan yang mendasar terhadap tata kelola Pemerintahan Desa seperti Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Aset Desa serta Administrasi Pemerintahan Desa lainnya. Pada tahun 2015, Desa hanya memperoleh Dana ADD (Alokasi Dana Desa) antara Rp. 81.000.000 – 115.000.000. Salah satu faktor penting dalam Undang-Undang Desa adalah adanya Dana Transfer besar untuk pembangunan di desa yang bersumber dari APBN dan APBD. Adapun alokasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan di Desa sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 103 Alokasi Transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa  
Tahun 2017 – 2021**

No.	Uraian	Alokasi DD Dan ADD (X Rp 1.000)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	DD – APBN	234.026.299	282.703.163	340.458.369	358.311.953	359.311.953
2.	ADD – APBD	120.521.520	118.087.607	122.510.452	125.000.000	113.076.784

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2022

Dana Transfer tersebut diatas tersalur 100% dari RKUD ke RKD, namun demikian penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yaitu RKPDes dan APBDes sebagai syarat penyaluran dana transfer yang telah ditentukan batas waktu penyusunannya, yaitu RKPDes paling lambat disusun Akhir Oktober tahun berjalan dan APBDes ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun Berjalan dalam



pelaksanaannya belum mematuhi ketentuan batas waktu. Adapun data Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, sebagai berikut:

**Tabel 2. 104 Dokumen Perencanaan Tingkat Desa Tahun 2017 - 2021**

NO	URAIAN	Jumlah Desa yg memiliki Dok Perencanaan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	RKPDes;					
	1.Desember s/d Januari	100	125	150	281	281
	2.Pebruari s/d Maret	181	156	131	0	0
2.	APBDes					
	1.Januari s/d Pebruari	100	125	150	278	281
	2.Maret s/d April	181	156	131	3	1

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2022

Ketidaktepatan waktu dalam penyusunan RKPdes dan APBdes disamping karena adanya peraturan yang baru juga karena kapasitas SDM di Pemerintah Desa yang masih minim dalam memahami sistem pemerintahan desa sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang baru, tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LPPD akhir tahun anggaran. Disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Berikut adalah Data penyampaian LPPD.

**Tabel 2. 105 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Desa Tahun 2017 - 2021**

NO	URAIAN	Jumlah Desa yang Menyusun LPPD				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/LPPD					
	1) Januari –Maret	115	120	127	276	279
	2) > Maret	166	161	154	5	2

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2022

Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa masih belum sesuai ketentuan. Pemerintah Desa masih dalam tahap awal inventarisir aset desa, belum dalam bentuk neraca aset desa. Dikarenakan Permendagri nomor 47 Tahun 2016 tentang Adminstrasi Pemerintahan Desa di Ketentuan Bagian Kedua Adminstrasi Umum Pasal 5 Ayat 2 huruf c. Masalah Buku Inventaris dan Kekayaan Desa belum dilaksanakan dan baru dilaksanakan tahun 2017.

**Tabel 2. 106 Data Pengelolaan Asset Desa Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Jumlah Desa yang Menyusun Data Aset Desa				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Neraca Aset	5	10	15	20	26
2	KIB/KIR	25	50	65	75	81

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2022

Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa ditandai jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya bertambah/meningkat. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan koordinasi semua stake holder yang terkait dengan Aparatur Pemerintahan Desa. Mulai Tahun 2015 dalam menunjang peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa tersebut telah dilaksanakan berbagai upaya baik koordinasi, pembinaan, bintek, penyuluhan, pelatihan-pelatihan maupun fasilitasi pengadaan perangkat desa dan fasilitasi pemilihan kepala desa. Sebagai ilustrasi berikut tersaji data hasil kegiatan mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 6 tahun terjadi perubahan/ peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa.

**Tabel 2. 107 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Kondisi Kapasitas Aparatur Desa				
		2017	2018	2019	2020	2021
A.	Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya (%)	38,17	50,15	55,19	56,25	76,60
1.	Aparatur Pemerintahan Desa yang memiliki kompetensi (%)	22,53	32,74	33,15	34,00	56,00
1.1	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih	950	1380	1.680	1.780	1.870
1.2	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa	4215	4215	4.232	2.439	2.510

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya dalam kurun waktu 6 tahun semakin bertambah/meningkat. Dari kondisi awal pada tahun 2017 sebesar 38,17 % semakin meningkat hingga pada tahun 2021 sebesar 76,60 %.

Untuk mencapai kondisi tersebut telah dilakukan kerja keras semua stake holder yang terkait dengan Aparatur Pemerintahan Desa mulai Tahun 2017 dalam menunjang peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa tersebut dengan telah dilaksanakannya berbagai upaya baik koordinasi, pembinaan, bintek, penyuluhan, pelatihan-pelatihan maupun fasilitasi pengadaan perangkat desa dan fasilitasi pemilihan kepala desa sebagaimana tersaji dalam tabel diatas.

**Tabel 2. 108 Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
2.	Desa yang melaksanakan pilkades dengan tertib (%)	100	100	60,57	0	0
2.1	Jumlah Desa yang melaksanakan pilkades dengan tertib	48	115	117	0	0
2.2	Jumlah Desa yang melaksanakan pilkades	48	115	281	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Pemilihan Desa di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 6 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ini dilaksanakan serentak bergelombang, dengan dibagi pelaksanaannya menjadi 3 (tiga) gelombang berdasarkan masa bhakti/jabatan kepala desa pada setiap desa. Pelaksanaan gelombang I dilaksanakan pada tahun 2017 sebanyak 48 desa,

gelombang II pada tahun 2018 sebanyak 115 desa dan gelombang III tahun 2019 sebanyak 117 desa, sehingga total 281 desa telah terpilih kepala desa baru.

**Tabel 2. 109 Jumlah Desa yang Melaksanakan Pengadaan Perangkat Desa Tahun 2017 - 2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
3	Desa yang melaksanakan pengadaan perangkat Desa dengan tertib (%)	100	100	95	96	24
3.1	Jumlah Desa yang melaksanakan pengadaan perangkat Desa dengan tertib	281	23	17	20	24
3.2	Jumlah Desa yang melaksanakan pengadaan	281	23	281	20	24

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Pengadaan Perangkat Desa di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 6 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Pada tahun 2017 sebanyak 281 desa melaksanakan pengadaan perangkat desa guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru tentang SOTK Desa, tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebanyak 23 desa dan 17 desa, tahun 2020 sebanyak 20 desa sedangkan tahun 2021 sebanyak 24 Desa yang dilaksanakan dalam rangka pengisian jabatan perangkat desa yang lowong karena purna tugas atau berhenti menjadi perangkat desa.

Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Desa ini dilaksanakan berdasarkan usulan permintaan dari desa bersangkutan dengan menyesuaikan pada kebutuhan dan jumlah penduduk yang disesuaikan dengan SOTK Desa.

**Tabel 2. 110 Jumlah Desa Yang Menyusun Peraturan Desa Tahun 2017 - 2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
4	Desa tertib penyusunan Perdes (%)	9,60	11,03	11,07	11,15	89,00
4.1	Jumlah Desa yang menyusun Perdes sesuai Peraturan	27	31	33	35	252
4.2	Jumlah Desa yang melaksanakan penyusunan Perdes	281	281	281	281	281

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Desa yang menyusun peraturan desa dalam kurun waktu 6 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 desa yang menyusun peraturan desa sesuai dengan peraturan menunjukkan trend yang semakin baik.

**Tabel 2. 111 Jumlah Desa Yang Menyediakan Data Perkembangan Desa Tahun 2017 - 2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
5	Desa tertib menyediakan data perkembangan Desa (%)	60,49	80,07	90,15	98,93	100
5.1	Jumlah Desa yang menyajikan data perkembangan Desa dengan benar	170	225	253	278	281

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
5.2	Jumlah Desa yang dievaluasi data perkembangan Desanya	281	281	281	281	281

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Desa yang menyediakan data perkembangan desa dalam kurun waktu 6 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 desa yang menyediakan data perkembangan desa sesuai dengan peraturan menunjukkan trend yang semakin baik.

**Tabel 2. 112 Jumlah Perkembangan Desa Tahun 2017 - 2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
6	Peningkatan Desa kurang berkembang menjadi berkembang (%)	19,35	28,00	100	81,25	83,63
6.1	Jumlah Desa kurang berkembang meningkat menjadi Desa berkembang	6	7	25	26	235
6.2	Jumlah Desa kurang berkembang	31	25	0	32	281

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkembangan desa dalam kurun waktu 6 tahun mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan trend yang semakin baik, namun untuk tahun 2020 perkembangan desa kurang menggembirakan, hal ini dikarenakan pembangunan di desa lebih difokuskan pada penanganan dampak pandemi covid-19. Pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan.

**Tabel 2. 113 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ke Desa dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2017 - 2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Monitoring dan evaluasi pemilihan kepala desa (desa)	48	115	117	-	-
2.	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang menejemen Pemerintahan Desa (org)	950	1380	1.680	-	-
3.	Monitoring dan Evaluasi pengadaan perangkat Desa	281	23	17	20	24

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke desa dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tegal dalam kurun waktu 6 tahun telah terlaksana dengan baik.

Sasaran yang hendak dicapai melalui pengembangan desa adalah perkembangan BUMDes dan pengembangan desa di Kabupaten Tegal. Untuk mencapai kondisi dilakukan melalui koordinasi keras Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tegal, bersama dengan Dinas/Instansi terkait serta Pemerintah Desa dan masyarakat pedesaan.

Kondisi data jumlah Bumdes. jumlah kawasan pedesaan, jumlah kerjasama desa mulai tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 seperti tabel di bawah. Data tersebut

menjadi landasan untuk mencapai sasaran program selama kurun waktu 6 tahun.

**Tabel 2. 114 Kondisi BUM Desa Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Kondisi BUM Desa				
		2017	2018	2019	2020	2021
	BUMDES tumbuh dan berkembang (%)	40	12	30	60,12	73,31
	Jumlah BUMDES	25	35	65	168	206
1.	Status Bumdes Dasar	15	20	47	67	80
2.	Status Bumdes Tumbuh	10	15	15	69	88
3.	Status Bumdes Berkembang	0	0	0	32	34
4.	Status Bumdes Maju	0	0	0	0	4

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2022

Pada akhir tahun 2021, jumlah BUMDesa yang telah berdiri di Kabupaten Tegal sebanyak 168 BUMDesa, meningkat secara signifikan sejak tahun 2017. Berdasarkan statusnya terdiri dari BUMDesa dasar sebanyak 67, BUMDesa tumbuh sebanyak 69 dan BUMDesa berkembang sebanyak 32. Untuk tahun 2021 ada peningkatan jumlah BUMDesa menjadi 206 BUMDesa berdasarkan statusnya terdiri dari BUMDesa dasar sebanyak 80, BUMDesa tumbuh sebanyak 88, BUMDesa berkembang sebanyak 34 dan BUMDesa maju sebanyak 4.

## 2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kemasyarakatan Desa adalah pemberdayaan masyarakat yang ditandai Lembaga Kemasyarakatan Aktif dan LEM Yang Berdaya. Untuk mencapai kondisi dilakukan melalui pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat. Hasil dari pembinaan tersebut dapat dilihat dalam data pengelolaan asset dan kelompok desa binaan mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 seperti tabel dibawah.

**Tabel 2. 115 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (unit)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Lembaga Ekonomi Masyarakat					
	Jml UED-SP	39	41	41	41	41
	Jml Kelp UP2K-PKK	397	397	738	287	287
	Jml CPPD	5	5	5	5	5
	Jml Pasar Desa	3	3	24	24	21
	Jml Pokmas TG	5	33	46	46	46
	Jml KUB	8	8	8	8	8
2.	Lembaga Kemasyarakatan					
	Jml KPMD	281	281	281	281	281
	Jml Posyandu	1064	1248	1518	1381	1514
	Jml kelompok PKK RW	1990	1990	1360	1329	1368
	Jml kelompok PKK RT	9546	9546	6337	6296	6369

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2022

Dari Data tersebut dapat diketahui Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat yang ada mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan trend yang semakin baik, namun di tahun 2020 terjadi penurunan sebagai dampak covid-19.

**Tabel 2. 116 Jumlah Kelompok Desa Binaan PKK Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Jumlah Kelompok Desa Binaan PKK				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Kelompok PKK RW	1990	1990	1.360	1329	1368
	Jumlah Kelompok PKK RW Aktif	1990	1990	1.360	1329	1368
	PKK Aktif	100	100	100	100	100
2.	Jumlah Kelompok Binaan PKK	32	32	32	33	33
3.	Jumlah Desa binaan dengan jumlah Desa	11,49	11,49	11,49	11,74	11,74

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2022*

Dari data di atas menggambarkan semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK sekaligus dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK, dengan Jumlah Desa binaan PKK setiap tahun sebanyak 33 Desa. Kelompok binaan PKK ini terdiri dari: Posyandu, BKB UP2K-PKK, Pos PAUD, Posbunda Lansia dan Kebun Percontohan PKK. tiap tahun 11,74 % dari jumlah Desa di Kabupaten Tegal.

### 3) Penataan Desa

Dengan mendasari Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan desa, maka perlu melaksanakan kegiatan Perdes Tata Ruang Desa, Perdes Kewenangan Desa dan Infrastruktur Desa, hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah.

**Tabel 2. 117 Jumlah Perdes Tata Ruang Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Jumlah Perdes Tata Ruang				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Perdes Tata Ruang	0	0	0	0	0

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2022*

Dari data diatas, tidak terdapat Perdes Tata Rang, dikarenakan Dispermasdes baru melaksanakan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**Tabel 2. 118 Jumlah Perdes Kewenangan Desa Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Jumlah Perdes Kewenangan Desa				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Perdes Kewenangan Desa	281	281	281	281	281

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2022*

Dari data diatas, menunjukan semua desa sudah mempunyai Perdes Kewenangan Desa. Dari tabel diatas menunjukan Perdes Kewenangan Desa sudah ada sejak 2017 s/d 2021.

**Tabel 2. 119 Jumlah Infrastruktur Desa Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Jumlah Infrastruktur Desa				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	TMMD & Karya Bhakti	7	8	8	9	8

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2022

Dari tabel diatas menunjukan peningkatan kegiatan infrastruktur desa, dikarenakan dari tahun 2018 kegiatan TMMD yang semula 2 desa menjadi 3 desa, sedangkan Karya Bhakti untuk Perkotaan 2 desa dan Karya Bhakti Perdesaan 2 desa. Pada Tahun 2020 ada penambahan kegiatan Karya Bhakti sehingga untuk Karya Bhakti Perkotaan menjadi 3 desa dan Karya Bhakti Perdesaan menjadi 3 desa. Untuk tahun 2021 TMMD 3 Desa, Karya Bhakti Perdesaan 3 Desa dan Karya Bhakti Perkotaan 2 Desa.

#### 4) Peningkatan Kerja Sama

Dengan mendasari Permendagri No. 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di bidang Pemerintahan Desa. Dispermasdes melaksanakan kegiatan tersebut sesuai amanat Permendagri No. 96 Tahun 2017 dengan hasil tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 120 Jumlah Desa Tertinggal Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Jumlah Desa Tertinggal				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Desa Tertinggal	0	0	41	31	26

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2022

Dari data tersebut diatas menunjukan peningkatan kegiatan kerjasama desa, dengan penurunan desa tertinggal. Jumlah desa tertinggal didapat dari Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2019 dan 2020, yang menunjukan penurunan jumlah desa tertinggal, dari 41 desa di tahun 2019 menjadi 31 desa di tahun 2020. Untuk tahun 2021 ada penurunan Desa tertinggal didapat dari data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021 menjadi 26 Desa.

## H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### 1) Pengendalian Penduduk

Pengendalian Penduduk adalah untuk mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Indonesia umumnya dan Kabupaten Tegal pada khususnya agar dapat terkendali sesuai yang direncanakan yaitu terjadinya *Zero Growth*. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui pengendalian kelahiran pada pasangan usia subur. Data Laju Pertumbuhan Penduduk mulai tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 seperti tabel di bawah. Dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun

diharapkan akan terjadi penurunan LPP Kabupaten Tegal sebesar 0,01 tiap tahunnya sehingga target LPP Tahun 2024 sebesar 1,20 bisa tercapai.

**Tabel 2. 121 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Laju Pertumbuhan Penduduk				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penduduk	1.433.515	1.437.225	1.440.698	1.579.432	1.608.611
2.	LPP	0,289	0,260	0,241	0,120	0,970
	Penurunan LPP	0,031	0,029	0,019	0,121	-0,85

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2022

Berdasarkan pada tabel di atas tercatat bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Tegal sejak tahun 2017-2020 cenderung menurun. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana. Namun pada tahun 2021 LPP kembali meningkat sebesar 0,85. Hal ini dikarenakan karena masih tingginya angka unmeet need (14,73%) dan drop out KB (13,08%) dan cenderung menurunnya persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR) sebesar 67,77%.

Perkembangan *Total Fertility Rate* (TFR) Kabupaten Tegal dalam dekade 5 tahun terakhir dari tahun 2017-2021 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 122 Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2017-2021**

No	Tahun	TFR
1	2017	2,42
2	2018	2,47
3	2019	2,24
4	2020	2,28
5	2021	2,23

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2022

Berdasarkan pada tabel di atas tercatat bahwa TFR Kabupaten Tegal fluktuatif. Namun sejak tahun 2019-2021 cenderung menurun. Kondisi ini harus selalu dipertahankan karena akan berpengaruh terhadap pertambahan jumlah penduduk.

## 2) Keluarga Berencana

Tingkat fertilitas pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Tegal cukup menggembirakan dengan TFR sebesar 2,23. Hal ini terlihat bahwa Kabupaten Tegal mampu mempertahankan rata-rata jumlah anak perkeluarga sebanyak 2-3 anak. Masyarakat Kabupaten Tegal saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitasnya. Berkaitan dengan itu dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Tegal pada tahun 2021 sebanyak 188.121 peserta dari 277.573 pasangan usia subur. Persentase pemakaian alat kontrasepsi pada tahun 2021 mencapai 67,77%, sedangkan pada tahun 2017-2020 terus mengalami penurunan. Adapun persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR) selama kurun waktu tahun 2017-2021 masing-masing dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 2. 123 Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Peresentase Pemakaian Alat Kontrasepsi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	207.923	203.349	205.527	186.867	188.121
2.	Jumlah PUS	293.674	297.296	302.652	275.625	277.573
3.	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	70.80	68.40	67.91	67.80	67,77

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2022

Kepesertaan KB Aktif mulai tahun 2017 – 2021 terus mengalami penurunan, yang dipengaruhi oleh makin tingginya angka drop out KB serta angka unmeet need. Unmet need KB merupakan kebutuhan PUS untuk ber KB tetapi kebutuhan tersebut (tidak ingin anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan berikutnya) tidak terpenuhi dan tidak memakai alat kontrasepsi. Berikut ditampilkan persentase unmeet need KB di Kabupaten Tegal tahun 2017 – 2021.

**Tabel 2. 124 Persentase *Unmeet Need* KB Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Persentase <i>Unmeet need</i>				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah PUS <i>Untmetneed</i>	39.496	42.283	47.563	42.095	40.883
2.	Jumlah PUS	293.674	297.296	302.652	275.625	277.573
3.	ProsentasePUS <i>Unmetneed</i>	13,45	14,22	15,72	15,27	14,73

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2022

Berdasar tabel di atas, persentase *Unmeet Need* dari tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif dan perlu mendapatkan perhatian. Tingginya angka unmet need KB dalam permasalahan program KB mengindikasikan rendahnya prevalensi kontrasepsi yang berakibat tingginya angka kelahiran dan memicu terjadi ledakan penduduk. Tingginya angka unmet need berpengaruh pada rapatnya jarak kelahiran dan banyaknya anak yang dilahirkan sehingga berisiko tinggi terhadap kematian ibu dan bayi. Kehamilan yang tidak diinginkan juga memicu terjadinya aborsi yang juga meningkatkan risiko kematian pada ibu.

Wanita usia reproduksi yang tidak menggunakan KB berpeluang besar untuk hamil dan mengalami komplikasi dalam masa kehamilan, persalinan dan nifas seperti aborsi karena unwanted pregnancy, jarak terlalu dekat, melahirkan terlalu banyak maupun komplikasi penyakit selama kehamilan, penyulit saat persalinan dan komplikasi masa nifas.

Sementara itu, kepesertaan KB pada keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (yang dipersepsikan sebagai keluarga miskin) dari tahun 2017-2021 bila dilihat dari persentase kepesertaan KB cukup baik yaitu rata-rata 67,83% namun terus mengalami penurunan sejak tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi *covid-19* sehingga masyarakat takut untuk melakukan pemasangan alat kontrasepsi baik peserta baru maupun ulang yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 125 Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Keluarga  
Pra Sejahtera dan Sejahtera I Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Peresentase Pemakaian Alat Kontrasepsi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	78.560	72.375	79.061	79.144	73.913
2.	Jumlah PUS	114.199	106.034	114.127	117.481	112.943
3.	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	68.79	68.26	69.27	67.37	65,44

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2022

### 3) Keluarga Sejahtera

Untuk Pelaksanaan dan memantapkan Ketahanan Keluarga diperlukan peranan dari berbagai aspek didalamnya melalui program Tribina yakni Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia. Melalui kegiatan ini setiap kelompok Tribina akan memperoleh sekaligus dapat memantapkan setiap program dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera.

Tribina merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak baik secara fisik, motorik, kecerdasan, emosional, sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya kepada balita dan anak remaja disamping itu tribina juga berguna untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan masa lanjut usia (Lansia) yang produktif, mandiri dan bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan masyarakat.

**Tabel 2. 126 Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pembinaan  
dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2017-2021**

Tahun	Uraian	BKB	BKR	BKL	Total
2017	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	54.881	73.287	52.146	180.314
	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	16.211	9.912	12.022	38.145
	<b>Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga</b>	<b>29,54</b>	<b>13,52</b>	<b>23,05</b>	<b>21,15</b>
2018	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	53.096	71.068	49.307	173.471
	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	16.217	9.137	10.810	36.164
	<b>Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga</b>	<b>30,54</b>	<b>12,86</b>	<b>21,92</b>	<b>20,85</b>
2019	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	58.087	66.051	52.890	177.028
	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	17.935	9.597	11.286	38.818

Tahun	Uraian	BKB	BKR	BKL	Total
	<b>Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga</b>	<b>30,88</b>	<b>14,53</b>	<b>21,34</b>	<b>21,93</b>
2020	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	58.843	67.322	58.347	184.512
	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	17.365	10.844	11.616	39.825
	<b>Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga</b>	<b>29,51</b>	<b>16,11</b>	<b>19,91</b>	<b>21,58</b>
2021	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	123.488	208.173	95.827	427.488
	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	48.253	47.174	21.343	116.770
	<b>Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga</b>	<b>39,08</b>	<b>22,66</b>	<b>22,27</b>	<b>27,32</b>

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2022

## I. Perhubungan

Infrastruktur perhubungan mempunyai peran cukup penting dan sangat strategis dalam menunjang konektifitas antar wilayah di Kabupaten Tegal terutama menuju pusat – pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan lokasi wisata. Selain itu menunjang konektifitas, keberadaan Infrastruktur perhubungan mempunyai peran penting dalam menjamin keselamatan jalan. Indikator yang mudah dibaca dari keselamatan jalan adalah adanya penurunan angka kecelakaan di jalan.

### 1) Kelengkapan Jalan /Rambu Lalu Lintas

Dengan adanya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas diharapkan pelayanan lalu lintas pada masyarakat semakin meningkat dilihat dari Persentase pemasangan rambu – rambu lalu lintas sesuai Standar. Fungsi dari Rambu perlengkapan jalan adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, angka, atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, perintah, larangan, dan petunjuk untuk bagi pengguna jalan.

**Tabel 2. 127 Kelengkapan Rambu Lalu Lintas Kab. Tegal Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun					Kondisi saat ini
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kebutuhan Rambu	40.429	40.429	40.429	40.429	40.429	40.429
2	Rambu Terpasang	13.624	13.944	16.320	16.958	17.190	17.190
	Persentasi Rambu (%)	33,7	34,49	40,37	41,95	42,51	42,51

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2022

Melengkapi data ketersediaan/tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, setidaknya meliputi: *guardrail*, LPJU, RPPJ, APILL, *warninglight*, marka selain rambu lalu lintas.

**Tabel 2. 128 Jumlah Rambu Lalu Lintas Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Guardrail	53	129	129	167	258
2	Marka	3567	3567	4311	5052	5742,38
3.	Rambu Lalu Lintas	434	434	582	696	928
5.	APILL	3	3	6	6	6
6.	Warninglight	15	19	41	41	41
7.	RPPJ	46	46	66	121	121

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2022

Lampu Penerangan Jalan Umum adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan bermotor dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan. Lampu Penerangan Jalan Umum disamping digunakan sebagai penerang jalan, lampu ini juga berfungsi untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas dan juga memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan. Gambaran pemasangan LPJU lima tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 129 Penerangan Jalan Umum Kabupaten Tegal**

No.	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun					Kondisi saat ini
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kebutuhan LPJU	16.954	16.954	16.954	16.954	16.954	16.954
2	LPJU Terpasang	-	7.328	9618	10.142	11.140	11.140
	Persentasi LPJU (%)	-	43,22	56,73	59,82	65,70	65,70

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2022

Sampai dengan Tahun 2021 jumlah LPJU sebanyak 11.140 titik (65,7%) dari jumlah kebutuhan LPJU di Kabupaten Tegal (16.954 titik).

## 2) Lokasi Parkir

Aktifitas yang terjadi pada pusat – pusat kegiatan seperti pusat perdagangan jasa, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, fasilitas pendidikan dan kesehatan, seringkali berdampak pada munculnya titik – titik kemacetan akibat kantong – kantong parkir yang belum teratur dan dikelola dengan baik. Dinas Perhubungan telah melakukan pengelolaan parkir di beberapa ruas jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan, gambaran sebaran. Gambaran pengelolaan lokasi parkir di Kabupaten Tegal sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 130 Titik Lokasi Parkir Kabupaten Tegal**

No	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun					Kondisi saat ini
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Lokasi yg berpotensi untuk pengelolaan Parkir	300	300	300	300	300	300

No	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun					Kondisi saat ini
		2017	2018	2019	2020	2021	
2	Jumlah Lokasi Parkir yg telah dikelola	157	171	203	269	282	282
	Persentasi lokasi parkir (%)	52,3	57,0	67,0	89,67	94,00	94,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun lokasi parkir yang terkelola di Kabupaten baru mencapai 94%. Sisanya masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan masih berpotensi pada munculnya titik kemacetan dan rawan pencurian kendaraan bermotor.

### 3) Pelanggaran Operasional Lalu Lintas dan Angkutan

**Tabel 2. 131 Data Pelanggaran Kendaraan Tahun 2017 - 2021**

No	Tahun	Jumlah kendaraan diperiksa	Jumlah kendaraan kena tilang	%
1	2017	1.254	488	38,92
2	2018	420	56	13,33
3	2019	174	35	20,11
4	2020	174	35	20,11
5	2021	0	0	NA

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2022

Dari tabel di atas, pelanggaran kendaraan (Angkutan Umum penumpang/barang) dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat akan penggunaan kendaraan angkutan umum semakin baik, tetapi perlu ditingkatkan lagi. Pada tahun 2021 tidak dilaksanakan pemeriksaan kendaraan sehingga data jumlah kendaraan yang melakukan pelanggaran tidak tersedia hal tersebut dikarenakan tidak adanya PPNS yang bertugas dalam penindakan pelanggaran kendaraan. Adanya wabah covid-19 serta diberlakukan protokol kesehatan juga secara tidak langsung menyebabkan dibatasinya angkutan umum penumpang/barang beroperasi.

### 4) Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Analisis dampak lalu lintas, untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah Studi / Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan pengaturan Lalu Lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan perubahan di dalam sistem transportasi nya. Misalnya pusat kegiatan, fasilitas pelayanan umum, industri, permukiman dan infrastruktur akan memengaruhi lalu lintas yang ada di sekitar kegiatan baru tersebut.

**Tabel 2. 132 Analisa Dampak Lalu Lintas**

No	Uraian	Jumlah per tahun					Kondisi saat ini
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Usaha Besar yg berpotensi pada perubahan sistem transportasi	-	12	12	12	12	12
2	Jumlah andalin yang disetujui	-	7	9	5	9	9
	Persentasi jumlah Andalin (%)	-	58,3	75	41,67	75,00	75,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2022

Kebijakan implementasi Andalin diterapkan sejak Tahun 2015 sebagai amanat Permen Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 dan Nomor 11 Tahun 2017. Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal baru melaksanakan amanat Andalin pada tahun 2018, sebelumnya tidak pernah dilakukan dikarenakan tidak terdapat anggaran monitoring dan evaluasi terhadap perubahan guna lahan yang berakibat pada berubahnya sistem transportasi.

Jumlah usaha besar yang berpotensi pada perubahan sistem transportasi tiap tahun jumlahnya selalu sama yaitu sejumlah 12, karena dalam menerbitkan ijin andalin bergantung pada ada tidaknya perkembangan melalui jumlah investor yang ikut berinvestasi yang kemudian mengajukan surat permohonan di Kabupaten Tegal sehingga sulit untuk diprediksi. Kecil kemungkinan andalin dapat disetujui karena adanya pandemi covid-19.

## 5) Infrastruktur Terminal, Shelter dan Halte

Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Tegal dilayani oleh 5 Terminal yang terdiri atas 3 terminal penumpang dan 2 terminal barang. 3 terminal penumpang dengan pola pelayanan tipe c yaitu terminal Dukuh Salam slawi, terminal Trayeman dan terminal Adiwerna. 2 terminal barang yaitu terminal/rest area Klonengan dan Maribaya. Sedangkan jumlah fasilitas tempat pemberhentian angkutan umum (halte) yang telah terpasang sebanyak 25 unit.

**Tabel 2. 133 Jumlah Terminal/Shelter dan Halte**

No	Uraian	Jumlah sampai tahun					Kondisi saat ini
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kebutuhan Terminal/ Shelter dan Halte	102	102	102	102	102	102
2	Halte	16	25	30	30	30	30
3	Terminal/Shelter	5	5	5	5	5	5
4	Rest Area/Shelter	3	3	3	3	3	3
	Persentasi Terminal/Shelter (%)	30,4	30,4	29,4	32,3	32,3	32,3

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2022

## 6) Trayek Angkutan Lalu Lintas

Seluruh angkutan umum penumpang yang ada di Kabupaten Tegal wajib memiliki izin trayek. Sejak tahun 2017 jumlah angkutan turun sebanyak 972 unit (angkutan

penumpang) dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena banyak yang tidak aktif. Kepemilikan izin trayek dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2021 sebanyak 343 sedangkan jumlah angkutan umum pada tahun 2021 adalah sebanyak 485 unit.

**Tabel 2. 134 Jumlah Trayek Lalu Lintas**

No.	Uraian	Jumlah sampai tahun					Kondisi saat ini
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Angkutan Umum	972	972	972	904	485	485
2	Jumlah Ijin Trayek	516	640	650	384	343	343
	Rasio Ijin Trayek	0,53	0,66	0,66	0,42	0,71	0,71

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2022

Penyebab penurunan dan stagnansi angkutan umum terjadi karena banyak angkutan yang tidak aktif. Faktor yang menyebabkan banyaknya angkutan yang tidak beroperasi antara lain yaitu di masa pandemi masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum, Sistem pembelajaran dengan pertemuan jarak jauh pada sekolah di masa pandemic membuat anak-anak sekolah yang biasanya menggunakan jasa angkutan umum menjadi tidak menggunakan angkutan umum.

Penyebab turunnya bisnis angkutan umum ini karena dua hal. Pertama, trayek atau rute angkutan tersebut sudah tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, kedua yaitu masyarakat memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap kualitas layanan termasuk pengemudi dan fisik kendaraan. Selain itu, banyak bermunculan alternatif angkutan jenis lain yang menawarkan pelayanan yang lebih baik sehingga angkutan umum yang ada mulai ditinggal penumpangnya, hal ini dikarenakan kondisi fisik kendaraan misalnya umur kendaraan, sudah tidak layak jalan, serta tidak ada kemampuan pengusaha untuk melakukan peremajaan. Dan yang terakhir karena semakin masifnya pertumbuhan dan ekspansi bisnis transportasi berbasis aplikasi seperti taksi online dan ojek online. Hal ini dinilai membuat bisnis angkutan umum konvensional di Kabupaten Tegal semakin tergerus karena tak mampu bersaing.

Program upaya terkait penyelesaian turunnya jumlah trayek lalu lintas:

- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin angkutan umum. Izin angkutan umum sendiri dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Tegal, dalam hal ini Dinas Perhubungan hanya melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi angkutan.
- Perlu dilakukan langkah atau upaya penyusunan kembali rencana umum jaringan trayek angkutan pedesaan dan perbatasan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tegal sehingga diperoleh riil kebutuhan jumlah angkutan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Perlu kami informasikan data tersebut terakhir disusun pada tahun 1996 dan sampai sekarang tidak tersedia anggaran, sebagai diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek.

- c. Perlu adanya inovasi dalam hal pemberian subsidi angkutan, kemudahan dalam melakukan perizinan angkutan serta perbaikan dalam kualitas pelayanan.

## 7) Kelayakan Kendaraan

Seluruh angkutan umum di Kabupaten baik yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

Jumlah angkutan umum yang telah melakukan uji KIR pada tahun 2021 sebanyak 7.371 unit kendaraan dari 10.805 unit kendaraan (angkutan penumpang dan angkutan barang). Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan uji KIR di Kabupaten Tegal.

**Tabel 2. 135 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kabupaten Tegal**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KB Wajib Uji	9.002	9.618	10.268	10.959	10.805
2	Jumlah KB yang melakukan Wajib Uji	8.237	8.760	9.472	8.191	7.371
3	Jumlah KB tidak melakukan Wajib Uji	765	858	796	2768	2768
	% Kendaraan Bermotor Wajib Uji	91,5	91,08	92,25	74,74	68.21

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2022

Adanya selisih angka jumlah angkutan penumpang dan barang dengan jumlah uji KIR angkutan umum sangat jauh perbedaannya. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kendaraan bermotor yang tidak melakukan uji KIR di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, dan melakukan uji KIR di Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota lain.

## 8) Perlintasan Sebidang

Apabila ditinjau dari sistem jaringan kereta api, Kabupaten terlantasi oleh 3 jalur rel kereta api yaitu 1) Jalur Jakarta – Tegal- Semarang – Surabaya di bagian utara yang melewati Kecamatan Kramat, Surdadi dan Warureja, 2) Jalur Tegal – Purwokerta di bagian tengah yang melewati Kecamatan Dukuhturi, Talang, Adiwerna, Slawi, Lebaksiu, Balapulang dan Margasari, serta 3) Jalur Jakarta – Cirebon – Purwakerta di bagian barat yang hanya melintasi Desa Kalisalak Kecamatan Margasari. Keberadaan jalur kereta api banyak yang crossing dengan jalan kabupaten, sehingga perlu difasilitasi pengamanan perlintasan sebidang.

**Tabel 2. 136 Jumlah Perlintasan Sebidang Kabupaten Tegal**

No	Uraian	Jumlah sampai tahun					Kondisi saat ini
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Perlintasan Sebidang	53	53	53	53	53	53



No	Uraian	Jumlah sampai tahun					Kondisi saat ini
		2017	2018	2019	2020	2021	
2	Jumlah Gardu Pengaman	14	17	18	18	18	18
	Persentasi Gardu Pengaman (%)	26,42	32,08	33,96	33,96	33,96	33,96

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2022

Dari jumlah 53 perlintasan sebidang yang ada di Kabupaten Tegal, Sampai dengan saat ini baru dibangun gardu pengaman mencapai 18 unit atau sekitar 33,96%. Tidak ada perlintasan di jalan nasional dan provinsi, karena yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal hanya menangani perlintasan yang ada di jalan kabupaten dan jalan desa.

## 9) Fatalitas Korban Kecelakaan

**Tabel 2. 137 Angka Kecelakaan Tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah Kejadian	Korban			Penurunan
		MD	LB	LR	
2017	487	156	0	512	22,82
2018	476	152	0	509	2,26
2019	619	170	0	629	-30,04
2020	500	134	0	506	19,22
2021	603	140	3	642	-20,60

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2022

Keterangan:

MD : Meninggal Dunia

LB : Luka Berat

LR : Luka Ringan

Tabel di atas menggambarkan 5 tahun terakhir terjadi kenaikan angka kecelakaan dari 500 kejadian menjadi 603 Kejadian atau naik sekitar 20,60%. Untuk menurunkan angka kecelekaan lalu linta, maka diperlukan upaya – upaya terkait dengan sektor perhubungan. Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi karena:

- Faktor manusia atau pengendara/ pengemudi kendaraan. Penyebabnya utama karena kondisi fisik yang kurang fit, mengantuk, kondisi mental yang tidak stabil, melaju cepat, kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam mengemudi, pengaruh buruk obat-obatan atau alkohol serta pengalihan perhatian,
- Kendaraan yang digunakan bisa menjadi penyebab kecelakaan, bisa karena sistem rem, kemudi, mesin yang tidak berfungsi, dimodifikasi tidak sesuai dengan aturan keselamatan dan lain sebagainya. Ada banyak komponen yang terdapat pada kendaraan dan semuanya berpotensi mengalami kerusakan. Apalagi jika umur mobil sudah cukup tua, ada banyak komponen yang sudah tidak berfungsi lagi dengan baik.
- Faktor jalan diantaranya seperti: kondisi permukaan jalan yang tidak memenuhi syarat (berlubang dan benjolan), fasilitas untuk pejalan kaki yang tidak memadai, layout jalan yang tidak sesuai, dan pencahayaan yang tidak memadai karena lingkungan atau cuaca. Cuaca yang buruk seperti hujan atau berkabut seringkali menjadi penyebab kecelakaan kendaraan.

## J. Komunikasi dan Informatika

### 1) Informasi dan Komunikasi Publik

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan Pemerintah wajib mewujudkan badan publik terbuka untuk masyarakat karena setiap orang berhak memperoleh informasi. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Badan publik yang dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan serta hasil kegiatan dalam pembangunan dapat diakses oleh publik dan masyarakat sejauh informasi tersebut adalah bukan informasi yang dikecualikan dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Permohonan informasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan oleh publik dan masyarakat dapat dilakukan melalui Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

**Tabel 2. 138 Data Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Badan Publik Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai KIP Badan Publik	NA	41,6	68,55	83,96	65
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	18%	19%	19%	51,60 %	67,13%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2022

Penilaian KIP Award ada 4 tahapan yaitu Website, SAQ, Visitasi, dan Uji Publik. Pada tahun 2021 Nilai KIP Badan Publik Kabupaten Tegal menurun (65). Hal ini karena dibandingkan dengan tahun 2020 penilaian KIP Award 2021 lebih ketat, data yang di *upload* pada *Website* PPID Kabupaten Tegal tidak bisa lagi dianggap masuk dalam penilaian jika melebihi batas waktu 31 Mei 2021. Pada KIP Award 2020 meski terlambat *upload* data di *website* PPID, masih bisa untuk menambah penilaian.

### 2) Aplikasi Informatika

Berdasarkan Lampiran Huruf P Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa salah satu kewenangan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Sub Urusan Aplikasi Informatika.

Sub urusan Aplikasi Informatika ini terbagi atas Pengelolaan Domain/Sub Domain dan Pengelolaan *e-Government* lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks pengelolaan *e-Government*, maka pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, diterbitkan peraturan turunan, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Indeks SPBE terbagi atas 4 (empat) domain, yaitu pertama, Domain Kebijakan Internal SPBE. Kedua, Domain Tata Kelola SPBE. Ketiga, Domain Manajemen SPBE dan keempat, Domain Layanan SPBE.

**Tabel 2. 139 Program Aplikasi Informatika dan Indeks SPBE Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		201	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	NA	1,8	2,82	3,11	NA
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	NA	NA	NA	2,2	2,55
2	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	NA	1,65	2,18	3,53	NA
	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	NA	NA	NA	2	2,70
3	Indeks Domain Tata Kelola SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	NA	2,14	2,57	2,29	NA
	Indeks Domain Tata Kelola SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	NA	NA	NA	2	2
4	Indeks Domain Manajemen SPBE	NA	NA	NA	1	1
5	Indeks Domain Layanan SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	NA	3,09	3,15	3,39	
	Indeks Domain Layanan SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	NA	NA	NA	2,8	3,37
6	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	12,5 %	12,50 %	16,67 %	16,67 %	50%
7	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	12,5 0%	12,50 %	16,67 %	16,67 %	20,8 %
8	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	15,0 0 %	25,00 %	30,00 %	45,00 %	35,60 % (17/48 (jml layanan publik))

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2022

Dari tabel di atas, Indeks SPBE sesuai Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018 pada tahun 2021 tidak dapat terpenuhi, hal tersebut dikarenakan Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun 2021.

### 3) Sumber Daya TIK

Tujuan pengembangan Sumber Daya TIK adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan, dengan cara memperbaiki pengetahuan, keterampilan, maupun sikap terhadap tugas-tugasnya di bidang TIK. Dalam pengembangan sumber daya TIK pada Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mendukung *e-Government*/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan berdasar Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan TIK bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang TIK yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya.

Dalam tahap selanjutnya, implementasi SPBE/*e-Government* akan berkembang menjadi *Smart City* yang membutuhkan sumber daya TIK yang dapat memahami dan menjalankannya Program *Smart City*, dimana Pemerintah Kabupaten Tegal juga sudah memiliki sebanyak 20 PNS fungsional Pranata Komputer. Berkaitan dengan bimbingan teknis TIK, berikut data jumlah ASN yang telah mengikuti bimtek di Kabupaten Tegal sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 140 Jumlah Aparatur Pemerintah yang Mengikuti Bimtek TIK Tahun 2017 – 2021**

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Bimtek internet sehat bagi masyarakat	0	100	100	100	100
2	Bimtek TIK untuk aparatur pemerintah	0	0	100	100	0
3	Bimtek TIK untuk aparatur pemerintah desa	0	100	100	100	0

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
4	Bimtek TIK untuk Pranata Komputer Penilaian Angka Kredit	0	20	40	50	0
5	Bimtek TIK untuk Kompetensi Pengelola Smart City	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2022

Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagaimana di atas, merupakan salah satu yang terpenting dalam menciptakan ekosistem Kota Cerdas (Smart City). Selain berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003, Pelatihan TIK juga masuk kedalam salah satu pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada urusan Komunikasi dan Informatika, namun pada tahun 2021 banyak dari pelatihan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena refocusing anggaran serta meningkatnya status covid19 Kabupaten Tegal yang tidak memungkinkan pelaksanaan bimtek secara tatap muka.

## K. Statistik

Mendasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ayat 274, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan antar sektor, Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengembangkan program Satu Data Kabupaten Tegal dengan menyelenggarakan Sinkronisasi Dan Koordinasi Data Statistik Sektorial Pada Pusat Data Yang Terintegrasi Dari Setiap OPD dalam aplikasi Single Data System dan Open Data yang mudah di akses oleh masyarakat secara luas.

Penyusunan data dan informasi pembangunan Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), OPD, instansi dan lembaga terkait di Tingkat Pusat dan Daerah. Selain data yang bersifat numerik, juga dilakukan koordinasi dan pengelolaan data yang bersifat spasial antara lain pengelolaan Jaringan Peta Daerah.

Data Statistik Sektorial yang reliable, up to date dan relevan memiliki arti penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah. Secara umum, pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan statistik sektorial, instansi pemerintah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektorial pada SIM Open Data, OPD yang menggunakan data statistik sektorial dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah serta kebutuhan data statistik sektorial Pemerintah Kabupaten Tegal sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 sebagaimana Tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 141 Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data, OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah serta kebutuhan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2017- 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data	NA	NA	NA	10.000	18.000
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kebutuhan data Statistik yang tersedia	NA	NA	NA	38,15%	45,38%

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2022*

Dari Tabel diatas terlihat bahwa dari Tahun 2017 sampai 2018 jumlah pemanfaat data statistik sektoral dan persentase kebutuhan data statistik tidak memiliki nilai, dikarenakan regulasi untuk melakukan kegiatan statistik sektoral belum ada. Perpres yang mengatur segala sesuatu tentang kegiatan statistik sektoral baru dikeluarkan pada tahun 2019 yakni Prepres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jumlah pemanfaat dan kebutuhan data statistik teridentifikasi mulai tahun 2019 dimana sudah tersedianya sistem informasi yang memuat kebutuhan data-data statistik sektoral yakni aplikasi Open Data.

Dari tabel di atas terlihat pada Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah telah terisi nilai 100% dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 hal ini dikarenakan seluruh perangkat daerah pada hakekatnya pasti menggunakan data statistik dari tahun-tahun sebelumnya untuk melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, meskipun masih sebatas data statistik internal.

Berdasarkan tabel di atas juga dapat dipahami bahwa persentase kebutuhan data statistik yang tersedia di tahun 2020 (38,15%) dan 2021 (45,38%) masih sedikit pencapaiannya. Hal ini karena keterbatasan SDM pada perangkat daerah yang membidangi urusan Statistik, terutama dalam penyediaan statistik sektoral. Oleh karena itu, sejumlah agenda percepatan peningkatan kebutuhan data statistik secara masif tengah ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan bintek operator open data. Sedangkan untuk jumlah pemanfaatan data statistik sektoral sendiri meskipun belum memenuhi angka yang diharapkan namun sudah adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2021 yang mana pada akhir tahun 2021 kurang lebih sekitar 38.000 pemanfaatan hal ini juga didasari oleh adanya kegiatan *Statistic Coaching Clinic (SCC)* dimana kegiatan ini merupakan sosialisasi mengenai aplikasi open data kepada seluruh

OPD di Kabupaten Tegal yang mana merupakan pelaku dari kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Tegal.

## L. Persandian

Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah. Kegiatan lingkup persandian meliputi: pembinaan peralatan sandi, sistem sandi, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian; pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan materiil persandian; penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian serta pemeliharaan sarana telekomunikasi di lingkungan SETDA Kabupaten Tegal.

**Tabel 2. 142 Indeks Keamanan Informasi Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Keamanan Informasi	NA	147	147	262	294
2	Tingkat Keamanan Informasi	NA	22,80 %	22,80 %	40,62 %	45,58 %

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2022*

Indeks KAMI adalah alat evaluasi yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menganalisis tingkat kesiapan dan kematangan pengamanan informasi dilingkungan Pemerintah ataupun non pemerintah yang telah disesuaikan dengan standar internasional. Alat evaluasi ini selanjutnya yang di gunakan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi pada Pemerintah Daerah Kab.Tegal dan bukan ditujukan untuk menilai kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada. Penggunaan dan publikasi hasil indeks KAMI merupakan bentuk tanggungjawab dan sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan keamanan informasi pada Pemerintah Daerah Kab.Tegal.

Hasil penilaian Indeks KAMI Kabupaten Tegal Tahun 2021 dengan skor 294 dengan Tingkat Keamaann Informasi 45,58%, nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya meskipun belum mencapai sesuai dengan target RPJMD yaitu dengan skor 300. Adapun permasalahan dan kendalanya adalah dari faktor Internal dan Eksternal, faktor internal yaitu belum maksimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang persandian, sarana dan prasarana persandian yang belum memadai dan juga kurangnya dukungan anggaran pada kegiatan penyelenggaraan persandian. Adapun dari faktor Eksternal belum adanya kesadaran Pimpinan serta ASN di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tentang pentingnya keamanan informasi serta belum memahami akan resiko yang akan terjadi. Dari hasil penilaian Indeks KAMI dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi serta melakukan perbaikan yang berkaitan dengan mitigasi atau pencegahan kerentanan keamanan informasi serta memastikan regulasi dapat dicapai dengan baik.

## M. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

### 1. Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu badan usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

**Tabel 2. 143 Koperasi Aktif Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah koperasi aktif	287	252	256	256	264
2.	Jumlah koperasi tidak aktif	152	183	183	182	188
3	Jumlah Koperasi yang akan dibubarkan	207	207	207	207	201
4.	Jumlah koperasi	646	642	646	645	653
Koperasi Aktif (%)		44,42	39,25	39,62	39,68	40,42

Sumber : Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Tegal, 2022

Perkembangan jumlah koperasi aktif pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan Koperasi sebanyak 10 Koperasi baru. Namun pada tahun 2021, terdapat 2 Koperasi yang berubah status dari binaan Kabupaten, menjadi binaan Provinsi. Kemudian pada tahun 2021, terdapat sejumlah Koperasi yang akan dibubarkan sebanyak 201 Koperasi.

### 2. Koperasi Sehat

Disamping adanya koperasi aktif, koperasi juga mempunyai kondisi dimana koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam mempunyai tingkat kesehatan bagi semua koperasi aktif yang terdiri dari Sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa setiap koperasi dilihat dari kesehatan koperasi berbeda-beda setelah diadakannya Penilaian Kesehatan bagi Koperasi.

Karena setiap koperasi sehat dan cukup sehat mesti aktif, akan tetapi belum tentu Koperasi aktif itu sehat dan cukup sehat. Dalam Perkembangan dari tahun 2017 – 2021, perkembangan Tingkat Kesehatan Koperasi sebagai berikut :

**Tabel 2. 144 Koperasi Sehat Tahun 2017-2021**

No	Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah per tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sehat	12	17	8	11	12
2	Cukup Sehat	76	73	73	60	64
3	Dalam Pengawasan	15	8	28	28	6
4	Dalam Pengawasan Khusus	3	1	2	4	3
5	Jumlah Koperasi(Aktif & Tidak Aktif)	439	435	439	438	452
Persentase Koperasi DP & DPK		4,10	2,06	6,83	7,30	1,99



No	Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah per tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase Koperasi Sehat	2,73	3,90	1,82	2,51	2,65
	Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	20,04	20,68	18,45	16,21	16,81

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal, 2022

Dilihat dari tingkat kesehatan, koperasi yang berpredikat dalam pengawasan (DP) dan dalam pengawasan khusus (DPK) pada tutup buku tahun 2020 (Penkes pada tahun 2021) sejumlah 9 Koperasi atau sebesar 1,99 % jika dibandingkan jumlah seluruh Koperasi. Hal ini disebabkan karena sebagian koperasi tersebut masih belum memenuhi standar penilaian kesehatan yang terdiri dari aspek permodalan, aspek likuiditas, aspek manajemen, aspek efisiensi, hingga aspek jatidiri koperasi. Selain itu adanya perubahan regulasi dalam penilaian kesehatan koperasi oleh pusat juga berpengaruh pada tingkat kesehatan koperasi, dimana beberapa koperasi belum mampu menyesuaikan standar penilaian kesehatan yang semakin ketat.

Sedangkan Jumlah Koperasi Sehat dan Cukup sehat pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 76 Koperasi atau sebesar 16,81 % jika dibandingkan dengan seluruh Jumlah Koperasi (aktif dan tidak aktif). Pencapaian ini diperoleh setelah dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi pada tahun 2021.

### 3. Kemitraan Koperasi

Kemitraan koperasi merupakan jalinan kerjasama usaha koperasi yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan. Berikut data kemitraan koperasi di Kabupaten Tegal :

**Tabel 2. 145 Daftar Kemitraan Koperasi terhadap Jumlah Koperasi Non KSP**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Koperasi Non KSP	394	389	383	385	385
2	Koperasi yang bermitra	2	3	4	4	6

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal, 2022

Dari data menunjukan perkembangan koperasi bermitra dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 ada penambahan jumlah Koperasi yang bermitra usaha pada tahun 2021, menjadi 6 Koperasi, penambahan jumlah Koperasi ini diperoleh setelah dilakukan Temu Kemitraan dan Jaringan antara Koperasi dengan stakeholder pendukung usaha Koperasi, khususnya di sector riil (Non Simpan Pinjam).

### 4. Koperasi yang mengikuti pembinaan dan pelatihan.

Dalam meningkatkan koperasi aktif dan sehat di Kabupaten Tegal maka setiap tahunnya harus melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan perkoperasian dengan tujuan koperasi akan lebih baik dalam hal manajemen, kesehatan, pengelolaan dan pelayanan kepada anggota sehingga diharapkan adanya peningkatan asset dan omsetnya juga kesejahteraan bagi anggotanya. Dalam kurun waktu 2017 – 2021,

perkembangan jumlah koperasi yang telah dibina dan dilatih oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab. Tegal sebagai berikut :

**Tabel 2. 146 Koperasi yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Perkoperasian Tahun 2017-2021**

No	Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah per tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi Mengikuti Pelatihan	83	50	304	165	280
2	Jumlah Koperasi Tidak Mengikuti Pelatihan	361	385	135	273	166
3	Jumlah Koperasi	444	435	439	438	446
Persentase Koperasi ikut Pelatihan		18,69	11,49	69,25	37,67	62,78

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal, 2022

Dilihat dari Jumlah Koperasi yang sudah mengikuti Diklat atau Pembinaan, pada tahun 2021, Persentasenya sudah mencapai 62,78 %. Pencapaian ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2020, dimana pada tahun 2021 volume Koperasi yang mengikuti Pelatihan, Pendidikan, yang dilaksanakan jauh lebih banyak dibanding pada tahun 2020. Adapun pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2021, diantaranya Pelatihan Akuntansi Koperasi, Pelatihan Penanganan Pembiayaan Bermasalah, dan Pelatihan Manajemen Koperasi.

#### 5. Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti Diklat dan Pembinaan

Dari jumlah Koperasi yang telah dibina dan dilatih, jumlah SDM atau Anggota Koperasi yang dibina dan dilatih selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2021 sebagai berikut :

**Tabel 2. 147 Data Anggota Koperasi yang sudah Mengikuti Diklat dan Pembinaan Tahun 2017-2021**

No	Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah per tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Peserta Diklat / Pembinaan Perkoperasian	86	60	466	275	280
2	Jumlah Seluruh Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi	3.108	3.045	3.073	3.066	2.207
Persentase		2,76	1,97	15,16	8,96	12,68

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal, 2022

Dilihat dari Jumlah SDM Koperasi yang sudah mengikuti Diklat atau Pembinaan, pada tahun 2021, Persentasenya mengalami peningkatan dari tahun 2020, dimana jumlah SDM Koperasi yang dilatih pada tahun 2021 sebanyak 280 Orang atau sebesar 12,68 % dibandingkan dengan jumlah seluruh Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi. Pencapaian ini disebabkan jumlah Peserta Diklat pada tahun 2021 lebih banyak dari tahun 2020.

## 6. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Mikro, kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UMKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UMKM.

Agar keberadaan UMKM dapat diakui dan dikembangkan, salah satunya adalah status legalitas usaha, dimana legalitas usaha akan menentukan bentuk UMKM menjadi formal atau non formal, dengan adanya legalitas usaha akan mempermudah UMKM Formal untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan untuk pengembangan usaha, dikarenakan sumber-sumber pembiayaan yang ada sekarang ini cenderung menyasar target UMKM formal yang memiliki legalitas.

Dalam kurun waktu Tahun 2017 – 2021, jumlah UMKM di Kabupaten Tegal mengalami perkembangan yang beragam. Pada tahun 2021 jumlah seluruh UMKM sejumlah 97.563. dan sejumlah 77.694 UMKM merupakan UMKM formal yang memiliki profil seperti NIK, NIB (OSS), IUMK, SIUP dll. Perkembangan Jumlah dan UKM yang mempunyai legalitas di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 148 Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun 2017 - 2021**

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah seluruh UKM	33.530	142.412	166.092	172.761	97.563
2	UKM formal	4.193	5.060	5.916	7.368	77.694
3	UKM non Formal	29.337	137.352	160.176	165.393	19.869
4	UKM yang dibina	432	479	532	951	1.814
5	UKM yang bermitra	13	14	20	25	40.211

*Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2022*

Pada tahun 2021 jumlah UMKM yang terdata mengalami penurunan dari tahun 2020. Penurunan ini dikarenakan terjadi pendataan ulang pada tahun 2021. diketahui setelah dilakukan pendataan ulang, jumlah UMKM menjadi sebanyak 97.563 unit, dari jumlah tersebut, yang ber-NIK, NIB, dan memiliki izin usaha lain sebanyak 77.694 unit. Dari jumlah UMKM tersebut, sebanyak 1.814 UMKM telah dibina dengan kegiatan pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan inkubasi bisnis. Dan sebanyak 40.211 UMKM telah menjalin kemitraan dengan beberapa stakeholder terkait seperti BI, BRI, Bank Jateng, dan beberapa Toko modern berjejaring.

Diharapkan dengan Pembinaan dan Pendampingan Usaha bagi UMKM ini mampu menurunkan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal.

## 7. Jumlah BPR/LKM

BPR merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan lembaga keuangan mikro (LKM) merupakan lembaga non perbankan baik koperasi maupun non koperasi yang bergerak di simpan pinjam atau didalamnya adalah unit

simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan mikro kecil. BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR dan LKM, maka akan semakin mudah bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil dalam mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perekonomiannya. Jumlah BPR pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berjumlah 11. Untuk jumlah LKM non Koperasi pada tahun 2017 berjumlah 618, mengalami kenaikan di tahun 2018, namun tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jumlah BPR dan LKM di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2. 149 Jumlah BPR/LKM Non Koperasi Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah BPR	11	11	11	11	N/A
2	Jumlah LKM Non Koperasi	618	207	6	6	N/A

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal, 2022

## N. Penanaman Modal

### 1) Program Penanaman Modal

Penanaman Modal dilakukan untuk mendorong meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Tegal. Untuk mencapai kondisi tersebut dengan menarik para investor lokal maupun Luar Negeri untuk menanamkan modalnya di kabupaten Tegal. Nilai investasi PMA dan PMDN mulai tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah.

**Tabel 2. 150 Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2017 - 2021**

Tahun	PMDN		PMA	
	Jml Proyek	Nilai Investasi	Jml Proyek	Nilai Investasi
2017	5.266	566.881.900.000	4	1.243.150.000.000
2018	7.257	1.073.862.531.863	3	480.800.000.000
2019	7.072	1.418.065.799.693	8	820.334.969.198
2020	11.457	9.073.688.922.252	5	291.626.969.198
2021	10.457	768.665.669.374	18	883.975.831.657

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi jumlah investor PMDN pada tahun tahun 2017 ada penurunan 5.266 investor dibanding tahun 2018. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 7.257 investor dengan nilai investasi mencapai 1.073.862.531.863, tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 11.457 investor dengan nilai investasi sebesar 9.073.688.922.252 dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 10.457 investor dengan nilai investasi

768.665.669.374. penurunan ini bagian dari dampak covid-19 yang mengena kepada seluruh lini sektor, baik sektor swasta dan Pemerintah. Dampak adanya pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja dan anggaran seluruh instansi.

## 2) Peningkatan Calon Investor

**Tabel 2. 151 Persentase Peningkatan Calon Investor Berkomitmen Tahun 2017 – 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Peningkatan Calon Investor Berkomitmen	N/A	3	3	1	1,48

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2022

## 3) Indeks Kepuasan Masyarakat Perizinan

Pelayanan perizinan yang optimal dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di Kabupaten Tegal sehingga dapat meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha untuk mengurus perizinan. Indeks Kepuasan Masyarakat terkait perizinan dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2. 152 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 – 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks kepuasan Masyarakat perijinan	73,87	75,32	77,61	78,08	88,86

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2022

Dengan melihat Tabel di atas pada tahun 2017 – 2021 selalu terjadi peningkatan kepuasan masyarakat dalam pengurusan izin, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memperoleh pelayanan perizinan yang cukup baik.

## 4) Persentase Data Layanan Termanfaatkan

**Tabel 2. 153 Persentase Data Layanan yang Termanfaatkan Tahun 2017 – 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Data Layanan yang Termanfaatkan	4,2	4,5	5,4	6,29	7,38

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2022

## 5) Pengendalian PMPTSP

Kepatuhan Perusahaan untuk mengurus perizinan sesuai ketentuan sangat diperlukan untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Tegal. Pengendalian PMPTSP diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para investor yang dilaksanakan melalui Tim Pengendali Perangkat Daerah yang terkait. Kondisi kepatuhan perusahaan yang berizin mulai tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 154 Kepatuhan Perusahaan Berizin Tahun 2018-2021**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perusahaan berizin	5.475	755	771	10.457
2	Jumlah Perusahaan	11.714	1678	1258	16.087
3	Persen Kepatuhan Perusahaan yang sudah berizin	46,73	45	61,28	65

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2022

Jumlah Perusahaan Berizin pada tahun 2018 sebanyak 5.475 meningkat pada tahun 2018 menjadi 5.475 dengan Kepatuhan Perusahaan yang sudah berizin meningkat 1,73% dari 45 % pada tahun 2017 menjadi 46,73% tahun 2018, pada tahun 2019 menjadi 45% dan pada tahun 2020 menjadi 61,28 % dan pada Tahun 2021 meningkat menjadi 65 %.

## O. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga salah satunya dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda.

**Tabel 2. 155 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Tahun 2017 - 2021**

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,011	0,022	0,038	0,073	
2.	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	N/A	0,061	0,058	0,067	

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2022

Banyaknya jumlah atlet berprestasi menggambarkan pembinaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah dalam bidang olahraga. Selanjutnya dalam rangka menyongsong bonus demografi, meningkatkan ekonomi lokal dan pembangunan manusia maka akan dilaksanakan program penumbuhan wirausaha pemuda untuk meningkatkan persentase wirausaha pemuda. Selanjutnya, banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Kegiatan olahraga yang rutin diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tegal yaitu POPDA, PORDA, Kejuaraan cabang sepak bola, bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja, catur, renang, bola volley.

**Tabel 2. 156 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Peningkatan prestasi olahraga	5	6	7	61	61
2.	Persentase Cabang Olahraga yang dibina	N/A	75	75	75	75

*Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2022*

## P. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Kebudayaan adalah seluruh sistem yang kompleks dimana di dalamnya terkandung sebuah pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, kesenian, adat istiadat disertai juga kemampuan-kemampuan lainnya yang dimiliki oleh seseorang sebagai bagian dari anggota masyarakat. Proses pengembangan budaya adalah suatu upaya meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat yang menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan sebagai pengaruh global. Adapun kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan yang dapat berupa gerak suara atau wujud. Kesenian ini mempunyai suatu penekanan yaitu adanya unsur estetika yang dipentingkan dalam setiap produk kebudayaan. Namun kesenian dapat dengan mudah mengalami perubahan-perubahan karena adanya tuntutan kebutuhan dari masing-masing individu dalam masyarakat yang mempunyai orientasi tertentu terhadap seni itu sendiri. Sehingga pengembangan budaya masyarakat juga harus mengembangkan kesenian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan itu sendiri.

**Tabel 2. 157 Kondisi Budaya Tahun 2017– 2021**

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase kebudayaan dan tradisi yang dikembangkan	39	45	50	61,11	63,12
2.	Persentase Seni dan Kesenian yang dibina	Pelakuseni : 625 Sanggar Seni : 331	Pelakuseni : 775 Sanggar Seni : 360	Pelakuseni : 1060 Sanggar Seni : 459	57,50	54,53
3.	Persentase Sejarah yang terdokumentasi	N/A	N/A	N/A	76.47	74.43
4	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	N/A	N/A	N/A	45.83	45.63
5	Persentase Museum yang dikelola	N/A	N/A	N/A	65	65

*Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2022*

Bahasa dan Sastra Lokal telah masuk dalam pembelajaran di satuan pendidikan baik di SD dan SMP dengan komposisi 2 jam pelajaran di setiap minggunya. Harapannya

kedepan siswa dapat mengetahui dan melestarikan budaya daerah Kabupaten Tegal. Dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah selalu berupaya meningkatkan perkembangan budaya dan kesenian. Baik itu revitalisasi maupun pelestarian adat dan budaya. Rehabilitasi cagar budaya juga terus dan pengelolaan museum juga dikembangkan. Hanya saja pada tahun 2020 yang lalu terkendala dengan adanya Pandemi *covid-19*. Semua anggaran yang sudah di sediakan harus di realokasi ke kegiatan penanganan Pandemi *covid-19*.

Kurun waktu 2017-2021 pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tegal menunjukkan perkembangan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Program pengembangan kebudayaan yang dihitung melalui proporsi kebudayaan dan tradisi yang dikembangkan terhadap tradisi yang ada mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ini berarti menandakan semakin baiknya pengembangan kebudayaan. Program pengembangan kesenian tradisonal juga mengalami kenaikan yang dihitung dari proporsi seni dan kesenian yang dibina terhadap seni dan kesenian yang ada. Persentase sejarah yang terdokumentasi, cagar budaya yang dilestarikan baru dihitung di tahun 2020 dengan angka persentase sebesar 76,47% untuk sejarah yang terdokumentasi dan 45,83% untuk cagar budaya yang dilestarikan. Nilai cagar budaya masih rendaha dikarenakan di tahun 2020 terjadi pandemi *covid-19* sehingga anggaran untuk cagar budaya di refocusing untuk penanganan *covid-19*. Persentase museum yang dikelola yaitu 65%. Adapun museum yang baru dibangun yaitu museum semedo dimana pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

## Q. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan tempat belajar masyarakat selain pada dunia pendidikan dan sebagai wadah di mana terdapat bahan pustaka yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan juga untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Dalam hal ini untuk memujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal mempunyai sasaran untuk mengembangkan dan meningkatkan penumbuhan perpustakaan serta minat baca masyarakat. Adapun hasil Indikator Perpustakaan selama Tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 158 Indikator Perpustakaan Tahun 2017 – 2021**

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Peningkatan pemustaka	24.667	31.243	35.909	20.898	33.162
2.	Peningkatan koleksi judul	4.786	6.038	6.289	2.401	4.589
3.	Peningkatan perpustakaan berbasis TIK	0	0	0	20	28
4.	Nilai Tingkat Kegemaran membaca Masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	72,63
5.	Indeks Pembangunan	n/a	n/a	n/a	n/a	21,70



No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Literasi Masyarakat					

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2022

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat pada tahun 2021 diukur melalui survey secara online dengan jumlah responden sebanyak 1.831 orang dengan skor 72,63 (kategori tinggi), dan indikator indeks pembangunan literasi masyarakat diperoleh dari metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan Aspek masyarakat (AM) ditahun 2021 memiliki skor 21,70.

Jumlah perpustakaan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah dalam memberikan pelayanan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas peningkatan mutu kehidupan masyarakat dan pelayanan pendidikan. Capaian kinerja pada tahun 2017-2021 selengkapnya sebagaimana Tabel berikut.

**Tabel 2. 159 Jumlah Perpustakaan Tahun 2017 – 2021**

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Perpustakaan Daerah (milik Pemda)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah mobil perpustakaan keliling	3	3	3	3	3
3.	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan	36	56	64	63	63
4.	Jumlah Perpustakaan Tempat Ibadah	16	19	21	21	21
5.	Jumlah Perpustakaan OPD	43	43	26	26	26
6.	Jumlah Perpustakaan Ekstensi	16	16	31	10	12
	Total Perpustakaan (1+2+3+4)	115	138	146	124	126

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2022

Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Tegal tahun 2020 ada 124 unit, sedangkan di tahun 2021 ada 126 unit, hal ini ada penambahan jumlah perpustakaan ekstensi sebanyak 2 unit, sehingga secara total jumlah perpustakaan di tahun 2021 ada 126 unit.

Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah, dan tingginya ketersediaan buku yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bacaan oleh pengunjung. Data jumlah pengunjung Perpustakaan Pemda Kabupaten Tegal Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 160 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pemda Tahun 2017 - 2021**

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah	15.777	14.319	21.780	16.741	12.264
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan keliling	8.890	16.924	14.129	4.157	0
3.	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Pemda	43.586	47.331	50.631	88.864	91.002

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2022

Jumlah pengunjung baik di perpustakaan milik Pemda Kabupaten Tegal maupun perpustakaan keliling mengalami penurunan, dikarenakan adanya Pandemi Covid 19, baik Perpustakaan Daerah maupun Perpustakaan Keliling tidak melayani pemustaka. Perpustakaan Daerah pada tahun 2020 sebanyak 16.741 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 12.264 orang, sedangkan pengunjung perpustakaan keliling pada tahun 2020 sebanyak 4.157 orang, pada tahun 2021 sebanyak 0 orang. Koleksi buku diperpustakaan Pemda juga terus mengalami peningkatan dari 43.586 buku di tahun 2017 hingga 91.002 buku di tahun 2021.

## R. Kearsipan

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satunya dengan membangun birokrasi yang baik, efisien, efektif produktif, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak terlepas dari tata kelola kearsipan yang baik. Arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena arsip sebagai sumber informasi yang akurat dan alat bukti otentik serta bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja birokrasi.

### 1) Audit Kearsipan

Audit kearsipan merupakan penilaian tata kelola kearsipan yang dilaksanakan oleh LKD dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 48 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, 4 BUMD, 2 Ormas dan 281 Desa yang ada di Kabupaten Tegal. Baik atau tidaknya hasil audit dapat dilihat dari nilai LAKE (Laporan Audit Kinerja Eksternal) LKD, Desa dan Ormas, dan nilai LAKI (Laporan Audit Kinerja Internal) Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD yang ada di Kabupaten Tegal. Berikut data Penilaian LAKE dan LAKI di Kabupaten Tegal:

**Tabel 2. 161 Penilaian LAKE dan LAKI Kearsipan Tahun 2017- 2021**

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Peningkatan Nilai LAKE LKD	27	33	52	73	73
2.	Peningkatan jumlah OPD dengan Nilai LAKI Cukup	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	1 OPD
3.	Peningkatan jumlah Desa	Blm	Blm	Blm	Blm	Blm

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	dan Ormas dengan Nilai LAKE Cukup	dilakukan penilaian	dilakukan penilaian	dilakukan penilaian	dilakukan penilaian	dilakukan penilaian

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Tegal, 2022

Di Tahun 2021 ANRI tidak melaksanakan Audit, sehingga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk Penilaian LAKE LKD menggunakan nilai tahun 2020 yaitu 73. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal di Tahun 2021 telah melakukan Audit kearsipan terhadap 29 OPD dengan hasil yang bernilai LAKE Cukup 1 (satu) OPD.

## 2) Pengelolaan Arsip

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa /kejadian/ kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya memerlukan pengelolaan kearsipan yang baik. Organisasi Perangkat Daerah dan Desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik tersaji dalam Tabel berikut :

**Tabel 2. 162 Kondisi Pengelolaan Arsip Tahun 2017 - 2021**

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah OPD yang telah mengelola kearsipan dengan baik.	48	48	48	48	48
2.	Persentase jumlah OPD yang telah mengelola kearsipan dengan baik.	100	100	100	100	100
3.	Jumlah Desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik.	63	77	113	113	113
4.	Persentase jumlah Desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik.	22,41	27,40	40,21	40,21	40,21

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2022

Mendasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2017-2021 seluruh Organisasi Perangkat Daerah telah mengelola arsip dengan baik, tetapi belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja untuk meningkatkan nilai LAKE LKD.

### 2.1.3.3 Fokus Layanan Pilihan

#### A. Kelautan dan Perikanan

##### 1) Produksi Perikanan

Produksi perikanan mencakup produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya serta produksi pengolahan hasil perikanan. Secara rinci produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, produksi pengolahan hasil perikanan dan persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari *destructive fishing* dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 163 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan  
Kabupaten Tegal Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Perikanan Tangkap					
	Produksi (kg)	1.441.201	1.343.621	1.664.974	1.964.378	1.599.902
	Nilai (Rp 000)	10.603.486	11.343.111	12.887.350	13.608.184	24.315.177
2.	Perikanan Budidaya					
	Produksi(kg)	1.933.115	2.047.818	2.511.329	2.730.262	2.404.195
	Nilai (Rp 000)	75.021.353	86.814.081	127.440.566	145.642.227	134.134.340

*Sumber : Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tegal, 2022*

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Tegal pada tahun 2021 sebesar 1.599.902 kg. Jumlah ini cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya (2019-2020), hal ini disebabkan oleh cuaca ekstrem berupa gelombang laut yang tinggi dan angin kencang diawal dan akhir tahun, yang menyebabkan nelayan tidak bisa melaut dan melakukan aktivitas penangkapan ikan serta menjadi musim paceklik bagi nelayan. Akan tetapi, meskipun produksi ikan mengalami penurunan, namun nilai produksi justru mengalami peningkatan drastis. keadaan tersebut dimungkinkan permintaan ikan di kalangan konsumen mengalami peningkatan, sehingga harga ikan pun meningkat tajam.

Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2021 sebesar 2.404.195 Kg. Jumlah ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (2019-2020), Isu strategis dan permasalahan beserta dampak potensialnya yang dihadapi oleh perikanan budidaya sehingga menyebabkan belum optimalnya produksi perikanan budidaya. Pertama yaitu besarnya porsi biaya dan tingginya harga pakan, Sebagian besar bahan baku pakan masih harus didatangkan dari negara lain (import), Pabrik pakan skala rumah tangga belum berkembang dengan baik, Kenaikan harga ikan tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan, Industri penyediaan bahan baku pakan lokal masih sangat terbatas, sehingga akan berdampak pada ongkos produksi meningkat sehingga membutuhkan modal usaha yang lebih besar, usaha budidaya ikan skala kecil akan mengalami degradasi hingga menuju kebangkrutan. Kedua, skala usaha pembudidaya ikan didominasi oleh pembudidaya skala kecil sehingga porsi biaya tetap yang dikeluarkan menjadi besar sehingga biaya produksi menjadi tidak efisien sedangkan akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya terbatas berdampak pada daya saing produk rendah. Ketiga, Sistem logistic kegiatan budidaya ikan belum tertata dengan baik dan efisien sehingga kualitas produk dan harga jual tidak menentu. Kemudian tingkat pemahaman untuk pengamanan kualitas ikan pada pembudidaya ikan masih kurang dan umumnya masih menerapkan sistem tradisional dan atau sistem semi-intensif.

**Tabel 2. 164 Produksi dan Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pengolahan hasil perikanan					
	Produksi (kg)	3.125.680	3.409.674	4.514.145	5.478.639	6.363.369
	Nilai (Rp.000)	74.337.204	129.470.577	171.409.044	131.189.142	165.147.103

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, 2022

Pada tahun 2021 produksi pengolahan hasil perikanan mencapai 6.363.369 Kg. Jumlah produksi ini cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2017-2020). Nilai produksi pengolahan juga meningkat seiring dengan peningkatan produksi pengolahan.

Kemanfaatan pengolahan hasil perikanan perlu dioptimalkan lagi antara lain dengan meningkatkan sarana pendukung pengolahan (dalam hal ini peralatan pengolahan yang masih kurang); dan penguasaan teknologi bagi pengolah.

**Tabel 2. 165 Perairan Umum Daratan (PUD) yang Bebas Dari Kegiatan Destructive Fishing di Kabupaten Tegal Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Perairan Umum Daratan (PUD) di Kabupaten Tegal	3,70	7,41	11,11	11,11	12,11

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, 2022

Kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan (PUD) mulai dilaksanakan sejak tahun 2017, sehingga realisasi di tahun 2015-2016 tidak ada. Pada tahun 2015 – 2016, kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan dilaksanakan di perairan laut Kabupaten Tegal, berfokus pada illegal, *unregulated* dan *unreported fishing* (IUU Fishing).

Kegiatan destructive fishing menjadi permasalahan yang muncul di perairan umum daratan (PUD) Kabupaten Tegal yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan berimplikasi pada produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan (PUD). Sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penanganan *destructive fishing* yaitu melalui kegiatan penebaran benih ikan dan pengawasan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan (PUD). Kemudian maraknya praktek penangkapan ikan ilegal di PUD (menggunakan racun dan listrik/setrum), hal ini terjadi karena kurangnya kegiatan pengawasan penangkapan ikan di PUD, masih kurangnya sosialisasi peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Selain itu faktor rendahnya kesadaran masyarakat akan kegiatan penangkapan ikan yang berkelanjutan (*sustainable fisheries*). Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (menggunakan racun dan listrik/setrum).

## **B. Pariwisata**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah pada urusan bidang pariwisata mencakup:

- 1) Destinasi Pariwisata, dengan kewenangan: pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota, dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/ kota;
- 2) Pemasaran pariwisata, dengan kewenangan: pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri tentang daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota;
- 3) Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan kewenangan: penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota; dan
- 4) Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan kewenangan: pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Tegal untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

### 1) Jumlah Kunjungan Wisata

**Tabel 2. 166 Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2017 - 2021**

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah obyek wisata(obyek)	37	37	37	60	60
2.	Jumlah Usaha Pariwisata memiliki TDUP	56/256	102/256	128/256	138/256	138/256
3.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	1.053.957	950.771	1.189.877	466.668	466.668
	Wisatawan Manca Negara	1.470	3.805	3.247	137	137
	Wisatawan Nusantara	1.052.487	946.966	1.186.630	466.531	466.531
4.	Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Kondisi baik	50%	50%	45%	25%	25%
5.	Rata-rata kunjungan per obyek wisata (orang)	351.319	315.655	297.469	155.556	155.556
6.	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	n/a	n/a	n/a	5,55	5,55

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2022

Jumlah Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang ada di Kabupaten Tegal sejak tahun 2017-2019 sebanyak 37 DTW. Jumlah kunjungan ke-3 Daerah Tujuan Wisata (DTW) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tersebut sebanyak 466.668 orang pada tahun 2020 yang terdiri dari wisatawan nusantara 466.531 dan wisatawan mancanegara sebesar 137 orang, hal ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya akibat dampak covid-19.

PAD sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang PAD unggulan di Kabupaten Tegal. Berikut data 5 tahun terakhir PAD sektor pariwisata di Kabupaten

Tegal.

## 2) PAD Sektor Pariwisata

**Tabel 2. 167 PAD Sektor Pariwisata Tahun 2017-2021**

No	Tahun	PAD Pariwisata terhadap PAD
1	2017	2,20
2	2018	2,40
3	2019	3,24
4	2020	1,85
5	2021	2,24

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2022

Capaian tahun 2018 sedikit menurun dibanding capaian tahun 2017. Hal ini disebabkan karena jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata yang dikelola pemerintah menurun. Destinasi obyek wisata yang dikelola masyarakat berkembang sehingga menjadi alternatif daerah kunjungan wisata bagi masyarakat di samping obyek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah.

## 3) Destinasi Pariwisata

**Tabel 2. 168 Persentase Destinasi Pariwisata di Kabupaten Tegal Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang dipromosikan	56,67	56,67	56,67	61,67	62,40

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2022

## 4) Tanda Daftar Usaha Pariwisata

**Tabel 2. 169 Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Tegal Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	56	102	128	138	138

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2022

## 5) Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata

**Tabel 2. 170 Sumber Daya Manusia Pariwisata di Kabupaten Tegal Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah SDM Pariwisata yang dibina	20	20	20	100	100

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2022

## C. Pertanian

### 1) Produksi Daging, Telur, Susu

Produksi daging di Kabupaten Tegal mencakup produksi daging ternak ruminansia besar (Sapi, Kerbau), ternak ruminansia kecil (Kambing, Domba), Unggas dan aneka ternak lainnya. Produksi telur meliputi telur ayam, bebek, puyuh dan unggas lainnya, sedangkan produksi susu meliputi produksi susu sapi dan susu kambing. Secara rinci data produksi daging, produksi telur, produksi susu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 171 Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu  
Kabupaten Tegal Tahun 2016– 2021**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Daging						
	Produksi (kg)	9.675.621	9.784.502	10.057.415	10.167.793	11.284.734	12.817.246
2.	Telur						
	Produksi (kg)	10.203.264	10.249.993	10.258.158	10.261.185	10.760.493	9.734.385
3.	Susu						
	Produksi (kg)	713.192	713.428	713.890	686.651	604.664	655.741

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2022

Jumlah produksi daging di Kabupaten Tegal pada tahun 2021 mencapai 12.817.246 Kg. Produksi daging ini meningkat dari tahun sebelumnya (2020). Hal ini mengingat banyak bermunculannya warung sate dan rumah makan padang di kabupaten tegal. Selain itu, kenaikan produksi daging ini disumbang oleh besarnya produksi daging ayam di Kab. Tegal

Pada tahun 2021 produksi telur mencapai 9.734.385 Kg. Jumlah produksi telur ini cenderung turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2016-2020). Kondisi ini disinyalir terjadi akibat kondisi cuaca seperti hujan deras dan angin kencang yang sering terjadi pada penghujung tahun 2021, serta adanya penurunan populasi ternak ayam *layer* (ras petelur).

Untuk Produksi susu pada tahun 2021 mencapai 655.741 Kg. Jumlah ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari tahun-tahun sebelumnya (2016-2020). Kenaikan ini mungkin disebabkan banyaknya cafe-cafe yang menawarkan minuman dengan bahan dasar susu. Serta produksi susu kambing yang di tahun sebelumnya memang diharapkan untuk bisa menopang produksi susu seluruhnya.

### 2) Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian di kabupaten Tegal meliputi Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Persentase Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi, Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen, Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen.



**Tabel 2. 172 Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten Tegal Tahun 2020-2021**

Uraian	Tahun	
	2020	2021
Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	99,20	76,77
Rasio Serangan OPT	0,90	4,10
Persentase lahan terakomodir pupuk bersubsidi	100,76	67,55
Jumlah layanan Perlindungan Tanaman	1.000	1.000
Rasio Unit Usaha Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) per desa	54,77	54,80

*Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2022*

Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tahun 2021 baru terlaksana 76,77% lebih kecil dari tahun sebelumnya, hal ini berpengaruh pada Rasio Serangan OPT yang jumlahnya diharapkan < 3 menjadi 4,10.

Realisasi Persentase lahan terakomodir pupuk bersubsidi pada tahun 2021 lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu 67,55%. Sedangkan Rasio Unit Usaha Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) per desa pada tahun 2021 adalah 54,80.

### **3) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian di Kabupaten Tegal meliputi Indeks Pertanaman (yaitu Luas lahan yang ditanami padi dalam 1 tahun / luas baku lahan), Aksesibilitas Jalan Usaha Tani (Km/Ha) yaitu Panjang Jalan Usaha Tani : Luas Lahan Pertanian, dan Luas Lahan Sawah Lestari, yaitu Luas LP2B : Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan 36.088 Ha dan akan dipertahankan sampai akhir periode perencanaan.

**Tabel 2. 173 Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kabupaten Tegal Tahun 2020-2021**

Uraian	Tahun	
	2020	2021
Indeks Pertanaman	1,52	1,59
Aksesibilitas Jalan Usaha Tani (KM/Ha) / Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3	24
Luas Lahan Sawah Lestari yang dipertahankan	36.088 Ha	36.088 Ha

*Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2022*

Indeks Pertanaman di Kabupaten Tegal pada tahun 2021 sedikit lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu 1,59. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani lebih besar dari tahun sebelumnya, yaitu 24. Sedangkan untuk Luas Lahan Sawah Lestari, masih dipertahankan pada 36.088 Ha.

#### 4) Pengendalian Kesehatan Ternak dan Produk Hasil Ternak yang ASUH

**Tabel 2. 174 Persentase ternak terkendali status kesehatannya dan pengawasan produk hasil ternak yang ASUH Kabupaten Tegal Tahun 2017- 2021**

No.	Uraian	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Ternak terkendali status kesehatannya (%)	15,57	21,11	16,61	31,37	12,32
2	Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utuh dan Halal/ASUH (jenis)	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2022

Dalam rangka pengendalian kesehatan ternak, dilaksanakan pengobatan ternak kepada peternak rakyat di Kab. Tegal. Setiap tahun persentase status kesehatan ternak yang terkendali di Kabupaten Tegal semakin meningkat. Namun ditahun 2021 terjadi penurunan, persentase ternak terkendali status kesehatannya tahun 2020 sebesar 31, 37 %, tahun 2021 hanya 12,32 %. Hal tersebut terjadi karena anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan OVK (Obat Vaksin Kimia) di tahun Anggaran 2021 sangat terbatas.

Dalam rangka terlaksananya pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), maka dilakukan pemeriksaan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utuh dan Halal/ASUH dengan 2 jenis indikator yaitu menjamin produk daging lebih terjamin kualitasnya, melalui pemotongan hewan dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pemeriksaan sampel air susu baik susu kambing maupun susu sapi ditujukan agar terjamin kualitas air susu yang ASUH dan juga dalam rangka mencegah terjadinya praktek pemalsuan air susu, misal dengan di tambah air tajin atau santan. Pengawasan Kesmavet ini dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan produk hasil ternak yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal).

Jumlah ternak yang dipotong di RPH baik ternak besar (Sapi, kerbau) maupun ternak kecil (Domba, Kambing) pada tahun 2016 – 2021 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 175 Jumlah Ternak yang Dipotong Di RPH (Rumah Potong Hewan) Di Kabupaten Tegal Tahun 2017-2021**

No.	Jenis Ternak	Jumlah Pemotongan (ekor)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sapi	3113	3983	4113	1653	1587
2	Kerbau	81	107	88	26	13
3	Kambing	894	1630	1514	377	441
4	Domba	1505	2195	2427	668	799
	<b>Jumlah Total</b>	5593	7915	8142	2724	2840

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2022

Data jumlah sampel air susu yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal dari tahun 2016-2021 secara rinci ada pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 176 Jumlah Pemeriksaan Sampel Air Susu di Kabupaten Tegal Tahun 2017-2021**

No.	Jenis Air Susu	Jumlah Sampel Air Susu Yang Diperiksa (Liter)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sapi	18	14	14	10	1,2
2	Kambing	35	33	33	25	3,6
	<b>Jumlah Total</b>	53	47	47	35	4,8

*Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2022*

Pada tahun 2021, jumlah sampel air susu yang diperiksa hanya 4,8 liter. Ada penurunan yang sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena beberapa bahan yang digunakan untuk uji kualitas susu seperti misalnya reagen kimia sudah expired.

#### 5) Kelembagaan SDM Penyuluh Pertanian

Penyuluh pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Tugas pokok penyuluh pertanian adalah menyuluh, selanjutnya dalam menyuluh dapat dibagi menjadi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan. Secara lengkap komposisi jumlah penyuluh di Kabupaten Tegal sebagaimana Tabel berikut ini.

**Tabel 2. 177 Jumlah Penyuluh Tahun 2017 – 2021**

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penyuluh PNS/ASN :						
	a. Pertanian	88	88	108	108	108	108
	b. Perikanan	6	-	-	-	-	18
	c. Kehutanan	15	-	-	-	-	-
2.	Penyuluh THL – TBPP	81	77	49	49	49	-
		81	81	81	81	81	-
3.	Penyuluh Swadaya :						
	a. Pertanian	132	-	-	-	-	141
	b. Perikanan	11	-	-	-	-	-
	c. Kehutanan	30	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>363</b>					

*Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2022*

Jumlah penyuluh PNS/ASN pertanian di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah, dimana pada Tahun 2020 sebanyak 108 orang penyuluh, maka di Tahun 2021 menjadi 60 orang penyuluh. Namun pada tahun 2021 jumlah nya totalnya menjadi 108 orang, karena penyuluh THL – TBPP sudah diangkat

menjadi ASN-P3K.

#### 6) Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan

Perkembangan sektor pertanian dipengaruhi oleh produktivitas dari masing-masing komoditi. Beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas antara lain luas tanam, luas panen serta hasil produksi. Pada tabel berikut menjelaskan tentang produktivitas komoditi pertanian, tanaman hias dan perkebunan di Kabupaten Tegal Tahun 2016 – 2020.

**Tabel 2. 178 Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan Rakyat Tahun 2017–2021**

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Padi</b>					
	Luas Tanam (ha)	76.761	64.297	61.149,9	56.050	63.325
	Luas Panen (ha)	65.499	65.660	64.037	57.620	64.475
	Produksi (ton)	394.023	373.525	377.924	360.431	414.549
	Produktivitas (ton/ha)	6,02	5,69	5,90	6,25	6,4
2.	<b>Jagung</b>					
	Luas Tanam (ha)	12.799	10.028	16.348,9	21.238	20.576
	Luas Panen (ha)	15.699	7.982	16.465	17.506	19.961
	Produksi (ton)	118.288	45.069	124.200	117.236	128.533
	Produktivitas (ton/ha)	7,53	5,65	7,54	6,69	6,43
3.	<b>Kedelai</b>					
	Luas Tanam (ha)	68	151	419,7	119	53
	Luas Panen (ha)	60	104	308	75	73
	Produksi (ton)	108	154	173	81	108
	Produktivitas (ton/ha)	1,81	1,48	5,62	1,07	4,80
4.	<b>Ketela Pohon</b>					
	Luas Tanam (ha)	292	286	201	299	328
	Luas Panen (ha)	287	259	222	238	281
	Produksi (ton)	6.710	5.928	1.623	4.377	6.190
	Produktivitas (ton/ha)	23,35	22,89	73,11	18,37	22,05
5.	<b>Ketela Rambat</b>					
	Luas Tanam (ha)	50	38	79,8	88	917
	Luas Panen (ha)	55	35	72	82	831
	Produksi (ton)	637	346	1.066	663	11.450
	Produktivitas (ton/ha)	11,56	9,89	14,80	8,03	13,78
6.	<b>Kacang Tanah</b>					
	Luas Tanam (ha)	126	66	130,6	168	156
	Luas Panen (ha)	135	75	117	106	181
	Produksi (ton)	363	90	147	141	322
	Produktivitas (ton/ha)	2,69	1,20	1,25	1,3	1,78
7.	<b>Kacang Hijau</b>					
	Luas Tanam (ha)	11	9	36,8	7	55
	Luas Panen (ha)	14	0	32,9	3	46
	Produksi (ton)	16	0	48	3	56
	Produktivitas (ton/ha)	1,20	0	1,47	1,2	1,2

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Sayuran dan Buah Semusim</b>					
1.	<b>Bawang Merah</b>					
	Luas Tanam (ha)	1.926	2.414	1.901	1.666	453
	Luas Panen (ha)	1.884	2.323	1.901	1.741	342
	Produksi (ton)	19.828	248.276	161.966	168.797	20.071
	Produktivitas (ton/ha)	10,52	106,86	85,20	72,27	58,77
2.	<b>Cabe</b>					
	Luas Tanam (ha)	327	360	495	592	509
	Luas Panen (ha)	328	397	418	628	397
	Produksi (ton)	3.581	38.705	25.185	41.827	26.605
	Produktivitas (ton/ha)	10,92	97,49	74,08	79,39	77,45
3.	<b>Kentang</b>					
	Luas Tanam (ha)	459	409	400	1.950	385
	Luas Panen (ha)	548	406	338	413	371
	Produksi (ton)	11.866	87.160	80.205	96.540	49.790
	Produktivitas (ton/ha)	21,65	214,68	74,08	79,39	134,2
4.	<b>Kubis</b>					
	Luas Tanam (ha)	1.162	1.090	975	1.950	476
	Luas Panen (ha)	1.202	1.108	948	761	516
	Produksi (ton)	26.190	195.015	169.360	99.982	52.026
	Produktivitas (ton/ha)	18,82	177,81	132,43	131,38	101,22
5.	<b>Semangka</b>					
	Luas Tanam (ha)	123	72	42	135	41
	Luas Panen (ha)	123	72	42	113	24
	Produksi (ton)	1.689	7.185	5.562	19.358	3.870
	Produktivitas (ton/ha)	13,73	99,79	132,43	171,31	161,25
	<b>Tanaman Hias</b>					
1.	<b>Melati</b>					
	Luas Tanam (ha)	-	10.000	0	2.000	3
	Luas Panen (ha)	341	3.419.250	2.095.440	2.182.390	2.000
	Produksi (ton)	4.796	5.263.728	2.585.981	3.142.270	1.371
	Produktivitas (ton/ha)	14,07	1,54	1,23	3,04	3,04
	<b>Perkebunan Rakyat</b>					
1.	<b>Kelapa Dalam</b>					
	Luas Tanam (ha)	3.665	3.370,66	3.180,76	2.905	1.109
	Luas Panen (ha)	2.123	2.027,40	1.903,4	1.638	663
	Produksi (ton)	1.887	1.807,94	1.814	1.296	708
	Produktivitas (ton/ha)	0,89	891,75	0,953	0,791	1,066
2.	<b>Cengkeh</b>					
	Luas Tanam (ha)	1.325	1.323,48	1.821,32	1.851,42	1.851,42
	Luas Panen (ha)	765	764,17	768,40	742,2	704,1
	Produksi (ton)	140	140,31	110	63,64	56,31
	Produktivitas (ton/ha)	0,18	183,61	0,143	0,085	0,080
3.	<b>Teh</b>					
	Luas Tanam (ha)	163	164,73	165,73	170,93	61,1
	Luas Panen (ha)	129	128,43	135,35	135,30	36,1
	Produksi (ton)	35	35,06	56,39	33,49	47,12
	Produktivitas (ton/ha)	0,27	273,02	0,41	0,247	1,305

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
4.	<b>Tebu</b>					
	Luas Tanam (ha)	3.265	2.687,30	1.809,857	1.856,029	986,47
	Luas Panen (ha)	3.265	2.669,18	1.804,857	1.856	725,62
	Produksi (ton)	14.299	30.912,06	7.104,132	7.066	50,574
	Produktivitas (ton/ha)	4,38	11,58	3.925	3.807	69,698

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2022

Produktivitas tanaman pangan seperti padi, palawija sayuran dan buah-buahan relatif stagnan bahkan beberapa cenderung berfluktuatif seperti tanaman padi dari tahun 2017–2021 pergerakannya tidak stabil. Ditahun 2021 ini produktivitas tanaman pangan utama (padi) mencapai mencapai 6,43 ton/ha, paling tinggi dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk produktivitas tanaman perkebunan pada tahun 2021 cenderung mengalami penurunan di semua sektor tanaman perkebunan. Hal tersebut disebabkan adanya alih fungsi lahan di banyak komoditas perkebunan.

Perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan dilakukan melalui perhitungan ketersediaan lahan dengan pendekatan nilai produksi pangan utama, nilai produktivitas pangan utama, harga satuan jenis komoditas.

Dalam perhitungan ini, faktor konversi yang digunakan untuk menyetarakan produk non beras dengan beras adalah harga. Untuk memudahkan perhitungan dapat digunakan contoh tabel berikut ini dalam menghitung total nilai produksi ( $\{\sum (P_i \times H_i)\}$ ).

**Tabel 2. 179 Perhitungan Nilai Produksi Total Kabupaten Tegal**

No	Komoditas	Produksi (Pi) Kuantum 2012	Harga /Satuan (Hi)	Nilai Produksi/satuan dalam Rupiah (Pi x Hi)
<b>1</b>	<b>Bahan Makanan</b>			
	Padi	373.524	409.900	153.107.487.600
<b>2</b>	<b>Sayuran</b>			-
	Kangkung	3.026	7.500	22.695.000
	Sawi/Cesim	35.020	14.000	490.280.000
	Bawang Merah	248.239	16.069	3.988.952.491
<b>3</b>	<b>Buah-Buahan</b>			
	Pisang	96.629	20.000	1.932.580.000
	Mangga	31.024	25.000	775.600.000
	Jambu Biji	9.153	25.000	228.825.000
	Jambu Air	3.905	50.000	195.250.000
	Pepaya	10.242	10.000	102.420.000
	Nangka	18.263	45.000	821.835.000
	Belimbing	2.243	40.000	89.720.000
<b>4</b>	<b>Peternakan</b>			
	Sapi Potong (ekor=250kg)	1.315.845	101.750	133.887.228.750
	Kerbau (ekor=250kg)	26.593	110.000	2.925.230.000
	Domba/Kambing (ekor=20kg)	930.958	65.000	60.512.270.000

No	Komoditas	Produksi (Pi) Kuantum 2012	Harga /Satuan (Hi)	Nilai Produksi/satuan dalam Rupiah (Pi x Hi)
	Kambing (ekor=20kg)	493.740	100.000	49.374.000.000
	Ayam Kampung (ekor=2kg)	6.500.169	57.357	372.830.193.333
	Ayam Buras (16 telur=1kg)	237.802	50.000	11.890.100.000
	Itik (ekor=1,5kg)	162.154	70.000	11.350.780.000
	Lainnya (puyuh, kelinci, angsa)	117.241	30.000	3.517.230.000
	Burung Dara	2.289	30.000	68.670.000
	Telur Ayam Kampung	7.144.390	2.000	14.288.780.000
	Telur Itik	912.840	2.000	1.825.680.000
	Telur Puyuh	43.642	500	21.821.000
	Susu	713.428	4.000	2.853.712.000
	<b>Jumlah Total</b>			<b>827.101.340.174</b>

Sumber : Data KLHS RPJMD Kabupaten Tegal, 2022

Ketersediaan lahan dari hasil perhitungan tahun 2017 sebesar 104.908,85 Ha. Perhitungan kebutuhan lahan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk. Kemampuan lingkungan hidup dalam pemenuhan lahan untuk hidup layak dihitung dengan memperhitungkan luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak perpenduduk yang dilihat dari dimana dalam Dokumen KLHS RPJMD menunjukkan kebutuhan lahan di Kabupaten Tegal di tahun 2017 adalah sebesar 215.027,25 Ha dan di tahun 2031 diproyeksikan sebesar 225.583,05 Ha.

Berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan lahan, dapat ditentukan status daya dukung lahan di Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil perhitungan diatas didapatkan bahwa :

- Untuk Tahun 2017 maka  $S_L$  (104.908,85 Ha) <  $D_L$ , (215.027,25 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan belum dapat memenuhi kebutuhan.
- Untuk Tahun 2031 maka  $S_L$  (104.908,85 Ha) <  $D_L$ , (225.583,05 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan defisit. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan belum dapat memenuhi kebutuhan.

## 7) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Sektor pertanian Kabupaten Tegal memiliki peluang besar untuk dapat lebih berkembang dari kondisi eksisting saat ini,hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Tegal. Pada tahun 2021 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan harga berlaku mencapai 13,00 %. Selain merupakan kontributor ketiga terbesar dalam perekonomian wilayah, angka di atas menunjukkan bahwa inflasi di sektor pertanian relatif lebih rendah daripada inflasi pada sektor lainnya. Sayangnya, kontribusi sektor pertanian menunjukkan tren yang semakin menurun. Hal ini perlu mendapat perhatian karena banyaknya masyarakat yang bekerja pada sektor ini. Sebagaimana Tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 180 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian:					
	- ADH Berlaku	4.191.180,91	4.435.640,80	4.495.443,15	4.675.153,15	4.855.098,56
	- ADH Konstan	2.657.779,26	3.001.385,12	3.011.429,74	3.077.109,74	3.163.249,57
2.	Jumlah PDRB:					
	- ADH Berlaku	30.278,512,28	32.769,834,10	35.231,694,10	35.318,844,10	37.335.993,58
	- ADH Konstan	22.322.107,23	23.552.548,37	24.866.738,37	24.502.628,37	25.402.911,06
3.	Kontribusi Sektor Pertanian thd PDRB					
	- ADH Berlaku	12,50	13,29	12,76	13,24	13,00
	- ADH Konstan	13,25	12,87	12,11	12,56	12,45

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2022

## D. Perdagangan

### 1) Sarana dan Prasarana Pasar

Sarana dan Prasarana Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal ada 26 Pasar, dengan kondisi Sarana dan Prasarana yang Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat. Kondisi Sarana dan Prasarana Pasar yang baik dan berfungsi baik mendorong Pembeli di Pasar Meningkatkan.

**Tabel 2. 181 Kondisi Pasar Kabupaten Tegal Tahun 2017- 2021**

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun(Dalam Ribuan)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pasar Kondisi Baik	2	5	4	4	8
2	Jumlah Pasar Kondisi Rusak Ringan	0	3	5	4	2
3	Jumlah Pasar Kondisi Rusak Sedang	4	6	5	5	7
4	Jumlah Pasar Kondisi Rusak Berat	20	12	12	13	9
5	Jumlah Seluruh Pasar	26	26	26	26	26
	Persentase Pasar dalam kondisi Baik	7,69	19,23	15,38	15,38	30,76 %

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2022

Pada Tahun 2021, jumlah Pasar dalam Kondisi Baik masih sebanyak 8 Pasar (30,76 %). Sedangkan sisanya merupakan Pasar dengan Kondisi kerusakan yang beragam, dari yang mengalami kerusakan ringan (2 unit), sedang (7 unit), hingga yang mengalami kerusakan berat pada atap (bocor), kios, saluran air, lantai pasar yang masih becek, dan sarana lainnya.

Saat ini Penerapan *e-Retribusi* pada pasar rakyat yang diterapkan hingga tahun 2021 sudah sebanyak 7 (Tujuh) Pasar, yaitu Pasar Pepedan, Pasar Kupu, Pasar Bojong, Pasar Lebaksiu, Pasar Kemantran, Pasar Kedungsukun, dan Pasar Pangkah. Tujuan dari penerapan *E-Retribusi* pada Pasar Rakyat adalah untuk mengoptimalkan penerapan transaksi non tunai dalam penarikan retribusi. Penerapan *e-Retribusi* ini direncanakan untuk diterapkan pada seluruh Pasar Rakyat secara bertahap.



## 2) Operasi Pasar

Operasi Pasar dilakukan untuk menekan / mempengaruhi harga pasar khususnya komoditi yang mengalami kenaikan harga. Operasi Pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditempatkan di Wilayah Kabupaten Tegal dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2. 182 Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun(Dalam Ribuan)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Operasi Pasar oleh Pemerintah Kabupaten	18	18	18	18	1
2	Operasi Pasar Oleh Pemerintah Provinsi	18	18	18	0	0
	Jumlah Operasi Pasar	36	36	36	18	1

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2022

Pelaksanaan Operasi Pasar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal pada Tahun 2017 – 2020 dilaksanakan di 18 lokasi Pasar. Sedangkan Tahun 2021 dikarenakan refocusing anggaran, operasi pasar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal pada Tahun tersebut hanya sebanyak 1 lokasi di Kecamatan Bojong.

## 3) Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih merupakan salah satu indikator agar Pertumbuhan Ekonomi bergerak positif. Nilai Ekspor bersih didapat dari selisih antara Nilai Ekspor dengan Nilai Impor.

Nilai ekspor bersih perdagangan di Tegal dari tahun 2018 sampai tahun 2019 meningkat. Namun pada tahun 2020, dimana terjadi pandemi COVID , rupanya cukup berpengaruh pada produktivitas Pelaku Ekspor, sehingga pada tahun 2020, nilai ekspor mengalami penurunan, Pada tahun 2021, dimana perekonomian berangsur pulih, Nilai Ekspor mengalami peningkatan pesat. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2017-2021 sebagaimana Tabel di bawah :

**Tabel 2. 183 Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2017- 2021**

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun(Dalam Ribuan)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai Ekspor	228.638.224.198	169.760.204.000	205.000.000.000	144.000.000.000	473.775.479.538
2.	Nilai Impor	54.801.884.058	0	0	0	0
3.	Nilai Ekspor Bersih (Nilai Ekspor – Nilai Impor)	173.836.380.139	169.760.204.000	205.000.000.000	144.000.000.000	473.775.479.538

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2022

**Tabel 2. 184 Jumlah Pelaku Ekspor Tahun 2017– 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pelaku Ekspor	7	8	9	11	7

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2022

#### **4) Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB**

Sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua. Pada tahun 2019 kontribusi sektor perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan mencapai 15,47% dan atas dasar harga konstan adalah sebesar 17,37%. Perbedaan kontribusi ini menunjukkan bahwa sektor ini relatif mengalami inflasi yang cukup tinggi. Ditopang dengan lokasi Kabupaten Tegal yang strategis, perkembangan kota kecamatan yang cukup pesat, dan kontribusi sektor pertanian dan industri pengolahan yang signifikan, maka pada dasarnya sektor perdagangan dapat berkembang tanpa adanya campur tangan pemerintah secara masif. Tugas Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengembangan sektor ini adalah menerapkan regulasi yang menjamin keadilan dalam berusaha, serta menyediakan infrastruktur pendukung sektor perdagangan yang dapat diakses oleh semua orang. Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2. 185 Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB Tahun 2017 – 2021**

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor):					
	- ADH Berlaku	4.725.986,05	4.942.943,53	5.449.555,30	5.274.290,34	5.274.290,34
	- ADH Konstan	3.872.572,30	3.954.562,55	4.307.730,96	4.126.594,65	4.126.594,65
2.	Jumlah PDRB :					
	- ADH Berlaku	30.044.412,28	33.079.234,10	35.231.687,56	35.318.843,56	35.318.843,56
	- ADH Konstan	21.265.717,23	23.552.548,37	24.806.727,91	24.502.623,91	24.502.623,91
3.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) thd PDRB					
	- ADH berlaku	15,42	15,73	15,47	14,93	14,93
	- ADH Konstan	17,16	17,31	17,37	16,84	16,84

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2022

Nilai ekspor bersih perdagangan di Tegal dari tahun 2017 sampai tahun 2021 meningkat. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2017-2021 sebagaimana Tabel di bawah.

**Tabel 2. 186 Jumlah Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) yang ditera Tahun 2017 - 2021**

No.	Uraian	Jumlah per Unit				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	2422	2295	5509	2108	2108
2.	Jumlah UTTP yang tidak ditera/tera ulang	4949	5076	2032	5433	5433
3.	Jumlah total UTTP	7371	7371	7541	7541	7541
	Persentase Alat UTTP yang Ditera	32,86	31,14	73,05	27,95	27,95

*Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2022*

Dalam rangka mencapai terwujudnya perlindungan terhadap konsumen, dunia usaha dan masyarakat dalam hal kebenaran pengukuran dan penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam industri dan perdagangan, meningkatkan daya saing produk daerah dalam negeri maupun luar negeri, serta terciptanya tertib ukur di berbagai bidang, maka perlu peningkatan penyelenggaraan kegiatan metrologi legal.

Dalam konteks perlindungan terhadap konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran pada perdagangan barang dan jasa, kegiatan metrologi legal berperan sebagai bagian dari pengamanan perdagangan barang dan jasa baik dalam negeri maupun luar negeri. Konsumen menghendaki adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran dan kepastian hukum terhadap proses transaksi perdagangan yang menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) sebagai dasar penetapan kuantitas dan harga barang dan jasa. Sedangkan dalam perdagangan luar negeri, negara menghendaki adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap ekspor dan impor barang dan jasa agar negara tidak mengalami kerugian akibat kesalahan atau ketidaksesuaian hasil pengukuran terhadap barang dan jasa tersebut.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diberlakukan secara efektif pada bulan Oktober tahun 2016 telah membagi kewenangan urusan pilihan perdagangan pada sub urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen khususnya penyelenggaraan metrologi legal dimana setiap Kota/Kabupaten diberi kewenangan dalam pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan, maka kewenangan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi akan diserahkan ke Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini yang mendasari Pemerintah Kabupaten Tegal mendirikan UPTD di akhir tahun 2016.

UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal mulai operasional sejak tahun 2017. Namun dikarenakan belum memiliki Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU) dari Kementerian Perdagangan maka di dua tahun pertama (2017 -2018) kegiatan metrologi legal dilaksanakan melalui kerja sama dengan Metrologi Kota Tegal. Pada tahun 2019 akhirnya UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal dapat beroperasi secara mandiri setelah mendapatkan SKKPTTU di awal tahun 2019.

Persentase UTTP yang ditera/tera ulang meningkat pesat sejak UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal operasional secara mandiri. Pada tahun 2017 dan 2018 pada saat masih kerja sama dengan Metrologi Kota Tegal persentase UTTP yang ditera/tera ulang masih berkisar 30% namun di tahun 2019 naik signifikan ke 73,05%.

Pada tahun 2020 semula ditargetkan persentase UTTP yang ditera/tera ulang dapat mencapai 85% , namun dengan adanya pandemi Covid-19 dimana terjadi refocussing anggaran, pelaksanaan Sidang Tera Ulang yang direncanakan akan diselenggarakan di 25 pasar pemkab tidak terealisasi. Dengan anggaran terbatas pelayanan metrologi legal tetap dilaksanakan dengan memprioritaskan pelayanan di kantor. Dengan segala keterbatasan persentase UTTP yang ditera/tera ulang pada tahun 2020 turun menjadi 27,95%.

## 5) Pemasaran Produk Dalam Negeri

Agar Produk Dalam Negeri dapat dikenal dan dipasarkan secara luas, perlu adanya Sarana Promosi, diantaranya adalah keikutsertaan pada Ajang Pameran, baik dalam level Pameran Tingkat Nasional hingga Lokal, selama kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021, keikutsertaan dalam Pameran sebagai berikut :

**Tabel 2. 187 Jumlah Promosi Produk Dalam Negeri Tahun 2017–2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pameran Tk. Nasional	2	2	2	-	-
2	Pameran Tk. Regional	1	1	1	-	-
3	Pameran Tk. Lokal	1	1	1	-	-
4	Jumlah seluruh Pameran yang diikuti	4	4	4	-	-

*Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2022*

Pada tahun 2020, tidak ikut serta Pameran Promosi Produk dikarenakan *Refocusing* Anggaran untuk penanganan covid-19.

## E. Perindustrian

### 1) Perencanaan dan Pembangunan Industri

Perencanaan dan Pembangunan Industri merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang meliputi beberapa aspek dalam menciptakan struktur ekonomi yang kukuh sebagai penggerak ekonomi daerah yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Berikut beberapa aspek pembangunan industri antara lain :

#### a. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan wilayah yang ditujukan untuk berkembangnya kegiatan industri harus ditunjang dengan akses infrastruktur industri dan penunjang yang disediakan pemerintah, infrastruktur tersebut meliputi jaringan energi dan listrik, sumber daya air dan pasokan bahan baku, sanitasi dan transportasi. Adapun infrastruktur penunjang meliputi perumahan, pendidikan, kesehatan dan tempat pembuangan sampah. Rencana

pengembangan perwilayah industri telah dimasukan pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal.

**Tabel 2. 188 Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Tegal**

No	Jenis Kawasan Peruntukan Industri	Lokasi Kecamatan
1	Industri Besar dan Menengah	
	KPI Margasari	Margasari
	KPI Pantura	Kramat, Suradadi dan Warureja
2	Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga	Kramat, Adiwerna, Talang, Pangkah, Pagerbarang, Suradadi, Balapulung, Dukuhturi, Margasari dan Warureja

*Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2022*

Berdasarkan tabel diatas bahwa pembangunan industri tidak hanya dilakukan dengan pendekatan sektoral yang diwujudkan melalui penguatan struktur industri dan berdaya saing saja, tetapi juga perlu pendekatan spasial yang dimuat dalam Rencana pengembangan perwilayah industri telah dimasukan pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal.

#### **b. Pembangunan Sumber Daya Industri**

Pembangunan sumber daya industri meliputi 3 (tiga) hal yaitu pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri. Berikut pelayanan peningkatan mutu produk yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium yang merupakan bagian dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri.

UPTD laboratorium Perindustrian sebagai lembaga penilai kesesuaian dalam rangka peningkatan daya saing daerah melakukan pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah peningkatan kualitas (quality) mutu produk industri melalui pengujian dan pemesanan serta pelaksanaan sertifikasi personil dimana UPTD Laboratorium Perindustrian sebagai lembaga penilai kesesuaian sejak tahun 2008 sudah teregistrasi/terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (ISO/IEC17025;2017) LP-396-IDN dan sejak Tahun 2017 terakreditasi/teregrestasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Logam dan Mesin Indonesia (LSP-LMI ) sebagai TUK Mandiri SP3 (Tempat Uji Kompetensi Personil) terverifikasi ulang nomor 002/SK-LSP-LMI/TUK-LM/X/2020 tanggal 9 oktober 2020 dengan skema Operasi mesin dan proses, menggambar, merencana, mendisain, fabrikasi, dan *Quality*.

**Tabel 2. 189 Pelayanan Peningkatan Kualitas Mutu Produk Masyarakat/Industri di Kabupaten Tegal Tahun 2017-2021**

Kategori (Pelanggan)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Kab. Tegal	263	336	365	300	300
Luar Kab .Tegal	51	136	150	136	136
Pendidikan	97	64	110	100	100
<b>Total/Tahun</b>	<b>411</b>	<b>536</b>	<b>625</b>	<b>536</b>	<b>536</b>

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2022

**c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri**

Pembangunan sumber daya industri meliputi beberapa hal diantaranya sertifikasi produk dan standarisasi IKM dalam upaya meningkatkan daya saing industri daerah. Berikut data sertifikasi produk dan standarisasi IKM :

**Tabel 2. 190 Sertifikasi Produk IKM di Kabupaten Tegal**

No.	Jenis Sertifikasi	Jumlah Ikm Terfasilitasi			Tahun
		APBD I	APBD II	APBN	
1	Uji Nutrisi	39	2		2019-2020
2	Uji Kadaluarsa	7			2018-2019
3	PIRT	82	-	-	2018-2020
4	Halal	30	11		2018-2020
5	Pendaftaran Merk	96	3		2015-2020
6	BKI	-	-	4	2018-2019
7	SNI			2	2018

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2022

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian kegiatan fasilitasi sertifikasi produk IKM dibiayai oleh APBD I kemudian APBD II dan APBN. Kegiatan fasilitasi yang biayai oleh APBN cenderung pada kegiatan yang lebih besar dan membutuhkan proses lebih lama daripada proses sertifikasi yang lainnya. Selain sertifikasi produk IKM juga dilakukan standarisasi IKM sebagaimana yang tercantum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2. 191 Standarisasi IKM di Kabupaten Tegal**

No.	Jenis Standarisasi	Jumlah IKM Terfasilitasi			Tahun
		APBD I	APBD II	APBN	
1	DOKUMEN MUTU	3	3		2018-2019
2	ISO 9001 : 2000			1	2008
3	ISO 9001 : 2008			1	2011
4	ISO 9001 : 2015			6	2017-2019
5	ISO 14001 : 2015		1		2019

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2022

Pada kurun waktu 2011 sampai dengan 2019 terdapat 15 IKM yang telah mengikut standarisasi yang biayai baik APBD II, APBD I maupun APBN.

Standarisasi yang paling banyak diikuti oleh para IKM terjadi pada kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 yaitu sebanyak 6 IKM yang dibiayai oleh APBN dan semuanya melakukan standarisasi tentang ISO 9001.

#### **d. Pengendalian Izin Usaha Industri**

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha Industri di Kabupaten Tegal perlu dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Izin Usaha Industri, dalam penerbitan IUI perlu adanya pengendalian melalui penerbitan Rekomendasi Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, berikut data Rekomtek IUI yang telah diterbitkan :

**Tabel 2. 192 Rekomendasi Teknis Penerbitan IUI**

<b>No.</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>KBLI / Jenis Usaha</b>	<b>Tanggal Terbit</b>
1.	CV Dok Abadi	33151 – Reparasi Kapal, Perahu dan Banguna Terapung	18 Juni 2020
2.	PT Citra Bahari Shipyard	30111 – Industri Kapal dan Perahu	19 Maret 2020
3.	PT Gopek Cipta Utama	10763 – Industri Pengolahan The	26 Agustus 2020
4.	PR Harjanti	10771 – Industri Kecap	26 Oktober 2020

*Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2022*

Pelaksanaan penerbitan rekomendasi teknis IUI oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dimulai pada Tahun 2020, ada 4 (empat) rekomtek yang telah diterbitkan yaitu 2 (dua) pada bidang industri pengolahan makanan, 1 (satu) pada bidang reparasi kapal dan 1 (satu) pada industri kapal.

#### **e. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Pengelolaan system Informasi Industri Nasional bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri yang dapat diakses oleh masyarakat. Berikut data perusahaan yang telah terdaftar dalam SiiNas.

**Tabel 2. 193 Perusahaan SIINas dan IUI**

No.	Uraian	Jumlah IKM	Keterangan
1.	Perusahaan yang sudah memiliki akun SIINas	66	IUI yang dimiliki belum Efektif
2.	Perusahaan yang sudah mengajukan Permohonan Verifikasi Teknis IUI	10	4 perusahaan telah diterbitkan rekomendasi teknis oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2022

Dari jumlah perusahaan yang dibina oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal terdapat 66 perusahaan yang telah memiliki akun SiiNas dan 10 perusahaan yang telah mengajukan permohonan verifikasi teknis IUI dari 10 perusahaan tersebut baru 4 (empat) perusahaan yang telah terbit rekomendasi teknis IUI nya.

#### F. Transmigrasi

Salah satu upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Tegal, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan Program Transmigrasi dalam rangka penyerapan lapangan kerja, namun penyerapan lapangan kerja melalui transmigrasi belum optimal dikarenakan pelaksanaan pelatihan, pengiriman dan penempatan transmigran merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam memberikan kuota calon transmigran dari Kabupaten Tegal. Berikut ini data rekapitulasi transmigran dari Kabupaten Tegal yang diberangkatkan pada tahun 2014 – 2020 :

**Tabel 2. 194 Rekapitulasi Transmigran dari Kabupaten Tegal yang Diberangkatkan pada Tahun 2014 – 2020**

No	Tahun	Jumlah Kartu Keluarga	Jumlah Jiwa	Tujuan
1	2014	4	15	Padalere Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
2	2015	6	23	Jebus Kab. Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung
3	2016	3	8	Sandalan Kab. Pahuwoto Provinsi Gorontalo
		4	14	Bukit Aren Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo
4	2017	2	13	Tangaona Kab. Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara
		2	8	Bukit Aren Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo
5	2018	3	13	Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
6	2019	3	16	Desa Tanjung Buka Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara
7	2020	0	0	-
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>110</b>	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2022



#### 2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

##### A. Perencanaan

##### 1) Perencanaan Penganggaran Pogram

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, top-down & bottom-up. Perencanaan dan penganggaran program adalah untuk memastikan penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Tegal yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sesuai tahapan. Adapun capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah.

**Tabel 2. 195 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan dan Kebijakan anggaran	NA	NA	NA	100	100
2.	Persentase hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti	NA	NA	NA	75	83

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

Berdasarkan data diatas maka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tegal telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku baik tahapan maupun waktunya. Hal ini perlu dipertahankan dan secara kualitas masih diperlukan adanya peningkatan di masa mendatang. Sedangkan hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti masih perlu ditingkatkan lagi.

##### 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan yang baik dan selaras antara dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD dan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renja OPD. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah adalah untuk menghasilkan keselarasan dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renja OPD rumpun bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, rumpun bidang perekonomian dan SDA, serta rumpun bidang infrastruktur dan kewilayahan. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan

melalui koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi stakeholder dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Dengan keselarasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Tegal. Pencapaian keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2. 196 Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	NA	NA	NA	91,22	76,24
2.	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Perekonomian dan SDA	NA	NA	NA	92,88	67,92
2.	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	NA	NA	NA	93,02	75,89

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

Capaian kinerja Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia masih perlu ditingkatkan karena masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu diangka 76,24%, hal tersebut dihitung berdasarkan instrument kesesuaian antara dokumen Renja Tahun 2021 dengan Renstra perangkat daerah, dimana paling besar penyumbang ketidakselarasan adalah pada indikator kinerja, baik indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta perbedaan besaran pagu anggarannya. Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut : (1) masih terdapat gap kompetensi SDM pengampu perencanaan pada masing-masing Perangkat Daerah lingkup koordinasi, (2) koordinasi internal antara Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Bidang Pemerintahan Pembangunan manusia yang belum optimal

Capaian tingkat seselarasan dokumen perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan perlu ditingkatkan karena masih berada di angka 75,89%, hal tersebut dihitung berdasarkan instrument kesesuaian antara dokumen Renja Tahun 2022 dengan Renstra perangkat daerah, dimana paling besar penyumbang ketidakselarasan adalah pada indikator kinerja, baik indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta perbedaan besaran pagu anggarannya. Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut : (1) kompetensi penyusun Renstra dan Renja dari masing-masing perangkat daerah yang tidak sama, (2) koordinasi internal perencanaan yang kurang optimal.

Ada 6 (enam) OPD yang berada di bawah rumpun bidang perekonomian dan SDA, yaitu : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu; Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja; Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata; Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan; Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian; dan Dinas Perikanan. Rata-rata tingkat keselarasan Renja-Renstra untuk OPD rumpun bidang perekonomian dan SDA adalah 67,92. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh dampak refokusing anggaran untuk Covid-19, sehingga banyak program/kegiatan/sub kegiatan pada OPD yang pagu anggarannya kegiatan pada renja tidak selaras dengan renstra. Bahkan ada beberapa program/kegiatan/sub kegiatan pada renstra yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya keterbatasan anggaran tersebut.

## B. Keuangan dan Aset Daerah

### 1) Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Dalam Program Pengelolaan Keuangan daerah terdapat tiga kegiatan antara lain : 1) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, 2) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. 3) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah. Secara garis besar Program Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD serta pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dan Penyusunan Anggaran Daerah berikut data capaian 5 tahun terakhir terkait indikator capaian Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Tabel 2. 197 Indikator Capaian Kinerja program Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Tahun 2017 - 2021**

No	Indikator	Realisasi Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D	95%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perda & Perbup Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2022

Capaian kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dipertahankan dari tahun sebelumnya. Namun untuk ketepatan penerbitan SP2D secara tepat waktu belum bisa optimal. Hal ini dikarenakan tidak lengkapnya persyaratan administrasi dan kurang tertibnya OPD dalam melakukan pengajuan pencairan yang cenderung menumpuk di akhir tahun. Untuk itu perlu adanya koordinasi antar semua pihak agar persyaratan administrasi dalam penerbitan SP2D dapat dipenuhi.

Dalam 5 tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Tegal telah berhasil menetapkan APBD tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat kegiatan pembangunan dan menghindari sanksi dari pemerintah pusat. Keterlambatan penetapan perda APBD akan berakibat akan ada sanksi, baik itu

administrasi, maupun sanksi lainnya yang lebih tegas. Salah satu sanksinya, kepala daerah dan anggota DPRD bisa tidak digaji selama enam bulan.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini tersebut menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Tegal yang semakin baik, kondisi tersebut merupakan pencapaian dari Indikator sasaran RPJMD tahun 2017-2021, berikut data capaian 5 tahun terakhir.

**Tabel 2. 198 Capaian Kinerja Keuangan Daerah atas Audit LKDP BPK Tahun 2017 - 2021**

Indikator	Realisasi Capaian				
	2017	2018	2019	2020	2021
Opini WTP atas Audit LKPD BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

*Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2022*

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah berhasil mempertahankan WTP sejak Tahun 2017 atau sudah 5 kali berturut-turut memperoleh opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, BPK masih menemukan beberapa permasalahan namun dampak permasalahan tersebut tidak material dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Permasalahan tersebut diantaranya terkait dengan pengelolaan pendapatan, persediaan dan aset tetap, dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan.

## 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Perda No 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD terdiri dari 11 Jenis/bentuk Pengelolaan yang meliputi Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, dari 11 komponen tersebut maka menjadi indikator Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktuberikut capaian 5 tahun terakhir.

**Tabel 2. 199 Indikator kinerja Program Pengelolaan Barang Milik/Aset Daerah Tahun 2017 - 2021**

Indikator	Realisasi Capaian				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah OPD yang telah menyusun Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu	24	24	26	30	30
Jumlah seluruh OPD	48	48	48	48	48
<b>Persentase Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>

*Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2022*

Dalam 5 tahun terakhir, OPD yang telah mengelola barang milik daerah (BMD) dengan baik dan benar selalu meningkat dan sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 62,5%. Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik /aset daerah negara telah memunculkan optimisme baru, *best practices* dalam penataan dan pengelolaan aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya. Pengelolaan aset daerah yang professional dan modern dengan mengedepankan *goodgovernance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan aset daerah.

### 3) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan dalam APBD yang perlu ditingkatkan pencapaian target oleh perangkat daerah pengampu. Berikut data kinerja pencapaian PAD selama 5 tahun terakhir.

**Tabel 2. 200 Capaian Kinerja Realisasi PAD Kabupaten Tegal Tahun 2017 - 2021**

Indikator	Realisasi Capaian				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah PAD	375.631. 165.351	372.282. 676.055	436.003. 392.413	437.354. 766.316	590.328.406.30 1
Jumlah APBD	2.450.766. 552.130	2.524.365. 919.815	2.755.677. 484.152	2.608.651. 547.250	2.351.735.092.6 40
Rasio PAD	15,1%	14,7%	15,8%	16,7%	25,10%

Sumber : Bappenda Kabupaten Tegal, 2022

Sistem pengelolaan data dan penetapan pajak daerah belum optimal ditandai persentase potensi pajak yang ditetapkan masih kurang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak didalam membayar pajaknya. Untuk itu diperlukan *updating* data pajak secara menyeluruh dan komprehensif.

**Tabel 2. 201 Capaian Kinerja PAD Kabupaten Tegal Tahun 2017 - 2021**

Indikator	Realisasa Capaian				
	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi PAD	375.631. 165.351	372.282. 676.055	436.003. 392.413	437.354. 766.316	590.328.406. 301
Target PAD	370.096. 012.000	418.830. 489.000	499.974. 699.000	408.838. 286.000	469.765.165. 000
Deviasi PAD	101%	88,9%	96,9%	106,98%	125,66%

Sumber : Bappenda Kabupaten Tegal, 2022

### 4) Pengelolaan Pajak Daerah

Pengelolaan Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kemandirian daerah. Hasil dari upaya pengelolaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2. 202 Capaian Kinerja Hasil Pajak Daerah yang tertagih Tahun 2017 – 2021**

Indikator	Realisasa Capaian				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pajak daerah	96.425. 287.892	107.035. 473.258	112.808. 450.157	125.226. 436.076	143.159.178 .165
Jumlah PAD	375.531. 165.351	372.282. 676.055	436.003. 392.413	437.354. 786.316	590.328.406 .301
Rasio Pajak	26 %	29 %	28 %	29 %	24%

Sumber : Bappenda Kabupaten Tegal, 2022

Penerimaan pajak daerah belum maksimal. Faktornya adalah Kurangnya kesadaran warga masyarakat atas pembayaran pajak, dan sosialisasi, penyuluhan dan ke Wajib Pajak; Spot-spot pelayanan dan sarana pembayaran pajak melalui perbankan dan pihak swasta/PPOB masih kurang; dan Sarana prasarana yang dimiliki belum memadai, seperti mobil pelayanan pajak yang bersifat mobile online, ruang pelayanan pajak yang terkoneksi dengan perbankan.

Pendataan terhadap potensi pajak belum dapat dilakukan secara maksimal, antara lain pendataan obyek baru, pendataan dan penilaian ulang obyek yang sudah ada.

#### 5) Pengelolaan Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah : piutang yang muncul karena pendapatan pajak yang telah diatur dalam UU perpajakan belum dilunasi hingga periode laporan keuangan. Pengelolaan piutang pajak masih sangat terbatas, hal ini disebabkan data pajak bermasalah seperti obyek pajak tidak ditemukan, double nomor obyek pajak, obyek pajak dalam sengketa, obyek pajak berubah fungsi dan kepemilikan, masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

**Tabel 2. 203 Hasil Pajak non PBB dan BPHTB yang tertagih Tahun 2018 – 2021**

Indikator	Realisasi Capaian			
	2018	2019	2020	2021
Jumlah piutang tertagih non PBB dan BPHTB	56.712.923	4.542.294.640	3.960.709.603	-
Jumlah piutang non PBB dan BPHTB	109.807.788	4.592.638.505	4.010.011.558	4.760.701.022
Rasio Piutang pajak	51,65 %	98,90 %	98,77%	-

Sumber : Bappenda Kabupaten Tegal, 2022

Keterangan : Bappenda (BP2D) berdiri tahun 2017 jumlah Piutang tahun 2017 adalah akumulasi tahun 2015-2016

\*Piutang Non PBB-P2 dan Non BPHTB Tahun 2021 tertagih pada Tahun 2022, sehingga belum dapat menyajikan data Piutang tertagih Non PBB-P2 dan BPHTB

**Tabel 2. 204 Capaian Kinerja Hasil Pajak PBB  
yang tertagih Tahun 2017 - 2021**

Indikator	Realisasi Capaian				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah piutang tertagih PBB	1.880.095.681	2.069.387.830	1.444.135.173	6.255.737.666	-
Jumlah piutang PBB	6.212.145.007	6.828.477.052	7.791.584.519	9.442.456.208	11.553.357.105
Rasio Piutang pajak	30,3 %	30,3 %	18,5 %	60,25%	-

*Sumber : Bappenda Kabupaten Tegal tahun 2022*

Keterangan:

*\*Piutang tertagih PBB-P2 Tahun 2020 yaitu Realisasi Piutang PBB-P2 Tahun 2020 sebesar Rp 4.304.370.120 dan Penghapusan Piutang PBB-P2 Tahun 2021 sebesar Rp 1.951.367.546*

*\*Piutang PBB-P2 Tahun 2021 tertagih pada Tahun 2022, sehingga belum dapat menyajikan data Piutang tertagih Tahun 2021.*

## **C. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**

### **1) Kepegawaian Daerah**

Dengan Program Kepegawaian Daerah diharapkan persentase ASN mendapatkan hukuman disiplin akan menurun secara signifikan, persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya, persentase jabatan fungsional (non guru dan kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya, rasio pegawai dengan pendidikan perguruan tinggi dan menengah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, rasio pegawai fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, persentase PNS yang mengikuti diklat teknis 20 jam/tahun, dan persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan akan bertambah secara signifikan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras BKPSDM Kabupaten Tegal selaku perangkat daerah yang bertugas dalam bidang kepegawaian. Sebagai ilustrasi tersaji data kepegawaian mulai tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu sampai dengan tahun 2024 diharapkan akan bertambah.

**Tabel 2. 205 Kepegawaian Daerah**

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin	0.20	0.54	0.15	0.12	0.25
2	Persentase jabatan struktural yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	91.11	84.62	77.30	87.97	93,15
3	Persentase jabatan fungsional yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	42.77	40.46	38.50	35.76	40,48
4	Rasio pegawai (PNS) (berpendidikan perguruan tinggi	67.79	72.80	103,20	110.04	96,38
5	Rasio pegawai (PNS) fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	9.99	8.13	8.61	9.87	16.87
6.	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	94.29	92.00	93.36	93.50	42,09

*Sumber: BKD Kabupaten Tegal, 2022*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bahwa persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin jumlahnya relatif kecil yaitu sejumlah 22 orang, namun dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 terdapat peningkatan PNS yang mendapatkan hukuman disiplin. Jumlah terbanyak adalah pelanggaran terhadap larangan kegiatan dalam masa pandemi Covid-19, dimana masih terdapat pejabat yang melaksanakan kegiatan dalam masa pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19 tersebut.

Persentase jabatan struktural terisi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan, hal ini karena pada periode tersebut terkendala adanya larangan mutasi dan promosi sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan penyederhanaan birokrasi yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan yang selesai pada akhir Desember 2021. Pada tahun 2021 capaiannya mengalami kenaikan yaitu sejumlah 93,13% setelah dilakukannya pelantikan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional. Sampai dengan akhir tahun 2021 masih terdapat 35 formasi jabatan struktural yang belum terisi dari 511 formasi jabatan struktural.

Minat PNS untuk menduduki Jabatan Fungsional non guru/kesehatan mulai tahun 2017-2021 jumlahnya fluktuatif. Disamping itu dengan adanya penyetaraan jabatan struktural kedalam jabatan fungsional turut meningkatkan capaian persentase jumlah jabatan fungsional non guru/kesehatan. selain itu pengadaan CPNS tahun 2018, 2019 dan tahun 2021 diformasikan untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional.

Rasio pegawai dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi meliputi diploma, sarjana dan pasca sarjana dibandingkan dengan pegawai dengan tingkat pendidikan menengah dan pendidikan dasar dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selain tinginya minat PNS untuk meningkatkan kompetensinya melalui jalur pendidikan formal, pengadaan CPNS mempersyaratkan pendidikan sarjana dan diploma.



Pegawai fungsional diluar guru dan tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah pegawai selain guru dan tenaga kesehatan rasionya untuk tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan adanya penyetaraan jabatan struktural kedalam jabatan fungsional. Selain itu namun masih terdapat 394 CPNS yang belum diangkat menjadi PNS sehingga belum dapat dilakukan pengangkatan kedalam jabatan fungsional hal ini karena CPNS tersebut masih dalam masa prajabatan.

Jabatan fungsional non guru dan tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi jumlahnya relative tinggi mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Untuk menduduki jabatan fungsional terdapat persyaratan-persyaratan antara lain lulus uji kompetensi jabatan fungsional, mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jabatan fungsional serta memiliki pendidikan yang linear sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Namun realisasi tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan sehubungan dengan pengangkatan jabatan fungsional dengan penyetaraan tidak mensyaratkan uji kompetensi.

## 2) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dengan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia diharapkan persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam dalam setahun, dan PNS yang mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan akan meningkat secara signifikan. Adanya kewajiban PNS untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam dalam setahun diharapkan akan memberikan motivasi kepada PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara klasikal maupun nonklasikal. persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 20 jam dalam setahun dan pegawai yang telah mengikuti seminar/workshop minimal dalam 2 tahun terakhir selama kurun waktu 5 tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2. 206 Data Pengembangan Sumber Daya Manusia**

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase PNS yang mengikuti diklat 20 jam dalam setahun	-	19.75	58.80	47.49	69.87
2	Persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	-	16.50	29.10	33.40	42.20

Sumber: BKD Kabupaten Tegal, 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa persentase PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan secara umum mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami penambahan secara signifikan. Dimensi kompetensi berupa pelatihan memiliki bobot yang cukup besar dalam indeks profesionalitas ASN. Oleh karena itu pemerintah daerah memiliki strategi peningkatan kompetensi salah satunya adalah bahwa seluruh pejabat struktural pada perangkat daerah diharapkan dapat memberikan pelatihan melalui metode *coaching* dan *mentoring* kepada pegawainya. Selain itu pelatihan melalui bimbingan teknis, workshop dan sejenisnya melalui *daring* saat ini merupakan model pelatihan yang tidak membutuhkan anggaran yang besar.

#### **D. Penelitian dan Pengembangan**

Untuk merespon dinamika pembangunan daerah saat ini yang begitu cepat, integrasi antara Perencanaan dan Penganggaran tidak lagi cukup. Perlu adanya muatan dan intervensi riset-inovasi dalam segala aktivitas pembangunan dari tingkat nasional hingga daerah. Karena itu juga di tingkat nasional beberapa waktu lalu telah dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mempunyai tugas membantu presiden dalam menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi melakukan monitori, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan riset dan inovasi di daerah.

Melihat begitu strategisnya fungsi riset dan inovasi, maka dari tingkat pusat hingga daerah, akselerasi riset dan inovasi perlu terus didorong pelaksanaannya. Oleh karena itu di Kabupaten Tegal, Badan Litbang diharapkan dapat mendongkrak roda riset melalui integrasi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi. Dengan begitu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan daerah dapat lebih cepat dilakukan.

Untuk mengintegrasikan riset-inovasi dalam pembangunan daerah, maka Bappedalitbang Kabupaten Tegal mengukur kinerjanya melalui indikator kinerja yaitu persentase dukungan produk kelitbangan dalam perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Hasil kelitbangan ini meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, hingga invensi dan inovasi. Untuk memperkuat akselerasi inovasi, maka ditentukan juga alat ukur kinerja menggunakan indikator skor inovasi.

Persentase dukungan produk kelitbangan dalam perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mulai diukur pada tahun 2020. Dalam dua tahun terakhir (2020 dan 2021) tren dukungan produk kelitbangan menunjukkan tren yang sangat positif. Di tahun 2020 Persentase dukungan produk kelitbangan dalam perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah baru mencapai 65% dan meningkat di tahun 2021 menjadi 80%. Peningkatan tersebut tidak luput dari semakin efektifnya produk kelitbangan yang ada khususnya dari hasil penelitian yang rekomendasinya dapat digunakan sebagai masukan dalam menyusun dan/atau mengevaluasi kebijakan pembangunan yang ada. Begitu juga dengan produk kelitbangan berupa inovasi khususnya inovasi pelayanan publik yang secara langsung dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan ukuran kinerja inovasi daerah, skor inovasi daerah Kabupaten Tegal dalam 3 (tiga) tahun terakhir juga mengalami peningkatan kualitas yang signifikan. Meskipun tahun 2021 pengukuran inovasi menggunakan metode yang berbeda dibandingkan dengan tahun 2019-2020, namun dapat dilihat dari peringkat inovasi daerah secara nasional dalam tiga tahun terakhir juga mengalami peningkatan.

Pada tahun 2019 skor inovasi Kabupaten Tegal hanya sebesar 140 poin dan berada di urutan 198 Kabupaten se Indonesia. Kemudian di tahun 2020 skor inovasi meningkat menjadi 4.027 poin dan menempati urutan 27 Kabupaten se Indonesia. Dengan segala akselerasinya kemudian di tahun 2021 melalui 141 inovasi dimana, 37 inovasi (26%) di antara berkaitan dengan urusan Wajib Pelayanan Dasar; 51 inovasi (36%) berkaitan dengan urusan Wajib Non Pelayanan Dasar; 20 inovasi (14%) berkaitan dengan urusan Pilihan, dan 33 inovasi (24%) berkaitan dengan fungsi penunjang urusan, skor inovasi

Kabupaten Tegal dengan metode yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya menjadi sebesar 62,06 poin dan menempati peringkat 10 dari seluruh Kabupaten se Indonesia. Bahkan melalui skema penilaian Innovative Government Award Kabupaten Tegal menempati peringkat 5 Kabupaten Terinovatif.

**Tabel 2. 207 Data Penelitian dan Pengembangan**

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Dukungan Produk Kelitbang dalam Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	NA	NA	NA	65	80
2.	Skor Inovasi	NA	NA	140 (Metode Lama)	4.027 (Metode Lama)	62,06 (Metode Baru)

*Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022*

Beberapa capaian kinerja kelitbang dirasa masih bisa dioptimalkan lagi. Tantangan pembangunan ke depan akan semakin besar. Untuk itu perlu kolaboratif antar pelaku pembangunan dalam mengakselerasi riset dan inovasi. Lembaga Litbang perlu melakukan penguatan kelembagaan sehingga mampu berperan sebagai penyedia infrastruktur riset di berbagai bidang, terutama untuk meningkatkan nilai tambah kekayaan sumber daya alam lokal demi peningkatan ekonomi daerah. Selain itu Lembaga litbang harus mampu memainkan perannya menjadi jembatan antara dunia riset dan dunia industri. Melalui aktivitas riset yang terintegrasi serta melahirkan banyak invensi dan inovasi yang berdaya saing global, maka hilirisasi industri dapat menjadi enabler ekonomi dan sekaligus penarik investor di Kabupaten Tegal. Sehingga pada akhirnya akan mendukung perekonomian Kabupaten Tegal dalam jangka Panjang dan penguatan daya saing daerah.

## **E. Pengawasan**

### **1) Pengawasan oleh Inspektorat**

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu,

monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

**a. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator program Persentase penyelesaian TLHP BPK, Itprov, dan Itkab. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju tata kelola yang baik, pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima termasuk di dalamnya penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan secara reguler. Kegiatan-kegiatan dalam program ini menghasilkan analisis dan rekomendasi terhadap perbaikan kinerja pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun Aparatus Sipil Negara (ASN). Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan/pengawasan dapat menunjukkan bahwa perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dilakukan. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menunjukkan sejauhmana rekomendasi terhadap perbaikan akuntabilitas kinerja dan keuangan telah dilakukan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh pihak yang terkait, baik Inspektorat selaku APIP maupun perangkat daerah selaku pelaksana rekomendasi atas temuan LHP. Sebagai ilustrasi tersaji data tingkat penyelesaian tindak lanjut LHP baik dari pemeriksa eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun pengawas internal (APIP) mulai tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 seperti tabel dibawah.

**Tabel 2. 208 Unit Kerja Ditetapkan Menuju WBK/WBBM**

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun(%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	83,97	90,08	90,38	91,67	91,98
2	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi	68,46	68,35	100	100	100
3	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten	71,17	63,99	35,65	59,26	60

*Sumber : Inspektorat Kabupaten Tegal, 2022*

Data tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 6 tahun, penyelesaian tindak lanjut atas LHP BPK mengalami peningkatan, namun penyelesaian atas tindak lanjut temuan APIP yaitu justru mengalami penurunan. Hal ini disebabkan perangkat daerah belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi dan temuan pada LHP Inspektorat Provinsi dan Kabupaten tahun 2018 tidak segera ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk penyelesaian temuan hasil Pemeriksaan Khusus menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.

## **b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator program, yaitu : (1) Persentase Perangkat Daerah berpredikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian Indikator, (2) Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah, dan (3) Persentase PD menyajikan laporan keuangan secara akuntabel. Masing masing indikator tersebut menjadi tolok ukur kinerja Inspektur Pembantu yang akan datang sesuai draf hasil perubahan kelembagaan Inspektorat, dengan nomenklatur masing masing Inspektur Pembantu secara jelas berdasarkan bidang tugas, dan tidak lagi berdasarkan wilayah /auditi. Nomenklatur Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, dan Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus.

Indikator Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Persentase Perangkat Daerah berpredikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian Indikator dilakukan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi untuk mengakselerasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Program ini bertujuan untuk menghasilkan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh instansi terkait yang terkait. Sebagai ilustrasi tersaji data unit kerja yang telah ditetapkan menuju WBK/WBBM sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut.

**Tabel 2. 209 Unit Kerja Ditetapkan Menuju WBK/WBBM**

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah unit kerja	2	6	6	8	4
2	Persentase	4,16	12,48	12,48	16,67	8,33

*Sumber : Inspektorat Kabupaten Tegal, 2022*

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 6 tahun terakhir, pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal masih perlu ditingkatkan.

Indikator Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan melaksanakan asistensi dan pendampingan dalam rangka pengawalan pencapaian tujuan organisasi, baik pada level perangkat daerah maupun pemerintah daerah. Program ini merupakan implementasi dari pengawasan intern berbasis

risiko yang mengamankan hasil pengawasan intern harus dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang menunjukkan perbaikan budaya kinerja menuju penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil. Selama ini capaian IKU masing-masing perangkat daerah secara umum belum menunjukkan capaian yang diharapkan, yang tercermin dari akumulasi hasil penilai kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB dengan skor 63,28 atau dengan kategori Baik (B batas bawah).

## F. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi 1) pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara padainstansi Daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya yang dibagi dalam 3 (tiga) rumpun koordinasi. Gambaran umum mengenai capaian di Sekretariat daerah sebagai berikut:

### 1) Capaian Kinerja Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat secara tupoksional adalah membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, hukum dan perundang-undangan serta Kesejahteraan Rakyat. Disamping itu fungsi pengkoordinasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, kerjasama daerah, kesatuan bangsa dan politik, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pertanahan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pembinaan mental, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki beberapa indikator sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 210 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesra nilai SAKIP B (Baik)	N/A	N/A	N/A	N/A	15.62

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
2	Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra yang sesuai standard (IKM Baik)	N/A	N/A	N/A	75	84.37
3	Persentase Indek RB Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra nilai B (Cukup Baik)	N/A	N/A	N/A	63.69	64.21
4	Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	100	100	100	100	100
5	Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi	100	300	100	100	99

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2022

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tergambar dari indikator Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesra nilai SAKIP B (baik) dimana capaian tahun 2021 tercapai 15.62%. Untuk kinerja pelayanannya diukur dari indikator Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra yang sesuai standard (IKM Baik), pada tahun 2021 tercapai 84.37% meningkat dibandingkan tahun 2020 yang tercapai 75%. Disamping itu kinerja dan tatanan birokrasi diukur dari Persentase Indek RB Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra nilai B (Cukup Baik) dimana capaian tahun 2021 tercapai 64.21% meningkat/menurun dibandingkan tahun 2020 yang tercapai 63.69%.

Selain ketiga indikator tersebut terdapat unit kerja yang melayani seluruh perangkat daerah dibidang hukum dan perundang-undangan dengan kinerja Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan dan Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi, yang capaiannya pada tahun 2021 masing-masing sebesar 100% dan 99%.

## 2) Capaian Kinerja Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan

Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan secara tupoksional membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan umum dan teknis urusan perekonomian, pembangunan, dan pengadaan barang/jasa;. Disamping itu juga menjalankan fungsi pengkoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah yang melaksanakan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM dan pasar, badan usaha milik daerah dan perbankan, penanaman modal dan PTSP, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, lingkungan hidup, transmigrasi, sumber daya kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Rumpun Perekonomian dan Pembangunan memiliki beberapa indikator sebagaimana terdapat pada table berikut :

**Tabel 2. 211 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Rumpun Koordinasi  
Perekonomian dan Pembangunan**

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan SAKIP dengan nilai B (Baik)	N/A	N/A	N/A	N/A	70
2	Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan yang sesuai standar (IKM Baik)	N/A	N/A	N/A	72.72	63.63
3	Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Perekonomian dan Pembangunan nilai B (Cukup Baik)	N/A	N/A	N/A	63.69	64.21
4	Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tercapai BAIK	100	100	100	100	100
5	Level Tingkat Maruritas UKPBJ terpenuhi	1	1	1	1	1
6	Persentase Tingkat Standardisasi LPSE terpenuhi	11	11	11	12	12

*Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2022*

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan tergambar dari indikator Persentase Kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan SAKIP dengan nilai B (Baik), dimana capaian tahun 2021 tercapai 70% . Untuk kinerja pelayanannya diukur dari indikator Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan yang sesuai standard (IKM Baik), pada tahun 2021 tercapai 63.63% menurun dibandingkan tahun 2020 yang tercapai 72.72%. Disamping itu kinerja dan tatanan birokrasi diukur dari Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Perekonomian dan Pembangunan nilai B (Cukup Baik) dimana capaian tahun 2021 tercapai 64.21% meningkat dibandingkan tahun 2020 yang tercapai 63.69%.

Selain ketiga indikator tersebut terdapat unit kerja yang menangani pengadaan barang/jasa dengan indikator kinerja Persentase Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tercapai BAIK dan Persentase Tingkat Standardisasi LPSE terpenuhi, yang capaiannya pada tahun 2021 masing-masing sebesar 100% dan tingkat standarisasi 12. Dan terkait dengan Level Tingkat Maruritas UKPBJ terpenuhi pada level 1.

### **3) Capaian Kinerja Rumpun Koordinasi Administrasi Umum**

Rumpun KoordinasiAsiten Administrasi umum secara tupoksional membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan umum dan teknis urusan kelembagaan,



ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, keuangan, komunikasi pimpinan, pembinaan pelaksanaan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, dan komunikasi pimpinan, pembinaan pelaksanaan urusan keuangan dan umum di lingkungan sekretariat daerah. Disamping itu juga menjalankan fungsi pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang sumber daya aparatur, keuangan, pendapatan, perlengkapan dan aset, kearsipan, dan perpustakaan, persandian, komunikasi dan informatika. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Rumpun Administrasi Umum memiliki beberapa indikator sebagaimana terdapat pada table berikut :

**Tabel 2. 212 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah  
Rumpun Koordinasi Administrasi Umum**

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	100	100	100	100	100
2	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kantor dan rumah jabatan sesuai standar dan administrasi pelayanan kepegawaian tepat waktu	100	100	100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Komponen	N/A	N/A	78.36	80.83	82.20
4	Predikat Nilai SAKIP Komponen	N/A	N/A	60.10	61.36	63.28
5	Nilai Reformasi Birokrasi Komponen	N/A	N/A	45.25	63.69	64.21
6	Persentase Kebijakan strategis dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat	100	100	100	100	100
7	Persentase kegiatan seremonial pimpinan daerah yang terfasilitasi layanan keprotokolan sesuai SOP	100	100	100	100	100
8	Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum nilai SAKIP B (Baik)	N/A	N/A	N/A	N/A	83.33
9	Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum yang sesuai standard (IKM Baik)	N/A	N/A	N/A	83.33	85.71
10	Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum dengan nilai CC (Cukup Baik)	N/A	N/A	N/A	63.69	64.21

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Tegal 2022

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum tergambar dari indikator Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum nilai SAKIP B (Baik) dimana capaian tahun 2021

tercapai 83.33 %. Untuk kinerja pelayanannya diukur dari indikator Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum yang sesuai standard (IKM Baik), pada tahun 2021 tercapai 85.71% meningkat dibandingkan tahun 2020 yang tercapai 83.33%. Disamping itu kinerja dan tatanan birokrasi diukur dari Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum dengan nilai CC (Cukup Baik) dimana capaian tahun 2021 tercapai 64.21% meningkat dibandingkan tahun 2020 yang tercapai 63.69%.

Pada rumpun asisten administrasi terdapat unit kerja yang mengkoordinasi kan data kinerja kabupaten dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Komponen, Predikat Nilai SAKIP Komponen, Nilai Reformasi Birokrasi Komponen dimana capaiannya pada tahun 2021 masing-masing sebesar 82.20%, 63.28% dan 64.21%.

Selain itu terdapat unit kerja yang menjalankan fungsi pelayanan internal dan pimpinan dengan indikator sebagai berikut Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah yang pada tahun 2021 tercapai 100%, Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kantor dan rumah jabatan sesuai standar dan administrasi pelayanan kepegawaian tepat waktu yang pada tahun 2021 tercapai 100%, Persentase Kebijakan strategis dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat yang pada tahun 2021 tercapai 100%, Persentase kegiatan seremonial pimpinan daerah yang terfasilitasi layanan keprotokolkan sesuai SOP yang pada tahun 2021 tercapai 100%. Capaian indikator tersebut menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2021 dan sebagai pijakan sebagai penyusunan target pada tahun 2023.

## G. Sekretariat DPRD

### 1) Peningkatan Fungsi Legislasi

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi dimana DPRD memiliki kekuasaan untuk menyusun peraturan daerah. Untuk mengukur kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya menggunakan indikator penganggaran raperda, jumlah prolegda dan jumlah perda yang ditetapkan dalam 1 tahun. Data selama kurun waktu 5 tahun dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2. 213 Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Anggaran**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke dalam penyusunan Prolegda dan APBD	51,11	52,31	100	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, 2022

Rencana Kerja Tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD telah ada disebabkan oleh belum adanya Rencana Kerja (Renja) pada setiap alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tegal, sehingga kinerja DPRD Kabupaten Tegal belum sepenuhnya terarah dan akuntabel.

**Tabel 2. 214 Data Raperda yang Dianggarkan, Prolegda, dan Perda yang di tetapkan dari Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pembahasan Perda yang dianggarkan	7	7	8	5	4
2.	Jumlah Prolegda	22	13	15	12	5
3.	Jumlah Perda ditetapkan	13	7	8	17	10

*Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, 2022*

## 2) Peningkatan Fungsi Pengawasan

Sesuai fungsinya DPRD sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat maka melalui program ini diharapkan adanya optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menggambarkan jalannya fungsi pengawasan DPRD maka menggunakan indikator persentase hasil pengawasan diintegrasikan dalam pembangunan yang dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2. 215 Program Peningkatan Fungsi Pengawasan Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase hasil pengawasan diintegrasikan dalam pembangunan	53,21	54,22	100	90	90

*Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, 2022*

Persentase integrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD masih belum sepenuhnya sinkron disebabkan oleh belum adanya Rencana Kerja DPRD pada setiap alat kelengkapan DPRD sehingga ada beberapa program DPRD yang tidak dapat dilaksanakan.

## H. Kecamatan

Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dari kedudukan tersebut terdapat beberapa kondisi yang menggambarkan kinerja kecamatan dari mulai tingkat kepuasan layanan publik, sampai dengan fungsinya sebagai koordinator, asistensi dan

fasilitasi desa, sejak tahun 2021 yang semula menggunakan model Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dirilis oleh Kementerian PPN/Bappenas dan dalam perkembangannya menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Dari beberapa kondisi kinerja di wilayah kecamatan pada tahun 2021 dapat dicermati dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2. 216 Kondisi Kinerja Kecamatan Tahun 2021**

<b>Kondisi Kinerja Kecamatan Tahun 2021</b>						
<b>KECAMATAN</b>	<b>IKM</b>	<b>Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</b>	<b>Persentase desa yang tertib administrasi</b>	<b>Persentase desa mandiri</b>	<b>Persentase desa maju</b>	<b>Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan PUM</b>
Adiwerna	79,87	100	89	0,00	14,29	100
Balapulang	80,24	100	55	0,00	10,00	100
Bojong	91	100	53	0,00	29,41	100
Bumijawa	84,76	100	35	5,56	0,00	100
Dukuhwaru	81,57	100	100	0,00	0,00	100
Dukuhturi	78,94	100	65	0,00	5,56	100
Jatinegara	80,9	100	45	0,00	5,88	100
Kedungbanteng	83	80	50	0,00	0,00	100
Kramat	81,11	100	50	0,00	15,79	100
Lebaksiu	79,16	100	35	6,67	33,33	100
Margasari	94,1	100	68,5	7,69	46,15	100
Pagerbarang	81	100	50	0,00	7,69	100
Pangkah	84	100	35	0,00	8,69	100
Slawi	81,00	100	35	0,00	80,00	100
Suradadi	79,76	100	35	0,00	9,09	100
Talang	92,99	100	52,63	0,00	5,26	100
Tarub	77,51	100	35	0,00	15,00	100
Warureja	77,4	100	35	0,00	8,33	100
<b>Rata-rata</b>	<b>82,68</b>	<b>98,89</b>	<b>51,29</b>	<b>1,11</b>	<b>16,37</b>	<b>93,33</b>

Sumber: 18 Kecamatan Kabupaten Tegal 2022 dan <https://idm.kemendesa.go.id/>

Kondisi kinerja kecamatan di wilayah Kabupaten Tegal ditunjukkan melalui indikator pelayanan publiknya, melalui capaian nilai IKM tahun 2021 rata-ratanya mengalami peningkatan yaitu diangka 82,68 dan memiliki predikat baik secara keseluruhan. Hal tersebut juga ditandai dengan kondisi kinerja persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dan persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan umum sebagian besar tercapai optimal. Untuk mempertahankan dan

meningkatkan nilai IKM, memerlukan upaya perbaikan secara terus menerus mengingat level kepuasan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat.

Terkait kondisi kinerja dari cerminan fungsi koordinator, asistensi dan fasilitasi desa juga telah mengalami peningkatan, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalkan diantaranya kondisi kinerja desa yang tertib administrasi serta persentase desa mandiri dan desa maju yang masih rendah, untuk desa tertib administrasi rata-rata diangka 51,29% meningkat dari kondisi tahun sebelumnya pada angka 37,22%. Begitupun capaian untuk desa mandiri, meskipun rata-rata mengalami peningkatan pada angka 1,11% dari 0,80% pada tahun sebelumnya, namun jumlah desa mandiri masih sama sejumlah 3 Desa, dan untuk desa maju mengalami peningkatan dari rata-rata pada angka 12% menjadi 16,37%.

## I. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan indikator jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhankam) tercapai 100% (sangat tinggi) dari Tahun 2015-2019. Laporan tersebut tersusun rutin setiap bulannya dan memuat kejadian-kejadian yang dianggap penting seputar Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

**Tabel 2. 217 Kondisi Keamanan dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Kondisi Trantibum				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah LSM Aktif	75	79	79	80	80
2.	Persentase Laporan Ipoleksosbudhankam lengkap	100	100	100	100	100
3.	Persentase Dialog Umat Beragama Dialogis	100	100	100	100	100
4.	Media Komunikasi Umat Beragama Aktif	1	1	1	2	2
5.	Persentase Siskamling terintegrasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	100	100	100	100	100

*Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal, 2022*

Dengan naiknya jumlah LSM yang mendaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal setiap tahun menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah meningkatkan. Kinerja merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu.

Pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indikator utamanya. Indikator pertama yaitu jumlah dialog umat beragama tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu 1 kali dialog yang terdiri dari dialog rutin intern anggota Forum Kerukunan Umat Beragama

Kabupaten Tegal dan dialog antara pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal dengan Masyarakat Kabupaten Tegal. Dialog Kerukunan Umat Beragama membahas berbagai permasalahan seputar potensi-potensi konflik dan kejadian konflik antar umat beragama di kalangan masyarakat Kabupaten Tegal guna menemukan solusi untuk mencegah dan menanggulangi konflik yang akan dan telah terjadi. Indikator kedua yaitu Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama yang untuk saat ini hanya 1 jenis yaitu berupa brosur/pamphlet yang berisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indikator utamanya. Pertama jumlah dialog wawasan kebangsaan tercapai 100% yakni terselenggaranya Talkshow, Seminar dan Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Masyarakat sebanyak 1 kali. Kecamatan dipilih sebagai sasaran pelaksanaan diskusi tersebut dengan argument bahwa telah ditangkapnya salah satu warga setempat sebagai pelaku aksi teror dan tahun 2017 telah dipulangkan eks warga Gafatar yang sebagian berasal dari Desa Pekiringan Kecamatan Talang. Indikator kedua yaitu jumlah kerjasama kerukunan umat beragama tercapai 100% yaitu dengan telah dibentuknya sebuah Organisasi Non Pemerintah yang menangani kerjasama antar umat beragama yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal. Pada Tahun 2021 dilaksanakan aktivitas FKUB GO TO SCHOOL yang melibatkan sekolah setingkat SMA dgn jumlah peserta sebanyak 400 peserta.

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan indikator yaitu cakupan siskamling dengan jumlah desa telah tercapai 100%. Cakupan siskamling yang dimaksud yaitu siskamling yang telah terintegrasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sesuai Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. Di Kabupaten Tegal Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat telah terbentuk hingga ke tingkat Desa.

Pendidikan politik masyarakat dengan indikator pertama yaitu Ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas tercapai 100% yaitu terdapat sampai saat ini di tahun 2018 terdapat 92 buah organisasi masyarakat yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tegal yang telah mendaftar dan telah lolos verifikasi sehingga terdaftar dalam system database ormas Kabupaten Tegal.

**Tabel 2. 218 Persentase Masyarakat Paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Kondisi Trantibum				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Presentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	NA	NA	NA	80,42%	84,66%
2.	Persentase parpol	NA	NA	100,00%	100%	

No.	Uraian	Kondisi Trantibum				
		2017	2018	2019	2020	2021
	yang melaksanakan pendidikan politik					100%
3.	Persentase lembaga penddiikan sma/smk dan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik	NA	NA	0%	0%	17,7%
4.	Persentase Ormas yang Terbina	NA	NA	NA	80%	90%
5.	Persentase Konflik yang tertangani	NA	100,00%	100,00%	97%	100%
6.	Persentase Gangguan KANTIBMAS yang tertangani	100,00%	100,00%	100,00%	85%	100%

*Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal, 2022*

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan indikator persentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, pada tahun 2020 sebesar 80,42% meningkat di tahun 2021 sebesar 84,66%. Melalui survey kepada masyarakat dengan mengambil sample golongan masyarakat yang telah dilakukan pembinaan dan sosialisasi tentang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, dapat menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat Kabupaten Tegal akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan indicator yang pertama yaitu Persentase partai politik yang melaksanakan pendidikan politik. Partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan (yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Tegal pada periode pemilu legeslatif 2019-2024) berjumlah 11 partai, dimana 60 % bantuan keuangan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan dipergunakan untuk kegiatan pendidikan politik terhadap anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan politik bertujuan untuk :

4. Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
5. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara
6. Meningkatkan kemandirian, kematangan, dan membangun jiwa nasional untuk menjaga persatuan nasional.

Indikator yang kedua yaitu persentase lembaga pendidikan SMA/ SMK dan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik. Jumlah lembaga pendidikan SMA/SMK dan PT di Kabupaten Tegal pada akhir tahun 2021 adalah 97. Pendidikan politik memiliki pengaruh dalam meningkatkan partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indicator Persentase Ormas yang Terbina. Data perkembangan organisasi masyarakat

yang sudah terdaftar dalam data base ormas di Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 162 Ormas.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan indikator Persentase Konflik yang tertangani. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan indikator persentase konflik yang tertangani sebesar 100%. Selama tahun 2021, ada 4 kasus konflik yang terjadi, secara umum tidak terjadi konflik berbasis SARA, anarkisme, sparatisme yang berdampak signifikan terhadap kondusifitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Tegal.

Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial dengan indikator persentase gangguan KANTIBMAS yang tertangani sebesar 100%. Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat perlu ditingkatkan untuk menjaga kondusifitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Tegal. Pada Tahun 2021 sebanyak 13 kasus gangguan KANTIBMAS yang telah tertangani.

#### **2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

##### **A. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan**

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga dalam kegiatan Susenas data ini didekati melalui data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar kabupaten/kota khususnya dilihat dari segi ekonomi.

Tahun 2021, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Tegal yaitu sebesar Rp 971.230,- yang terdiri dari rata-rata pengeluaran untuk komoditas makanan sebesar Rp 526.627,- dan pengeluaran untuk komoditas non makanan sebesar Rp 444.603,-.

Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama, sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan semakin meningkat. Namun kebutuhan ini mempunyai titik jenuh, sehingga pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi pengeluaran akan dialihkan ke kebutuhan lain. Oleh karena itu pengeluaran makanan dan non makanan dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kesejahteraan penduduk. Besarnya konsumsi untuk makanan menandakan bahwa sebagian besar penduduk masih mementingkan kebutuhan pokok.



**Tabel 2. 219 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan 2021**

<b>Kelompok Komoditas/Commodity Group</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
(1)	(2)	(3)
<b>Makanan/Food</b>		
Padi-padian/Cereals	51 160	55 863
Umbi-umbian/Tubers	3 409	4 092
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	19 902	19 839
Daging/Meat	19 622	18 233
Telur dan susu/Eggs and milk	25 932	26 966
Sayur-sayuran/Vegetables	34 192	45 613
Kacang-kacangan/Legumes	15 968	17 308
Buah-buahan/Fruits	25 603	22 718
Minyak dan kelapa/Oil and coconut	10 982	13 479
Bahan minuman/Beverage stuffs	17 876	19 592
Bumbu-bumbuan/Spices	12 735	15 546
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	9 750	12 009
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	225 984	196 111
Rokok/Cigarettes	58 365	59 259
<b>Jumlah makanan/Total food</b>	<b>531 480</b>	<b>526 627</b>
<b>Bukan makanan/Non-food</b>		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities	218 356	220 650
Aneka komoditas dan jasa/Goods and services	127 773	116 990
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear	28 599	20 628
Komoditas tahan lama/Durable goods	50 779	40 550
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance	34 137	32 256
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies	23 684	13 529
<b>Jumlah bukan makanan/Total non-food</b>	<b>483 328</b>	<b>444 603</b>
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1 014 808</b>	<b>971 230</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2022

Konsumsi makanan penduduk Kabupaten Tegal mencapai Rp 526.627,- atau 52,78% dari total pengeluaran. Dari total pengeluaran makanan sebesar 10,61% digunakan untuk padi-padian. Pengeluaran makanan terbesar lainnya adalah konsumsi makanan/minuman jadi dan rokok masing-masing sebesar 37,24% dan 11,25% dari total pengeluaran konsumsi makanan, sedangkan pengeluaran konsumsi paling sedikit adalah umbi-umbian sebesar 0,78%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2. 220 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan 2021**

Kelompok Komoditas/Commodity Group	2020	2021
(1)	(2)	(3)
<b>Makanan/Food</b>		
Padi-padian/Cereals	9,63	10,61
Umbi-umbian/Tubers	0,64	0,78
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	3,74	3,77
Daging/Meat	3,69	3,46
Telur dan susu/Eggs and milk	4,88	5,12
Sayur-sayuran/Vegetables	6,43	8,66
Kacang-kacangan/Legumes	3,00	3,29
Buah-buahan/Fruits	4,82	4,31
Minyak dan kelapa/Oil and coconut	2,07	2,56
Bahan minuman/Beverage stuffs	3,36	3,72
Bumbu-bumbuan/Spices	2,40	2,95
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	1,83	2,28
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	42,52	37,24
Rokok/Cigarettes	10,98	11,25
<b>Jumlah makanan/Total food</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Bukan makanan/Non-food</b>		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities	45,18	49,63
Aneka komoditas dan jasa/Goods and services	26,44	26,31
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear	5,92	4,64
Komoditas tahan lama/Durable goods	10,51	9,12
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance	7,06	7,26
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies	4,90	3,04
<b>Jumlah bukan makanan/Total non-food</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2022

## B. Sumber Daya Manusia

Tingkat ketergantungan penduduk atau Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong maju atau sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang menunjukan jumlah kelompok usia non produktif (0-15 tahun dan di atas 65 tahun) yang ditanggung oleh kelompok usia produktif (diatas 15-65 tahun). Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2017-2020 sebagaimana Tabel di bawah.

**Tabel 2. 221 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tegal Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penduduk Produktif	949.810	953.218	956.072	1.113.809	1.113.731
2.	Penduduk Non Produktif	483.705	484.007	484.626	438.430	496.126
3.	Rasio Ketergantungan	50,92	50,77	50,69	39,36	44,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

Rasio ketergantungan Kabupaten Tegal dalam 5 tahun terakhir relatif berimbang, proporsi penduduk produktif dan nonproduktif relatif sama. Hal ini mengindikasikan bonus demografi belum terjadi dalam 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan angka kelahiran masih di atas rata-rata 2 kelahiran/per keluarga. Di samping itu jumlah penduduk lansia semakin bertambah yang menyumbang angka penduduk non produktif yang tinggi. Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan selama beberapa tahun terakhir dapat dicermati dalam tabel berikut.

**Tabel 2. 222 Rasio Penduduk usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2020-2021**

No	Tingkat Pendidikan	2020 Jumlah (Jiwa)	%	2021 Jumlah (Jiwa)	(%)
1	SD/lebih rendah	343.025	53,18	326.698	50,69
2	SMP/ sederajat	113.806	17,64	114.302	17,73
3	SMA	145.142	22,50	154.109	23,91
4	Perguruan Tinggi (PT)	43.005	6,67	49.390	7,77
	<b>J U M L A H</b>	<b>644.978</b>	<b>100</b>	<b>644.497</b>	<b>100</b>

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2022 (diolah)

\* Angka sangat sementara, berdasar metode BPS

Sementara itu penduduk yang tidak/belum sekolah semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa partisipasi sekolah penduduk meningkat setiap tahunnya. Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama beberapa tahun terakhir dapat dicermati dalam tabel berikut.

**Tabel 2. 223 Rasio Penduduk Usia 15 tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2021**

No	Lapangan Pekerjaan	2021 Jumlah (Jiwa)*	%
1	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	107.929	17,12
2	Pertambangan dan Penggalian	7.490	1,19
3	Industri Pengolahan	149.754	23,75
4	Listrik, Gas dan Air	1.524	0,24
5	Bangunan	47.779	7,58
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Tangga dan Hotel	184.184	29,21
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	29.785	4,72

No	Lapangan Pekerjaan	2021 Jumlah (Jiwa)*	%
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah	13.362	2,12
9	Jasa Kemasyarakatan	88.786	14,08
	<b>JUMLAH</b>	<b>630.593</b>	<b>100</b>

Sumber : Bappeda dan Litbang, 2022 (diolah)

\*Angka sangat sementara, berdasar metode BPS

Angka sektor pertanian menunjukkan penurunan pada tahun-tahun terakhir. Hal ini karena sektor pertanian semakin tidak menarik bagi keluarga petani, utamanya anak muda. Untuk itu diperlukan strategi agar kaum muda tertarik menjadi petani dan menggeluti usaha pertanian.

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD




### 2.2.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR



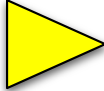
#### A. Pendidikan

#### 1. Pengelolaan Pendidikan dan Pengembangan Kurikulum

Capain kinerja pada Pengelolaan Pendidikan dan Pengembangan Kurikulum antara lain:

**Tabel 2. 224 Capaian Kinerja Pengelolaan Pendidikan dan Pengembangan Kurikulum**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah PenanggungJawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD	%	29,43	25,89	47,31	182,72		DIKBUD
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Angka Partisipasi PNFI	%	39,75	34,65	96,55	278,64		
		Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	%	0,11	0,13	0,03	176,92		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
		Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	%	0,1	0,12	0,41	- 141,67		
3	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Rasio Guru/Kelas	%	1:0,55	01:0,40	01:1,24	- 110,00		
		Rasio Guru/Mapel	%	1:1:27	01:01:30	01:1:39,70	67,00		

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal, 2022

Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pengembangan Kurikulum mempunyai. Indikator programnya adalah sebagai berikut:

a. APM PAUD

Target program APM PAUD adalah sebesar 25,89 sedangkan capaian programnya adalah 47,31 hal ini berarti tingkat capaian programnya adalah 182,72%. Hal ini berarti capaian sudah melebihi targetnya.

b. Angka Partisipasi PNFI

Angka Partisipasi PNFI terget programnya adalah 34,65. Capaian programnya adalah 96,55 sehingga tingkat capaian programnya adalah 278,64% karena capaian sudah melebihi targetnya.

c. Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI

Target program Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI adalah 0,13. Capaian programnya adalah 0,03. Tingkat capaian programnya adalah 176,92%. Hal ini berarti capaian program sudah melebihi targetnya.

d. Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs



Target program Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs adalah 0,12. Capaian programnya adalah 0,41. Tingkat capaian programnya adalah -141,67%. Hal ini berarti capaian program belum mencapai targetnya dimana angka putus sekolah SMP/SMPLB/MTs masih lebih tinggi dari angka yang ditargetkan yaitu 0,12. Tingginya Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs masih diindikasikan karena Pandemi Covid 19 masih berlangsung sehingga masih ada dampak di seluruh aspek kehidupan termasuk pendidikan.

## 2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Capain kinerja pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap

pendidik dan tenaga kependidikan yang ada diseluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan (Sekolah).

**Tabel 2. 225 Capaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru/Kelas	%	1:0,55	01:0,40	01:1,24	-110,00		DIKBUD
		Rasio Guru/Mapel	%	1:1:27	01:01:30	01:1:39,70	67,00		

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal, 2022

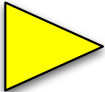
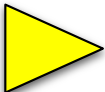
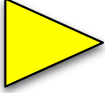
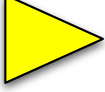

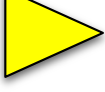

Ada dua indikator dalam Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu yang pertama adalah Rasio Guru/Kelas. Target programnya adalah 1:0,40 sedangkan capaian programnya adalah 1:0,81. Hal ini berarti tingkat capaian programnya menjadi -0,02. Artinya bahwa capaian dari indikator Rasio Guru/Kelas belum tercapai dimana terpaut jauh lebih besar dua kali lipat dari targetnya. Indikator Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kedua adalah Rasio Guru/Mapel. Target programnya adalah 1:1:30 sedangkan capaian programnya adalah 1:1:39,70. Hal ini berarti tingkat capaian programnya menjadi 0,67. Artinya capaian program dari indikator Rasio Guru/Mapel belum tercapai dari targetnya.

## B. Kesehatan

### 1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Capain kinerja pada Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat antara lain:

**Tabel 2. 226 Capaian Kinerja Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 – 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	97	87,6	90,31		DINKES
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	99	91,13	92,05		
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100,00	93,54	93,54		
		Pelayanan kesehatan balita	%	93	91	77,85	85,55		
		Cakupan remaja mendapat pelayanan konseling	%	55	47	91,7	194,07		
		Pelayanan kesehatan usia lanjut	%	80	77	50,95	66,17		
		Cakupan balita stunting	%	16	19,00	12,18	64,11		


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tegal, 2022

Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan terdapat tujuh indikator program antara lain Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir; pelayanan kesehatan balita; cakupan remaja mendapat pelayanan konseling; pelayanan kesehatan usia lanjut; dan cakupan balita stunting. Rata – rata tingkat capaian indikator program sebesar 80,50%.

## 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Capain kinerja pada Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan kualitas sumber daya manusia kesehatan terus ditingkatkan, diantaranya dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi dan perizinan yang sesuai dengan standar.

**Tabel 2. 227 Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	%	100	69,00	82,7	119,86		DINKES


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tegal, 2022

Dinas Kesehatan terus meningkatkan capaian program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ada satu indikator yang mendukung program tersebut yaitu Cakupan puskesmas yang mempunyai Sembilan tenaga kesehatan strategis. Maka tingkat capaian indikator kinerja program sebesar 119,56%.













## 3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Capain kinerja pada Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman antara lain:

**Tabel 2. 228 Capaian Kinerja Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	%	100	100	102	102,00		DINKES



NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di puskesmas	%	100	100	100	100,00		
		Persentase Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Sesuai Standar	%	100	100	100	100,00		
		Cakupan Pelayanan Penyimpanan dan Pendistribusian Obat di Gudang Farmasi sesuai standar	%	100	100	100	100,00		
		Cakupan Desa UCI	%	100	95	49	51,58		
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah	60	45	50,95	113,22		
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah	75	60	55	91,67		
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah	75	60	52,50	87,50		
		Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	%	99	97	69	71,13		
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TBC)	%	95	90	98	108,89		
		Angka penemuan kasus baru kusta	Per 100.000 pddk	11 per 100.000 pddk	11,75 per 100.000 pddk	8,07	68,68		
		Angka kesakitan DBD	Per 100.000 pddk	<39 per 100.000 pddk	<44 per 100.000 pddk	11,8	173,18		
		Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	10	4	8	200,00		







Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tegal, 2022




Dinas Kesehatan terus meningkatkan capaian program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, ada tiga belas indikator program antara lain Persentase Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah; Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di puskesmas; Persentase Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Sesuai Standar; Cakupan Desa UCI; Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif; Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat; Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV; Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TBC); Angka penemuan kasus baru kusta; Angka kesakitan DBD; dan Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Rata – rata tingkat capaian indikator kinerja program sebesar 105,34%.

#### 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Capain kinerja pada Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan antara lain:

**Tabel 2. 229 Capaian Kinerja pada Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								DINKES
		Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	85	82,0	93	113,41		
		Cakupan desa/kelurahan siaga aktif mandiri	%	15	12,0	26	216,67		
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100	100	62	62,00		
		Cakupan penduduk memiliki jaminan kesehatan	%	100	90,0	76,1	84,56		
		Cakupan Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar, Tradisional dan Rujukan	%	100	100	100	100,00		
		Persentase Puskesmas dan Labkesda yang terakreditasi	%	100	100	100	100,00		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cakupan pelayanan perijinan di bidang kesehatan	%	100	100	100	100,00		
		Persentase pencapaian standar mutu akreditasi puskesmas	%	54	42	42	100,00		
		Rata-rata jumlah Pengunjung WKJ Kalibakung setiap bulan	Angka	300	260,0	297	114,23		



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tegal, 2022









Indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang terdiri dari sembilan indikator kinerja program antara lain Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); Cakupan desa/kelurahan siaga aktif mandiri; Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; Cakupan penduduk memiliki jaminan kesehatan; Cakupan Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar, Tradisional dan Rujukan; Persentase Puskesmas dan Labkesda yang terakreditasi; Cakupan pelayanan perijinan di bidang kesehatan; Persentase pencapaian standar mutu akreditasi puskesmas; Rata-rata jumlah Pengunjung WKJ Kalibakung setiap bulan. Rata - rata tingkat capaian kinerja program sebesar 110,08%.

## 5. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja pada Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah antara lain:

**Tabel 2. 230 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RSUD dr. Soeselo**



NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Prosentase Pelayanan Medis sesuai dengan standar Perumah sakitan	%	84,00	78,00	79,00	101,28		<b>RSUD dr. SOESELO</b>
		Prosentase mutu dan etika sesuai standar	%	84,00	78,00	78,00	100,00		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Prosentase Pelayanan keperawatan sesuai dengan standar Perumahsakitan	%	84,00	78,00	83,00	106,41		
		Prosentase asuhan keperawatan sesuai dengan standar Perumahsakitan	%	84,00	78,00	90,00	115,38		
		Persentase Penunjang Medis sesuai dengan standar Pelayanan	%	85,00	81,00	83,36	102,91		
		Persentase penunjang non medis sesuai standar	%	98,00	92,00	96,67	105,08		
		Prosentase pemenuhan Urusan Umum dan Kehumasan, Kepegawaian dan Diklat	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
		Prosentase Dokumen Keuangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
		Prosentase Pengelolaan Rekam Medis dan Sistem Informasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
		Prosentase dokumen Perencanaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00		

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tegal, 2022

RSUD dr. Soeselo melaksanakan satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang didalamnya memuat sepuluh indikator program diantaranya Prosentase Pelayanan Medis sesuai dengan standar Perumah sakitan; Prosentase mutu dan etika sesuai standard; Prosentase Pelayanan keperawatan sesuai dengan standar Perumahsakitan; Prosentase asuhan keperawatan sesuai dengan standar Perumahsakitan; Persentase Penunjang Medis sesuai dengan standar Pelayanan; Persentase penunjang non medis sesuai standard; Prosentase pemenuhan Urusan Umum dan Kehumasan, Kepegawaian dan Diklat; Prosentase Dokumen Keuangan; Prosentase Pengelolaan Rekam Medis dan Sistem Informasi; dan Prosentase dokumen Perencanaan. Rata – rata tingkat . Capaian indikator kinerja program 101,82%.

**Tabel 2. 231 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RSUD Suradadi**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Persentase pelayanan medis dan keperawatan sesuai standar perumahsakitan	%	93,50	89,50	92,00	102,79		RSUD SURADADI
		Rata-rata Persentase penunjang medis dan non medis sesuai dengan standar pelayanan dan sarana prasarana rumah sakit	%	91,50	87,00	92,00	105,75		

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tegal, 2022*



Pelaksanaan RSUD Suradadi memiliki satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki dua indikator program yaitu rata – rata persentase pelayanan medis dan keperawatan sesuai standard dan rata – rata persentase penunjang medis dan non medis sesuai dengan standar pelayanan dan sarana prasarana rumah dengan rata – rata tingkat capaian sebesar 104,27%.

## C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

### 1. Penyelenggaraan Jalan

Secara kewilayahan Kabupaten mempunyai pusat – pusat kegiatan yang tersebar secara sporadis yang terkoneksi dengan sistem jaringan prasarana jalan dimana berdasar SK Bupati Tegal No. 600/17 tahun 2020 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal, panjang jalan Kabupaten adalah 1002,59 kilometer . Sedangkan untuk Jalan Nasional yang berada di Wilayah Kabupaten Tegal sepanjang 68,29 kilometer, Jalan Provinsi sepanjang 54,63 kilometer. Secara kewilayahan regional Bregasmalang di Bagian Utara terlntasi oleh Jalan Arteri Primer (Jalan Pantura), dan bagian tengah jalan arteri sekunder (ruas Tegal – Cilacap) yang merupakan jalan nasional sepanjang 68,29 kilometer. Di Bagian Tengah juga terlntasi oleh Jalan Kolektor Primer yang merupakan jalan provinsi (Ruas Randudongkal – Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru – Jatibarang) yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan di wilayah Randudongkal (Kabupaten Pemalang), Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru (Kabupaten Tegal), dan Jatibarang – Ketanggungan – Losari (Kabupaten Brebes).

**Tabel 2. 232 Capaian Kinerja Pembangunan Penyelenggaraan Jalan**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	90,02	75,02	83,05	110,70		DINAS PUPR
		Proporsi jembatan dalam kondisi baik	%	91,11	79,91	89,57	112,09		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal, 2022

Dengan indikator program proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dengan capaian 110,70% dan indikator program Proporsi jembatan dalam kondisi baik dengan capaian 112,09%.

## 2. Pengembangan Jasa Kontruksi

Capain kinerja pada Pengembangan Jasa Kontruksi antara lain:

**Tabel 2. 233 Capaian Kinerja pada Pengembangan Jasa Konstruksi**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	Rasio Tenaga Konstruksi Terlatih			60	91,25	152,08		DINAS PUPR


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal, 2022

Dengan indikator program rasio tenaga kontruksi terlatih dengan capaian 152,08%

## 3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Capain kinerja pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase antara lain:

**Tabel 2. 234 Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b>	Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 0,5-1)	%	60,00	45	61,60	136,89		<b>DINAS PUPR</b>


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal, 2022

Dengan indikator program Persentase jalan yang memiliki drainase atau saluran pembuangan air (minimal 0,5-1) dengan capaian indikator program 136,89%.

Sumber daya air berpedoman pada pola pengelolaan sumber daya air, meliputi: wilayah sungai, jaringan irigasi, pengembangan jaringan air baku untuk air bersih, pengembangan sistem pengendalian banjir. Pengembangan wilayah sungai yang merupakan WS strategis nasional adalah WS Pemali Comal terdiri atas Pengelolaan sumber daya air sungai, Pengembangan waduk; dan Pengembangan embung. Terkait dengan pengembangan waduk dan embung, Di Kabupaten Tegal terdapat Waduk Cacaban yang mempunyai kapasitas yang saat ini mempunyai kapasitas 49,02 juta m<sup>3</sup> dan dapat mengaliri lahan sawah seluas 17.481 Ha. Sedangkan jumlah embung atau waduk lapang di Kabupaten Tegal.

Berdasarkan SK Bupati Tegal No.050/492 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Tegal, bahwa jumlah Daerah Irigasi (DI) 208 DI, dengan luas 9.281 Ha. Secara lokasi sebagian besar Daerah Irigasi Kabupaten berada di daerah atas yaitu Kecamatan Bojong, Jatinegara, Margasari dan Bumijawa, dan bangunan Irigasinya letaknya jauh dari permukiman penduduk. Untuk mengetahui Presentase irigasi Kabupaten tegal dalam kondisi baik seperti pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 235 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	70,00	60,10	60,27	100,28		DINAS PUPR


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal, 2022

Dengan indikator program persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dengan capaian indikator program 100%.

#### 4. Penyelenggaraan Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang yang baik dan terpadu. Indikator Penataan Ruang pada fokus fasilitasi wilayah/infrastruktur antara lain dilihat dari ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang (RTR). Untuk melihat berapa nilai ketaatan (persentase) antara realisasi pemanfaatan ruang terhadap dokumen RTR.

**Tabel 2. 236 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	90,00	87,00	65,00	74,71		DINAS PUPR

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal, 2022

Pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan indikator kinerja program Persentase Ketaatan terhadap RTRW dengan tingkat capaian kinerja sebesar 74,71%.

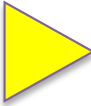


## D. PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

### 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Indikator – indikator Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum antara lain :

**Tabel 2. 237 Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan akses layanan air minum	%	95,00	89,00	87,29	98,08		DINAS PERKIM


Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Tegal, 2022

Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator kinerja program Cakupan akses layanan air minum dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,58%.

### 2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah

Berikut ini indikator – indikator dan capaian kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah antara lain :

**Tabel 2. 238 Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Limbah	cakupan akses layanan sanitasi (jamban)	%	100,00	93,00	93,64	100,69		DINAS PERKIM


Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Tegal, 2022

Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah dengan indikator kinerja program cakupan akses layanan sanitasi (jamban) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,69%.

### 3. Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh

Penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil, dan merata, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan dan kelestarian lingkungan hidup.

**Tabel 2. 239 Capaian Kinerja Program Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	%	0,00	45,00	48,39	107,53		DINAS PERKIM


Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Tegal, 2022

Pada Program KAWASAN Permukiman dengan indikator kinerja program Persentase Penurunan Luas KAWASAN Kumuh dengan tingkat capaian kinerja sebesar 107,53%.

### 4. Pengembangan Perumahan

Dalam penataan perumahan dan permukiman hal-hal yang menjadi perhatian antara lain infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, kawasan kumuh, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

**Tabel 2. 240 Capaian Kinerja Program Pengembangan Perumahan**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	27,00	18,00	17,24	95,78		DINAS PERKIM

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Tegal, 2022


Pada Program Pengembangan Perumahan Pada pertengahan tahun terjadi pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus disesuaikan antara kementerian dan pemerintah daerah, yang berakibat terjadi pemindahan ke

program kawasan permukiman kegiatan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ( Sepuluh ) Ha sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Sehingga pada program Pengembangan Perumahan tidak terdapat kegiatan sub kegiatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya capaian kinerja.

## 5. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Indikator – indikator Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) antara lain :

**Tabel 2. 241 Capaian Kinerja Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,SARANA, dan UTILITAS UMUM</b>	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU	%	55,34	53,34	56,66	106,22		<b>DINAS PERKIM</b>


Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Tegal, 2022

Pada Program Peningkatan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan indikator kinerja program Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU dengan tingkat capaian kinerja sebesar 106,22%.

## 6. Penataan Bangunan Gedung

Bangunan Gedung Negara yaitu bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi /akan menjadi milik negara seperti gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, dan sebagainya yang diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBD atau APBN dan/atau perolehan lainnya yang sah. Bangunan gedung negara harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Adapun rasio bangunan negara yang sesuai standar teknis di Kabupaten Tegal seperti pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 242 Capaian Kinerja Program Penataan Bangunan Gedung**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Program penataan bangunan gedung	Rasio Bangunan Gedung yang Sesuai Standar Teknis	%	76,48	70,34	70,34	100,00		DINAS PERKIM

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Tegal, 2022



Pada Program Penataan Bangunan Gedung dengan indikator kinerja Rasio Bangunan Gedung yang Sesuai Standar Teknis dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

## E. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

### 1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penegakan Perundang-undangan Daerah dilaksanakan agar jumlah pelanggaran Perda di Kabupaten Tegal akan semakin menurun. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati guna terpeliharanya ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor terkait.

**Tabel 2. 243 Capaian Kinerja Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian penegakan perda dan perkara	%	90,00	82,00	82,00	100,00		SATPOL PP
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	%	82,00	76,00	76,00	100,00		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
		Rasio Linmas per RT	%	1,11	1,08	1,08	100,00		
		Persentase Linmas terlatih	%	17,00	10,00	0,00	0,00		


Sumber : Satpol PP Kab. Tegal, 2022

Pada indikator kinerja program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum memiliki empat indikator kinerja program yaitu Persentase penyelesaian penegakan perda dan perkada, Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Rasio Linmas per RT, Persentase Linmas terlatih dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 75%.

## 2. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Capain kinerja pada Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakran dan Penyelamatan Non Kebakaran antara lain:

**Tabel 2. 244 Capaian Kinerja Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kasus kebakaran tertangani	%	100,00	74,00	82,00	110,81		SATPOL PP


Sumber : Satpol PP Kab. Tegal, 2022

Pada indikator kinerja program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran memiliki satu indikator kinerja program yaitu Persentase kasus kebakaran tertangani dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 110,81%.

### 3. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik diukur dari banyaknya warga Kabupaten Tegal yang berpartisipasi dalam penggunaan hal suara pada pemilihan umum legislatif, presiden, Gubernur, Bupati dan Pilkadaes. Berikut tabel capaian program Kesbangpol.

**Tabel 2. 245 Capaian Kinerja Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Legislatif	%	65,00	0,00	0,00	100,00		BADAN KESBANGPOL

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tegal, 2022

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, dengan indikator kinerja program Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Legislatif capaiannya sebesar 100%.

### 4. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator – indikator Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan antara lain :

**Tabel 2. 246 Capaian Kinerja Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Presiden	%	65,00	0,00	0,00	100,00		BADAN KESBANGPOL


Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tegal, 2022

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan indikator kinerja program Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Presiden capaiannya sebesar 100%.

## 5. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Indikator – indikator Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya antara lain :

**Tabel 2. 247 Capaian Kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Gubernur	%	0,00	0,00	0,00	100,00		BADAN KESBANGPOL


Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tegal, 2022


Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dengan indikator kinerja program Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Gubernur capaiannya sebesar 100%.

## 6. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Indikator – indikator Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial antara lain :

**Tabel 2. 248 Capaian Kinerja Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Kualitas, dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Bupati	%	0,00	0,00	0,00	100,00		BADAN KESBANGPOL

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
	Penanganan Konflik Sosial								
		Persentase Rata-Rata Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pilkaes	%	80,00	0,00	0,00	100,00		

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tegal, 2022

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, dengan indikator kinerja program Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Bupati capaiannya sebesar 100%.

## 7. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Indikator – indikator Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan antara lain :

**Tabel 2. 249 Capaian Kinerja Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah/ Frekuensi Konflik SARA dalam Masyarakat	%	0,00	0,00	0,00	100,00		BADAN KESBANGPOL

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tegal, 2022







Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan indikator kinerja program Jumlah/Frekuensi Konflik SARA dalam masyarakat capaiannya 100%.



## 8. Penanggulangan Bencana

Masyarakat siap siaga bencana dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi kadang naik juga kadang turun misalnya untuk dua tahun pertama mengalami kenaikan, dan tahun berikutnya mengalami penurunan, begitu juga untuk tahun berikutnya mengalami kenaikan dan pada tahun terakhir mengalami kenaikan, untuk itu perlu usaha-usaha yang keras agar masyarakat yang siap siaga bencana mengalami kenaikan dari tahun ketahun.

**Tabel 2. 250 Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penanggulangan Bencana								BPBD
		Persentase masyarakat siap siaga bencana	%	15,05	12,55	12,55	100,00		
		Persentase dokumen pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	%	100,00	64,00	64,00	100,00		
		Persentase penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik	%	100,00	94,67	94,67	100,00		
		Persentase dokumen penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
		Persentase penanganan dan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	58,70	29,89	29,89	100,00		
		Persentase dokumen penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	100,00	75,00	75,00	100,00		

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2022

Pada indikator kinerja Program Penanggulangan Bencana memiliki enam indikator kinerja program yaitu Persentase masyarakat siap siaga bencana, Persentase dokumen pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, Persentase penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistic, Persentase dokumen penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana,

Persentase penanganan dan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dan Persentase dokumen penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 100%.

## F. SOSIAL

### 1. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah untuk meningkatkan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu anak, usia lanjut, disabilitas dan tuna sosial.

**Tabel 2. 251 Capaian Kinerja Program Rehabilitasi Sosial**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas dan Tuna Sosial	%	88,34	85,34	86,87	101,79		DINSOS


Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2022

Capaian kinerja indikator program rehabilitasi sosial yaitu mencapai 86,87% atau sebesar 101,79% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85,34%. Pada program rehabilitasi sosial ini terdiri dari Empat sub kegiatan diantaranya Penyediaan Permakanan; Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat; Penyediaan Alat Bantu; dan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA.

### 2. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial adalah untuk dapat meningkatkan potensi PSKS yang aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebagai Mitra dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di masyarakat.

**Tabel 2. 252 Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Sosial**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Cakupan Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana sosial	%	94,08	91,08	91,08	100,00		DINSOS



Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2022

Capaian kinerja program pemberdayaan sosial yaitu sebesar 91,08% atau mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Pada program ini terdapat satu sub kegiatan yaitu Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

### 3. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Capain kinerja pada Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, Pengelolaan Taman Makam Pahlawan antara lain:

**Tabel 2. 253 Capaian Kinerja Program Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	87,46	82,92	82,92	100,00		DINSOS
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Cakupan Penanganan Fakir Miskin	%	100	98,89	72,73	73,55		
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2022

Pada indikator program yang diampu oleh tiga program, capaian kinerja indikator program Persentase cakupan perlindungan dan jaminan social dengan capaian 100% dan Persentase cakupan penanganan fakir miskin capaiannya 73,55%

dengan rata – rata tingkat capaian indikator program yaitu 86,77%.




## 2.2.2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

### A. TENAGA KERJA

#### 1. Penempatan Tenaga Kerja

Capain kinerja pada Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja antara lain:

**Tabel 2. 254 Capaian Kinerja Program Pelatihan dan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	AKAN	Jumlah	708	672	172	25,60		DINAS PERINAKER
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	AKAD	Jumlah	306	261	2.857	1094,64		
		AKL	Jumlah	216	159	10.192	6410,06		


Sumber : Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Tegal, 2022

Pada indikator program yang diampu oleh dua program yaitu AKAN, AKAD, dan AKL dengan tingkat capaian indikator program untuk AKAN 25,60%, AKAD 1.094%, dan AKL 6.410,06% dengan total tingkat capaian 2.510,10%.

#### 2. Hubungan Industrial

Hubungan industrial merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan keadaan kesejahteraan ekonomi tenaga kerja melalui tercapainya hubungan industrial melalui kerjasama antara pengusaha dan pekerja. Berikut capaian program tersebut pada tabel berikut:

**Tabel 2. 255 Capaian Kinerja Program Hubungan Industrial**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Presentase Penyelesaian Hubungan Industrial	%	70	55	100	181,82		<b>DINAS PERINAKER</b>

Sumber : Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Tegal, 2022


Pada program hubungan industrial dengan indikator program Presentase penyelesaian hubungan industrial dengan tingkat capaian 181,82%.

## B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

### 1. Perlindungan Perempuan

Capain kinerja pada Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan antara lain:

**Tabel 2. 256 Capaian Kinerja Program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>	Capaian keadilan dan kesetaraan Gender/APE	%	77	73	70	95,89		<b>DINAS P3AP2KB</b>
2	<b>Program Perlindungan Perempuan</b>								


Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tegal, 2022

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Program Perlindungan Perempuan, dengan indikator program Capaian keadilan dan kesetaraan gender/ APE (Anugerah Parahita Ekapraya) dengan tingkat capaian indikator program sebesar 100%.

## 2. Perlindungan Khusus Anak

Capaian kinerja pada Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak antara lain:

**Tabel 2. 257 Capaian Kinerja Program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	<b>Program Pemenuhan Hak Anak</b>	Capaian Pemenuhan Hak Anak	%	75	60,00	61,00	101,67		DINAS P3AP2KB
4	<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>								

Sumber : Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tegal, 2022



Program Pemenuhan Hak Anak dan Program Perlindungan Khusus Anak, dengan indikator program Capaian Pemenuhan Hak Anak mencapai tingkat capaian indikator program sebesar 101,67%.

## C. PANGAN

### 1. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Gubernur dan Bupati/Walikota, dimana bahwa gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban melaporkan kepada pemerintah dan DPRD tentang pembangunan ketahanan pangan; dan sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

**Tabel 2. 258 Capaian Kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Persentase penguatan cadangan pangan	%	245,00	219	210	95,89		<b>DINAS TAN &amp; KP</b>
		Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	%	52,00	49	50	102,04		




*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Tegal, 2022*

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat melaksanakan empat sub kegiatan yaitu Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan, Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya local dengan tingkat capaian kinerja output sebesar 100%.

## **2. Pengawasan Keamanan Pangan**

Peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan yang dapat dipedomani pemerintah Kabupaten/Kota telah tersedia, diantaranya yaitu: UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; PP 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; dan sebagainya. Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal tahun 2013 - 2017 tercermin dengan capaian indikator ketersediaan energi per kapitan dari tahun 2013 – 2016 selalu meningkat, namun mengalami penurunan pada tahun 2017. Sedangkan ketersediaan protein per kapita dan Penguatan Cadangan Pangan dari tahun 2013 – 2017 perkembangannya masih fluktuatif.

**Tabel 2. 259 Capaian Kinerja Program Pengawasan Keamanan Pangan**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	85,00	76,00	75	98,68		<b>DINAS PERINAKER</b>
		Skore Pola Pangan Harapan (PPH)	Tahunan	83,00	81,50	91,6	112,39		
		Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	85,00	76,00	100	131,58		


Sumber : Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Tegal, 2022

Program Pengawasan Keamanan Pangan melaksanakan satu sub kegiatan yaitu Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja output sebesar 100%.

#### D. PERTANAHAN

Capain kinerja pada Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, Penatagunaan Tanah antara lain:

**Tabel 2. 260 Capaian Kinerja Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Pembangunan dan Penatagunaan Tanah**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>								
2	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	Persentase luas lahan bersertifikat	%	66,85	59,52	59,52	100,00		<b>DINAS PERKIM</b>

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Tegal, 2022









Pada Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dan Program penatagunaan tanah terdiri dari satu indikator kinerja program yaitu Persentase luas lahan bersertifikat dengan capaian kinerja program sebesar 100%.

## E. LINGKUNGAN HIDUP

Capain kinerja pada Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI); Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; Penanganan Pengaduan Lingkunga Hidup; Perencanaan Lingkungan Hidup antara lain:

**Tabel 2. 261 Capaian Kinerja Program Lingkungan Hidup**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)								DINAS LH
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pelanggaran Tata Lingkungan	%	0,00	50	50	100,00		
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	80,00	74	44,09	59,58		
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	81,00	78	85,13	109,14		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Indeks Ketutupan Lahan	%	59,21	59,21	43,89	74,13		
6	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Limbah B3 ditangani	%	90,46	70,75	70,75	100,00		
7	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pelanggaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	100,00	100	100	100,00		
8	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal, 2022

Indikator program yang diampu dalam delapan program yaitu Persentase Pelanggaran Tata Lingkungan, Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Ketutupan Lahan, Persentase Limbah B3 ditangani, dan Persentase Pelanggaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti dengan tingkat capaian indikator program sebesar 91,43%.

## 1. Pengelolaan Persampahan

Capain kinerja pada Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, Penatagunaan Tanah antara lain:

**Tabel 2. 262 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Persampahan**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah terangkut ke TPA	%	90,46	70,75	70,75	100,00		DINAS LH

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal, 2022



Program Pengelolaan Persampahan dengan indikator program Persentase Sampah terangkut ke TPA dengan tingkat capaian indikator program sebesar 100%.

## F. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

### 1. Pencatatan Sipil

Catatan Sipil adalah memberikan layanan kepada Penduduk untuk mendapatkan akta Catatan Sipil. Untuk mewujudkan layanan tersebut dilaksanakan oleh aparat dinas Dukcapil dibidang pelayanan pencatatan Sipil dan koordinasi dengan instansi yang terkait.

**Tabel 2. 263 Capaian Kinerja Program Pencatatan Sipil**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pencatatan Sipil	Presentase Penduduk Usia 0-18 tahun ber akta kelahiran	%	97	85	94,88	111,62		DINAS DUKCAPIL
		Presentase penduduk ber akta kematian	%	40	25	69,87	279,48		




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal, 2022

Dengan indikator program Prosentase Penduduk usia 0 - 18 tahun ber Akta Kelahiran dengan tingkat capaian 111,62%, dan Persentase penduduk ber akta kematian dengan tingkat capaian 279,48%,

### 2. Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran Penduduk adalah untuk memberikan layanan kepemilikan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik, Kartu Keluarga dan KIA mengalami peningkatan dari capaian yang sudah ada. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan SDM yang cukup juga kompeten.

**Tabel 2. 264 Capaian Kinerja Program Pendaftaran Penduduk**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk ber kartu keluarga	%	98	92	95,3	103,59		DINAS DUKCAPIL
		Persentase penduduk ber KTP-el	%	98	92	99,69	108,36		
		Persentase anak memiliki KIA	%	80	50	31	62,00		


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal, 2022



Dengan indikator program Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga dengan tingkat capaian 103,59%, Persentase Penduduk ber KTP-el dengan tingkat capaian 108,36%, Persentase anak memiliki KIA dengan tingkat capaian 62%, maka rata-rata tingkat ketercapaian indikator program yaitu 91,32%.

### 3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pengelolaan Informasi Adminduk adalah memberikan pelayanan SIAK, dan layanan database kependudukan sesuai perkembangan terjamin. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pemanfaat data yaitu OPD dan instansi lainnya (pemerintah dan swasta).

**Tabel 2. 265 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase OPD/Instansi yang Memanfaatkan data Kependudukan	%	80	20,00	10,00	50,00		DINAS DUKCAPIL

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil	%	80	0,00	0,00	100,00		
		Persentase Pelayanan SIAK di Dinas dan di rumah Paten 18 Kecamatan	%	95	0,00	0,00	100,00		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal, 2022

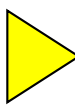
Dengan indikator program Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil dengan tingkat capaian 50%. Persentase OPD/ Instansi yang memanfaatkan data kependudukan dengan tingkat capaian 50%, dan Persentase Pelayanan SIAK di Dinas dan di rumah Paten 18 Kecamatan dengan tingkat capaian 100%, sehingga rata-rata-rata tingkat ketercapaian indikator program yaitu 66,67%.

## G. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

### 1. Penataan Desa

Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa ditandai jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya bertambah/meningkat. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan koordinasi semua stake holder yang terkait dengan Aparatur Pemerintahan Desa.

**Tabel 2. 266 Capaian Kinerja Program Penataan Desa**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penataan Desa	Persentase Lembaga Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya	%	82,00	64	56	87,50		DISPERMASDES

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tegal, 2022

Dengan indikator program persentase Lembaga Pemerintahan Desa yang bekerja berfungsi sesuai fungsinya mencapai tingkat capaian indikator program sebesar 87,50%.

## 2. Administrasi Pemerintah Desa

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi perubahan yang mendasar terhadap tata kelola Pemerintahan Desa seperti Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Aset Desa serta Administrasi Pemerintahan Desa lainnya.

**Tabel 2. 267 Capaian Kinerja Program Administrasi Pemerintahan Desa**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	%	100,00	50	62,73	125,46		DISPERMASDES






Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tegal, 2022

Dengan indikator program persentase Desa Tertib Administrasi Desa mencapai tingkat capaian indikator program sebesar 125,46%.

## 3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Sasaran yang hendak dicapai melalui pengembangan desa adalah perkembangan BUMDes dan pengembangan desa di Kabupaten Tegal. Untuk mencapai kondisi dilakukan melalui koordinasi keras Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tegal, bersama dengan Dinas/Instansi terkait serta Pemerintah Desa dan masyarakat pedesaan.

**Tabel 2. 268 Capaian Kinerja Program Lembaga Masyarakat, Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Perkembangan BUMDES Tumbuh dan Berkembang	%	80,00	30	80,07	266,90		DISPERMASDES
		Persentase Pengembangan Desa	%	100,00	100	100	100,00		
		Persentase Pengembangan Kawasan Perdesaaan	%	80,00	62,5	0	0,00		
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	%	100,00	50	100	200,00		
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang berdaya	%	100,00	50	100	200,00		

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tegal, 2022


Dengan lima indikator program yaitu Persentase Perkembangan BUMDES Tumbuh dan Berkembang dengan tingkat capaian kinerja 266,90%; Persentase Pengembangan Desa dengan tingkat capaian kinerja 100%; Persentase Pengembangan Kawasan Perdesaaan dengan tingkat capaian kinerja 0%, dikarenakan indikator kegiatan baru akan dilaksanakan di Tahun 2022; Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif dengan tingkat capaian kinerja 200%; dan Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang berdaya dengan tingkat capaian kinerja 200%. Maka rata – rata tingkat capaian kinerja sebesar 153,38%.

## H. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

### 1. Pengendalian Penduduk

Pengendalian Penduduk adalah untuk mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Indonesia umumnya dan Kabupaten Tegal pada khususnya agar dapat terkendali sesuai yang direncanakan yaitu terjadinya *Zero Growth*.

**Tabel 2. 269 Capaian Kinerja Program Pengendalian Penduduk**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RPKD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,22	1,30	1,25	103,85		DINAS P3AP2KB


Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tegal, 2022

Program Pengendalian Penduduk, ada 1 (Satu) indikator program yaitu indikator program Laju Pertumbuhan Penduduk dengan tingkat capaian indikator program sebesar 125,38%

### 2. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Indikator pada Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) antara lain:

**Tabel 2. 270 Capaian Kinerja Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RPKD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Ketahanan Keluarga	%	60	52	54,91	105,60		DINAS P3AP2KB

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tegal, 2022


Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan indikator program Persentase Ketahanan Keluarga dengan tingkat capaian indikator program sebesar 105,60%.



### 3. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Hasil Evaluasi program keluarga berencana dengan indikator kinerja Prosentase pemakaian kontrasepsi (CPR) Semester I tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 2. 271 Capaian Kinerja Program Pembinaan Keluarga Berencana**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana</b>	Persentase pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	71,41	70,21	67,77	96,52		<b>DINAS P3AP2KB</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tegal, 2022



Program Pembinaan Keluarga Berencana, dengan indikator program Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR) dengan tingkat capaian indikator program sebesar 98,30%.

## I. Perhubungan

### 1. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Lalu Lintas adalah memberikan pelayanan lalu lintas pada masyarakat melalui pemasangan rambu – rambu lalu lintas sesuai Standar. Fungsi dari Rambu perlengkapan jalan adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, angka, atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, perintah, larangan, dan petunjuk untuk bagi pengguna jalan.

**Tabel 2. 272 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	persentase jalan memiliki perlengkapan jalan	%	80,00	50,00	50	100,00		<b>DISHUB</b>
		prosentase perijinan analisis dampak lalu lintas	%	100,00	40,00	40	100,00		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		prosentase pelanggaran operasional lalu lintas	%	20,00	30	30,00	100,00		
		prosentase lokasi titik parkir	%	100,00	76	76,00	100,00		
		Persentase Layanan Angkutan Darat	%	39,00	33	7,75	23,48		
		Rasio Izin Trayek	%	90,00	80	76,00	95,00		
		Persentase Kepemilikan Kendaraan Angkutan Umum	%	90,00	82,00	82,00	100,00		
		Persentase LPJU (Lmapu Penerangan Jalan Umum)	%	100,00	67	67	100,00		


Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tegal, 2022

Dengan indikator Program Persentase jalan memiliki perlengkapan Jalan dengan tingkat capaian 100%, Persentase Perijinan Andalalin dengan tingkat capaian 100%, Persentase pelanggaran operasional lalu lintas dengan tingkat capaian 100%, Persentase lokasi titik parkir dengan tingkat capaian 100%, Presentase layanana Angkutan Darat dengan tingkat capaian 23%, Rasio izin trayek dengan tingkat capaian 95%, Persentase kepemilikan Kendaraan Angkutan Umum dengan tingkat capaian 100%, dan Persentase LPJU dengan tingkat capaian 100% sehingga rata-rata tingkat ketercapaian indikator program yaitu 89,81%.

## 2. Pengelolaan Pelayaran

Capain kinerja pada Pengelolaan Pelayaran antara lain:

**Tabel 2. 273 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pelayaran**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	Persentase Penerbitan Pass sungai dan danau			33,00	33	100,00		<b>DISHUB</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tegal, 2022

Dengan indikator program Presentase Penerbitan pass sungai dan danau dengan tingkat capaian 100%. Sehingga rata-rata tingkat ketercapaian indikator program yaitu 100%.

### 3. Pengelolaan Perkeretaapian

Indikator Pengelolaan Perkeretaapian antara lain:

**Tabel 2. 274 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perkeretaapian**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	Persentase Perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu	%	38,00	38,00	0	0,00		<b>DISHUB</b>
		Persentase Fatalitas Korban Kecelakaan	%	3,10	3,80	0	0,00		

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tegal, 2022



Dengan indikator program presentase fatalitas korban kecelakaan dengan tingkat capaian 0% dan Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu dengan tingkat capaian 0%, sehingga rata-rata-rata tingkat ketercapaian indikator program yaitu 0%.

## J. KOMUNIKASI DAN INFORMASI

### 1. Informasi dan Komunikasi Publik

Capain kinerja pada Informasi dan Komunikasi Publik antara lain:

**Tabel 2. 275 Capaian Kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Kualifikasi Peringkat KIP Badan Publik	Skor	79,00	50	65	130,00		DINAS KOMINFO
		Prosentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa	%	100,00	55	8	14,55		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tegal, 2022

Informasi dan Komunikasi dengan indikator program Kualifikasi Peringkat KIP Badan Publik dengan capaian 65% sehingga tingkat ketercapaian indicator program yaitu 130%, sedangkan indicator program Presentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa dengan capaian 8% sehingga tingkat ketercapaian indicator program 14,55%. Dikarenakan adanya pembatasan kegiatan sosialisasi pada saat Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa Tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, dan anggaran tersebut di *Refocusing*.


## K. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

### 1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Capain kinerja pada Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi antara lain:

**Tabel 2. 276 Capaian Kinerja Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								DINAS DAGKOP & UKM

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	%	0,57	0,42	0,58	138,10		

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kab. Tegal, 2022

Dengan indikator kinerja presentase koperasi aktif memiliki kinerja mencapai 58 unit atau 0,58% dari target yang telah ditetapkan yaitu 0,42%.

## 2. Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Capaian kinerja pada Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) antara lain:

**Tabel 2. 277 Capaian Kinerja Program Pengembangan UMKM**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	UMKM yang kompetitif dan mandiri	%	10,70	7,10	33,00	464,79		DINAS DAGKOP & UKM

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kab. Tegal, 2022


Dengan indikator jumlah UMKM yang kompetitif mencapai kinerja 33 atau 464,79% dari target 7,10 yang telah ditetapkan.

## L. PENANAMAN MODAL DAERAH

### 1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Capaian kinerja pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal antara lain:

**Tabel 2. 278 Capaian Kinerja Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Perusahaan	%	73,28	64,28	65	101,12		DINAS PMPTSP





Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tegal, 2022

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator program Presentase Kepatuhan Perusahaan dengan capaian 65%, sehingga tingkat ketercapaian indikator program yaitu 101,12%.

## 2. Promosi Penanaman Modal

Capaian kinerja pada Promosi Penanaman Modal antara lain:

**Tabel 2. 279 Capaian Kinerja Program Promosi Penanaman Modal**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi PMA	Rp	580 Milyar	520 Milyar	884 Milyar	170,00		DINAS PMPTSP
		Jumlah Investor PMA	Pemohon	13,00	7	18	257,14		
		Nilai Investasi PMDN	Rp	950 Milyar	875 Milyar	766 Milyar	87,50		
		Jumlah Investor PMDN	Pemohon	8257,00	7.657	1650	21,55		

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tegal, 2022


Promosi Penanaman Modal dengan indikator program Nilai Investasi PMA dengan capaian Rp. 799.278.898.058 sehingga tingkat ketercapaian indikator program

153,71%, lalu indikator program Jumlah Investor PMA ada 18 Pemohon, dengan tingkat ketercapaian indikator program 257,14%. Dan indikator program Nilai Investasi PMDN dengan capaian Rp. 2.735.359.996.977 sehingga tingkat ketercapaian 312,61%, lalu indikator program Jumlah Investor PMDN ada 1.650 pemohon dengan tingkat ketercapaian 21,52%.

### 3. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Capaian kinerja pada Pelayanan Penanaman Modal, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal antara lain:

**Tabel 2. 280 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks kepuasan Masyarakat perijinan	Indeks	82,00	79	88,86	112,48		
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal								

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tegal, 2022




Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator program Indeks Kepuasan Masyarakat Perizinan dengan capaian 88,86 sehingga tingkat ketercapaian indikator program yaitu 112,48%.

## M. PEMUDA DAN OLAHRAGA

### 1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Capaian kinerja pada Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan antara lain:

**Tabel 2. 281 Capaian Kinerja Program Pengembangan Kapasitas  
Daya Saing Keolahragaan**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Wirausaha Pemuda	%	1,28	0,60	0,40	66,67		DINAS PORAPAR
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
		Jumlah Atlet yang Berprestasi	Atlet	90,00	75,00	7,00	9,33		

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kab. Tegal, 2022

Pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olahraga yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal melaksanakan dua program yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan yang memiliki tiga indikator program dengan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Wirausaha Pemuda dengan capaian kinerja program sebesar 0,40% atau dengan tingkat capaian 66,67% dari target yang telah ditetapkan yaitu 0,60%
2. Capaian kinerja Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif adalah dengan realisasi sebesar 100 % atau dengan tingkat capaian program 100 % dari target yang telah ditentukan 100 %.
3. Capaian kinerja Jumlah Atlet yang Berprestasi dengan realisasi 65 atlet yang berprestasi atau dengan tingkat capaian 86,67% dari target 75 atlet.

## N. STATISTIK

### 1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Mendasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ayat 274, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Pengembangan statistik untuk menyediakan data/informasi yang *reliable, up to date* dan relevan diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagai salah satu bahan analisa pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat.

Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan antar sektor, Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengembangkan program Satu Data



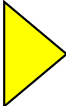

Kabupaten Tegal melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan dan integrasi data statistik sektoral OPD dan Kabupaten/Kota dalam aplikasi Single Data System dan Open Data yang mudah di akses oleh masyarakat secara luas.

Penyusunan data dan informasi pembangunan Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), OPD, instansi dan lembaga terkait di Tingkat Pusat dan Daerah. Selain data yang bersifat numerik, juga dilakukan koordinasi dan pengelolaan data yang bersifat spasial antara lain pengelolaan Jaringan Peta Daerah.

Pembangunan membutuhkan kekuatan, dan tanpa kekuatan pembangunan akan runtuh. Salah satu kekuatan agar pembangunan yang akan dilaksanakan kuat adalah tersedianya data statistik yang berkualitas. Dukungan ketersediaan data statistik yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam melakukan asesmen dan perumusan kebijakan pembangunan, alat kontrol terhadap implementasi perencanaan, termasuk kebijakan yang bersifat evaluasi terhadap hasil kerja akhir. Apa yang menjadi sumber kekuatan tersebut, semuanya tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan daerah memerlukan data berkualitas.

Tujuan pengembangan Sumber Daya TIK adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan, dengan cara memperbaiki pengetahuan, keterampilan, maupun sikap terhadap tugas-tugasnya di bidang TIK. Dalam pengembangan sumber daya TIK pada Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mendukung *e-Government*/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan berdasar Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan TIK bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang TIK yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya.

**Tabel 2. 282 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Prosentase dokumen data statistic sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM single data statistik (SDS) / open data	%	100,00	40	30	75,00		DINAS KOMINFO
		Laju pemanfaatan data dan informasi statistic sektoral oleh pengunjung SIM single data statistik (SDS) / open data	%	50,00	20	20	100,00		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022


Dengan indikator program Presentase dokumen data statistic sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM Single Data Statistik (SDS) / Open Data dengan capaian 30% sehingga tingkat ketercapaian indicator program 75%. dan indicator lainnya adalah Laju Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral oleh Penunjang SIM Single Data Statistik (SDS) / Open Data dengan capaian 20%, sehingga tingkat ketercapaian indikator program yaitu 100%.

## 0. Persandian

### 1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Capaian kinerja pada Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi antara lain:

**Tabel 2. 283 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	Nilai	456,00	300	294	98,00		DINAS KOMINFO

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Dengan indikator program Indeks Keamanan Informasi dengan capaian indikator program 294, sehingga tingkat ketercapaian indikator program yaitu 98%.

## P. KEBUDAYAAN

### 1. Pengembangan Kesenian Tradisional

Capaian kinerja pada Pengembangan Kebudayaan, Pengembangan Kesenian Tradisional antara lain:

**Tabel 2. 284 Capaian Kinerja Program Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Tradisional**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase tradisi yang dikembangkan	%	60,25	57,50	60,00	104,35		DIKBUD
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal, 2022

Program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pengembangan Kesenian Tradisional memiliki indikator kinerja persentase tradisi yang dikembangkan dari target 57,50% terealisasi 60%. Maka tingkat capaian kinerja 104,35%.

### 1. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Capaian kinerja pada Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya antara lain:

**Tabel 2. 285 Capaian Kinerja Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase seni dan kesenian yang dibina	%	83,56	80,12	80,81	100,86		DIKBUD


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal, 2022

Indikator program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya ada satu yaitu persentase seni dan kesenian yang dibina. Target program indikator tersebut adalah 80,12 sedangkan capaian programnya adalah 80,81. Sehingga tingkat capaian programnya 1,01. Rata-rata tingkat ketercapaian indikator program adalah 100,86.

## 2. Pengelolaan Permuseuman

Capaian kinerja pada Pengelolaan Permuseuman antara lain:

**Tabel 2. 286 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Permuseuman**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	Persentase Benda Cagar Budaya dan Situs Budaya yang dibangun/direhabilitasi dan dikaji	%	28,56	24,50	25,95	105,92		DIKBUD

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal, 2022



Indikator program pengelolaan permuseuman ada satu yaitu persentase benda cagar budaya dan situs budaya yang dibangun/direhabilitasi dan dikaji. Target program indikator tersebut adalah 24,50 sedangkan capaian programnya adalah 25,95.


## Q. PERPUSTAKAAN

### 1. Pembinaan Perpustakaan

Capaian kinerja pada Pembinaan Perpustakaan antara lain:

**Tabel 2. 287 Capaian Kinerja Program Pembinaan Perpustakaan**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>	Persentase Peningkatan Pemustaka	%	100% (62.486 Orang)	40% (43.740 Orang)	33.162 Orang	75,82		DINAS ARPUS
		Persentase Peningkatan Koleksi Judul Buku	%	100% (12.500 Judul)	40% (5.000 Judul)	4.589 judul	91,78		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
		Persentase Peningkatan Perpustakaan Berbasis TIK	%	100% (200 perpustakaan)	40% (80 Perpustakaan)	28 Perpustakaan	35,00		

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal, 2022




Program Pembinaan Kearsipan, ada tiga indikator program yaitu indikator program Persentase Peningkatan Pemustaka dengan tingkat capaian indikator program sebesar 75,82%, indikator program Persentase Peningkatan Koleksi Judul Buku dengan capaian 91,78%, dan indikator program Persentase Peningkatan perpustakaan berbasis TIK dengan capaian 35%, sehingga rata-rata tingkat ketercapaian indikator program yaitu 67,53%.

## R. KEARSIPAN

### 1. Pengelolaan Arsip

Capaian kinerja pada Pengelolaan Arsip antara lain:

**Tabel 2. 288 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Arsip**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pengelolaan Arsip	Peningkatan Nilai LAKE LKD	Nilai	85,00	55	73	132,73		DINAS ARPUS
		Peningkatan Pemerintah Desa dan Ormas bernilai LAKE cukup	Desa & Ormas	100 (10 Desa dan 2 Ormas)	33,33% (4 Desa)	0	0,00		
		Peningkatan jumlah Perangkat Daerah dan BUMD bernilai LAKE cukup	OPD & BUMD	46,15% (20 OPD & 4 BUMD)	17,31% (9 OPD)	1	11,11		

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal, 2022

Program Pengelolaan Arsip, ada tiga indikator program yaitu Peningkatan Nilai LAKE LKD dengan tingkat capaian 132,73%; Peningkatan Pemerintah Desa dan Ormas bernilai LAKE Cukup dengan tingkat capaian 0%; dan Peningkatan jumlah

perangkat daerah dan BUMD bernilai LAKI cukup dengan tingkat capaian 11,11%. Maka rata – rata tingkat capaian indikator program sebesar 47,95%.



### 2.2.3 URUSAN PILIHAN

#### A. PARIWISATA

##### 1. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Capaian kinerja pada Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata antara lain:

**Tabel 2. 289 Capaian Kinerja Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Kondisi Baik	%	77,78	66,67	66,67	100,00		DINAS PORAPAR
		Persentase Usaha Pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	%	95,00	80	44	55,00		



Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, 2022

Pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi PARIwisata terdapat dua indikator yang mendukung program tersebut yaitu Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Kondisi Baik dengan realisasi kinerjanya 66,67 % dengan tingkat capaian 100 % dan Persentase Usaha Pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang hanya mencapai 44% atau dengan tingkatan capaian kinerja 55%.

##### 2. Pemasaran Pariwisata

Capaian kinerja pada Pemasaran Pariwisata antara lain:

**Tabel 2. 290 Capaian Kinerja Program Pemasaran Pariwisata**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisnu dan Wisman	Angka	1.552.987,00	1.052.687	483.642	45,94		DINAS PORAPAR
		Rata-rata lama kunjungan wisata	Hari	0,14	0,90	0,49	54,44		

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, 2022


Dinas Pariwisata, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal melaksanakan dua indikator program yaitu Jumlah Kunjungan Wisnu dan Wisman dengan realisasi kinerjanya 429.306 dengan tingkat capaian 40,78% dari target 1.052.687 dan Rata-rata lama kunjungan wisata yang telah mencapai 0.75% atau dengan tingkatan capaian kinerja 83,33%.

## B. PERTANIAN

### 1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Capaian kinerja pada Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat antara lain:

**Tabel 2. 291 Capaian Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Indekertanaman	Indeks	1,70	1,58	1,59	100,63		

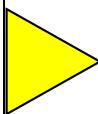
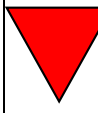
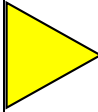
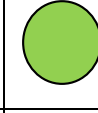
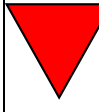
Sumber : Dinas Pertahanan Pangan dan Pertanian Kab. Tegal, 2022

Dengan indikator program antara lain Indeks Pertanaman dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 100,63%.

## 2. Penyediaan Prasarana Pertanian

Penyediaan prasarana pertanian yang memadai diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dari hasil komoditas hasil pertanian sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal. Berikut capaian kinerja peningkatan prasarana dan sarana pertanian :

**Tabel 2. 292 Capaian Kinerja Program Penyediaan Prasarana Pertanian**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<b>PROGRAM PENYEDIAAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Jumlah Pelaku Usaha Industri Pengolahan Pertanian	%	5,00	5	3	60,00		<b>DINAS TAN &amp; KP</b>
		Persentase adopsi teknologi tepat guna	%	6,00	6	2	33,33		
		Persentase Penyediaan Bibit Tanaman Pertanian	%	55,00	40	35	87,50		
		Penyediaan Sistem Informasi Pertanian	Jumlah Jenis SI	1,00	1	1	100,00		
		Tingkat Kunjungan Masyarakat di TTP	Jumlah	5.000,00	5.000	0	0,00		

Sumber : Dinas Pertahanan Pangan dan Pertanian Kab. Tegal, 2022







Dengan indikator program antara lain Jumlah Pelaku Usaha Industri Pengolahan Pertanian, Persentase adopsi teknologi tepat guna, Persentase Penyediaan Bibit Tanaman Pertanian, Penyediaan Sistem Informasi Pertanian, Tingkat Kunjungan Masyarakat di TTP dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 56,17%.

## 3. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Capaian kinerja pada Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian antara lain:



**Tabel 2. 293 Capaian Kinerja Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	%	90,00	89,85	99,88	111,16		<b>DINAS TAN &amp; KP</b>
		Rasio Serangan OPT	%	<3	<3	4,10	136,67		
		Persentase lahan terakomodir pupuk bersubsidi	%	95,00	92,00	67,55	73,42		
		Luas Lahan Sawah Lestari yang dipertahakan	%	100,00	100,00	100	100,00		
		Jumlah layanan Perlindungan Tanaman	Liter	1000,00	1.000	1000	100,00		
		Rasio Unit Usaha Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) per desa	%	68,00	61,48	54,80	89,14		




Sumber : Dinas Pertahanan Pangan dan Pertanian Kab. Tegal, 2022

Dengan indikator program antara lain Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Rasio Serangan OPT, Persentase lahan terakomodir pupuk bersubsidi, Luas Lahan Sawah Lestari yang dipertahakan, Jumlah layanan Perlindungan Tanaman, Rasio Unit Usaha Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) per desa dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 96,89%.

#### 4. Penyuluhan Pertanian

Capaian kinerja pada Penyuluhan Pertanian antara lain:

**Tabel 2. 294 Capaian Kinerja Program Penyuluhan Pertanian**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Persentase Posluhdes	%	44,60	34,15	38,79	113,59		<b>DINAS TAN &amp; KP</b>
		Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	5,00	5,00	5,73	114,60		
		Persentase petani yang terlatih pertahun	%	2,50	2,50	2,5	100,00		


Sumber : Dinas Pertahanan Pangan dan Pertanian Kab. Tegal, 2022



Dengan indikator program antara lain Persentase Posluhdes, Persentase peningkatan kelas kelompok tani, Persentase petani yang terlatih pertahun dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 109,40%

## 5. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB sector peternakan diperlukan adanya penguatan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas hasil peternakan seperti daging, telur dan susu. Berikut capaian kinerja produksi di bidang peternakan:

**Tabel 2. 295 Capaian Kinerja Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Produksi Daging (Kg.)	Kg	10.570.444,00	10.259.569	12.817.246	124,93		<b>DINAS KPP</b>

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
		Produksi Telur (Kg.)	Kg	10.781.427,00	10.464.347	9.734.385	93,02		
		Produksi Susu (Kg.)	Kg	769.063,00	735.468	655.742	89,16		

Sumber : Dinas Pertahanan Pangan dan Pertanian Kab. Tegal, 2022


Dengan indikator program antara lain Produksi Daging (Kg), Produksi Telur (Kg), Produksi Susu (Kg) dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 102%.

## C. PERDAGANGAN

### 1. Standarsisasi dan Perlindungan Konsumen

Capaian kinerja pada Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; Pengembangan Ekspor; Standarsisasi dan Perlindungan Konsumen antara lain:

**Tabel 2. 296 Capaian Kinerja Program Standarsisasi dan Perlindungan Konsmen**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pedagang tertib niaga	%	100,00	40,00	61,00	152,50		DINAS DAGKOP & UKM
2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								
3	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kab. Tegal, 2022

Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Proram Pengembangan Ekspor, dan Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

dengan indikator Persentase Pedagang tertib niaga mencapai kinerja 61% dari target 40% yang telah ditetapkan.

## 2. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Dalam upaya mengembangkan standarisasi pasar di kabupaten tegal, ada beberapa aspek yang harus dipenuhi meliputi aspek teknis, aspek pengelolaan, aspek SDM, dan aspek pembiayaan.

**Tabel 2. 297 Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah pasar yang merujuk SNI	Pasar	1	1	4	400		DINAS DAGKOP & UKM

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kab. Tegal, 2022

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator kinerja Jumlah pasar yang merujuk SNI memiliki kinerja mencapai empat pasar atau 400% dari target yang telah ditetapkan yaitu satu pasar. Adapun capaian kinerja sub kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian kinerja program diatas adalah sebagai berikut :





- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan memiliki realisasi capaian kinerja mencapai 106,25%.
- Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan memiliki realisasi capaian kinerja 100 %.
- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan memiliki realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

## D. PERINDUSTRIAN

### 1. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Capaian kinerja pada Perencanaan dan Pembangunan Industri, Pengendalian Izin usaha industri Kabupaten/Kota, Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional antara lain:

**Tabel 2. 298 Capaian Kinerja Program Perencanaan,  
Pengendalian, Pengelolaan Perindustrian**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan sub sektor PDRB industri logam	%	7,90	7,90	0,18	2,28		DINAS PERINAKER
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Cakupan bina kelompok pengrajin industri logam, mesin, alat transportasi, tekstil, aneka	Tahunan	7,17	5,00	4,98	99,60		
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pertumbuhan sub sektor PDRB industri agro, kimia dan hasil hutan	%	7,40	7,40	5,51	74,46		
		Cakupan bina kelompok pengrajin industri agro, kimia dan hasil hutan			7,20	7,55	104,86		

Sumber : Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Tegal, 2022

Pada indikator program yang diampu oleh tiga program yaitu pertumbuhan sub sektor PDRB industri logam; Cakupan bina kelompok pengrajin industri logam, mesin, alat transportasi, tekstil, aneka; Pertumbuhan sub sector PDRB industri agro, kimia dan hasil hutan; dan Cakupan bina kelompok pengrajin industri agro, kimia dan hasil hutan. Dengan tingkat capaian indikator program untuk Cakupan bina kelompok pengrajin industri logam, mesin, alat transportasi, tekstil, aneka sebesar 99,60%; Pertumbuhan sub sector PDRB industry agro, kimia dan hasil hutan sebesar; 74,46% pertumbuhan sub sektor PDRB industri agro, kimia dan hasil hutan dan cakupan bina kelompok pengrajin industri agro, kimia dan hasil hutan sebesar 104,86%.


## **E. TRANSMIGRASI**

### **1. Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

Transmigrasi pada dasarnya merupakan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa melalui program terpadu dan lintas sektoral. Dengan kata lain, transmigrasi bertujuan untuk meratakan penyebaran jumlah penduduk/tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat

menjamin peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya.

**Tabel 2. 299 Capaian Kinerja Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RPKD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Persentase Transmigran yang ditempatkan	%	100	0	0	100,00		

Sumber : Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Tegal, 2022


Pada pelaksanaan Urusan Transmigrasi hanya terdiri satu program yaitu Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan indikator Presentase transmigran yang ditempatkan. Pada program ini terlaksananya kegiatan pengiriman atau pemberangkatan transmigran dari Kabupaten Tegal bergantung pada kuota yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan pada Tahun 2021 Kabupaten Tegal tidak mendapatkan kuota.


## F. KELAUTAN DAN PERIKANAN

### 1. Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha pengembangan perikanan. Berdasarkan tempat pembudidayaan, dibedakan: perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan. Sedangkan pengertian penangkapan ikan sendiri adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaikan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan / atau mengawetkannya.

**Tabel 2. 300 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RPKD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Kg.)	Kg	1.630.561	1.582.606	1.599.902	101,09		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
		Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp. 000,-)	Rupiah	15.196.846	14.749.909	24.315.177	164,85		






Sumber : Dinas Perikanan Kab. Tegal, 2022


Program perikanan tangkap dengan indikator program Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dengan capaian 101,09% dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap dengan capaian 164,85%. Sehingga rata-rata tingkat ketercapaian indikator program yaitu 132,97%.

## 2. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Capaian kinerja pada Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan antara lain:

**Tabel 2. 301 Capaian Kinerja Program Pengawasan Sumberdaya Laut dan Perikanan, Pengelolaan Hayati dan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Tersedianya asosiasi tanaman Mangrove			30.000	30.000	100,00		
3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN dan PERIKANAN	Tersedianya benih ikan			540.000	540.000	100,00		
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Kg.)	Kg	2.152.277	2.088.979	2.404.195	115,09		
5	PROGRAM PENGOLAHAN dan PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp. 000,-)	Rp	91.247.472	88.559.044	134.134.340	151,46		
		Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Kg)	Kg	4.744.412	4.604.879	6.363.369	138,19		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000,-)	Rp	180.152.628	174.854.366	165.147.103	94,45		

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Tegal, 2022

Pada indikator program Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dengan capaian 115,09%; Nilai Produksi Perikanan Budidaya dengan capaian 151,46%; Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dengan capaian 138,19%; dan Nilai produksi pengolahan hasil perikanan dengan capaian 94,45%. Sehingga rata – rata tingkat ketercapaian indikator program yaitu 124,80%.


## 2.2.4 URUSAN PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN

### A. ADMINISTRASI











#### 1. Sekretariat Daerah













Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi 1) pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara padainstansi Daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



**Tabel 2. 302 Capaian Kinerja Program Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan Sekretariat Daerah**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja OPD Lingkup Koordinasi Bagian Keuangan tercapai LKJIP OPD Kategori BB	%	45,41	39,00	66,67	170,95		BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN SETDA



NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
		Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terfasilitasi	%	97	94,00	169,16	179,96		
		Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100,00	100,00	100,00		
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pemenuhan pelayanan sosial keagamaan	%	100	100,00	100,00	100,00		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA
		Persentase OPD Rumpun Kesra tercapai LKJIP OPD kategori BB	%	45,41	39,41	62,50	158,59		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Jabatan sesuai Standar dan Administrasi Pelayanan Kepegawaian Tepat Waktu	%	100	100,00	100,00	100,00		BAGIAN UMUM SETDA
4	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase layanan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan secara on-line ( e-procurement )	%	100	100,00	100,00	100,00		BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA SETDA
		Persentase lelang tepat waktu	%	100	100,00	100,00	100,00		
5	Program Pemerintahan dan Kesra	Persentase pembentukan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa	%	100	100,00	50,00	50,00		BAGIAN PEMERINTAHAN RAKYAT SETDA
		Persentase OPD Rumpun Pemerintahan Desa tercapai LKJIP OPD kategori BB	%	45,41	39,41	0,00	0,00		
		Persentase kerjasama Daerah yang terealisasi	%	100	100,00	100,00	100,00		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
		Persentase Layanan Publik sesuai dengan SPM	%	97	94,00	93,00	98,94		
		Persentase IKM Kecamatan	%	77,53	73,78	75,11	101,80		
		Persentase OPD Rumpun Pemerintahan tercapai LKJIP OPD kategori B	%	45,41	39,41	62,50	158,59		
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebijakan strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat	%	100	100,00	100,00	100,00		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA
		Persentase OPD Rumpun Humas tercapai LKJIP OPD kategori BB	%	45,41	39,41	100,00	253,74		
7	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pembentukan Perda yang terselesaikan	%	100	100,00	100,00	100,00		BAGIAN HUKUM SETDA
		Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terfasilitasi	%	100	100,00	100,00	100,00		
8	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD Rumpun Pembangunan tercapai LKJIP OPD kategori BB	%	45,41	39,41	20,00	50,75		BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN SETDA
		Persentase Rumusan Kebijakan Rumpun Pembangunan yang difasilitasi	%	100	100,00	100,00	100,00		
		Persentase OPD Rumpun Perekonomian tercapai LKJIP OPD kategori BB	%	45,41	39,41	40,00	101,50		
		Persentase peraturan rumpun perekonomian yang diimplementasikan	%	97	94,00	94,00	100,00		
9	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai SAKIP Kabupaten Tegal	%	67,61	65,61	63,28	96,45		BAGIAN ORGANISASI SETDA

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
		Persentase OPD Rumpun Organisasi tercapai LKJIP OPD kategori BB	%	45,41	39,41	50,00	126,87		
		Nilai IKM Kabupaten	%	77,53	80,46	82,20	102,16		

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Tegal 2022

Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan enam indikator program, yaitu Persentase OPD Rumpun Pembangunan tercapai LKJIP OPD kategori BB, Persentase Rumusan Kebijakan Rumpun Pembangunan yang difasilitasi, Persentase OPD Rumpun Perekonomian tercapai LKJIP OPD kategori BB, Persentase peraturan rumpun perekonomian yang diimplementasikan, dengan rata – rata capaian indikator program sebesar 88,06%. Lalu ada Persentase layanan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan secara on-line ( *e-procurement* ), dan Persentase lelang tepat waktu dengan rata-rata capaian indikator program sebesar 100%.

Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, dengan tiga belas indikator program, yaitu Persentase pembentukan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa, Persentase OPD Rumpun Pemerintahan Desa tercapai LKJIP OPD kategori BB, Persentase kerjasama Daerah yang terealisasi, Persentase Layanan Publik sesuai dengan SPM, Persentase IKM Kecamatan, Persentase OPD Rumpun Pemerintahan tercapai LKJIP OPD kategori BB dengan rata – rata capaian indikator program sebesar 84,89%. Lalu ada Persentase pemenuhan pelayanan sosial keagamaan, Persentase OPD Rumpun Kesra tercapai LKJIP OPD kategori BB dengan rata – rata capaian indikator program sebesar 129,29%. Predikat ( Nilai ) SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal, Persentase IKM Kabupaten, Persentase OPD Rumpun Organisasi tercapai LKJIP OPD kategori BB dengan rata – rata capaian indikator program sebesar 113,66%. Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan, dan Persentase penyelesaian permasalahan hukum HAM yang terfasilitasi dengan rata – rata capaian indikator program sebesar 100%. Pada tahun 2021 untuk capaian kinerja indikator yang pertama, yaitu Nilai SAKIP Kabupaten Tegal tercapai 63,28 dengan predikat B dari target yang telah ditetapkan 65,61. Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian PANRB, Nilai SAKIP tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Tegal sudah menunjukkan hasil yang cukup baik dari

tahun 2019. Beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam penyelenggaraan SAKIP pada tahun 2021 adalah :

- a. Dalam perencanaan kinerja, sasaran strategis yang ada pada dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome), sebagian besar masih menunjukan proses atau output. Sehingga perlu melakukan perbaikan terhadap komponen perencanaan kinerja dengan memperhatikan berbagai kaidah seperti manfaat langsung dirasakan oleh masyarakat dan keterpaduan perencanaan pembangunan.
- b. Belum tersedianya aplikasi SAKIP secara terintegrasi mulai dari e-planning, e-budgeting dan e-SAKIP, sehingga monitoring dan evaluasi secara bulanan atau triwulan belum berjalan maksimal;
- c. Kualitas laporan kinerja di tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah belum sepenuhnya menyajikan analisis yang memadai atas pencapaian kinerja yang berorientasi hasil dan analisis efisiensi penggunaan anggaran dengan pencapaian target kinerja sehingga laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
- d. Evaluasi Internal telah dilakukan oleh APIP dan telah memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan dapat mengidentifikasi potensi adanya penggunaan anggaran yang kurang efektif dan efisien, namun rekomendasi dimaksud belum ditindaklanjuti secara optimal oleh sebagian pimpinan Perangkat Daerah.
- e. Untuk capaian kinerja secara umum yang ditetapkan dalam PK tingkat Pemda berhasil dicapai dengan rata-rata pencapaian kinerjanya sebesar 97%.

Guna mendukung meningkatnya nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal, tidak terlepas dari peran seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun LKJiP masing-masing. Adapun Perangkat Daerah yang berada di bawah rumpun Bagian Organisasi adalah BKPSDM dan Dinas Perpustakaan. Berdasarkan hasil evaluasi internal, Dinas Perpustakaan memperoleh nilai 61,39 dengan predikat B (Baik). Sedangkan BKPSDM belum dievaluasi internal pada Tahun 2021. Sehingga target penilaian LKJiP dengan predikat BB (Sangat Baik) pada Perangkat Daerah tersebut belum tercapai. Untuk mencapai hasil dengan predikat BB, sangat dibutuhkan komitmen yang kuat dari para pimpinan perangkat daerah hingga pelaksana untuk bekerja sama mewujudkan birokrasi yang lebih baik. Nilai IKM Kabupaten pada tahun 2021 memperoleh nilai 82,20 dengan predikat Baik. Pencapaian nilai tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD yakni 80,46. Selisih nilai dari target sebanyak 1,74 menunjukkan nilai yang lebih baik namun, menjadi hal yang patut dipertahankan dan ditingkatkan dalam meraih kepercayaan masyarakat.

Program Administrasi Umum dengan enam indikator program yaitu Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Jabatan sesuai Standar dan Administrasi Pelayanan Kepegawaian Tepat Waktu dengan rata – rata capaian indikator program sebesar 100%. Lalu ada Persentase OPD Rumpun Keuangan


Daerah tercapai LKJIP OPD kategori BB, Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terselesaikan, Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Perencanaan perangkat Daerah dengan rata – rata capaian indikator program sebesar 123,05%. Persentase kebijakan strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat, dan Persentase OPD Rumpun Humas tercapai LKJIP OPD kategori BB dengan rata – rata capaian indikator program sebesar 176,87%.

## 2. Sekretariat DPRD

### a. Layanan dan Administrasi Keuangan

Capaian kinerja pada Layanan dan Administrasi Keuangan antara lain:

**Tabel 2. 303 Capaian Kinerja Program Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan Sekretariat DPRD**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD ke dalam pembangunan	%	100,00	100	100	100,00		SETWAN


Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Tegal 2022

Program Layanan dan Administrasi Keuangan, dengan indikator program Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD ke dalam pembangunan mencapai tingkat capaian indikator program sebesar 100%.

### b. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Capaian kinerja pada Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD antara lain:

**Tabel 2. 304 Capaian Kinerja Program Dukungan  
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke dalam penyusunan Prolegda dan APBD	%	100,00	100	100	100,00		<b>SETWAN</b>









Sumber : Sekretariat DPRPD Kab. Tegal 2022

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan indikator program Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke dalam penyusunan Prolegda dan APBD mencapai tingkat capaian indikator sebesar 100%.




### 3. Kecamatan




Basis pembangunan kecamatan sebagai koordinator, asistensi dan fasilitasi desa adalah model Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dirilis oleh Kementerian PPN/Bappenas. Kecamatan dalam melaksanakan fungsinya mendorong *stakeholders* di kecamatan untuk mewujudkan desa mandiri sebagai indikator keberhasilan pembangunan di level desa yang pada akhirnya menggambarkan pembangunan di seluruh kecamatan pada umumnya.



**Tabel 2. 305 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Desa Tertinggal	Jumlah	0,00	0,00	0,00	100,00		KEC. ADIWERNA
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Desa Berkembang	Jumlah	12,00	15,00	8,00	53,33		
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETRITIBAN UMUM	Desa Mandiri	Jumlah	9,00	6,00	6,00	100,00		
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Desa								
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Desa tertinggal	Jumlah	0,00	0	0	100,00		KEC. BALAPULANG
2	Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Desa Berkembang	Jumlah	15,00	16	12	75,00		
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Desa Mandiri	Jumlah	5,00	4	4	100,00		
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
5	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum								
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Desa tertinggal	Jumlah	0,00	0	0	100,00		KEC. BOJONG
2	Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Desa Berkembang	Jumlah	13,00	15	13	86,67		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Desa Mandiri	Jumlah	4,00	2	2	100,00		
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								




1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik								KEC. BUMIJAWA
2	Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Desa Tertinggal	Jumlah	0,00	0	0	100,00		
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Desa Berkembang	Jumlah	14,00	13	13	100,00		
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Desa Mandiri	Jumlah	4,00	0	0	100,00		




1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Persentase Desa Tertinggal	Jumlah	0,00	0	0	100,00		KEC. DUKUHTURI
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Persentase Desa Berkembang	Jumlah	12,00	14	10	71,43		
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Persentase Desa Mandiri	Jumlah	6,00	4	4	100,00		
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								


Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									KEC. DUKUHWARU
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Desa Tertinggal	Jumlah	0,00	0	0	100,00			
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Desa Berkembang	Jumlah	4,00	6	10	166,67			



NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Desa Mandiri	Jumlah	6,00	4	4	100,00		




PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									KEC. JATINEGARA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah	0,00	0	0	100,00			
PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah	15,00	16	16	100,00			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	2,00	1	1	100,00			


1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik								KEC. KEDUNGBANTENG
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN	Desa tertinggal	Jumlah	0,00	0	0	100,00		
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Desa berkembang	Jumlah	7,00	8	8	100,00		
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Desa Mandiri	Jumlah	3,00	2	2	100,00		



1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								KEC. LEBAKSIU
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Desa Tertinggal	Jumlah	0,00	0	0	100,00		




NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Desa Berkembang	Jumlah	4,00	9	8	88,89		
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Desa Mandiri	Jumlah	11,00	6	3	50,00		




Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									KEC. MARGASARI
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Desa Tertinggal	Jumlah	0,00	0,00	0,00	100,00			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Desa Berkembang	Jumlah	9,00	10,00	9,00	90,00			
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Desa Mandiri	Jumlah	4,00	3,00	1,00	33,33			
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									


1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Desa Tertinggal	Jumlah	0,00	0	0	100,00		KEC. PAGERBARANG
2	Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Desa Berkembang	Jumlah	8,00	13	13	100,00		
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Desa Mandiri	Jumlah	5,00	0	0	100,00		
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								

1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Desa Tertinggal	Jumlah	0,00	0	0	100,00		KEC. PANGKAH
---	---	-----------------	--------	------	---	---	--------	---	--------------




NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P-RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Desa Berkembang	Jumlah	12,00	17	9	52,94		
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Desa Mandiri	Jumlah	11,00	6	6	100,00		
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								




1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								KEC. SLAWI
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Desa Tertinggal	Jumlah	0,00	0	0	100,00		
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Desa Berkembang	Jumlah	0,00	0	0	100,00		
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Desa Mandiri	Jumlah	5,00	5	5	100,00		

1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik								KEC. SURADADI
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Desa Tertinggal	Jumlah	0,00	0	0	100,00		
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Desa Maju	Jumlah	7,00	7	7	100,00		
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Desa Mandiri	Jumlah	4,00	4	4	100,00		

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									KEC. TALANG
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Desa Tertinggal	Jumlah	0,00	0	0	100,00			

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Desa Berkembang	Jumlah	16,00	17	17	100,00		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Desa Mandiri	Jumlah	3,00	2	2	100,00		

1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik								KEC. TARUB
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Desa Tertinggal	Jumlah	0,00	0	0	100,00		
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Desa Berkembang	Jumlah	14,00	17	17	100,00		
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Desa Mandiri	Jumlah	6,00	3	3	100,00		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8		10
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Desa Tertinggal	Jumlah	0,00	0,00	0,00	100,00		KEC. WARUREJA
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Desa Berkembang	Jumlah	7,00	7,00	7,00	100,00		
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Desa Mandiri	Jumlah	5,00	5,00	5,00	100,00		
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Desa								

Sumber : Kecamatan Kabupaten Tegal, 2022

### **Kecamatan Adiwerna**

Program peningkatan pelayanan kecamatan Adiwerna untuk capaian kinerja Desa berkembang dan desa Mandiri Sangat Tinggi, dari Target 15 dan 6 Desa terealisasi 16 dan 5 Desa. Penentuan katagori tersebut adalah didasarkan pada kondisi desa dan berdasarkan indikator dalam IDM antara lain ;

- Pembangunan Infrastruktur
- Peningkatan SDM
- Pemanfaatan SDA
- Perekonomian

Peningkatan status desa berkembang menjadi desa mandiri bukan merupakan tanggungjawab pemerintah saja namun juga menjadi tanggungjawab seluruh komponen masyarakat.

### **Kecamatan Balapulang**

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Balapulang untuk capaian kinerja Desa berkembang dan desa mandiri Sangat tinggi, dari target 16 dan 4 desa terealisasi 16 dan 4 desa.

Desa Mandiri, dimana perkembangan desa dekat dengan kesehatan, dan faisilitas pendidikan ada kantor wilayah kecamatan Balapulang antara lain bank BRI, BPD, BD, dan kehidupan masyarakat desanya Sangat Maju.

Desa berkembang, dimana adanya lembaga pendidikan yang maju setingkat atas lembaga kesehatan seperti puskesmas, dana desa dikelola dengan baik dan maju pengelolaan BUMDES, UPK, kemudian adanya pasar desa dan lembung desa yang kuat.

### **Kecamatan Bojong**

Program peningkatan pelayanan Kecamatan Bojong untuk capaian kinerja Desa Berkembang dan Desa Mandiri Sangat Tinggi, dari Target 15 dan 2 Desa terealisasi 15 dan 2 Desa. Penentuan status tersebut didasarkan antara lain ;

- Infrastruktur
- Sarana transportasi, sarana penghubung antar desa, kecamatan dan daerah lain.
- Sarana Kesehatan, sarana yang ada di puskesmas dan aktivitas posyandu.
- Sarana Pendidikan, sarana dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi.
- Sarana Perekonomian, sarana perdagangan/pasar dan pertanian.
- Sumber Daya Manusia, tingkat kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan pengangguran.

### **Kecamatan Bumijawa**

Program peningkatan pelayanan Kecamatan Bumijawa untuk capaian kinerja Desa Berkembang dari Target 15 Desa, terealisasi di Semeser I 16 desa dengan capaian kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan untuk Desa Mandiri Target 3 Desa, terealisasi 2

Desa yang dimana capaian kinerja Sedang. Penentuan status tersebut didasarkan antara lain ;

- Infrastruktur
- Sarana transportasi, sarana penghubung antar desa, kecamatan dan daerah lain.
- Sarana Kesehatan, sarana yang ada di puskesmas dan aktivitas posyandu.
- Sarana Pendidikan, sarana dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi.
- Sarana Perekonomian, sarana perdagangan/pasar dan pertanian.
- Sumber Daya Manusia, tingkat kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan pengangguran.

### **Kecamatan Dukuhturi**

Program peningkatan pelayanan Kecamatan Dukuhturi untuk capaian kinerja Desa Berkembang dari Target 14 Desa, terealisasi di Semester I 15 desa dengan capaian kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan untuk Desa Mandiri Target 4 Desa, terealisasi 3 Desa yang dimana capaian kinerja Sedang. Penentuan status tersebut didasarkan antara lain ;

- Infrastruktur
- Sarana transportasi, sarana penghubung antar desa, kecamatan dan daerah lain.
- Sarana Kesehatan, sarana yang ada di puskesmas dan aktivitas posyandu.
- Sarana Pendidikan, sarana dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi.
- Sarana Perekonomian, sarana perdagangan/pasar dan pertanian.
- Sumber Daya Manusia, tingkat kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan pengangguran.

### **Kecamatan Dukuhwaru**

Program peningkatan pelayanan Kecamatan Dukuhwaru untuk capaian kinerja Desa Berkembang dari Target 6 Desa, terealisasi di Semester I 7 desa dengan capaian kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan untuk Desa Mandiri Target 4 Desa, terealisasi 3 Desa yang dimana capaian kinerja Sedang.

Upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Dukuhwaru dalam mempertahankan status Desa Mandiri dan berupaya meningkatkan Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri adalah sbb :

- Program dan Kegiatan Dana Desa baik yang bersumber dari APBD maupun dari Bantuan Provinsi hendaknya bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel sehingga bisa tepat waktu, tepat guna , tepat sasaran kepada masyarakat.
- Meningkatkan Pelatihan teknis administrasi desa dan pembinaan secara berkala kepada Kepala Desa dan perangkatnya

- Menanamkan kesadaran diri dan komitmen organisasi pemerintahan desa agar tumbuh kesadaran bagi mereka untuk memberikan sumbangsih bagi kemajuan desanya
- Meningkatkan upaya yang sinergis dari stakeholder terkait pendampingan, pengelolaan, pelaporan, monitoring, evaluasi dan pengawasan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dana Desa.

### **Kecamatan Jatinegara**

Program peningkatan pelayanan Kecamatan Jatinegara untuk capaian kinerja Desa Berkembang dan Desa Mandiri Sangat Tinggi, dari Target 16 dan 1 Desa terealisasi 16 dan 1 Desa. Penentuan status tersebut didasarkan antara lain ;

- Infrastruktur
- Sarana transportasi, sarana penghubung antar desa, kecamatan dan daerah lain.
- Sarana Kesehatan, sarana yang ada di puskesmas dan aktivitas posyandu.
- Sarana Pendidikan, sarana dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi.
- Sarana Perekonomian, sarana perdagangan/pasar dan pertanian.
- Sumber Daya Manusia, tingkat kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan pengangguran.

### **Kecamatan Kedungbanteng**

Program peningkatan pelayanan Kecamatan Kedungbanteng untuk capaian kinerja Desa Berkembang dan Desa Mandiri Sangat Tinggi, dari Target 8 dan 2 Desa terealisasi 8 dan 2 Desa. Penentuan status tersebut didasarkan antara lain ;

- Infrastruktur
- Sarana transportasi, sarana penghubung antar desa, kecamatan dan daerah lain.
- Sarana Kesehatan, sarana yang ada di puskesmas dan aktivitas posyandu.
- Sarana Pendidikan, sarana dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi.
- Sarana Perekonomian, sarana perdagangan/pasar dan pertanian.
- Sumber Daya Manusia, tingkat kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan pengangguran.

### **Kecamatan Kramat**

Program peningkatan pelayanan Kecamatan Kramat untuk capaian kinerja Desa Tertinggal dan Desa Berkembang capaian Kinerja Sangat Tinggi. Dari Target 6 dan 5 desa, terealisasi 7 dan 5 desa. Sedangkan untuk Desa Mandiri Capaian kinerja Tinggi. Dari target 8 desa terealisasi 7 desa. Penentuan status tersebut didasarkan antara lain ;

- Infrastruktur
- Sarana transportasi, sarana penghubung antar desa, kecamatan dan daerah lain.
- Sarana Kesehatan, sarana yang ada di puskesmas dan aktivitas posyandu.

- Sarana Pendidikan, sarana dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi.
- Sarana Perekonomian, sarana perdagangan/pasar dan pertanian.

Sumber Daya Manusia, tingkat kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan pengangguran.

### **Kecamatan Lebaksiu**

Program peningkatan pelayanan kecamatan Lebaksiu untuk capaian kinerja Desa berkembang Sangat Tinggi, sedangkan Desa Mandiri capaian kinerja Sangat Rendah. Untuk mencapai atau meningkatkan status desa dari desa tertinggal menjadi desa berkembang dari desa berkembang menjadi desa maju. Dapat dinilai dari ;

- Infrastruktur jalan, sejauh mana infrastruktur jalan yang ada dapat memperlancar usaha perekonomian masyarakat.
- Sarana Pendidikan, sarana yang ada dapat meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
- Sarana Kesehatan, sarana yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Sarana Pertanian, sarana dapat meningkatkan hasil pertanian.

### **Kecamatan Margasari**

Program peningkatan pelayanan Kecamatan Margasari untuk capaian kinerja Desa Berkembang Sangat Tinggi dari target 10 desa terealisasi 11 desa. Sedangkan untuk Desa Berkembang capaian kinerja Sedang dari target 3 desa terealisasi 2 Desa. Penentuan kategori tersebut didasarkan pada kondisi desa dan indikator dalam IDM antara lain ;

- Pembangunan infrastruktur
- Peningkatan SDM
- Pemanfaatan SDA
- Perekonomian

Adapun desa yang termasuk dalam kategori desa Mandiri antara lain desa Margasari dan Jembayat, hal ini didasarkan pada :

- Infrastruktur hampir merata ke seluruh wilayah
- Tingkat pendidikan masyarakat
- Tingkat kesadaran membayar pajak

Desa-desa yang termasuk dalam kategori berkembang antara lain ; desa prupuk selatan, kaligayam, dukuh tengah, wanasari, danaraja, pakulaut, kalisalak, karangdawa, jatilava, prupuk utara, marga ayu, hal ini didasarkan pada ;

- Tingkat SDM atau pendidikan masyarakat masih rendah
- Tingkat perekonomian
- Sarana atau infrastruktur masih kurang



Namun demikian, berupaya maksimal untuk meningkatkan srata desa dari berkembang menjadi mandiri, yaitu desa kaligayam dimana desa ini sudah memiliki BUMDES yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa.

### **Kecamatan Pagerbarang**

Program peningkatan pelayanan Kecamatan Pagerbarang untuk capaian kinerja Desa Berkembang Sangat Tinggi, dari Target 13 desa terealisasi 13 Desa. Fasilitas sarana dan prasarana umum pada 13 desa di wilayah kecamatan pagerbarang relatif sama. Hanya ada sedikit perbedaan, terutama pada sarana dan prasarana pendidikan SMPN 1 yang berada di desa Randusari, SMPN 2 di desa Sidomulyo, SMA N Pagerbarang di desa pagerbarang. Sedangkan sarana dan prasarana kesehatan berupa puskesmas berada di desa randusari. Dengan keberadaan fasilitas sarana dan prasarana umum lainnya secara merata ada di setiap desa, berupa TK, SD maupun dibidang kesehatan berupa puskesmas pembantu pada tiap desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dari aspek pendidikan dan kesehatan. Meski demikian hal ini perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kriteria desa menjadi desa mandiri.

Peningkatan kriteria desa menjadi desa mandiri mutlak diperlukan selaras dengan perkembangan zaman serta pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat yang pada akhirnya berkembang pula kebutuhannya. Sedangkan dari segi mikro adalah perlunya menanamkan kesadaran diri dan komitmen organisasi pemerintahan desa agar tumbuh kesadaran bagi mereka untuk memberikan kemajuan desanya. Selain itu diperlukan upaya yang sinergis dari stakeholder atau OPD terkait berupa pendampingan, penyuluhan, pemberian pelatihan/diklat/workshop, monitoring, evaluasi hingga pengawasan.

### **Kecamatan Pangkah**

Program peningkatan pelayanan Kecamatan Pangkah untuk capaian kinerja Desa Berkembang Sangat Tinggi dari Target 17 desa terealisasi 20 desa. Untuk Desa Mandiri Capaian kinerja Sangat Rendah dari target 6 desa terealisasi 3 Desa. Untuk mencapai atau meningkat status desa dari desa tertinggal menjadi desa berkembang dari desa berkembang menjadi desa mandiri dapat dinilai dari :

- Infrastruktur Jalan, yang ada dapat memperlancar usaha ekonomi masyarakat
- Sarana Pendidikan, yang ada dapat meningkatkan taraf pendidikan masyarakat
- Sarana Kesehatan, dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- Sarana Pertanian. Dapat meningkatkan hasil pertanian yang menghidupi masyarakat.

### **Kecamatan Slawi**

Program peningkatan pelayanan Kecamatan Slawi untuk capaian kinerja Desa Mandiri Sangat Tinggi, dari Target 5 Desa realisasi. Penentuan status tersebut didasarkan antara lain ;

- Infrastruktur

- Sarana transportasi, sarana penghubung antar desa, kecamatan dan daerah lain.
- Sarana Kesehatan, sarana yang ada di puskesmas dan aktivitas posyandu.
- Sarana Pendidikan, sarana dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi.
- Sarana Perekonomian, sarana perdagangan/pasar dan pertanian.
- Sumber Daya Manusia, tingkat kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan pengangguran.

### **Kecamatan Suradadi**

Program peningkatan pelayanan Kecamatan Suradadi untuk capaian kinerja Desa Berkembang dan Desa Mandiri terealisasi 7 desa dan 4 Desa dari Target 7 dan 4 Desa. Desa mandiri yaitu desa suradadi dimana perkembangan desa dekat dengan kesehatan dan fasilitas pendidikan dan ada kantor wilayah kecamatan suradadi, antara lain Bank BNI dll. Kehidupan desa sangat maju dari pola pilar kehidupan sangat maju wilayahnya seperti mempunyai berbagai pembangunan sanitasi dan bangunan yang baik.

Desa berkembang dimana desanya masih dalam pembangunan dan mempunyai fasilitas kesehatan (puskesmas) dan infrastruktur pendidikan yang baik dan SDM tingkat pendidikan yang maju sesuai dari SD, SMP, SMA sudah baik. Dana desa alokasi yang dikelola dengan benar dan mengandalkan pembangunan dan ketrampilan.

### **Kecamatan Talang**

Program peningkatan pelayanan Kecamatan Jatinegara untuk capaian kinerja Desa Berkembang dan Desa Mandiri Sangat Tinggi, dari Target 17 dan 2 Desa terealisasi 17 dan 2 Desa. Penentuan status tersebut didasarkan antara lain ;

- Infrastruktur
- Sarana transportasi, sarana penghubung antar desa, kecamatan dan daerah lain.
- Sarana Kesehatan, sarana yang ada di puskesmas dan aktivitas posyandu.
- Sarana Pendidikan, sarana dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi.
- Sarana Perekonomian, sarana perdagangan/pasar dan pertanian.
- Sumber Daya Manusia, tingkat kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan pengangguran.

### **Kecamatan Tarub**

Program peningkatan pelayanan Kecamatan Tarub untuk capaian kinerja Desa Berkembang dan Desa Mandiri capaian kinerja tahun 2021 Semester I terealisasi 17 dan 3 Desa dari Target 17 dan 3 Desa. Untuk mencapai peningkatan desa tersebut perlu adanya pemenuhan variabel dan indikator yaitu

- Variabel Kesehatan adanya indikator tempat puskesmas
- Variabel Pendidikan adanya PAUD, PKBM, dan TBM

- Variabel modal sosial adanya gotong royong masyarakat, ruang publik, lapangan olahraga, dan kelompok olahraga
- Variabel pemukiman adanya sumber air mineral, air minum penduduk, jamban keluarga dan tempat pembuangan sampah

### Kecamatan Warureja

Program peningkatan pelayanan Kecamatan Warureja untuk capaian kinerja Desa Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Mandiri capaian kinerja tahun 2021 Semester I terealisasi 0, 9, dan 2 Desa dari Target 0, 7, dan 5 Desa. Desa tertinggal karena, SDM masyarakat rendah serta sarana prasarana belum sesuai yang diharapkan dan tingkat pendidikan masyarakat rendah. Desa berkembang, SDM masyarakat sudah mulai maju dan tingkat pendidikan sudah menengah ke atas. Desa maju, SDM masyarakat sudah tinggi dan sarana dan prasarana sudah baik.



Upaya untuk meningkatkan status desa dari desa tertinggal ke desa berkembang, maka harus perlu di tingkatkan perbaikan sarana dan prasarana desa serta SDM masyarakat perlu ditingkatkan dengan cara pendidikan.

## B. PENGAWASAN

### 1. Penyelenggaraan Pengawasan

Capaian kinerja pada Penyelenggaraan Pengawasan antara lain:

**Tabel 2. 306 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKP	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proram Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase penyelesaian LHP	%	95,00	91,00	91,00	100,00		INSPEKTORAT
		Presentase APIP memiliki sertifikasi keahlian	%	25,58	13,63	14,00	102,71		



Sumber :Inspektorat Kab. Tegal, 2022

Pada program penyelenggaraan pengawasan melaksanakan dua indikator kinerja program yaitu Persentase penyelesaian LHP dengan tingkat capaian sebesar 100% dan Persentase APIP memiliki sertifikasi keahlian dengan tingkat capaian sebesar 120,38% dengan rata – rata tingkat capaian sebesar 110,19%.

### 2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi

Capaian kinerja pada Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi antara lain:

**Tabel 2. 307 Capaian Kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi	Persentase OPD yang tercapai IKUnya	Jumlah	90,00	60,00	62,50	104,17		INSPEKTORAT
		Persentase OPD berpredikat WBK/WBBM	%	34,00	21,00	2,00	9,52		

Sumber : Bappedalitbang Kab. Tegal, 2022




Pada program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi melaksanakan dua indikator kinerja program yaitu Persentase OPD yang tercapai IKUnya dengan tingkat capaian 104,17% dan Persentase OPD berpredikat WBK/WBBM dengan tingkat capaian 9,52%. Hal ini dikarenakan Pada tahun 2021 penentuan target sesungguhnya menggunakan presentase yaitu sebesar 4,2 % atau sejumlah 2 OPD. Adapun target yang tertulis pada RPJMD (Permendagri 90) sejumlah 21 OPD dengan maksud jumlah OPD tersebut merupakan obyek sosialisai bukan objek yang dinilai.

## C. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

### 1. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, *top-down* & *bottom-up*. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan adalah untuk mengendalikan kesesuaian rencana dan realisasi kegiatan dan mengevaluasi capaian indikator pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui pengendalian operasional kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan serta evaluasi kinerja pembangunan. Adapun pencapaian penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan seperti tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 308 Capaian Kinerja Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	%	100,00	100	100	100,00		<b>BAPPEDALITBANG</b>
		Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi kegiatan	%	90,00	86	86	100,00		
		Tingkat ketercapaian indikator pembangunan sesuai target	%	85,00	86	85	98,84		

Sumber : Bappedalitbang Kab. Tegal, 2022



Pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah memiliki tiga indikator program dengan capaian kinerja sebagai berikut :

- Presentase dokumen perencanaan disusun sesuai tahapan merupakan salah satu indikator program diatas dengan realisasi capaian kinerja mencapai 100 % atau dengan tingkat capaian 100 % dari target yang telah ditetapkan yaitu 100%.
- Realisasi capaian kinerja program untuk indikator Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi pembangunan mencapai 86% dengan tingkat kinerja 98,85% dari target yang ditentukan yaitu 87%.
- Realisasi capaian kinerja Tingkat ketercapaian indikator pembangunan sesuai target mencapai 85% dengan tingkat capaian program sebesar 99% dari target yang ditetapkan yaitu 86%.

## **2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Perencanaan yang baik dan selaras antara dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD dan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renja OPD daerah yang baik sesuai dengan harapan masyarakat. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah untuk menghasilkan keselarasan dokumen RKPD dengan Renja OPD, dengan keselarasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil pembangunan daerah di kabupaten Tegal. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perangkat daerah sesuai tahapan dapat dilihat dalam tabel dibawah.

**Tabel 2. 309 Capaian Kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<b>PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Pemkesos dengan Dokumen Perencanaan OPD Rumpun Pemkesos	%	97,00	97	86	88,66		BAPPEDALITBANG
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Ekbangtur dengan Dokumen Perencanaan OPD Rumpun Ekbangtur	%	97,00	97	95,50	98,45		

Sumber : Bappedalitbang Kab. Tegal, 2022

Pada program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah memiliki dua indikator program dengan capaian kinerja sebagai berikut :







- a) Presentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Pemkesos dengan Dokumen Perencanaan OPD Rumpun Pemkesos dengan realisasi yang masih tinggi yaitu 86% dengan tingkat capaian program 88,66% dari target yang telah ditentukan yaitu 97%.
- b) Presentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Ekbangtur dengan Dokumen Perencanaan OPD Rumpun Ekbangtur dengan realisasi yang masih tinggi yaitu 95,50% dengan tingkat capaian program 98,45% dari target yang telah ditentukan yaitu 97%.

## **D. KEUANGAN**

### **1. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Capaian kinerja pada Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

**Tabel 2. 310 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	%	100,00	100,00	100,00	100,00		BPKAD
		Persentase kualitas DPA yang sesuai ketentuan	%	95,00	75,00	75,00	100,00		
		Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
		Persentase ketersediaan Dana Kasda terhadap anggaran Kas	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
		Persentase Ketepatan waktu Perda Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
		Persentase OPD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	%	100,00	100,00	100,00	100,00		

Sumber : BPKAD Kab. Tegal, 2022

Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan enam indikator program, yaitu persentase ketepatan waktu penyusunan APBD, Persentase kualitas DPA yang sesuai ketentuan, Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu, Persentase ketersediaan Dana Kasda terhadap anggaran Kas, Persentase Ketepatan waktu Perda Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Persentase OPD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP dengan tingkat capaian indikator program sebesar 100%.

## 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Perda No 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD terdiri dari 11 Jenis/bentuk Pengelolaan yang meliputi Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan,

Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

**Tabel 2. 311 Capaian Kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase OPD yg telah mengelola BMD yang baik dan benar	%	95,00	70,00	70,00	100,00		BPKAD




Sumber : BPKAD Kab. Tegal, 2022

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan satu indikator program, yaitu Persentase OPD yg telah mengelola BMD yang baik dan benar dengan rata-rata capaian indikator program sebesar 100%.

### 3. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Capaian kinerja pada Pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain:

**Tabel 2. 312 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>								BAPPENDA
		Persentase Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan	%	100,00	100,00	75,00	75,00		
		Persentase hasil penagihan Pajak PBB dan BPHTB yang tertagih	%	100,00	100,00	98,00	98,00		
		Persentase hasil penagihan Pajak Non PBB dan	%	100,00	100,00	97,85	97,85		



NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
		BPHTB yang tertagih							

Sumber : Bapenda Kab. Tegal, 2022


Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan tiga indikator program yaitu Persentase Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan, Persentase hasil penagihan Pajak PBB dan BPHTB yang tertagih, Persentase hasil penagihan Pajak Non PBB dan BPHTB yang tertagih dengan tingkat capaian indikator program sebesar 100%.

## E. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

### 1. Penelitian dan Pengembangan Daerah

Fungsi penelitian dan pengembangan terintegrasi dengan fungsi perencanaan pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan agar hasil-hasil dari penelitian dan pengembangan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan.

**Tabel 2. 313 Capaian Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Peneliti Dan Pengembangan Daerah	Persentase produk kelitbangan yang termanfaatkan dalam pembangunan daerah	%	100,00	88,57	85,71	96,77		BAPPEDALITBANG

Sumber : Bappedalitbang Kab. Tegal, 2022

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan indikator program yaitu persentase produk kelitbangan yang termanfaatkan dalam pembangunan daerah dengan tingkat capaian sebesar 96,77%.





## G. KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

### 1. Kepegawaian Daerah

Dengan Program Kepegawaian Daerah diharapkan persentase ASN mendapatkan hukuman disiplin akan menurun secara signifikan, persentase jabatan structural

terisi sesuai dengan kompetensinya, persentase jabatan fungsional (non guru dan kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya, rasio pegawai dengan pendidikan perguruan tinggi dan menengah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, rasio pegawai fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, persentase PNS yang mengikuti diklat teknis 20 jam/tahun, dan persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan akan bertambah secara signifikan.

**Tabel 2. 314 Capaian Kinerja Program Kepegawaian Daerah**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase jabatan JPT Pratama, Administrator dan Pengawas teisi	%	96,00	95,50	93,15	97,54		BKD
		Persentase jabatan fungsional non guru/ kesehatan terisi	%	2,77	2,77	2,96	106,77		
		Persentase JPT Pratama, dan Administrasi yang diuji kompetensinya	%	13,68	13,68	14,41	105,32		
		Persentase PNS mendapatkan hukuman disiplin	%	0,52	0,52	0,25	152,29		

Sumber : BPK SDM Kab. Tegal, 2022




Pada Kepegawaian Daerah ada lima indikator program yaitu indikator program Persentase jabatan JPT Pratama, Administrator dan Pengawas terisi mencapai tingkat capaian indikator program sebesar 97,54%, Adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi salah satunya dengan melakukan pengangkatan penyetaraan jabatan fungsional terhadap 214 pejabat administrator dan pengawas yang dilakukan pelantikan dan pengukuhan pada tanggal 31 Desember 2021 menyebabkan masih terdapat jabatan administrator dan pengawas yang belum terisi sejumlah 35 formasi. Indikator program Persentase jabatan fungsional non guru atau kesehatan terisi mencapai tingkat capaian indikator program sebesar 106,77%, Pengangkatan jabatan fungsional dilakukan melalui mekanisme inpasing serta perpindahan jabatan bagi PNS dan pengangkatan pertama karena formasi pengadaan pegawai pada seleksi CPNS tahun 2019 merupakan factor penting. Indikator Program Persentase JPT Pratama, dan Administrasi yang diuji kompetensinya mencapai tingkat capaian indikator program sebesar 105,32%, PNS yang menduduki JPT Pratama, dan Administrasi dilakukan uji kompetensi melalui PCAP (*Position Competencies Assesment Program*) bagi JPT Pratama, Penelusuran kader potensial (*Talent Scouting*) bagi Pejabat Administrator,

Pengawas dan Pelaksana, dan uji kompetensi tingkat sederhana atau SAP (*Simple Assesment Program*) bagi jabatan pelaksana. Indikator Program Persentase SIM kepegawaian yang terintegrasi mencapai tingkat capaian indikator program sebesar 50%, hal ini dikarenakan SIM kepegawaian yang telah diintegrasikan dengan SIMPEG adalah presensi berbasis android. Presensi berbasis android saat ini sedang dalam tahap uji coba dan akan diterapkan di tahun 2022. Dan indikator program Persentase PNS mendapatkan hukuman disiplin mencapai tingkat capaian indikator program sebesar 152,29%, hal ini merupakan ASN Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. *Reward and Punishment* yang terus diterapkan Pemda dalam manajemen ASN turut berperan dalam mengurangi pelanggaran-pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh ASN Pemkab Tegal.

## 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Capaian kinerja pada Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain:

**Tabel 2. 315 Capaian Kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2021		Tingkat Capaian RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Persentase PNS mengikuti pelatihan kepemimpinan dan mendapatkan STTPL	%	5,62	5,62	3,21	57,12		BKD
		Persentase pejabat fungsional non pendidikan dan non pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional dan mendapatkan sertifikasi	%	4,34	4,34	4,50	103,69		
		Persentase CPNS mengikuti pelatihan dasar/ prajabatan sesuai dengan peraturan	%	100,00	100,00	60,73	60,73		

Sumber : BPK SDM Kab. Tegal, 2022

Pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ada tiga indikator program yaitu indikator program Persentase PNS mengikuti pelatihan kepemimpinan dan mendapatkan STTPL dengan tingkat capaian indikator program sebesar 57,12%, dikarenakan Masih banyaknya pejabat yang belum mengikuti Diklatpim merupakan salah satu permasalahan tersendiri karena dibutuhkan pendanaan yang cukup besar untuk biaya pengiriman peserta belum termasuk adanya promosi pejabat baru. Selain itu salah satu dimensi Indeks Profesionalitas ASN adalah pejabat yang telah mengikuti Diklatpim. Indikator program Persentase

pejabat fungsional non pendidikan dan non pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional dan mendapatkan sertifikasi dengan tingkat capaian indikator program sebesar 103,69%, hal ini Diklat fungsional dalam masa pandemic Covid-19 ini dilaksanakan secara *daring/online*. Adapun dilat yang diselenggarakan adalah diklat dalam rangka kenaikan jenjang jabatan fungsional. Dan indikator program Persentase CPNS mengikuti pelatihan dasar atau prajabatan sesuai dengan peraturan dengan tingkat capaian indikator program sebesar 60,73%, Terdapat 494 CPNS formasi tahun 2019 yang diangkat pada tahun 2021 yang harus diberikan pelatihan dasar dalam masa percobaan satu tahun. Oleh karena itu mulai tahun 2021 pemerintah daerah mulai melaksanakan pelatihan dasar bagi 300 CPNS dan 194 CPNS akan diberikan pelatihan dasar pada tahun 2022.

## **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu untuk menentukan langkah yang tepat dimasa depan. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan atau mempengaruhi pencapaian visi-misi RPJMD.

### **2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

#### **A. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Pemerintahan**

Penyelenggaraan pemerintah semakin mendapatkan tantangan yang cukup besar. Saat ini tranformasi digital telah masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat tidak terkecuali pada layanan pemerintah kepada masyarakat. Era digital saat ini menuntut penyelenggaraan pemerintah harus dapat diakses oleh masyarakat di mana saja dan kapan saja tidak terbatas ruang dan waktu. Maka tantangan penyelenggaraan pemerintahan adalah bagaimana memberikan pelayanan public yang semakin transparan, cepat dan efektif. Tantangan tersebut mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal perlu mengakselerasi perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau dapat dimaknai sebagai layanan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK. Namun dalam penerapan SPBE tersebut muncul beberapa kendala khususnya dengan adanya silo-silo system yang tidak terintegrasi mengingat banyak OPD membangun aplikasi pemerintahan sendiri-sendiri. Setidaknya di tahun 2021 baru 35% system layanan online Perangkat Daerah yang terintegrasi. Hal menjadi salah satu penyebab capaian indeks SPBE Kabupaten Tegal belum optimal. Capaian indeks SPBE tahun 2021 sebesar 2,55 dan masih perlu diakselerasi setidaknya agar dapat melampaui nilai 2,6 di tahun 2025 sebagaimana target nasional. Untuk memaksimalkan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal diperlukan infrastruktur (sarana dan prasarana) dan sumber daya manusia (ASN) yang berkualitas. Untuk itu kualitas dan profesionalitas ASN perlu ditingkatkan. Dengan diterapkannya SPBE secara

optimal akan mendorong peningkatan kinerja pembangunan, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan mendorong efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

## **B. Terbatasnya Daya Saing Sumberdaya Manusia**

Kualitas SDM Kabupaten Tegal masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maupun eks Karisidenan Pekalongan. Capaian IPM Kabupaten Tegal di tahun 2021 mencapai 68,79 masuk kategori 3 Kabupaten/Kota terendah di wilayah eks Karisidenan Pekalongan bersama Kabupaten Brebes dan Pemalang. Rendahnya kualitas SDM Kabupaten Tegal dipengaruhi khususnya oleh kualitas Pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

- **Kualitas Pendidikan**  
Masalah pendidikan di Kabupaten Tegal yang perlu segera ditangani saat ini adalah relative tingginya angka putus sekolah. Angka putus sekolah siswa SD/ sederajat mencapai 0,03%, angka putus sekolah siswa SMP/ sederajat mencapai 0,41%. Relatif tingginya angka putus sekolah tidak hanya disebabkan oleh masalah sektor Pendidikan saja seperti kurangnya fasilitas pendidikan, faktor lokasi jauhnya jarak sekolah, minat sekolah dan sebagainya, namun dipengaruhi oleh faktor tuntutan ekonomi untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat khususnya menagai angka putus sekolah, tidak bisa ditangani oleh Dinas Pendidikan saja namun sektor-sektor lainnya perlu terlibat.
- **Kualitas Kesehatan Masyarakat**  
Masalah Kesehatan yang cukup serius dihadapi Kabupaten Tegal saat ini adalah masih tingginya kasus stunting di Kabupaten Tegal. Kasus stunting pada bayi dibawah lima tahun (balita) meskipun trennya relative menurun dari 14,88% di tahun 2019 menjadi 12,02% di tahun 2021, namun jika dilihat jumlah absolutnya bisa dikatakan masih cukup tinggi. Lebih parah lagi kasus stunting pada bayi di bawah dua tahun (baduta) trennya semakin meningkat dimana tahun 2019 mencapai 9,74% dan meningkat menjadi 12,02% di tahun 2021. Relatif tingginya kasus stunting pada balita dan baduta menunjukkan bahwa kualitas dan atau asupan gizi masyarakat masih relative rendah. Jika dilihat secara menyeluruh, tingginya kasus stunting dipengaruhi oleh kurangnya antisipasi resiko potensi stunting secara dini dan kurang optimalnya penanganan 1000 hari pertama kelahiran. Untuk itu stunting harus menjadi masalah lintas sektoral yang perlu kerjasama lintas sektoral dalam penanganannya baik untuk program yang sifatnya sensitive (berbasis resiko) dan program spesifik pada 1000 hari kehidupan pertama mulai saat ibu hamil hingga anak minimal sampai usia 2 tahun.

## **C. Ketimpangan Gender**

Seringkali hasil pembangunan menghasilkan ketimpangan dalam perspektif gender. IPG kabupaten Tegal tahun 2021 mencapai 87,53 naik dari tahun sebelumnya (2020) yang sebesar 86,79. Kondisi ini masih menunjukkan ketimpangan hasil pembangunan yang lebih dinikmati oleh laki-laki ketimbang perempuan. Selain itu Kabupaten Tegal sedang menikmati bonus demografi. Usia produktif Kabupaten Tegal tahun 2021 mencapai 69,18% atau sejumlah 1,113 juta jiwa berusia produktif. Jika bonus demografi

tidak termanfaatkan dan terkelola dengan baik dapat berdampak negatif khususnya semakin tingginya angka pengangguran khususnya pada kaum perempuan yang sering termarginalkan pada hampir seluruh lapangan kerja, yang akhirnya akan menambah ketimpangan pembangunan gender di Kabupaten Tegal. Untuk itu bonus demografi perlu dimanfaatkan dan dikelola agar penduduk usia produktif mampu terserap lapangan kerja maupun menciptakan lapangan kerja sendiri.

#### **D. Peningkatan Jangkauan Layanan Infrastruktur**

Kondisi infrastruktur di Kabupaten Tegal menunjukkan tren yang semakin baik selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, 71% jalan kabupaten berkondisi baik dan 17% rusak. Jembatan dengan kondisi baik menunjukkan angka yang hampir sama, sebesar 70%. Jaringan irigasi kabupaten yang berada dalam kondisi baik terdapat 60%. Selanjutnya, layanan jaringan air bersih sudah menjangkau 63% penduduk kabupaten. Sementara, 100% desa di Kabupaten Tegal sudah bebas buang air besar sembarangan, meskipun masih terdapat 6,38% penduduk yang memiliki jamban yang belum layak. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah layanan persampahan, dimana tren tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun (80% sampah terangkut pada 2021; turun dari 98% pada 2019).

Meskipun tren layanan dan jangkauan infrastruktur semakin baik, tetapi tingkat layanannya masih perlu ditingkatkan karena layanan infrastruktur akan mendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan jasa. Infrastruktur yang mantap merupakan kewajiban pemerintah karena sifat investasinya yang membutuhkan biaya awal besar dan bersifat non-eksklusif dimana setiap orang bebas menggunakan tanpa harus membayar. Kedua karakter ini menjadikan sektor swasta kurang berminat dalam penyediaan infrastruktur, sehingga pemerintah harus melakukan intervensi untuk melayani masyarakat.

Kualitas jalan dan jembatan yang baik menjadi prioritas pembangunan karena kedua infrastruktur tersebut merupakan konektor utama antarwilayah. Pergerakan barang dan jasa sangat bergantung pada jalan dan jembatan. Untuk itu, target akhir yang akan dicapai adalah jalan kabupaten bebas lubang.

Layanan air bersih juga akan ditingkatkan jangkauan layanannya. Pemkab Tegal akan berkolaborasi dengan stakeholder lain melalui beberapa program seperti Pamsimas dan ekstensifikasi jaringan PDAM dengan anggaran APBN. Air yang bersih akan secara langsung berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat dan mengurangi stunting di Kabupaten Tegal. Sektor kesehatan juga akan sangat didukung oleh kualitas jamban yang baik. Oleh karenanya, Pemkab Tegal akan mengusahakan agar seluruh penduduk memiliki jamban yang layak.

Infrastruktur lain yang akan diprioritaskan penanganannya adalah jaringan persampahan. Total sampah yang terangkut (menurun dari 99% pada tahun 2020 menjadi 80,04% pada tahun 2021) menunjukkan bahwa Pemkab Tegal menghadapi risiko timbunan sampah yang besar, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat, selain menimbulkan polusi bau dan visual. Pada dasarnya, strategi yang akan dilakukan adalah pengurangan produksi sampah, pemilahan sampah, dan peningkatan efektivitas pengolahan sampah di TPA. Dua strategi pertama akan dilakukan dengan Program Desa Merdeka Sampah yang dilakukan di tiap desa. Dengan program tersebut, target yang ingin dicapai adalah pengurangan timbunan sampah dan

meningkatnya *reuse* dan *recycle* sampah. Peningkatan efektivitas pengolahan sampah di TPA akan dilakukan utamanya dengan penambahan buldozer sampah (sewa buldozer dan perbaikan buldozer), serta perawatan dan peremajaan armada pengangkut sampah. Pemkab Tegal juga akan melakukan peninjauan kemungkinan penambahan TPA, mengingat saat ini hanya satu yang dimiliki (TPA Penujah) dan lokasinya berada di bagian selatan kabupaten. Dengan penambahan TPA, maka ritasi pengambilan sampah akan semakin cepat.

#### **E. Pemulihan Perekonomian Saat Dan Pasca Pandemi Covid-19**

Pandemi covid-19 memberikan *shock* pada perekonomian Kabupaten Tegal. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar pada perekonomian (industri pengolahan [0,66%], perdagangan [-4,20%], dan jasa [-7,70%]) mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020. Sektor yang masih memberikan pertumbuhan yang positif adalah sektor pertanian (2,18%), walaupun tren kontribusinya terus menurun. Di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal memberikan angka yang positif baik kumulatif (3,72%) ataupun sektoral (kecuali sektor administrasi pemerintahan) yang menunjukkan bahwa kondisi perekonomian mulai pulih. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal masih belum menyamai kondisi awal pada masa pra-covid dan belum dapat mencapai target yang ditetapkan pada RPJMD.

Untuk itu, perlu dilakukan upaya guna mempercepat pemulihan ekonomi Kabupaten Tegal. Intervensi kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal akan berfokus pada sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, dengan pertimbangan bahwa ketiga sektor tersebut merupakan sektor yang memberikan kontribusi signifikan, bersifat padat karya, dan performa pemulihannya pada masa pandemi kurang begitu signifikan (di bawah performa sektor jasa). Sementara, sektor jasa juga tidak akan ditinggalkan, meskipun Pemkab Tegal akan lebih berfokus pada aspek regulasi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor ini.

Di sisi lain, iklim investasi di Kabupaten Tegal perlu ditingkatkan agar lebih baik. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tegal 2012-2022, kawasan peruntukan industri ditetapkan pada kawasan pantura (Kecamatan Kramat, Suradadi, Warureja) dan Kecamatan Margasari. Sementara, industri yang berbasis padat karya cenderung mencari lokasi yang dekat dengan kantong penduduk serta memiliki kondisi alam yang baik (kawasan pantura kurang disukai karena korosif). Untuk itu, revisi RTRW perlu mendapat prioritas untuk diselesaikan. Selain itu, UMKM yang ada di Kabupaten Tegal juga perlu dikembangkan, karena data pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan tumbuh dengan stabil, dan ketika covid hanya sedikit mengalami guncangan. Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah pemberian layanan prima pada aspek layanan publik, khususnya perijinan investasi. Oleh karenanya, Mall Pelayanan Publik perlu diakselerasi kuantitas dan kualitas layanannya.

#### **F. Pengentasan Kemiskinan**

Kemiskinan menjadi satu hal yang menjadi prioritas untuk diatasi oleh Pemkab Tegal. Walaupun indikator kemiskinan seperti prosentase penduduk miskin (8,60%), indeks P1 (1), dan indeks P2 (0,19) Kabupaten Tegal relatif lebih baik dibandingkan dengan rerata di Provinsi Jawa Tengah, namun jumlah absolut penduduk miskin yang ada menunjukkan angka lebih dari 123.000 penduduk. Di Kabupaten Tegal juga terdapat

25 desa yang termasuk dalam lokasi kemiskinan ekstrim yang perlu mendapat perhatian lebih. Pandemi covid-19 juga memberikan dampak pada masyarakat miskin, dimana cakupan perlindungan dan jaminan sosial turun dari 83,28% di tahun 2020 menjadi 36,79% di tahun 2021. Kawasan kumuh juga masih terdapat di Kabupaten Tegal, yaitu seluas 314,77 hektar. Indikator lain adalah rumah tidak layak huni (RTLH) yang banyak terdapat di Kabupaten Tegal. Dari 42.675 RTLH yang ada, hingga akhir tahun 2021 baru 14,67% yang tertangani. Selanjutnya, indikator yang memiliki tren kurang bagus adalah pengangguran. Kondisi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal relatif selalu mengalami peningkatan (9,97% pada tahun 2021), dan *gap* dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional cenderung melebar.

Untuk mengentaskan kemiskinan, Pemkab Tegal akan memfokuskan intervensi yang dilakukan pada desa yang masuk dalam kategori desa dengan kemiskinan ekstrim. Sementara, beberapa program akan dilaksanakan seperti rehab RTLH, penanganan kumuh melalui KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), dan Wirausaha Pemuda. Pemkab Tegal juga akan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Desa, sektor swasta, dan pihak-pihak lain mengingat pengentasan kemiskinan membutuhkan usaha dari berbagai pihak dengan biaya yang besar.

Rehab RTLH, selain dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Tegal, juga akan dipadukan dengan dana dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBDes, dan CSR pihak swasta. Rumah yang layak tidak hanya akan mengentaskan kemiskinan, tetapi juga berpengaruh positif pada aspek kesehatan masyarakat. Selain itu, rehab RTLH juga akan mengurangi luasan kawasan kumuh di Kabupaten Tegal. Penanganan kawasan kumuh dilakukan utamanya melalui kerjasama dengan KOTAKU. Kerjasama sudah dilaksanakan selama sekitar tujuh tahun sejak program KOTAKU pertama kali dicanangkan, dan Pemkab Tegal berkomitmen untuk terus melanjutkan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik.

Program unggulan lain yang akan dilaksanakan adalah program Wirausaha Pemuda yang akan memasuki tahun keempat. Pemkab Tegal berkomitmen untuk memberikan pelatihan usaha, manajemen, dan bantuan modal bagi wirausaha pemuda yang ada di Kabupaten Tegal. Diharapkan, wirausaha-wirausaha di Kabupaten Tegal akan dapat berkembang dan mandiri, bahkan membuka kesempatan kerja baru. Pada akhirnya, hasil akhir yang dituju adalah pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tegal.

## **G. Pengangguran**

Angka pengangguran di Kabupaten Tegal cukup tinggi dan relatif meningkat dari 9,82% di tahun 2020 menjadi 9,97% di tahun 2021 sebagai dampak Covid-19. Masalah pengangguran jika tidak segera ditangani dapat meledak ditengah-tengah bonus demografi dengan tingginya usia produktif saat ini. Jika dilihat profil pengangguran dimana banyak anak lulusan SMK dan Perguruan Tinggi (PT) yang menganggur maka perlu disediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan karakter Pendidikan yang ada. Untuk itu perlu dibuka investasi secara luas yang mampu menyerap tenaga kerja yang kualifikasi dan keahliannya sesuai dengan lulusan SMK dan PT. Namun perluasan Investasi saat ini masih terkendala oleh payung regulasi yang belum pasti. Perubahan Perda RTRW yang sampai saat ini belum juga tuntas menyisakan permasalahan realisasi dan tumbuhnya investasi khususnya yang berskala besar di Kabupaten Tegal. Untuk itu



maka Perubahan Perda RTRW perlu segera dituntaskan sebagai pintu masuk untuk menarik investor domestik maupun internasional. Bersamaan dengan itu perlu disiapkan tenaga kerja yang memiliki 10 *soft skill* era Revolusi Industri Generasi Keempat dan memiliki *hard skill* penguasaan teknologi.

## **H. Potensi Bencana**

Kabupaten Tegal tidak asing dengan bencana. Cukup banyak daerah rawan bencana di Kabupaten Tegal yang mengancam hidup masyarakat di dalamnya. Setidaknya pada tahun 2021 terdapat 584.336 jiwa penduduk Kabupaten Tegal yang hidup di Kawasan rawan bencana. Sementara dari seluruh penduduk yang tinggal di Kawasan rawan bencana baru 68,42% yang terakses informasi terhadap potensi bencana yang dihadapi. Jika dilihat dari jenis bencananya, bencana banjir, tanah bergerak/longsor adalah bencana yang frekuensinya paling sering terjadi khususnya di tahun 2021. Setiap musim hujan dengan curah hujan tinggi hampir selalu menimbulkan banjir dan tanah longsor secara bersamaan. Tingginya potensi banjir dan tanah longsor sangat disebabkan oleh drainase yang buruk, kondisi dan fungsi sungai yang rusak serta tingginya bukaan/alih fungsi lahan di daerah resapan. Untuk mengantisipasinya maka upaya preventif perlu didahulukan, tidak sebatas hanya edukasi mitigasi bencana saja, namun penyediaan drainase yang baik, perlindungan kawasan resapan air, dan normalisasi sungai juga diperlukan. Oleh karena itu penanganan bencana perlu dikonsolidasikan dan dilaksanakan lintas sektoral.

## **I. Perlindungan Budaya dan Kearifan Lokal**

Kabupaten Tegal kaya akan budaya dan kearifan lokal, namun masih menyisakan beberapa masalah di dalamnya. Selain hingga tahun 2021 baru 63,12% budaya dan tradisi yang dikembangkan, juga perlindungan secara hukum terhadap budaya dan tradisi yang belum optimal. Saat ini Pemerintah Pusat sedang gencar menggalakkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Semua Pemerintah Daerah didorong untuk mencatatkan dan mendaftarkan Kekayaan Intelektual yang ada di daerahnya. Berbagai jenis budaya dan kearifan lokal yang unik di Kabupaten Tegal perlu untuk dilindungi melalui pencatatan dan/atau pendaftaran HKI nya, terutama yang berupa Indikasi Geografis maupun Cipta Komunal yang telah turun menurun ada di Kabupaten Tegal. Oleh karena itu perlu diidentifikasi misalnya Kopi atau Buah khas Kabupaten Tegal yang bisa perlu dilindung maupun produk budaya seperti Tari Topeng, Wayang Tutus, Naskah Rembang dan lain sebagainya yang perlu dilindungi HKI-nya melalui cipta komunal Kabupaten Tegal.

### **2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

Mendasarkan berbagai capaian kinerja pembangunan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Tegal, maka permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2022 dapat dirumuskan sebagai berikut :

### **2.3.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

#### **A. Pendidikan**

- Tingkat Partisipasi warga Negara 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD masih perlu ditingkatkan
- Mutu layanan pendidikan masyarakat belum optimal
- Kurikulum lokal yang berkualitas belum diimplementasikan dengan optimal
- Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan belum optimal dalam pemerataanya
- Pengendalian mutu satuan pendidikan swasta perlu ditingkatkan

#### **B. Kesehatan**

- Fasilitas dan layanan kesehatan, serta pengelolaan limbah medis yang sesuai standar perlu dioptimalkan
- Cakupan balita stunting yang sangat tinggi
- Kualitas sumberdaya kesehatan perlu dioptimalkan
- Pemerataan Kualitas dan kuantitas sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman dimasyarakat perlu dioptimalkan
- Perlu dioptimalkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

#### **C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- Cakupan irigasi yang berkualitas tidak menjangkau seluruh wilayah, kerusakan ringan dan rusak berat (tidak mantap) sepanjang 66,13 km (23,96%)
- Layanan akses air minum baru sebesar 63,85%.
- Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 (satu) TPA, revitalisasi TPA Penujah
- Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk sebesar 0,151
- KK yang masih belum memiliki akses jamban yang layak sebesar 6,38%
- Persentase Jalan berdrainase (d/b) sebesar 61,60% serta kurang berfungsi secara optimal.
- Masih adanya bangunan gedung negara yang tidak sesuai standar teknis sebesar 23,12%
- Masih adanya penyedia jasa konstruksi yang tidak sesuai standar dan bersertifikat
- Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) baru dalam tahap penyusunan dokumen namun belum ada yang diperdakan, karena mengacu proses legalisasi Perda Revisi RTRW
- Kondisi jalan mantap baru 83,05%
- Kondisi jembatan yang baik baru 70,22%

#### **D. Perumahan Rakyat dan Permukiman**

- Pemerintah wajib menyediakan/memperbaiki rumah layak huni bagi korban bencana setiap tahun untuk menjaga kualitas hidup masyarakat terdampak bencana
- Perlu Pengendalian Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin agar kualitas penyediaan perumahan terjaga
- Penanganan lingkungan permukiman kumuh yang belum optimal. Dari 487,78 Ha kawasan kumuh sesuai SK Kumuh, hingga tahun 2021 masih tersisa 275,347 Ha.
- Penanganan rumah tidak layak huni kurang optimal. Hingga tahun 2021 baru 14,76% RTLH yang tertangani
- Tidak meratanya layanan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dimana tahun 2021 capaian akses PSU baru mencapai 77,97%

**E. Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum masih perlu tingkatkan
- Penanganan kasus pelanggaran perda perlu ditingkatkan;

**F. Sosial**

- Cakupan pelayanan perlindungan sosial korban bencana daerah belum optimal

**2.3.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar****A. Tenaga Kerja**

- Kompetensi tenaga kerja lokal yang kurang bersaing
- Kurang optimalnya pelayanan dan penyaluran tenaga kerja lokal

**B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- Masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan

**C. Pangan**

- Penguatan cadangan pangan belum maksimal

**D. Pertanian**

- Lahan pemda yang tersertifikasi masih rendah baru mencapai 55,95%
- Penyelesaian ganti rugi/santunan tanah untuk pembangunan atau kepentingan umum kurang optimal

**E. Lingkungan Hidup**

- Pengelolaan lingkungan hidup belum terencana dengan maksimal. Setidaknya di tahun 2021 baru tersusun 6 dokumen pengendalian perencanaan lingkungan hidup
- Pengendalian dan pengawasan pencemaran lingkungan hidup harus terus dilakukan untuk mengendalikan kualitas dan kuantitas pengelolaan lingkungan hidup
- Belum optimalnya cakupan penanganan sampah dimasyarakat. Persentase penanganan sampah baru mencapai 42% dan persentase pengurangan sampah baru sebesar 24,4%
- Pelaku usaha berkomitmen dalam pengelolaan lingkungan belum maksimal, dimana baru mencapai 35,7%
- Kapasitas masyarakat dan penyuluh dalam mengelola lingkungan masih belum maksimal

**F. Kependudukan dan Catatan Sipil**

- Layanan pendaftaran penduduk masyarakat perlu dioptimalkan;
- Layanan pencatatan sipil kepada masyarakat perlu dioptimalkan;
- Layanan dan pengelolaan penyediaan data kependudukan masih rendah.

**G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- Prioritas anggaran pembangunan berbasis gender belum maksimal
- Masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan
- Kualitas pelayanan konseling hidup keluarga berbasis gender belum optimal
- Ketersediaan dan kualitas data gender dan anak kurang terkelola

- Pemenuhan hak tumbuh kembang anak kurang optimal
- Masih rendahnya pelayanan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan

#### **H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- Layanan pemenuhan kebutuhan KB perlu dioptimalkan
- Pengendalian kelahiran penduduk untuk menekan laju pertumbuhan penduduk perlu dioptimalkan
- Peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera perlu dioptimalkan

#### **I. Perhubungan**

- Layanan keselamatan berkendara belum optimal: Persentasi Rambu (%): 42,5, Persentasi LPJU (%): 65,70, Kendaraan Bermotor Wajib Uji: 68.21%, Persentasi Gardu Pengaman (%): 33,96
- Layanan konektivitas transportasi belum optimal dengan Persentasi Terminal/Shelter (%): 32,3
- Penurunan dan stagnansi angkutan umum, dengan Rasio Ijin Trayek sebesar 71%

#### **J. Komunikasi dan Informasi**

- Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk pemerintahan yang efektif dan efisien perlu ditingkatkan;
- Penyebarluasan Informasi publik yang sampai ke masyarakat perlu dioptimalkan
- Terbatasnya layanan publik yang terintegrasi dan dapat diakses secara online

#### **K. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

- Kurang maksimalnya pengawasan KSP/USP
- Masih ada KSP/USP yang kondisi koperasinya tidak sehat
- Masih kurangnya kualitas SDM perkoperasian
- Masih kurangnya kemitraan perkoperasian
- Masih rendahnya kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

#### **L. Penanaman Modal Daerah**

- Potensi obyek investasi kurang terpetakan dan terprofiklan dengan baik
- Kurang maksimalnya strategi promosi untuk menarik calon investor berkomitmen

#### **M. Pemuda dan Olahraga**

- Kesadaran pemuda agar lebih produktif kurang maksimal
- kemandirian wirausaha pemuda belum optimal
- Produktifitas organisasi pemuda belum optimal
- Pengembangan atlit belum maksimal

#### **N. Statistik**

- Ketersediaan dan keseragaman data/informasi yang dibutuhkan masih rendah dan kurang berkualitas

#### **O. Persandian**

- Keamanan informasi pemerintah daerah yang masih relatif rendah dan belum sesuai standard pemerintahan

**P. Kebudayaan**

- Bahasa dan Sastra lokal kurang diajarkan sejak dini kemasyarakat
- Banyak kebudayaan lokal tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik
- Banyak potensi kesenian lokal tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik
- Banyak potensi sejarah lokal tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik
- Rehabilitasi dan pengelolaan Cagar budaya tidak maksimal
- Museum tidak berfungsi sebagaimana mestinya

**Q. Perpustakaan**

- Tingkat literasi masyarakat Kabupaten Tegal perlu dioptimalkan

**R. Kearsipan**

- Belum optimalnya pengelolaan Arsip penting daerah khususnya arsip keuangan dan aset

**2.3.2.2 Urusan Pilihan**

**A. Pariwisata**

- Destinasi tujuan wisata kurang dioptimalkan/dikembangkan/terkelola

**B. Pertanian**

- Belum optimalnya pengendalian dan penaggulangan bencana pertanian
- Belum optimalnya komoditas hasil produksi peternakan
- Belum optimalnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- Kurang maksimalnya pengawasan produksi hasil peternakan yang aman dan sehat
- Kualitas kelembagaan kelompok tani dan Kapasitas penyuluh pertanian tanaman pangan yang berkualitas belum optimal

**C. Perdagangan**

- Rendahnya kualitas /standarisasi pasar serta pengelolaannya.

**D. Perindustrian**

- Pengembangan sektor industri yang belum maksimal
- Masih ada usaha industri yang melakukan pelanggaran baik yang sudah berizin maupun belum berizin

**E. Penanaman Modal**

- Potensi obyek investasi kurang terpetakan dan terprofiklan dengan baik
- Kurang maksimalnya strategi promosi untuk menarik calon investor berkomitmen

**F. Kelautan dan Perikanan**

- Belum optimalnya produksi perikanan tangkap.
- Belum optimalnya produksi perikanan budidaya.

**2.3.2.3 Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan**

**A. Administrasi**

**1. Sekretariat Daerah**

- Kualitas SAKIP Kabupaten Tegal yang perlu ditingkatkan;
- Fasilitasi peningkatan pelayanan publik dan SAKIP rumpun pemerintahan dan kesejahteraan rakyat belum optimal;

- Fasilitasi peningkatan pelayanan public dan SAKIP rumpun Perekonomian dan Pembangunan belum optimal;
  - Maturitas UKPBJ yang masih rendah;
  - Standarisasi LPSE belum sesuai standar yang ditetapkan.
2. Sekretariat DPRD
- Renja DPRD perlu diselaraskan dan diinterintegrasikan dalam pelayanan fungsi Sekretariat DPRD.

## **B. Pengawasan**

### **1. Inspektorat**

- Tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI perlu dioptimalkan;
- Tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat provinsi perlu dipertahankan;
- Tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat kabupaten perlu di optimalkan;
- Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal masih rendah;
- Pemenuhan IKU OPD perlu di optimalkan

## **C. Perencanaan Pembangunan**

- Belum optimalnya kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan dan sinkronisasi penganggaran
- Manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal OPD perlu di optimalkan
- Keselarasan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah perlu ditingkatkan.

## **D. Keuangan**

- Belum Optimalnya Pengelolaan APBD
- Pengelolaan Pendapatan Daerah perlu ditingkatkan;
- Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

## **E. Penelitian dan Pengembangan**

- Pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan inovasi yang dapat mendukung secara langsung pelaksanaan berbagai sektor pembangunan daerah belum optimal

## **F. Pendidikan dan Pelatihan**

- Belum optimalnya ASN yang mengikuti pelatihan teknis 20 jam/tahun;
- Partisipasi ASN perlu dioptimalkan dalam mengikuti seminar/*workshop*/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan;

## **G. Kepegawaian**

- Tingkat kedisiplinan ASN masih kurang
- Jabatan struktural/jabatan fungsional (non guru non kesehatan) belum terisi sesuai kompetensinya dikarenakan kebijakan penyederhanaan birokrasi.

## **H. Kewilayahan**

- Perlu dioptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan;
- Kurangnya kemandirian desa/kelurahan dalam mengelola pembangunan kewilayahan;
- Perlu dioptimalkan penanganan gangguan trantibum di masyarakat;
- Perlu dimaksimalkan fasilitasi dan koordinasi penguatan kerukunan dan toleransi di masyarakat;

- Perlu ditingkatkan pembangunan desa tertib administrasi;

#### **I. Unsur Pemerintahan Umum (Kesbangpol)**

- Pembinaan masyarakat terhadap ideologi pancasila dan wasbang masih perlu ditingkatkan
- Kesadaran politik masyarakat kurang optimal;
- Organisasi Masyarakat (ormas) belum terbina secara optimal;
- Potensi konflik SARA masih belum optimal tertangani;
- Gangguan Kamtibmas belum tertangani secara optimal.

### **2.3.3 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Mendasarkan berbagai permasalahan pembangunan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Tegal, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2022 dapat dirumuskan sebagai berikut :

#### **A. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbang dan Teknologi Informasi**

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tegal. Dengan isu strategis tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Tegal bertekad untuk mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja menuju birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang jauh dari perilaku koruptif, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, birokrasi yang transparan dan birokrasi yang melayani.

Dalam situasi pandemi covid-19 saat ini, pemerintah dihadapkan pada suatu dilema yang cukup menghambat. Di saat prinsip kehati-hatian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, kualitas layanan publik harus tetap dijaga, perubahans sistem kerja ASN di era new normal sangat dinamis. Jika terdapat kasus covid-19 terkonfirmasi di lingkungan kerja ASN, maka dalam seketika sistem kerja berubah dari “*work in office*” menjadi “*work from home*”. Kondisi ini menuntut mindset budaya kerja yang masih menitikberatkan pada hierarki pangkat dan jabatan harus mulai diubah. Dalam keadaan yang normal, dimana seluruh situasi dan kondisi dapat berjalan tanpa hambatan, pelaksanaan program kerja berdasarkan hierarki ini masih dapat diterima, akan tetapi dalam situasi pandemi ini, maka pegawai dari semua eselon wajib berani mengambil inisiatif sebagai konsekuensi berkurangnya intensitas bertemu secara langsung di lapangan atau ruangan kerja di kantor. Setiap pegawai dituntut untuk berpikir sebagai manajer, ikut memikirkan bagaimana sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Alih-alih mempertahankan tingkat kepangkatan atau strata kelembagaan, sebaiknya tata kerja lebih dikembangkan berbasis jejaring atau kerjasama antar instansi dan pejabat. Ada beberapa tantangan terkait pemerintahan di era new normal antara lain:

- Dalam pola pikir yang baru, semua pegawai harus mulai mengembangkan kecakapan berpikir lateral dan keberanian membuat eksperimen dengan tolok ukur resiko dan manfaat yang jelas;

- Mendorong mindset lama ke mindset baru bagi ASN;
- Mendukung kesiapan ASN dalam membangun budaya berteknologi; dan
- Dalam keadaan dimana kondisi moneter dunia saat ini sedang berada dalam ancaman resesi, maka perlu dilakukan sejumlah langkah pengamanan, khususnya terhadap neraca anggaran pemerintah daerah. Secara teknis, hal tersebut dapat berupa pembatasan kegiatan yang berbiaya besar, pengurangan pos-pos yang semula bersifat melibatkan pengumpulan massa, dan sebagainya;
- Mendorong semangat kepemimpinan yang berbudaya.

Secara keseluruhan masih banyak permasalahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Tegal. Setidaknya terdapat delapan aspek yang perlu dibenahi yaitu aspek manajemen perubahan; aspek peraturan perundang-undangan; aspek kelembagaan; aspek ketatalaksanaan; aspek sumber daya aparatur; aspek pengawasan; aspek akuntabilitas kinerja dan aspek pelayanan publik. Dalam hal ketatalaksanaan, *e-goverment* sebagai sarana untuk mendukung kinerja organisasi belumlah diterapkan secara optimal.

Dari fungsi pemerintahan, Pemerintah juga harus menjamin keamanan dan kenyamanan hidup masyarakatnya. Keamanan dan kenyamanan tersebut terutama berkaitan dengan bencana alam dan sosial. Sebagai daerah yang berada pada jalur rawan bencana, Kabupaten Tegal perlu melakukan upaya-upaya antisipatif dalam kesiapsiagaan bencana (mitigasi) di samping kesiapan penanggulangan kedaruratan bencana dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Dalam peta rawan bencana Kabupaten Tegal dapat digambarkan sebagai wilayah rawan bencana banjir di kawasan Pantura (Suradadi, Warureja, Kramat), rawan bencana kekeringan (Suradadi, Warureja, Kedungbanteng), rawan bencana kebakaran lahan (Pagerbarang, Balapulung, Lebaksiu), rawan bencana puting beliung (Kedungbanteng, Tarub), serta rawan bencana tanah bergerak dan tanah longsor (Pangkah, Bojong, Bumijawa). Sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, tantangan kebencanaan kedepan adalah bagaimana menciptakan Desa Tangguh Bencana dan penyediaan *early warning system* cuaca dan iklim.

Selain bencana alam, isu bencana sosial juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Kondisi saat ini, baik internasional, nasional, hingga lokal, stabilitas dan keamanan wilayah banyak dirusak melalui penyebaran berita hoax yang dapat memunculkan gesekan di masyarakat. Kondisi masyarakat yang sedang tertekan secara ekonomi semakin mempermudah mereka mempercayai informasi tanpa diperiksa dahulu kebenarannya. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka pelaksanaan pembangunan yang sudah sangat berat akibat pandemi covid-19 ini akan semakin sulit mencapai tujuannya.

Saat tersebut mempunyai dampak yang luas pada kehidupan masyarakat Kabupaten Tegal. Perubahan itu termasuk perubahan budaya, perubahan cara kerja dan perubahan berpemerintahan (*era new normal*). Selain itu, sebagaimana RPJPD tahap IV yang menekankan pada Akselerasi Proses Inovasi. Untuk menjawab tantangan tersebut maka optimalisasi kelitbangan dan difusi teknologi informasi mempunyai peranan penting.



Aktifitas kelitbangan harus mampu memberikan nilai tambah inovasi pada tiap aktifitas pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan pencapaian tujuan sasaran pembangunan khususnya berkaitan dengan pemulihan ekonomi lokal. Akselerasi inovasi dan perubahan tersebut dapat diantisipasi melalui serangkaian proses kelitbangan yang relevan yang menghasilkan produk-produk baru, proses baru, dan jasa baru, yang kemudian akhirnya dapat dijadikan strategi utama dalam merespon perubahan dan tantangan yang ada. Oleh karena itu hasil kelitbang bisa memiliki dampak signifikan bagi pembangunan daerah. Beberapa kebijakan dapat dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Tegal dengan mendasarkan hasil kelitbangan. Selain itu berbagai kebijakan pemerintah juga dapat dievaluasi melalui aktifitas kelitbangan, sehingga kebijakan-kebijakan yang kurang relevan saat ini bisa digantikan dengan kebijakan yang lebih relevan dan efektif.

Namun tantangan kelitbangan saat ini di Kabupaten ialah kita belum memiliki SDM Kelitbangan yang mumpuni, sementara tantangan kelitbangan kedepan semakin besar. Untuk itu beberapa hal yang dapat dilakukan saat ini dalam menjawab tantangan kelitbangan kedepan ialah dengan melakukan kerjasama dengan institusi lain seperti perguruan tinggi. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan selain dapat menciptakan proses transfer *knowledge*, juga menghasilkan produk kelitbangan yang dapat menjawab tantangan yang ada.

Perananan teknologi informasi dalam menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dan pandemi covid-19 ialah bisa menjadi katalis sekaligus akselerator. Difusi teknologi informasi harus masuk di berbagai aktifitas sosial ekonomi dan pemerintahan. Adanya difusi tersebut menjadi satu prasyarat utama Kabupaten Tegal bisa melaju ke arah *smart city*. Adapun *smart city* terdiri dari 6 (enam) pilar yaitu *Smart Governance*, *Smart People*, *Smart Living*, *Smart Mobility*, *Smart Economy*, dan *Smart Environment*. Namun dengan melihat kondisi saat ini maka tantangan TI untuk menuju *smart city* yang paling relevan ialah untuk pengembangan dan penguatan *Smart Economy* dan *Smart Governance*.

## **B. Pelayanan Infrastruktur Dasar**

Berbagai aktifitas sosial-ekonomi dapat berjalan lancar jika didukung oleh infrastruktur yang memadai khususnya infrastruktur transportasi, air bersih, persampahan, sanitasi dan energi. Kondisi saat ini, infrastruktur jalan yang memadai jumlahnya masih sangat terbatas atau baru mencapai sekitar 68,01 % dari total 958,32 km. Oleh karena itu pemerintah desa dengan segala sumber dayanya harus mampu mengambil peran dalam upaya peningkatan kualitas jalan tersebut sesuai kewenangannya. Selain itu terdapat Kegiatan Strategis Nasional yang berlokasi di Kabupaten Tegal antara lain pembangunan infrastruktur jalan Tol Trans Jawa, program Pengembangan wilayah yang tertuang dalam Perpres 79 Tahun 2019, dan pembangunan jalur ganda kereta api.

Pemenuhan layanan air bersih yang merata masih menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Tegal. Untuk itu kualitas pengelolaannya masih butuh akselerasi. Pengelolaan air bersih saat ini untuk perpipaan terbagi menjadi 2 (dua) pengelolaan SPAM PDAM untuk wilayah perkotaan dan SPAM Pamsimas untuk wilayah perdesaan. Wilayah perkotaan sebagian besar sudah terlayani oleh SPAM PDAM, namun saat ini menghadapi

kendala yaitu terbatasnya sumber air baku dimana idle capacity SPAM PDAM tersisa tidak lebih dari 50 Liter/Detik. Sedangkan untuk SPAM PAMSIMAS saat ini baru ada di 120 desa yang tentu saja masih dibutuhkan perluasan jaringan pemenuhan air bersih.

Dalam perspektif infrastruktur yang lebih luas, Kabupaten Tegal mempunyai tantangan yang cukup berat dalam hal penataan kota. Hingga kini, perkembangan perkotaan Kabupaten Tegal cenderung *sporadic (leap frog)* dan belum mempunyai bentuk yang jelas. Bisa dikatakan belum memiliki ikon perkotaan layaknya kota-kota yang terdesign dengan jelas. Untuk itu penataan kota menjadi isu yang cukup strategis kedepan, minimal Kabupaten Tegal memiliki icon perkotaan melalui penataan wajah kota slawi.

Dalam hal konsep pengembangan wilayah, berdasarkan tingkat pelayanan dan pusat kegiatan, Kabupaten Tegal dapat dibagi menjadi 4 wilayah: 1) Kecamatan Slawi, Adiwerna, dan Kramat yang merupakan wilayah yang mempunyai sarana dan prasarana memadai; 2) Pangkah, Talang, Tarub, Margasari, Dukuhturi, Dukuwaru, dan Balapulung yang didominasi oleh kegiatan perdagangan dan industri seperti di Kecamatan Pangkah yang terdapat pasar sebanyak 3 buah dan di Kecamatan Talang dengan sentra industrinya; 3) Kecamatan Lebaksiu, Suradadi, Bumijawa, Warureja, Bojong, Jatinegara yang memiliki kegiatan perekonomian yang cukup beragam dan potensi pertanian yang cukup bagus; dan 4) Kecamatan Pagerbarang dan Kedungbanteng dimana perkembangan keduanya masih tergolong lamban. Untuk itu tantangan dalam pengembangan wilayah secara umum adalah bagaimana menyejajarkan perkembangan wilayah di Kecamatan Pagerbarang dan Kedung Banteng agar sejajar dengan kecamatan lainnya. Dalam pelaksanaan pembangunan secara merata, ada kendala yang dirasa cukup mengganggu. Hal tersebut berkaitan dengan pembagian kewenangan dalam pengembangan infrastruktur wilayah antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Untuk itu perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

### **C. Pelayanan Kesehatan Lingkungan Hidup**

Kesehatan lingkungan hidup menjadi faktor utama yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Lingkungan sehat tidak hanya berkaitan erat dengan derajat kesehatan masyarakat namun juga mempengaruhi ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Kondisi saat ini manfaat lingkungan hidup dan manfaat ekonomi cenderung saling mengeliminasi. Untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya maka fungsi lingkungan hidup selalu dikorbankan.

Sebagai wilayah yang didominasi perekonomian berada pada sektor industri pengolahan dan pertanian, potensi ancaman degradasi lingkungan hidup di Kabupaten Tegal sudah mulai nyata. Limbah industri yang toksik yang tidak tertangani dapat memperburuk kondisi lingkungan sekitar atau bisa menimbulkan kerusakan pada ekosistem lingkungan yang lain bahkan menimbulkan penyakit pada makhluk hidup yang terpapar.

Selain pencemaran air, isu penurunan kesehatan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal juga dipengaruhi oleh pencemaran udara yang cukup massive. Aktivitas pencemaran udara yang hingga saat ini belum terselesaikan adalah turunnya kualitas

udara akibat pengolahan batu gamping atau kapur di Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari. Aktivitas pembakaran dan debu ukuran mikro dalam pengolahan batu gamping banyak berterbangan di udara yang dapat menyebabkan penyakit ISPA.

Pengelolaan sampah dan sanitasi juga masih menjadi permasalahan yang harus ditangani. Penanganan sampah meliputi penanganan persampahan rumah tangga baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pelayanan persampahan di perkotaan hanya mampu melayani untuk kawasan komersial, perkantoran, perumahan, taman dan jalan. Sedangkan di wilayah perdesaan 100% masih dikelola mandiri oleh masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah antara lain: manajemen pengelolaan sampah yang belum baik dari hulu ke hilir (*waste management*), keterbatasan alat angkut, keterbatasan alat pengolahan/pemrosesan sampah pada TPA, serta terbatasnya lahan TPA Penujah. Sedangkan dalam penanganan limbah tinja, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah idle capacity IPLT Penujah sudah mencapai 0%, perlu dilakukan upaya revitalisasi IPLT Penujah. Cakupan layanan sanitasi saat ini untuk on site system sebesar 65% dari total penduduk Kabupaten Tegal, yaitu terdiri atas sistem on site individual (tangki septik) mencakup 63,85% dan sistem on site komunal (MCK, MCK++) mencakup 1,15%. Sedangkan cakupan layanan off site system di Kabupaten Tegal saat ini belum ada. Untuk itu sanitasi juga masih menjadi tantangan dalam penataan perkotaan. Sanitasi secara umum juga berkaitan dengan permukiman kumuh. Cakupan pelayanan permukiman kumuh masih sangat rendah. Untuk itu upaya penyediaan lingkungan sehat bagi masyarakat khususnya perkotaan perlu difokuskan pada penyediaan RTLH dan sanitasi sehat terutama jamban.

Dari beberapa masalah kesehatan lingkungan diatas, jika tidak ditangani dan diantisipasi kedepan, maka skala kerusakan lingkungan dan dampak yang ditimbulkannya akan semakin luas. Oleh karena itu tantangan pembangunan kedepan adalah bagaimana meningkatkan pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan kesehatan lingkungan hidup.

#### **D. Pemulihan Ekonomi Lokal Pariwisata, Industri Kreatif, dan Ketahanan Pangan**

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sektor ekonomi adalah yang paling mendapatkan tekanan dari dampak Pandemi covid-19. Kondisi ini memaksa seluruh pelaku usaha termasuk pelaku usaha di Kabupaten Tegal harus berupaya dengan segala cara agar tetap dapat bertahan. Namun disisi lain rusaknya struktur perekonomian secara luas justru berpotensi bagi semua pelaku usaha bisa mengambil peran pelaku usaha lainnya.

Sektor unggulan Kabupaten Tegal terdiri atas sektor industri pengolahan, pertanian (pertanian, kehutanan dan perikanan) dan perdagangan (perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor). Industri pengolahan, Kabupaten Tegal cukup terkenal dengan industri pengolahan logam dan pengolahan makan/minuman. Dalam kondisi covid-19 saat ini banyak sektor industri pengolahan yang gulung tikar akibat tidak mampu beradaptasi. Ini bisa menjadi ancaman sekaligus peluang bagi pelaku industri pengolahan di Kabupaten Tegal. Kondisi saat ini memang sebagian besar permintaan produk industri manufaktur mengalami penurunan yang tajam.

Industri manufaktur harus diarahkan agar bisa melihat peluang produk industri manufaktur apa yang tingkat permintaannya tetap tinggi bahkan meningkat ditengah wabah covid-19 ini. Dengan melihat peluang tersebut maka pelaku usaha lokal perlu dibantu dan difasilitasi agar bisa menghasilkan produk yang lebih terdiversifikasi sesuai permintaan pasar (berorientasi ekspor), khususnya yang ada keterkaitan (interlinkage) dengan sektor primer lokal. Industri pengolahan lokal harus mampu menciptakan nilai tambah (value added creation) produk-produk sektor primer lokal sekaligus didorong agar bisa berperan masuk ke sektor ekonomi yang ditinggalkan oleh industri ditempat lain, minimal untuk saat ini peran sektor industri lokal yang ada tidak diambil oleh pelaku dari luar.

Di sektor pertanian, transformasi pertanian modern ramah lingkungan bisa menjadi opsi yang tepat. Dalam masa pandemi covid-19, permintaan produk pertanian khususnya pangan naik signifikan baik lingkup nasional bahkan global. Melalui modernisasi pertanian yang fokus pada produk kebutuhan pasar, diharapkan produk pertanian Kabupaten Tegal mampu mengambil bagian dalam pemenuhan permintaan produk pangan.

Transformasi sektor pertanian tidak boleh dianggap hanya sebatas mekanisasi (penerapan teknologi) saja. Namun transformasi pertanian modern juga mempunyai konsep bahwa petani sebagai pelaku utama perlu didorong untuk mampu menguasai hulu hingga hilir. Paradigma mereka harus dilatih agar tidak hanya selesai memproduksi hasil pertanian saja, namun juga bisa memberikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan sekaligus memasarkannya. Melalui konsep seperti ini, tenaga kerja baru dapat terserap sekaligus menjadi salah satu solusi pengangguran akibat wabah covid-19 khususnya di wilayah perdesaan Kabupaten Tegal. Untuk itu transformasi pertanian modern di Kabupaten Tegal minimal harus memuat 2 (dua) unsur perubahan utama yaitu penguasaan teknologi dan paradigma hulu-hilir.

Di sektor perdagangan, digitalisasi perdagangan di seluruh skala bisnis harus mulai diaplikasikan. Saat ini transaksi tatap-muka disemua lini perdagangan mulai bergeser ke sistem online. Selain dapat meningkatkan manfaatkan ekonomi lainnya khususnya jasa kurir, sistem online juga dapat meluaskan pasar tidak hanya skala lokal bahkan menjangkau pasar internasional. Oleh karena itu pelaku usaha perdagangan harus mampu menguasai dan menjalankan mekanisme sistem online tersebut.

Disisi lain, era pandemi saat ini dengan segala keterbatasan mobilitas, Industri kreatif mempunyai peluang yang cukup besar, juga disektor-sektor yang lain, baik fotografi, design dan editing. Untuk itu tantangannya ialah upaya menyiapkan masyarakat untuk memanfaatkan peluang bisnis dari industri kreatif itu sendiri.

Selain ketiga sektor tersebut, potensi lokal yang diprediksi mampu mengangkat perekonomian masyarakat ialah sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata saat ini mempunyai tantangan yang cukup berat. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh dampak covid-19 yang hingga saat ini belum berakhir. Beberapa tantangan yang cukup strategis dalam pengembangan pariwisata antara lain:

- Kabupaten Tegal memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keberagaman budaya yang dapat dijadikan sebagai wahana kepariwisataan. Pengembangan

pariwisata yang kekinian tidak lagi hanya mengandalkan indahnya bentang alam, tetapi juga dengan memadukan potensi-potensi sektor lainnya, seperti mengembangkan potensi wisata industri, wisata pendidikan, wisata kesehatan, dan wisata kebudayaan serta dikaitkan dengan potensi-potensi lain yang dapat dinilai sebagai sebuah keunikan untuk menjadi daya tarik wisata, baik wisatawan lokal maupun manca negara. Oleh karena itu tantangannya ialah bagaimana membangun pariwisata yang terintegrasi atau terkolaborasi dengan sektor lainnya khususnya terkait pelestarian budaya lokal untuk menjadi atraksi baru.

- Kabupaten Tegal yang berlokasi pada simpul persinggahan mobilitas antar daerah yang ditunjang akses jalan tol trans Jawa dan dengan kondisi topografi yang heterogen, serta memiliki karakteristik budaya lokal yang unik, tentunya memiliki banyak potensi wisata yang layak dikembangkan. Dampak positif bagi pariwisata Kabupaten Tegal dengan terbukanya akses jalan tol ruas pantai utara Jawa, perlu diantisipasi dengan perbaikan infrastruktur menuju lokasi wisata;
- Dalam kondisi pandemi covid-19 seperti ini, mobilitas masyarakat sangat dibatasi, hal ini berpengaruh pada penurunan jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Selain itu meskipun destinasi-obyek wisata bisa dibuka, namun syarat-syarat protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat. Untuk itu tantangan agar pelaku usaha pariwisata dapat menerapkan protokol kesehatan sesuai standard menjadi suatu hal yang wajib diwujudkan.
- Untuk mengantisipasi geliat sektor pariwisata yang masih minim, maka pelaku usaha pariwisata perlu difasilitasi agar dapat melakukan diversifikasi usaha lain minimal sampai pandemi berakhir.

Dalam masa pasca krisis covid-19, dimana era digital makin terakselerasi dengan cepat, terlebih dengan kondisi ini semua dipaksa untuk memahami digital lebih cepat. Untuk itu perlu kolaborasi antara pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya serta kearifan lokal yang saling mendukung. Penjualan paket wisata online yang didalamnya terdapat banyak menu-menu jasa tambahan yang bisa dipilih calon pengunjung seperti jasa fotografi, jasa tour guide dan lain sebagainya.

Selain dapat dikolaborasikan, budaya dan kearifan lokal juga dapat berfungsi sebagai benteng identitas lokal Kabupaten Tegal. Era globalisasi memungkinkan masuknya budaya luar secara bebas. Masuknya budaya luar tanpa adanya filter yang kuat, maka dapat merusak bahkan mengganti budaya atau kearifan lokal yang ada di Kabupaten Tegal. Untuk itu tantangan budaya kedepan ialah bagaimana menguatkan kearifan local agar dapat berfungsi untuk:

- Membentengi dari pengaruh dalam budaya luar yang tidak sesuai dengan adat ketimuran;
- Menyerap dan memfilter budaya asing;
- Memberikan arah pada pengembangan budaya.

## **E. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Isu Sumber daya manusia meliputi isu pendidikan, kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan kedepan. Isu kualitas Pendidikan masyarakat kedepan akan menjadi lebih berat ketimbang sebelumnya. Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,15 poin, dari 68.24 poin pada 2019 menjadi 68,39 poin pada 2020. Namun demikian terjadi penurunan pertumbuhan secara signifikan dari 0,91 menjadi 0,14 pada 2020.

Dalam kondisi Kabupaten Tegal mulai menata pengelolaan Pendidikan yang lebih berkualitas, seketika terganggu akibat wabah covid-19. Sistem belajar mengajar mempunyai keterbatasan dan kendala akibat perubahan pola pembelajaran tatap muka (luring) menjadi non-tatap muka (daring). Sementara pembelajaran non-tatap muka belum ditemukan bentuk yang efektif mulai dari prosesnya hingga evaluasinya. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan mutu Pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu tantangan Pendidikan ke depan (new normal) ialah harus syarat perbaikan ekosistem pendidikan agar tidak lagi bergantung pada sekolah (Pendidikan Era 4.0). Selain sistem, kualitas tenaga pengajar dalam mengimplementasikan Pendidikan Era 4.0 harus ditingkatkan. Tantangan lainnya yang timbul yaitu terkait sarana prasarana yang memadai. Misalnya peserta didik dari keluarga yang kurang mampu tidak memiliki laptop/smartphone tetap bisa mengikuti proses belajar mengajar. Kita juga harus memastikan setidaknya internet tersedia secara merata. Maka kebijakan kedepan sudah seharusnya memperhatikan beberapa hal tersebut.

Isu kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Tegal masih sangat diwarnai efek pandemi covid-19 di Kabupaten Tegal. Hingga 20 Januari 2021 secara akumulasi sudah terdapat 3.998 orang positif covid-19. Dari 3.998 orang tersebut 149 orang meninggal dunia, 3.433 orang sembuh, 125 orang masih dirawat di rumah sakit, dan sisanya 291 orang menjalani isolasi mandiri. Kondisi ini memberikan pukulan cukup telak terhadap efektifitas penanganan covid-19 di Kabupaten Tegal. Dengan kondisi yang belum bisa dipastikan kapan wabah akan berakhir, kesiapan sektor kesehatan kedepan harus lebih kuat. Kesiapan tenaga kesehatan dari segi jumlah, kualitas, dan protokol keselamatan pelayanan kesehatan harus diutamakan. Sarana prasarana harus mencukupi setidaknya untuk menghadapi puncak kasus yang mungkin masih dapat terus meningkat.

Berbagai permasalahan sektor kesehatan, memunculkan tantangan tersendiri dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Ada beberapa tantangan Kesehatan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Tegal antara lain:

- Adanya wabah ini mensyaratkan masyarakat untuk mampu menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian protokol kesehatan rutin di era new normal;
- Pemanfaatan teknologi dalam sektor kesehatan ke depan bisa menjadi suatu kebutuhan. Rasa cemas masyarakat untuk datang secara langsung ke fasilitas kesehatan, membuat pelayanan kesehatan membutuhkan teknologi yang bisa mendukung masyarakat agar dapat berkonsultasi dengan dokter secara virtual.

Pemerintah Kabupaten Tegal harus mampu menyediakan layanan kesehatan online yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas layanan kesehatan;

- Belajar dari proses dan kondisi penanganan pandemi covid-19 secara umum, maka sistem kesehatan harus lebih dikuatkan. Kesiapan dan penanganan menghadapi pandemi lainnya harus lebih baik. Mengingat pandemi itu bisa terjadi kapan saja.

Sedangkan isu ketenagakerjaan adalah bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing tinggi. Dengan kata lain tantangan ini menitik beratkan pada tingkat penyerapan tenaga kerja kedepan. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa tingkat penyerapan lapangan kerja dimasa pasca krisis berpotensi tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang telah di-PHK. Dengan keterbatasan sumber daya perusahaan saat krisis, maka memungkinkan perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja dengan jumlah yang lebih sedikit. Hal tersebut memunculkan seleksi yang lebih ketat kedepannya. Perusahaan akan lebih memilih tenaga kerja yang memiliki produktifitas yang tinggi dan mampu mengerjakan hal lainnya (*multi tasking*). Oleh karena itu perubahan landscape atau kualifikasi tenaga kerja bisa jadi suatu keniscayaan. Tenaga kerja berpendidikan dan berketerampilan rendah disektor formal akan tersingkir secara otomatis. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait ketenagakerjaan pascakrisis antara lain:

- Tingkat penyerapan tenaga kerja dimasa pasca krisis tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang telah di-PHK, atau dengan kata lain supply tenaga kerja jauh melebihi demand tenaga kerja itu sendiri;
- Dengan keterbatasan sumber daya (ekonomi) perusahaan pasca krisis, maka memungkinkan perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktifitas yang tinggi dan mampu mengerjakan hal lainnya (*multi tasking*). Karena itu kualifikasi tenaga kerja akan semakin meningkat;
- Lapangan usaha yang berkembang di era pascapandemi adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi dalam artian digitalisasi maupun mesinisasi. Sehingga peran manusia akan mulai berkurang porsinya dalam proses produksi hingga pemasaran. Oleh karena itu transformasi tenaga kerja diarahkan pada proses *entrepreneurship*.

Dengan melihat tantangan dalam sektor ketenagakerjaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal harus mampu menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri maupun mampu bersaing dalam seleksi penyerapan lapangan kerja kedepan.

## **F. Menekan Laju Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan permasalahan dan isu multi dimensi dan krusial yang harus ditangani oleh berbagai kebijakan sektoral yang saling bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melalui melalui tiga strategi yakni, perlindungan sosial yang komprehensif; penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar; dan penyediaan mata pencarian yang layak serta berkelanjutan.

Melalui sinergitas kebijakan tersebut, dalam lingkup regional Jawa Tengah tingkat kemiskinan Kabupaten Tegal tahun 2019 yang sebesar 7,64 % berada pada urutan 10 terendah dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, atau satu tingkat dibawah Kota Tegal yang berada pada posisi 9 terendah dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,47%. Namun dengan adanya pandemi covid-19 di awal tahun 2020 telah merubah tren kemiskinan di Kabupaten Tegal yang sudah menurun menjadi meningkat secara riil ditahun 2020 menjadi 8,14 dan melingkupi sekitar 117.500 jiwa. Ironisnya, umumnya sebagian besar penduduk yang rentan miskin tersebut bekerja di sektor informal, dimana kelompok ini merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap kemiskinan dan paling terdampak dengan adanya pandemi covid-19. Sedangkan Angka Pengangguran mengalami peningkatan dari 8,45 ditahun 2019 menjadi 9,82 ditahun 2020.

Permasalahan penanggulangan kemiskinan utamanya menyangkut akses kebutuhan dasar, kehidupan ekonomi berkelanjutan, perilaku dan budaya masyarakat, ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi, dan pengelolaan data kemiskinan Sumber.

### **G. Menekan Laju Pengangguran**

Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah daerah yang saat ini masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan. Kemiskinan juga berkaitan erat dengan pengangguran yang keduanya saat ini menjadi satu entitas yang tidak bisa dipisahkan. Fenomena pengangguran di Kabupaten Tegal cukup unik dan perlu dikaji lebih mendalam. Idealnya penurunan angka kemiskinan berbanding lurus dengan penurunan angka pengangguran. Namun kenyataannya di Kabupaten Tegal disaat angka kemiskinan mengalami penurunan, angka pengangguran justru meningkat. Hal ini perlu diwaspadai dan mendapat perhatian khusus apalagi disaat kondisi pandemi covid-19 saat ini telah banyak merusak struktur ekonomi wilayah.

Pada masa pandemi ini, banyak sector usaha dari skala besar hingga kecil mengalami penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan tersebut disebabkan karena turunnya permintaan pasar yang menyebabkan rendahnya produktivitas usaha (perusahaan). Daya jual produk usaha yang melemah tersebut menjadikan perusahaan kesulitan dalam membayar gaji karyawannya sehingga banyak tenaga kerja asal Kabupaten Tegal yang akhirnya dirumahkan bahkan di-PHK. Dengan melihat kondisi saat ini, isu pengangguran Kabupaten Tegal bisa dikatakan cukup kompleks. Selain fenomena pengangguran penduduk Kabupaten Tegal yang belum diketahui bentuk dan perilakunya, pemerintah Kabupaten Tegal harus bisa meningkatkan produktifitas masyarakat didalam era krisis pandemi covid-19.

Tantangan isu pengangguran dalam era krisis (in crisis) lebih kepada bagaimana masyarakat dengan segala keterbatasan saat ini namun tetap mampu produktif secara ekonomi. Setidaknya dalam era krisis ini transformasi bentuk usaha digital harus menjadi guideline khusus. Digitalisasi ekonomi masyarakat mulai skala kecil hingga besar perlu difasilitasi. Hal ini didasarkan fakta bahwa adanya pandemi covid-19 di Kabupaten Tegal telah memunculkan ekonomi digital masyarakat disemua lini bahkan penjual sayur eceran telah masuk kedalamnya. Kemunculan ekonomi digital ini



mempunyai potensi pengembangan mulai dari hulu-hilirnya. Untuk itu perlu di-manage dan dikembangkan keterkaitan hulu hilirnya (supply chain management). Digitalisasi semua sektor usaha khususnya pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan harus dikembangkan.